LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016-2021

bab I

pendahuluan

1. **Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas PerangkatDaerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifatindikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusundengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi.

Dalam kerangka perencanaan, hasil penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilihdalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021, merupakan indikasi terukur yang hendak dicapai sesuai dengan fungsi dan peran daerah sebagai regulator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan publik dan daya saing daerah.

Sesuai dengan pentahapan pembangunan lima tahunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021merupakan tahapan pembangunan lima tahunan periode ketiga.Periode ketiga ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berbasis pertanian, pariwisata budaya, dan kelestarian fungsi lingkungan dengan didukung oleh sumberdaya manusia yang sehat dan kompetitif untuk mewujudkan ***Tabanan Sejahtera Berbasis Pertanian***.

Sebagaimana tujuan jangka panjang pembangunan Tabanan dan potensi daerah, maka pembangunan pertanian perlu diarahkan untuk mendorong terciptanya peningkatan pendapatan petani, membuka kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan serta mampu bersaing di pasar global dalam rangka menghadapi perdagangan bebas ASEAN (*MEA*),oleh karena itu seluruh pemangku kepentingan harus merubah paradigma yang ada saat ini dan mengarahkan seluruh sumberdaya untuk pembangunan sektor pertanian yang tangguh dan modernsehingga mendorong terwujudnya industri pertanian di Kabupaten Tabanan.

Dijadikannya Tabanan sebagai lumbung panganBali tidak sebatas slogan semata,perlu dukungan dan komitmen semua pihak untuk membangun pertanian di Kabupaten Tabanan.Selain tantangan sektor pertanian, persaingan di era global tidak dapat dihindari.Oleh karena itu kesiapan Sumber Daya Manusia yang unggul, berkarater dan berbudaya menjadi prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Tabanan lima tahun yang akan datang. Konsep pembangunan ini berbasis pada ajaran Trisakti yaitu berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian di bidang kebudayaan dengan memfokuskan pada lima bidang prioritas yaitu 1). Bidang sandang, pangan dan papan; 2).Pendidikan dan kesehatan; 3) tenaga kerja dan jaminan sosial; 4).Adat, agama dan budaya; 5) pariwisata.

Selain berpijak pada konsep-konsep pembangunan tersebut, perumusan dan penetapan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabananpasca ditetapkannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pemilukada, berpedoman pada hal-hal yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan penyusunan RPJMD meliputi persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal,pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik. Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati, Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Komang Gede Sanjaya, pada tanggal 17 Februari 2016, maka Peraturan Daerah tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 ditetapkan tanggal 12 Agustus 2016.

Setelah Perda RPJMD ditetapkan,terbit Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perda ini menata ulang struktur dan eselonering perangkat daerah untuk disesuaikan dengan urusan dan kewenangan sesuai UU 23 Tahun 2014.Penataan ini berpengaruh terhadap jenis, penanggung jawab urusan dan program dalam RPJMD yang telah diperdakan. Di samping itu, untuk kebutuhan pengembangan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah) yang lebih sistematis dan berjenjang, dibutuhkan beberapa perbaikan dan penyelarasan berkenaan dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama (IKU). Demikian juga proyeksi pendapatan daerah lima tahun ke depan membutuhkan analisis yang lebih cermat mengingat adanya perkembangan terbaru dari perekonomian daerah. Perubahan tersebut dilakukan pada hampir seluruh bab mengacu pada hasil evaluasi Rancangan Perda revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021oleh Gubernur pada Tanggal 14 Juli 2017.

Bertolak dengan beberapa perubahan kondisi tersebut di atas, dipandang perlu dilakukan revisi terhadap Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021.Proses penyusunan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 oleh tim penyusun RPJMD dimulai pada bulan Januari tahun 2017, mengikuti proses Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan tahapan penyusunan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan

2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

3. Penyusunan Rancangan RPJMD

4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

5. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

6. Penetapan RPJMD

1. **Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016- 2021 disusun atas dasar peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu:

|  |
| --- |
| 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); |
| 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); |
| 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); |
| 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
| 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); |
| 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
| 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
| 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); |
| 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); |
| 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); |
| 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); |
| 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); |
| 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
| 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); |
| 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
| 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598); |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ); |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833 ); 2. Peraturan Pemerintah Nomer 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449); |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ); |
| 1. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; |
| 1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – Undangan; |
| 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; |
| 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, |
| 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2); |
| 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14); |
| 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 –2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 28 ); |
| 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 ); |

**1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, dokumen RPJMD sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat nasional,provinsi, dan kabupaten seperti: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015), Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Bali 2013-2018 (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2017), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan (Perda Nomor 14 Tahun 2011) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan (Perda Nomor 11 Tahun 2012)

Memperhatikan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, maka pembangunan daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional.Oleh karenanya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

Dari Gambar 1.1dapat dijelaskan bahwa penyusunan RPJM Nasional berpedoman pada RPJP Nasional. RPJP Nasional dipakai acuan untuk menyusun RPJPD Provinsi. RPJPD Provinsi dipakai acuan untuk menyusun RPJPD Kabupaten/Kota. Dengan memperhatikan RPJM Nasional dan mengacu kepada RPJPD Provinsi, disusunlah RPJMD Provinsi dan Renstra PD Provinsi yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Penyusunan RPJMD Kabupaten berpedoman pada RPJPD Kabupaten dengan memperhatikan RPJMD Provinsi, serta RPJMN. Sebagaimana amanat penjelasan pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah.Di samping itu, seluruh dokumen perencanaan pembangunan dari pusat sampai daerah wajib merujuk *platform* baru yang menjadi kesepakatan 193 negara anggota PBB, disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs). Ada 17 poin penting yang menjadi target SDGs pada tahun 2030, yakni tercipta dunia dengan:

1. Tanpa kemiskinan;
2. Tanpa kelaparan;
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan;
4. Pendidikan berkualitas;
5. Kesetaraan gender;
6. Air bersih dan sanitasi;
7. Energi bersih dan terjangkau;
8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak;
9. Industri, inovasi, dan infrastruktur;
10. Pengurangan kesenjangan;
11. Keberlanjutan kota dan komunitas;
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
13. Aksi terhadap iklim;
14. Kehidupan bawah laut;
15. Kehidupan di darat;
16. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian; dan
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Dokumen RPJMD pada dasarnya menerjemahkan suatu proses pemikiran strategis.Kualitas dokumen RPJMD sangat ditentukan oleh seberapa jauh RPJMD dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses menetapkan kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.



Gambar 1.1

Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD sebagai perencanaan strategis diharapkan:

1. Dapat menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih secara terukur sesuai kemampuan daerah;
2. Dapat memberikan arah perkembangan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan;
3. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas;
4. Menyediakan instrumenmonitoring dan evaluasi untuk mengukur sejauhmana kemajuan atau perubahan kondisi yang telah dicapai dalam proses pembangunan;
5. Dapat menggalang partisipasi masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama;
6. Dapat dihasilkan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif.

RPJMD sebagai perencanaan strategis akan berhasil mengantarkan pada visi, misi dan tujuan serta sasaran apabila:

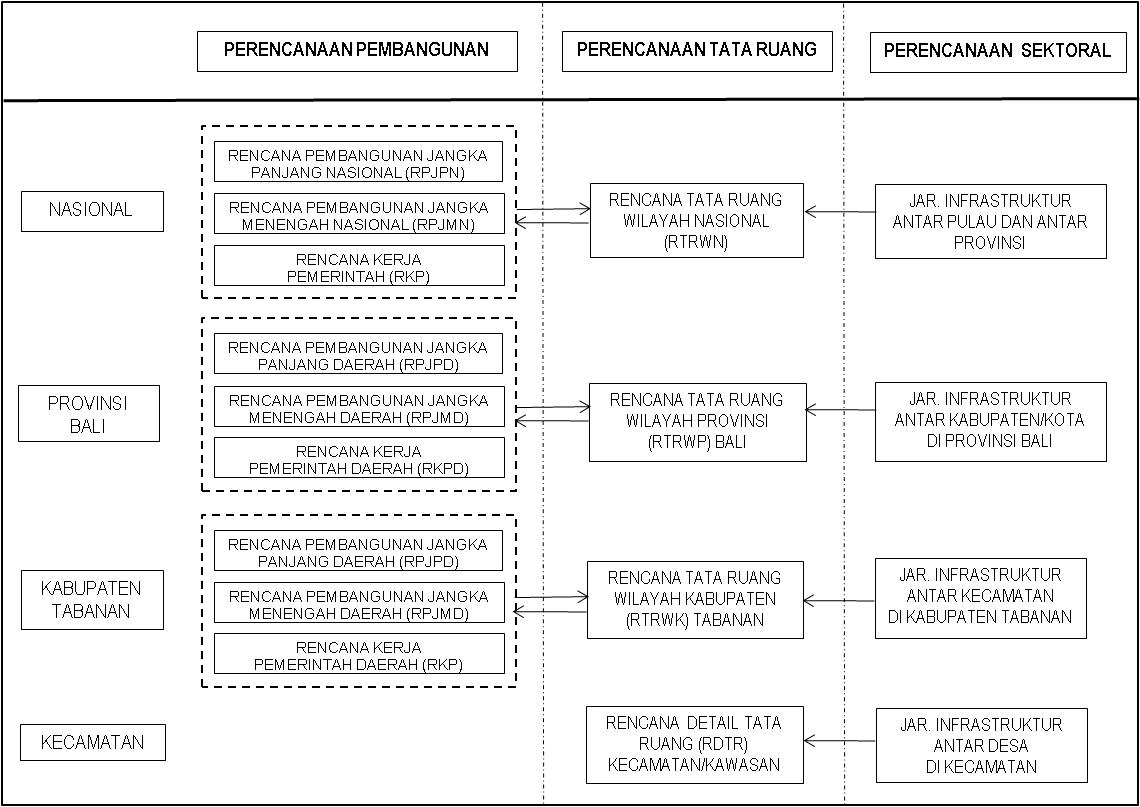
1. Mengikutsertakan *stakeholders* yang tepat dalam proses perencanaan;
2. Mengkomunikasikan rencana dengan bahasa yang mudah dimengerti;
3. Tujuan (*goals*) dan sasaran (*objectives*) rencana mesti realistis dan *SMART;*
4. Terdapat kejelasan siapa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, dan waktu penyelesaian termasuk review kemajuan pencapaian sasaran;
5. Terdapat kemampuan untuk menyesuaikan dari waktu ke waktu terhadap perkembangan internal dan eksternal yang terjadi;
6. Terdapat evaluasi terhadap proses perencanaan yang dilakukan;
7. Terdapat komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dari dokumen yang dihasilkan;
8. Digunakan instrumen, metodelogi, dan pendekatan yang tepat untuk mendukung proses perencanaan.

Renstra Perangkat Daerah ( PD ) disusun berpedoman pada RPJMD yang isinya antara lain: Tujuan, Sasaran dan Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran. Renstra Perangkat Daerah (PD) juga memuat program-program dan kegiatan indikatif.Renstra Perangkat Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerahmemuat Kebijakan Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pembangunan. Program dan Kegiatan pembangunan disusun sebagai acuan untuk pelaksanaan pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam kaitannya dengan Rencana Tata Ruang, hubungan kedua dokumen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Kabupaten Tabanan 2010-2030 beserta rencana rincinya adalah matra ruang dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025, yang sekaligus juga merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali ke dalam strategi pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten Tabanan yang terintegrasi dengan wilayah sekitarnya. Selanjutnya Rencana Tata Ruang dan RPJMD menjadi acuan dalam perencanaan sektoral.
2. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tabanan merupakan turunan dari Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tabanan. Visi RPJPD Kabupaten Tabanan 2005-2025 adalah “***Tabanan Sejahtera Berbasis Pertanian“.*** Sedangkan penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Tabanan yang hijau, lestari dan berkelanjutan sebagai penyangga lingkungan, kebudayaan dan perekonomian Bali yang berbasis budaya agraris, berdaya saing dan terintegrasi dengan kepariwisataan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pengembangan wilayah.

Kedudukan dan pola hubungan perencanaan pembangunan, perencanaan tata ruang dan perencanaan sektoral dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2

Pola Hubungan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang

Dari diagram tersebut di atas nampak bahwa RPJMD Kabupaten/Kota disusun mengacu pada Rencana Tata Ruang, sebaliknya rencana pembiayaan Tata Ruang dan Perencanaan Sektoral akan tertuang pada prioritas program RPJMD. Terkait dengan Tata Ruang, data dan informasi, serta rencana tata ruang diolah melalui proses:

1. Analisis daerah;
2. Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
3. Perumusan masalah pembangunan daerah;
4. Penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.

Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.

Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya melakukan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah.Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran.

Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat. Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup kekuatan, tantangan, ancaman dan kelemahan yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.

1. **Sistematika Penulisan**

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2021, terdiri atas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BAB** | **I** | **PENDAHULUAN**  Pada bab ini berisi tentang pengertian RPJMD, maksud dan tujuan, dasar hukum, hubungan antara RPJMD dengan dokumen lainnya, proses penyusunan dan sistematika. |
| **BAB** | **II** | **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**  Menguraikan kondisi geografis dan demografi, aspek perekonomian, aspek kesejahteraan sosial, dan aspek pelayanan umum. |
| **BAB** | **III** | **GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**  Bab ini menguraikan kebijakan pengelolaan kuangan yang meliputi; ektensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah, kebijakan pengelolaan belanja daerah serta pembiayaan. |
| **BAB** | **IV** | **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**  Bab ini menguraikan tentang analisis permasalahan daerah dan isu-isu strategis. |
| **BAB** | **V** | **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**  Bab ini menjelaskan pernyataan visi danmisi kepala daerah terpilih. Selanjutnya misi dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang mengacu pada Bab II, III, dan IV. |
| **BAB** | **VI** | **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  Bab ini menjelaskan strategi pembangunan yang direncanakan selama lima tahun untuk pencapaian tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan untuk mendukung implementasi strategi dapat terlaksana secara efektif dan efisien |
| **BAB** | **VI** | **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**  Kebijakan umum pembangunan daerah menjelaskan konsep dasar kebijakan umum serta penerapannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan. |
| **BAB** | **VIII** | **INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAANNYA**  Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, program pembangunan daerah dan rencana kerja, baik rencana kerja kerangka regulasi maupun rencana kerja kerangka anggaran. |
| **BAB** | **IX** | **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**  Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan program kegiatan. |
| **BAB** | **X** | **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**  Pada Bab ini diuraikan tentang program transisi daerah dan kaidah pelaksanaannya. |

1. **Maksud dan Tujuan**
2. **Maksud**

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016- 2021 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu 5 tahun sebagai penjabaran periode ketiga RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016 - 2021 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan daerah yang memberikan arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Tabanan sebagaimana Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sehingga setiap *stakeholders* dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan sampai pada kontrol sosial guna mewujudkan Tabanan Serasi.

1. **Tujuan**

Tujuan Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2016-2021 adalah:

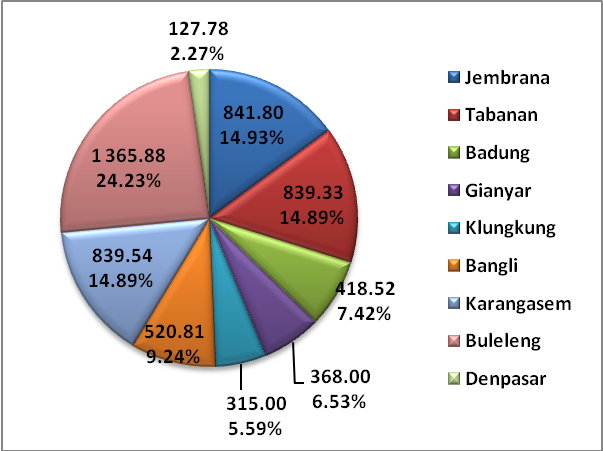
1. Terumuskannya tujuan dan sasaran pembangunan yang jelas dan terukur sesuai dengan visi dan misi kepala daerah;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama lima tahun;
4. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan pemerintah Kabupaten Tabanan selama lima tahun;
5. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah;
6. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pemerintah Kabupaten Tabanan selama lima tahun; dan
7. Sebagai pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaran pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD 2016-2021.

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

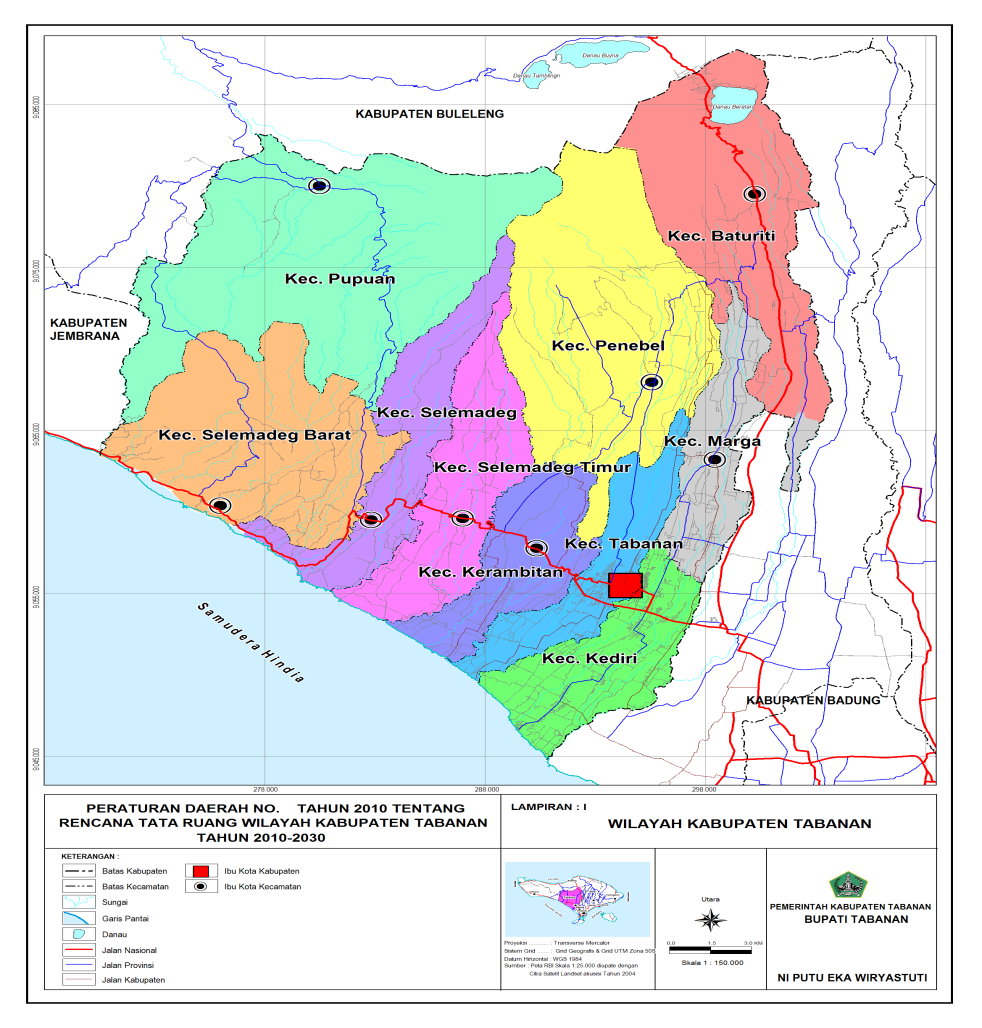
1. **Aspek Geografi dan Demografi**
   * 1. **Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Kabupaten Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Bali yang memiliki luas wilayah 839,33 km2 atau 14,89 persen dari luas daratan Provinsi Bali dan merupakan Kabupaten terluas keempat setelah Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Secara astronomis Kabupaten Tabanan berada pada posisi 8014’ 30’’8030’07’’ Lintang Selatan, 1140 54’52’’- 115012’57’’ Bujur Timur. Dilihat dari geostrategicKabupaten Tabanan terletak di bagian selatan pulau Bali yang berbatasan langsung dengan dengan tiga Kabupaten yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Badung, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten jemberana dan di sebelah Selatan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.



Gambar 2.1

Komposisi Luas Wilayah Bali per Kabupaten/Kota



Gambar 2.2

Letak Geografis dan Wilayah Administratif Kabupaten Tabanan

Secara administratif, Kabupaten Tabanan teridiri dari 10 Kecamatan dengan 133 Desa Dinas, 348 Desa Adat/Desa Pakraman yang terdiri dari 795 Banjar Adat, selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Pembagian dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Desa Dinas | Desa Pakraman | Banjar | Luas Wilayah (Ha) |
| 1. | Selemadeg | 10 | 36 | 57 | 5.205 |
| 2. | Kerambitan | 15 | 28 | 90 | 4.239 |
| 3. | Tabanan | 12 | 12 | 82 | 5.140 |
| 4. | Kediri | 15 | 22 | 98 | 5.360 |
| 5. | Marga | 16 | 28 | 69 | 4.479 |
| 6. | Baturiti | 12 | 53 | 64 | 9.917 |
| 7. | Penebel | 18 | 72 | 130 | 14.198 |
| 8. | Pupuan | 15 | 24 | 63 | 17.902 |
| 9. | Selemadeg Barat | 11 | 37 | 71 | 12.015 |
| 10 | Selemadeg Timur | 10 | 32 | 71 | 5.478 |
|  | Jumlah | 133 | 348 | 795 | 83.933 |

Sumber : BPS Kab. Tabanan, 2015

Keadaan topografi Kabupaten Tabanan berupa dataran tinggi di bagian utara, dan dataran rendah di bagian selatan. Bentangan wilayah dari laut sampai gunung seperti ini sering diistilahkan dengan “*Nyegara-Gunung”.*Bagian utara merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian tertinggi berada pada puncak Gunung Batukaru, yaitu setinggi 2.276 meter dari permukaan laut dan di bagian selatan merupakan daerah pantai.Tabanan memiliki ekosistempegunungan, danau, lembah, dataran rendah, pesisir dan laut. Miniatur Bali sesungguhnya telah terwakili oleh Tabanan.

Kabupaten Tabanan mempunyai karakteristik hidrologi yang beragam sehingga secara relatif memiliki sumber daya air yang kaya dibandingkan wilayah lainnya di Bali. Karakteristik hidrologi tersebut meliputi sebaran sungai yang membentuk suatu daerah aliran sungai (DAS) meliputi DAS Tukad Yeh Empas, DAS Tukad Yeh Ho, dan DAS Tukad Balian.Sungai-sungai besar lainnya yang bermuara di Kabupaten Tabanan yaitu Tukad Yeh Sungi, Tukad Yeh Abe, Tukad Yeh Matan dan Tukad Yeh Otan. Di samping sungai,di Tabanan juga terdapat sebuah danau, yaitu Danau Beratan dan tersebar kurang-lebih 118 mata air yang 82 diantaranya telah didayagunakan.

Iklim Kabupaten Tabanan merupakan iklim hujan tropis bermusim, dengansuhu rata-rata mencapai 27°C dengan suhu terendah 24°C dan suhu tetinggi 30°C. Kelembaban udara berkisar antara 74-77% dan curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 2.155-3.292 mm.

Secara umum kondisi tanah di Kabupaten Tabanan sangat subur dan memungkinkan ditanami berbagai tanamam pertanian. Hal tersebut disebabkan wilayah permukaan Kabupaten Tabanan tersusun oleh formasi geologi beragam. Batuan tua penyusunnya adalah batuan hasil muntahan Gunung Api Membrana seperti Gunung Klatakan, Gunung Merbuk dan Gunung Patas yang terdiri dari lava, breksi dan tufa, terdapat disekitar Kaliukir, Munduk Tiinggading, Suraberata dan Kerambitan. Batuan yang lebih muda adalah tufa dan endapan lahar Buyan-Bratan dan Batur yang terbentuk pada era kuarter. Batuan ini menutupi sekitar setengah Kabupaten Tabanan, terutama daerah bagian selatan. Sementara pada daerah pegunungan terdapat dua formasi batuan yaitu batuan hasil ekstrusi Gunung Batukaru dan batuan gunung api dari kerucut-kerucut sebresen Gunung Pohen, Gunung Sangiyang dan Gunung Lesong. Jenis-jenis batuan menurut luasnya di wilayah Kabupaten Tabanan adalah: Batuan Gunung Berapi Batukaru, luasnya 120,79 km2/(14,39%), Tufa endapan lahar Buyan, Beratan dan Batur, luasnya 453,57 km2/(54,04%), Batuan Gunung Pohen dan Gunung Sangiyang, luasnya 136,50 km2/(16,26%), Batuan Gunung Api Jembrana, Breksi, Tufa dari Gunung Klatakan dan Batuan tergabung, luasnya 118,42 km2/(14,11%), Endapan Alluvial pada Danau Beratan, luasnya 0,38 km2/(0,05%), dan Formasi Palasari, luasnya 9,67 km2/(1,15%).

Dilihat dari penguasaan lahan, dari luas yang ada sekitar 219,62 km2 atau 26,17 persen merupakan lahan persawahan dan 619,71 Km2 atau 73,83 persen merupakan lahan bukan sawah. Dari 73,83 persen luas lahan bukan sawah, 99,88 persen diantaranya merupakan lahan kering yang sebagian besar berupa tegal, kebun dan hutan negara sisanya 0,12 persen adalah lahan lainnya seperti kolam, tambak dan rawa (Gambar 2.3)

Gambar2.3

Luas Lahan Dirinci Menurut Penggunaannya (ha)

Sebagai wilayah yang memiliki luas sawah terbesar di Bali, menjadikan sektor pertanian sebagai basis pertumbuhan ekonomi dan menjadikan Kabupaten Tabanan sebagai lumbung pangan Bali.

* + 1. **Potensi Pengembangan Wilayah**

Berdasarkan karakteristik wilayah, Pemerintah Kabupaten Tabanan menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten dengan mengacu Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali 2009 – 2029. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena akan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan. Kawasan Strategis dimaksud adalah:

1. **Kawasan Strategis Berdasarkan Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi mencakup:

1. Kawasan Perkotaan Tabanan;
2. Kawasan Perkotaan Bajera
3. Kawasan Agropolitan Baturiti;
4. Kawasan Agropolitan Pupuan;
5. Kawasan Agropolitan Penebel;
6. Kawasan Agrowisata Jatiluwih;
7. Kawasan Efektif Pariwisata Tanah Lot;
8. Kawasan Efektif Pariwisata Bedugul;
9. Kawasan Efektif Pariwisata Soka.
10. **Kawasan Strategis Berdasarkan Kepentingan Sosial Budaya**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya mencakup sebaran Kawasan Pura Sad Kahyangan dan Pura Dang Kahyangan, mencakup:

1. Kawasan radius kesucian Sad Kahyangan dan Pura Dang Kahyangan terdiri atas:
2. Kawasan Pura Batukaru, di Desa Wongaya Betan, Kecamatan Penebel;
3. Kawasan Pura Tanah Lot dan Pura Pekendungan, di Desa Beraban, Kecamatan Kediri;
4. Kawasan Pura Resi, di Desa Nyambu, Kecamatan Kediri;
5. Kawasan Pura Luhur Serijong, di Desa Antap Kecamatan Selemadeg;
6. Kawasan Pura Gadingwani di Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat.
7. Kawasan Desa Wisata, terdiri atas:
8. Kawasan Desa Wisata Pinge;
9. Kawasan Desa Wisata Jatiluwih.
10. **Kawasan Strategis Berdasarkan Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup mencakup:

* + 1. kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Gunung Batukau;
    2. kawasan Hutan Lindung Yeh Leh Yeh Lebah;
    3. Kawasan Hutan Lindung Yeh Ayah;
    4. Kawasan Danau Beratan dan sekitarnya;
    5. Kawasan Waduk Telaga Tunjung dan sekitarnya

1. **Potensi Kecamatan**

Sebagaimana telah disampaikan pada uraian sebelumnya, potensi Kabupaten Tabanan adalah sektor pertanian, ini dapat dilihat dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan merupakan wilayah pertanian. Namun demikian masing-masing kecamatan memiliki potensi unggulan.

1. **Kecamatan Pupuan**

Topografi Kecamatan Pupuan berada di daerah pegunungan dengan curah hujan sangat tinggi, sebesar 3.475 mm.Tanaman perkebunan merupakan komoditas yang dominan di daerah ini. Dari 14 desa yang ada di Kecamatan Pupuan, terdapat dua desa yang tidak memiliki areal pertanian sawah, yaitu Desa Munduk Temu dan Belatungan. Hal ini karena topografi kedua desa tersebut berada di lereng dengan ketinggian diatas 700m dari permukaan laut.

Dilihat dari luas wilayah masing-masing desa di Kecamatan Pupuan, Desa Munduk Temu merupakan desa terluas (22,55 km2) diikuti Desa Belimbing (22,49 km2) dan Desa Pujungan (22,12 km2) yang luas wilayahnya masih diatas 20 km2. Desa yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Desa Sai, hanya seluas 2,78 km2.

Sektor pertanaian sangat cocok sekali dikembangkan, mengingat banyak sekali sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan areal pertanian. Di Kecamatan Pupuanterdapat 21 subak yang tersebar di 12 desa.

1. **Kecamatan Penebel**

Keadaan geografis Kecamatan Penebel sebagian besar berada di ketinggian antara 500 - 1.000 m dari permukaan laut sehingga memiliki hawa sejuk dan cenderung intensitas curah hujannya cukup tinggi. Luas Kecamatan Penebel sebesar 141,98 km2 (16,92 persen) dari luas Kabupaten Tabanan. Bagian utara Kecamatan Penebel berbatasan langsung dengan Kabupaten Buleleng, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Baturiti, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tabanan,dan bagian baratnya dengan Kecamatan Pupuan.

Luas sawah terluas di Kabupaten Tabanan terdapat di Kecamatan Penebel sehingga pasokan produksi padi Tabanan sebagian besar berasal dari wilayah ini. Sebuah kawasan pertanian yang khas dan berhasil diakui sebagai warisan budaya dunia (WBD) sejak tanggal 6 Juli 2012 terdapat di Kecamatan Penebel, yakni WBD Jatiluwih. WBD Jatiluwih dicirikan dengan sawah yang berterasering dan mencakup kawasan pertanian seluas 2.428 ha,serta terdiri dari 14 subak. Saat ini WBD Jatiluwih telah dikembangkan sebagai Desa Wisata. Selain itu Di Desa Senganan banjar Pagi terdapat komunitas Penangkar Burung Hantu (*titoAlba*) Musuh alami hama tikus.

1. **Kecamatan Marga**

Kecamatan Marga terdiri dari 16 (enam belas) desa. Desa dengan wilayah terluas adalah Desa Cau Belayu (4,31 km2) atau 9,62 persen dari luas kecamatan,sedangkan wilayah desa paling kecil luasnya yaitu Desa Batannyuh (1,35 km2) atau 3,01 persen dari luas kecamatan. Luas lahan di Kecamatan Marga dominan merupakan lahan pertanian. Hal ini menyebabkan sektor pertanian memegang peran yang sangat penting. Sebagian besar penduduk masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian terutama pertanian tanaman pangan (sawah). Selain pertanian tanaman pangan, terdapat juga hasil perkebunan dan peternakan yang menjadi alternatif mata pencaharian penduduk.Luas sawah di kecamatan ini diperkirakan seluas 3.867 ha, sedangkan lahan tegalan seluas 460,5 ha. Tanaman dominan pada lahan tegalan adalah kopi, cengkeh, kelapa, dan vanili.

Disamping pertanian lahan basah dan kering, sektor peternakan juga banyak ditekuni oleh masyarakat di Kecamatan Marga. Jenis ternak yang banyak dikembangkan di sini adalah sapi bali, babi, ayam ras pedaging, dan ayam kampung. Di samping itu, di kecamatan ini terdapat sebuah desa wisata, Desa Pinge yang keberadaannya sudah cukup berkembang dibandingkan dengan desa wisata lain yang ada di Kabupaten Tabanan. Obyek wisata menarik lainnya adalah Taman Makam Pahlawan Margarana.

1. **Kecamatan Kediri**

Kecamatan Kediri terdiri dari 15 desa dengan luas 53,60 km2 yang merupakan hamparan berupa dataran dengan lahan pertanian yang cukup luas. Semua desa di kecamatan ini memiliki hamparan persawahan, tegalan dan tanah pemukiman untuk tempat tinggal penduduk. Dilihat dari luasnya, Desa Beraban memiliki wilayah yang paling luas dengan luas (6,92 km2) atau 12,91 persen dari luas wilayah kecamatan, sedangkan luas terkecil adalah Desa Pandak Bandung (1,50 km2), 2,80 persen dari luas kecamatan. Pertanian lahan sawah terdapat di seluruh desasehingga matapencaharian utama penduduk lokal sebagian besar sebagai petani sawah. Selain pertanian padi sawah, terdapat dua desa yang sangat terkenal dengan produksi genteng dan keramiknya yaitu Desa Pejaten dan Desa Nyitdah. Produksi keramik dari Desa Nyitdah telah memasuki pasar ekspor. Di Desa Beraban, Kecamatan Marga terdapat obyek wisata yang masuk dalam katagori obyek wisata unggulan di Bali adalah Obyek wisata Tanah Lot.

1. **Kecamatan Kerambitan**

Kecamatan Kerambitan memiliki 15 desa dengan luas 42,39 km2dengan topografi relatif datar. Penggunaan lahan terdiri dari hamparan sawah dalam jumlah yang relatif luas, disusul kebun, dan permukiman. Desa terluas di Kecamatan Kerambitan adalah Desa Sembung Gededengan luas6,83km2 atau 16,11 persen dari luas kecamatan. Sementara desa dengan wilayah paling kecil adalah Desa Tista dengan luas 0,52 km2 atau 1,23 persen dari luas kecamatan. Sumber ekonomi utama Kecamatan Kerambitan adalah padi sawah, perdagangan, penggalian, dan pariwisata. Obyek wisata yang cukup terkenal di daerah ini adalah Puri Agung dan Puri Anyar, dengan daya tarik burupa: tari tradisional “tektekan” dan “okokan”, serta paket wisata pernikahan adat Bali. Berkenaan dengan perkembangan wilayah, tingkat alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan permukiman di Kecamatan Kerambitan dalam beberapa tahun terakhir ini relatif tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

1. **Kecamatan Selemadeg Timur**

Kecamatan Selemadeg Timur memiliki luas 52,05 Km2 terdiri dari 10 desa. Desa dengan wilayah terluas adalah Desa Gunung Salak, seluas 10,14 km2 (18,51%), sedangkan Desa Beraban memiliki luas wilayah paling kecil sebesar 1,99 km2 (3,63 %). Terdapat 2 desa yang berada di dataran tinggi, yaitu Desa Gunung Salak dan Desa Dalang, dengan ketinggian antara 500-1000m dari permukaan laut. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, baik petani sawah maupun petani kebun. Tanaman padi di bagian utara dapat ditanam hingga 2-3 kali per tahun, sedangkan pada wilayah dekat pantai penanaman padi sangat tergantung dari curah hujan. Apabila curah hujan cukup, dimungkinkan penanaman 2 kali setahun, sedangkan apabila curah hujan kurang, penanaman kedua bersifat spekulatif. Pada lahan tegalan, tanaman yang banyak dihasilkan adalah kelapa, kakao, pisang, durian, dan beberapa buah lainnya.

Di bagian selatan berbatasan dengan laut dan terdapat pantai tepatnya di Desa Tegal Mengkeb dan Desa Beraban. Desa ini mulai ditata sebagai obyek wisata komersial.

1. **Kecamatan Selemadeg**

Kecamatan Selemadeg memiliki 10 desa dengan luas 52,05 km2. Dilihat dari penggunaan lahannya, terdiri dari tanah sawah 1.883 Ha, perkebunan 1.580 Ha, tegal 757 Ha,dan lain-lain 985 ha. Dilihat dari luasnya, Desa Wanagiri memiliki wilayah yang paling luas dengan luas 14,28 km2 atau 27,44 persen dari luas kecamatan. Sementara desa dengan wilayah paling kecil adalah Desa Bajera dengan luas 1,91 km2 atau 3,67 persen dari luas kecamatan. Dilihat dari potensi wilayah, matapencaharian penduduk yang utama bergerak di sektor pertanian berupa pertanian padi sawah. Selain pertanian padi sawah, potensi yang lain adalah perkebunan, antara lain kelapa, kakao, cengkeh, dan kopi terutama di daerah dataran tinggi.

1. **Kecamatan Selemadeg Barat**

Dari 11 desa yang ada di Kecamatan Selemadeg Barat, Desa Lumbung memiliki area terluas yaitu 27,28 km2 atau 22,70 persen dari luas kecamatan, sedangkan Desa Antosari memiliki area lahan terkecil yaitu 4,29 km2(3,57 persen). Wilayah Kecamatan Selemadeg Barat sebagian berada di daerah pegunungan,dengan tanaman utama, seperti: kelapa, kopi, cengkeh, kakao dan lain-lain. Luas wilayah Kecamatan Selemadeg Barat sekitar 120,15 km2., dengan penggunaan lahan terdiri dari: lahan pertanian sekitar 1.356,0 Ha. Wilayah yang memiliki lahan pertanian padi sawah paling luas berada di Desa Lalang Linggah yaitu sekitar 270,0 Ha dengan produktivitas cukup tinggi. Desa Lalang Linggah berada di daerah pesisir dan berbatasan langsung dengan laut.

1. **Kecamatan Tabanan**

Kecamatan Tabananmemiliki 12 desa dengan luas 51,40 km2dengan topografi berupa dataran. Dilihat dari luasnya, Desa Sudimara wilayahnya paling luas,yaitu 5,83 km2 atau 11,34 persen dari luas kecamatan.Sementara desa dengan wilayah paling kecil adalah Desa Subamia dengan luas 2,58 km2 atau 4,63 persen dari luas kecamatan. Potensi pertanian masih merupakan penggerak utama perekonomian Kecamatan Tabanan terutama pertanian padi sawah. Hanya satu desa yang tidak memiliki lahan persawahan yaitu Desa Delod Peken yang merupakan desa pusat pemerintahan Kabupaten Tabanan. Dari 12 desa, ada 9 desa yang sebagian besar penduduknya adalah petani, 3 desa lainnya merupakan desa-kota yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor perdagangan, industri dan jasa.

1. **Kecamatan Baturiti**

Kecamatan Baturiti terdiri dari 12 desa dengan total luas wilayah mencapai 99,17 km2. Sebagian besar wilayah kecamatan ini terletak di dataran tinggi. Tidak jauh berbeda dengan kecamatan lainnya,pertanian tanaman pangan merupakan produk utama dari Kecamatan Baturiti. Produksi yang mononjol adalah tanaman sayur-mayur, strawbary, dan tanaman buah-buahan. Di samping itu, tanaman padi juga terdapat hampir di semua desa, kecuali Desa Candikuning.

Di Kecamatan Baturiti terdapat sebuah danau yang sangat penting bagi sumber mata air Bali, yaitu Danau Beratan. Danau Beratan telah berkembang menjadi obyek wisata yang cukup banyak diminati wisatawan dan merupakan salah satu obyek wisata favorit di Bali. Ancaman terbesar dari keberadaan danau ini adalah proses pendangkalan dan pencemaran air yang terus berlangsung. Berdekatan dengan obyek wisata Danau Beratan, terdapat Kebun Raya Eka Karya Bedugul yang juga menjadi daya tarik wisata dengan tingkat kunjungan yang cukup tinggi.

* + 1. **Wilayah Rawan Bencana**

Berdasarkan data bencana di wilayah Provinsi Bali, tercatat ada 14 jenis peristiwa kebencanaan. Dari 14 jenis peristiwa kebencanaan tersebut, terdapat 10 jenis potensi bencana alam yaitu bencana gunung api, gempa bumi, banjir, angin topan, tanah longsor, kekeringan, wabah penyakit menular, hama tanaman, tsunami/gelombang pasang dan abrasi pantai. Kondisi geografi, topografi, oseanografi dan geologi Kabupaten Tabanan berpotensi terjadi bencana alam yang merupakan salah satu kombinasi dari gempa bumi tektonik, tsunami, angin topan/badai, banjir, dan tanah longsor. Beberapa garis pantai Kabupaten Tabanan dilihat dari tipologi pantai dan kondisi oseanografinya, rawan mengalami erosi/abrasi. Selain itu wilayah Kabupaten Tabanan juga terindentifikasi rawan terhadap bencana serangan hama tanaman. Kawasan yang tergolong rawan bencana alam di Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

**A. Rawan Bencana Banjir**

Kabupaten Tabanan secara umum termasuk wilayah yang tidak menghadapi masalah yang serius berkaitan dengan bencana banjir. Walaupun memiliki curah hujan yang tinggi dan sistem sungai yang banyak,namun Tabanan ditunjang oleh kapasitas tampung sungai dan daya resap tanah yang tinggi yang pada gilirannya akan mengurangi aliran permukaan.

**B. Rawan Bencana Tanah Longsor**

Bencana tanah longsor dapat disebabkan kondisi alam dan ulah campur manusia. Kondisi alam yang meningkatkan kerawanan terhadap bencana tanah longsor yaitu lahan dengan kemiringan tinggi, tekstur dan kedalaman solum tanah, vegetasi penutup lahan, sifat aliran air permukaan dan lain sebagainya. Sedangkan ulah campur tangan manusia antara lain pengusahaan lahan dan pembuatan bangunan pada lahan dengan kemiringan lereng yang tinggi, pembabatan vegetasi, penggalian bahan tambang dan lain sebagainya. Kawasan yang teridentifikasi rawan terhadap bencana tanah longsor di Kabupaten Tabanan menurut data Bapedalda Provinsi Bali (2003) adalah:

1. Kecamatan Selemadeg Barat: di sepanjang jalan Dusun Delod Ceking Desa Lumbung Kauh sampai Dusun Auman Kaja Desa Mundeh Kauh;
2. Kecamatan Selemadeg: sepanjang jalan Dusun Pupuan Sawah sampai Dusun Sawah Desa Wanagiri;
3. Kecamatan Pupuan terdapat beberapa spot-spot daerah rawan longsor yaitu Dusun Munduk Gaing dan Kebon Jero Kauh di Desa Munduktemu, Dusun Kebon Kaja Desa Kebonpadangan sampai Dusun Padangan Kelod Desa Batungsel, Dusun Munduktemu Kelod Desa Munduktemu sampai Dusun Seleksek Desa Bantiran, Dusun Bantiran sampai Dusun Tibudalem Desa Pujungan serta daerah pinggiran hutan di Desa Sanda, Batungsel dan Pujungan;
4. Kecamatan Penebel: Dusun Wongaya Bendul sampai Dusun Gunungsari desa Desa Jatiluwih; dan
5. Kecamatan Baturiti: Dusun Abing Desa Batunya, Dusun Mandukandong Utara Desa Bangli sampai Dusun Pekarangan Desa Batunya, serta daerah lereng perbukitan sekitar Danau Beratan.

**C. Rawan Bencana Gempa Bumi**

Berdasarkan Peta Seismotektonik Regional Indonesia, secara umum wilayah Bali terletak pada jalur kegempaan dengan zona seismisitas tinggi. Kegempaan terekam pada magnitut 7,3 pada kedalaman 300 km terletak pada episenter sebelah timur laut Kota Denpasar. Sumber gempa masing-masing pada kedalaman 80, 40 dan 30 km dengan magnitut 6,7; 6,2 dan 6,0 (Subandono, 2000). Dengan demikian, di wilayah pesisir Kabupaten Tabanan bagian timur yaitu di Kecamatan Kediri termasuk kawasan rawan bencana gempa bumi (Satkorlak Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Provinsi Bali, 2004).

**D. Rawan Bencana Tsunami**

Bencana tsunami yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik di sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif lainnya. Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya merupakan suatu kawasan yang terletak pada daerah pertemuan tiga lempeng (*triple junction plate convergence*) yaitu lempeng Eurasia, lempeng Samudera Pasifik dan lempeng India-Australia yang masing-masing bergerak ke barat dan ke utara relatif terhadap Eurasia. Dengan demikian Bali merupakan daerah yang secara tektonik sangat labil dan termasuk salah satu pinggiran benua yang sangat aktif di muka bumi. Akibatnya, Bali merupakan salah satu kawasan yang mempunyai tingkat kegempaan yang tinggi di dunia (Arnold, 1986). Gempa-gempa tersebut sebagian berpusat di dasar Samudera Hindia, dan beberapa dapat memicu terjadinya gelombang laut besar yang disebut tsunami.

Wilayah Bali dan pulau-pulau Nusa Tenggara termasuk pantai-pantai yang rawan tsunami. Tingkat kerawanan bencana tsunami semakin meningkat pada pantai yang berbentuk corong atau teluk seperti kawasan pesisir sekitar Selat Badung dan Selat Bali. Menurut Subandono (2003), teluk-teluk merupakan tempat yang paling potensial terjadi tsunami, karena tempat-tempat ini topografi garis pantai cenderung menyempit sehingga mengakibatkan akumulasi dan terkonsentrasinya energi gelombang tsunami.

Bencana tsunami akibat gempa bumi di Jawa Timur tahun 1984 menimbulkan rayapan (*run-up*) tsunami dengan tinggi gelombang yang cukup tinggi yaitu maksimum 19,1 m dan berdampak di sepanjang pantai-pantai di Selat Bali dan Selat Badung. Dengan kondisi demikian, maka beberapa wilayah pesisir Kabupaten Tabanan termasuk rawan terhadap bencana tsunami. Akan tetapi tipologi pantai di Kabupaten Tabanan sebagian merupakan pantai bertebing terjal, maka kawasan yang rawan terhadap bencana tsunami menjadi berkurang. Berdasarkan topografi dan tipologi pantai, kawasan yang rawan terhadap bencana tsunami di Kabupaten Tabanan adalah Selabih sampai Mekayu (Kecamatan Selemadeg Barat), dan Yeh Gangga (Kecamatan Tabanan).

**E.Rawan Erosi/Abrasi Pantai**

Erosi pantai merupakan salah satu yang digolongkan sebagai bencana alam karena tingkat kerugian yang ditimbulkan akibat erosi pantai sudah serius. Erosi pantai menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak kecil akibat hilangnya lahan-lahan pertanian milik masyarakat, rusaknya fasilitas umum seperti jalan, rusaknya bangunan dan pemukiman, rumah ibadah (pura) dan sekolah, fasilitas pariwisata (seperti hotel dan restoran), dan tempat rekreasi. Menurut data Bapedalda Provinsi Bali (2003), di Kabupaten Tabanan terdapat enam segmen pantai yang rawan erosi pantai yaitu pantai Selabih dan Mekayu, pantai Suraberata, Pantai Kelating, pantai yeh Gangga, pantai Kedungu dan pantai Nyanyi.

1. Pantai Selabih dan Mekayu terletak di Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat rawan erosi kurang lebih 3,5 km, akan tetapi sebagian besar telah ditangani dengan tembok pantai. Fasilitas yang terancam meliputi jalan raya, rumah penduduk, tempat suci (pura) dan lahan pertanian. Faktor-faktor yang diperkirakan menyebabkan erosi pantai ini antara lain adanya pengambilan material pantai, gelombang badai dan terbatasnya masukan sedimen dari daratan;
2. Pantai Suraberata terletak di Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat rawan erosi lebih kurang 0,6 km, di mana fasilitas yang terancam adalah lahan pertanian dan obyek rekreasi/pariwisata. Faktor utama penyebab erosi pantai adalah gelombang badai dan terbatasnya suplai sedimen dari daratan ke laut;
3. Pantai Kelating terletak di Desa Kelating, Kabupaten Tabanan rawan erosi sepanjang lebih kurang 0,6 km. Fasilitas yang terancam akibat erosi pantai adalah lahan pertanian. Erosi pantai terutama terjadi di sebelah barat muara Tukad Yeh Kelating. Faktor penyebab selain karena pengaruh alam yaitu gelombang badai, juga dipengaruhi oleh pengambilan material pantai seperti pasir dan kerikil;
4. Pantai Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, rawan erosi pantai sepanjang lebih kurang 0,3 km, di mana fasilitas yang terancam adalah tempat rekreasi dan pura suci (pura);
5. Pantai Kedungu terletak di Desa Pangkung Tibah, Kecamatan Kediri rawan erosi sepanjang lebih kurang 0,5 km, di mana tempat rekreasi dan tempat suci (pura)terancam; dan
6. Pantai Nyanyi terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri rawan erosi sepanjang lebih kurang 0,5 km. Fasilitas yang terancam adalah tempat rekreasi.
7. **Angin Topan**

Angin topan biasanya terjadi bersamaan dengan datangnya musim penghujan dan pada musim pancaroba. Sebagian besar wilayah pesisir dan wilayah pegunungan Kabupaten Tabanan temasuk rawan terhadap bencana angin topan.

* + 1. **Demografi**

Tahun 2020-2030 Indonesia diprediksi mendapat bonus demografi, dimana penduduk dengan umur produktif(15-64 tahun) sangat besar yaitu mencapai 70 persen sementara usia muda dan usia lanjut kecil, sedang 30 persen penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun). Bonus demografi ini tentu akan membawa dampak sosial – ekonomi. Salah satunya adalah angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah, diperkirakan mencapai 4 per 10 penduduk produktif, untuk itu pemerintah harus menyiapkan generasi muda yang berkualitas tinggi SDM-nya melalui pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan investasi.

Pertumbuhan penduduk secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta mengendalikan mobilitas penduduk. Upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan mendorong kegiatan, sepertipenundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye program keluarga berencana (KB). Sementara upaya menurunkan kematian dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Menurut hasil registrasi Penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) akhir Tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Tabanan mencapai 448.033 jiwa. Jumlah tersebut meningkat sekitar 6 ribu jiwa jika dibandingkan dengan pencatatan registrasi tahun sebelumnya. Penduduk tersebut tersebar di sepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan. Dari 10 kecamatan tersebut, Kecamatan Kediri merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling banyak yaitu sebanyak 78.313 jiwa atau sekitar 17,48 persen dari total penduduk Kabupaten Tabanan. Kecamatan dengan persentase penduduk tertinggi kedua, berada di Kecamatan Tabanan dengan jumlah penduduk sebesar 70.509 jiwa. Dibandingkan dengan tahun 2012, persentase penduduk di Kecamatan Tabanan mengalami peningkatan sebesar 0,61 persen. Sementara Selemadeg merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Tabanan hanya 21.920 jiwa atau hanya sekitar 4,96 persen dari total penduduk Kabupaten Tabanan.

Dari sisi kepadatan penduduk, Kecamatan Kediri memiliki dengan kepadatan tertinggi yaitu 1.461 jiwa per km2 kemudian diikuti Kecamatan Tabanan dengan tingkat kepadatan mencapai 1.371 jiwa per km2 sementara rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Tabanan hanya mencapai 534 jiwa per km2. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh faktor geostrategis, selain sebagai sebagai pusat perekonomian kedua kecamatan tersebut bersinggungan langsung dengan pusat Kabupaten Badung yang kita ketahui merupakan pusat ekonomi Bali. Selengkapnya disajikan Jumlah dan Tingkat Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2013 pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Jumlah dan Tingkat Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2013

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Jumlah Penduduk** | **Kepadatan Penduduk Per Km2** |
| 1 | Kediri | 78.313 | 1.461,06 |
| 2 | Tabanan | 70.509 | 1.371,77 |
| 3 | Marga | 44.169 | 986,14 |
| 4 | Kerambitan | 40.017 | 944,02 |
| 5 | Baturiti | 53.318 | 537,64 |
| 6 | Selemadeg Timur | 22.199 | 405,24 |
| 7 | Selemadeg | 21.920 | 421,13 |
| 8 | Penebel | 50.680 | 356,95 |
| 9 | Pupuan | 42.693 | 238,48 |
| 10 | Selemadeg Barat | 24.215 | 201,54 |
|  | **Total** | **448.033** | **6.923,97** |

Sumber : BPS Kab. Tabanan

* 1. **Aspek KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**
     1. **Fokus Kesejahteraan dan PemerataanEkonomi**

1. **Nilai dan Struktur PDRB**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Dalam Periode 2010 – 2014 Nilai dan kontribusi sektor lapangan usaha di Kabupaten Tabanan terinci dalam Tabel 2.3 dan 2.4

Tabel 2.3

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 - 2014

Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 di Kabupaten Tabanan

| **NO** | **Sektor** | **2010** | | **2011** | | **2012** | | **2013** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Juta Rp)** | **%** | **(Juta Rp)** | **%** | **(Juta Rp)** | **%** | **(Juta Rp)** | **%** | **(Juta Rp)** | **%** |
| 1 | Pertanian | 2.326.523,91 | 24,95 | 2.351.118,86 | 23,76 | 2.482.620,72 | 23,64 | 2.536.055,12 | 22,70 | 2.627.287,32 | 22,07 |
| 2 | Pertambangan & Penggalian | 111.651,97 | 1,20 | 123.021,86 | 1,24 | 140.900,21 | 1,34 | 152.298,11 | 1,36 | 152.175,09 | 1,28 |
| 3 | Industri Pengolahan | 604.278,38 | 6,48 | 608.665,46 | 6,15 | 633.854,88 | 6,04 | 691.697,23 | 6,19 | 752.583,71 | 6,32 |
| 4 | Pengadaan Listrik,Gas | 10.205,76 | 0,11 | 11.097,82 | 0,11 | 12.155,91 | 0,12 | 13.242,96 | 0,12 | 13.636,24 | 0,11 |
| 5 | Pengadaan Air | 19.718,71 | 0,21 | 19.749,52 | 0,20 | 20.145,26 | 0,19 | 21.417,51 | 0,19 | 23.019,94 | 0,19 |
| 6 | Konstruksi | 872.781,30 | 9,36 | 929.499,90 | 9,39 | 1.096.504,44 | 10,44 | 1.170.381,39 | 10,47 | 1.192.634,95 | 10,02 |
| 7 | Perdagangan, Hotel & Restoran | 785.563,99 | 8,42 | 829.129,42 | 8,38 | 866.115,55 | 8,25 | 951.636,48 | 8,52 | 1.023.784,84 | 8,60 |
| 8 | Transportasi & Pergudangan | 161.245,27 | 1,73 | 166.589,97 | 1,68 | 172.103,22 | 1,64 | 184.144,58 | 1,65 | 200.476,57 | 1,68 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 1.639.315,60 | 17,58 | 1.744.996,28 | 17,63 | 1.852.109,98 | 17,64 | 2.007.418,00 | 17,97 | 2.142.805,05 | 18,00 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 585.819,50 | 6,28 | 636.492,18 | 6,43 | 679.663,75 | 6,47 | 724.267,73 | 6,48 | 778.485,14 | 6,54 |
| 11 | Jasa Keuangan | 312.319,43 | 3,35 | 328.054,96 | 3,32 | 353.274,24 | 3,36 | 403.170,45 | 3,61 | 442.732,70 | 3,72 |
| 12 | Real Estate | 537.964,14 | 5,77 | 560.860,24 | 5,67 | 589.804,64 | 5,62 | 635.284,21 | 5,69 | 693.047,80 | 5,82 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 95.733,21 | 1,03 | 98.707,44 | 1,00 | 99.584,98 | 0,95 | 109.500,88 | 0,98 | 118.021,55 | 0,99 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wjib | 720.188,79 | 7,72 | 903.257,65 | 9,13 | 901.735,86 | 8,59 | 907.604,55 | 8,12 | 1.007.666,02 | 8,46 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 154.807,48 | 1,66 | 171.527,29 | 1,73 | 169.872,60 | 1,62 | 194.624,15 | 1,74 | 215.890,91 | 1,81 |
| 16 | Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial | 201.317,58 | 2,16 | 213.931,57 | 2,16 | 224.047,74 | 2,13 | 254.542,78 | 2,28 | 286.890,49 | 2,41 |
| 17 | Jasa Lainnya | 185.909,28 | 1,99 | 198.654,03 | 2,01 | 205.968,35 | 1,96 | 215.922,47 | 1,93 | 233.047,81 | 1,96 |
|  | **PDRB** | **9.325.344,32** | **100,00** | **9.895.354,48** | **100,00** | **10.500.462,33** | **100,00** | **11.173.208,59** | **100,00** | **11.904.186,12** | **100** |

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan

Tabel 2.4

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 - 2014

Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Tabanan

| **NO** | **Sektor** | **2010** | | **2011** | | **2012** | | **2013** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Juta Rp)** | **%** | **(Juta Rp)** | **%** | **(Juta Rp)** | **%** | **(Juta Rp)** | **%** | **(Juta Rp)** | **%** |
| 1 | Pertanian | 2.326.523,91 | 24,95 | 2.447.188,74 | 23,64 | 2.676.727,80 | 23,34 | 2.988.328,68 | 23,05 | 3.327.653,06 | 22,09 |
| 2 | Pertambangan & Penggalian | 111.651,97 | 1,20 | 129.194,92 | 1,25 | 151.622,66 | 1,32 | 172.885,48 | 1,33 | 193.371,52 | 1,28 |
| 3 | Industri Pengolahan | 604.278,38 | 6,48 | 645.835,25 | 6,24 | 702.010,28 | 6,12 | 793.675,03 | 6,12 | 924.493,50 | 6,14 |
| 4 | Pengadaan Listrik,Gas | 10.205,76 | 0,11 | 9.811,69 | 0,09 | 9.528,75 | 0,08 | 9.365,45 | 0,07 | 12.286,87 | 0,08 |
| 5 | Pengadaan Air | 19.718,71 | 0,21 | [19 807,1](file:///F:\tabanankab.bps.go.id)3 | 0,19 | 20.075,11 | 0,18 | 21.540,38 | 0,17 | 24.044,57 | 0,16 |
| 6 | Konstruksi | 872.781,30 | 9,36 | 988.152,32 | 9,54 | 1.241.137,55 | 10,82 | 1.382.744,31 | 10,67 | 1.500.148,93 | 9,96 |
| 7 | Perdagangan, Hotel & Restoran | 785.563,99 | 8,42 | 895.241,76 | 8,65 | 956.825,88 | 8,34 | 1.072.546,60 | 8,27 | 1.254.909,09 | 8,33 |
| 8 | Transportasi & Pergudangan | 161.245,27 | 1,73 | 168.089,96 | 1,62 | 177.362,91 | 1,55 | 206.156,00 | 1,59 | 243.605,88 | 1,62 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 1.639.315,60 | 17,58 | 1.860.229,34 | 17,97 | 2.142.102,52 | 18,68 | 2.577.088,49 | 19,88 | 3.262.806,39 | 21,66 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 585.819,50 | 6,28 | 639.999,41 | 6,18 | 683.311,05 | 5,96 | 723.962,95 | 5,59 | 807.985,97 | 5,36 |
| 11 | Jasa Keuangan | 312.319,43 | 3,35 | 346.081,71 | 3,34 | 408.854,08 | 3,56 | 488.922,84 | 3,77 | 572.852,35 | 3,80 |
| 12 | Real Estate | 537.964,14 | 5,77 | 583.042,59 | 5,63 | 623.914,31 | 5,44 | 701.607,10 | 5,41 | 814.474,92 | 5,41 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 95.733,21 | 1,03 | 100.334,75 | 0,97 | 106.803,37 | 0,93 | 120.495,97 | 0,93 | 140.205,36 | 0,93 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wjib | 720.188,79 | 7,72 | 920.901,40 | 8,89 | 925.485,89 | 8,07 | 941.194,21 | 7,26 | 1.091.878,88 | 7,25 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 154.807,48 | 1,66 | 173.014,51 | 1,67 | 180.844,78 | 1,58 | 221.703,9 | 1,71 | 260.497,71 | 1,73 |
| 16 | Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial | 201.317,58 | 2,16 | 222.589,11 | 2,15 | 242.851,67 | 2,12 | 287.533,40 | 2,22 | 337.380,83 | 2,24 |
| 17 | Jasa Lainnya | 185.909,28 | 1,99 | 204.090,43 | 1,97 | 220.887,43 | 1,93 | 252.560,48 | 1,95 | 293.491,07 | 1,95 |
|  | **PDRB** | **9.325.344,32** | **100,00** | **10.353.604,98** | **100,00** | **11.470.346,04** | **100,00** | **12.962.311,26** | **100,00** | **15.062.086,90** | **100,00** |

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan

PDRB Kabupaten Tabanan Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan terus mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2010-2014. PDRB Kabupaten Tabanan tahun 2014 atas dasar harga berlaku mencapaiRp.15.062.086,90 juta, sedangkan atas harga konstan mencapai 11.904.186,12 juta atau meningkat sebesar 730.977.53 juta. Hal ini menunjukan pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan tahun 2014 adalah sebesar 6,54 persen. Dalam periode 2010 – 2014 rata rata pertumbuhan PDRB mencapai 6,31 persen.

Dilihat dari struktur perekonomiannya, kontribusi sektor lapangan usaha tidak mengalami perubahan yang berarti. Kontribusi 2 sektor yaitu sektor pertanian dan sektor akomodasi dan makan minum masih mendominasi. Sektor pertanian menjadi penyumbang kontribusi terbesar karena potensi alam di Tabanan yang merupakan hamparan lahan pertanian yang luas. Sektor akomodasi dan makan minum menjadi pemyumbang kontribusi PDRB terbesar kedua karena selain perputaran produksi makanan dan minuman untuk kebutuhan masyarakat Tabanan, juga disebabkan adanya industri pariwisata di Kabupaten Tabanan yang banyak menyediakan akomodasi dan konsumsi pariwisata.

Sebagai penyumbang kontribusi PDRB Kabupaten Tabanan yang cukup besar, selama kurun waktu tahun 2010-2014, sektor akomodasi dan makan minum sumbangannya mengalami peningkatan. Namun hal ini tidak terjadi pada sektor pertanian yang justru mengalami penurunan kontribusi. Meskipun nilai tambah bruto dari sektor pertanian mengalami kenaikan dari Rp 2,33 trilyun di tahun 2010 menjadi Rp 3,33trilyun di tahun 2014, namun jika dilihat kontribusinya mengalami penurunan dari angka 24,95 persen menjadi 22,09 persen.

Penurunan kontribusi sektor pertanian ini harus diwaspadai karena ketahanan pangan Bali sangat tergantung dari eksistensi pertanian Kabupaten Tabanan. Selain sektor pertanian, beberapa sektor lainnya juga mengalami pertumbuhan negatif selama kurun waktu tahun 2010-2014 seperti sektor Industri Pengolahan, Pengadaan Air, Transportasi & Pergudangan, Jasa Perusahaan, dan Jasa Lainnya.

1. **PDRB Per Kapita**

PDRB per kapita merupakan suatu indikator yangdihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan atau diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah atau wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah atau wilayah makin sejahtera.

Tabel 2.5

PDRB Perkapita ADHB Tahun 2010 - 2014 di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Nilai PDRB ( Juta Rp) | 9.325.344,32 | 10.353.604,98 | 11.470.346,04 | 12.962.311,26 | 15.062.086,90 |
| Jumlah Penduduk (jiwa) | 422.300 | 425.100 | 427.800 | 430.600 | 433.300 |
| PDRB perkapita (Juta Rp/jiwa) | 22,08 | 24,36 | 26,81 | 30,10 | 34,76 |

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan

Tabel 2.6

PDRB Perkapita ADHK Tahun 2010 - 2014 di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Nilai PDRB ( Juta Rp) | 9.325.344,32 | 9.895.354,48 | 10.500.462,33 | 11.173.208,59 | 11.904.186,12 |
| Jumlah Penduduk (jiwa) | 422.300 | 425.100 | 427.800 | 430.600 | 433.300 |
| PDRB perkapita (Juta Rp/jiwa) | 22,08 | 23,28 | 24,55 | 25,95 | 27,47 |

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan

PDRB Perkapita Tabanan atas dasar harga berlaku ditahun 2014 tercatat sebesar Rp. 34,76 juta. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap penduduk di Tabanan menerima pendapatan sebesar Rp. 34,76 juta selama tahun 2014. Jumlah ini meningkat sebanyak Rp. 4,66 juta atau 15,48 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2010–2014, rata-rata pendapatan perkapita penduduk Tabanan mencapai Rp. 27,62 juta. Jika dilihat berdasarkan harga konstan, maka PDRB per kapita Tabanan yang terbentuk di Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 27,48 juta. Laju peningkatan PDRB perkapita Tabanan atas dasar harga konstan pada tahun 2014 meningkat sebesar 5,54 persen dari tahun sebelumnya.

1. **Indeks Gini/Koefiesien Gini**

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). *Gini ratio* Kabupaten Tabanan ditahun 2014 tercatat sebesar 0,4017, yang berarti terjadi tingkat ketimpangan sedang. Hal ini mengalami peningkatan sejak empat tahun terakhir masing-masing pada tahun 2011 sebesar 0,2652, tahun 2012 sebesar 0,2949, dan tahun 2013 sebesar 0,3399.

Tabel 2.7

Gini Ratio Tahun 2010 - 2014 di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **Tahun** | | | | |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1 | Gini Ratio | 0,2596 | 0,2652 | 0,2949 | 0,3399 | 0,4017 |

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan

1. **Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan menunjukan peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada kisaran 6 persen hingga 6,5 persen, namun peningkatan tersebut tidak diikuti dengan membaiknya distribusi pendapatan yang ditunjukan dengan semakin melebarnya gini rasio di Kabupaten Tabanan.

[Tabel 2.8](F:\\tabanankab.bps.go.id)

[Distribusi Pendapatan Penduduk dan Gini](F:\\tabanankab.bps.go.id) Ratio

di Kabupaten Tabanan[Tahun 2011](file:///F:\tabanankab.bps.go.id) –2014

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Distribusi PendapatanPenduduk (%)** | | | **Gini Ratio** |
| **40 persen rendah** | **40 persen sedang** | **20 persen tinggi** |
| 1 | 2011 | 23,73 | 38,96 | 37,31 | 0,2652 |
| 2 | 2012 | 22,10 | 38,29 | 39,61 | 0,2949 |
| 3 | 2013 | 18,67 | 39,86 | 41,47 | 0,3399 |
| 4 | 2014 | 16,21 | 35,67 | 48,11 | 0,4017 |

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan

* + 1. **Fokus Kesejahteraan Sosial**

1. **Pendidikan**
2. **Angka Melek Huruf (AMH)**

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Perkembangan AMH tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di Kabupaten Tabanan mengalami peningkatan bertahap. Pada tahun 2014 AMH Kabupaten Tabanan adalah sebesar 91,64 yang berarti proporsi penduduk usia 15 tahun keatas memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.

Tabel 2.9

Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010 - 2014

Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1 | Angka melek huruf | 89,62 | 90,82 | 90,86 | 91,64 | 91,64 |

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan

1. **Angka Partisipasi Murni**

APM adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Jika demikian maka sesungguhnya keberhasilan pelayanan pendidikan di suatu wilayah/negara dilihat dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM). APM SD/MI di Kabupaten Tabanan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,28 dari 89,03 menjadi 89,31 yang berarti sebesar 89,31 anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Berbeda halnya dengan APM SD, APM SMP/MTs dan SMA/SMK/MA mengalami penurunan sebesar masing-masing 6,69 dan 1,52.

Tabel 2.10

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)

Tahun 2012- 2014 di Kabupaten Tabanan

| **NO** | **Jenjang Pendidikan** | **2012** | **2013** | **2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APM SD/MI | 91,06 | 89,03 | 89,31 |
| 2. | APM SMP/MTs | 75,07 | 85,24 | 78,75 |
| 3. | APM SMA/MA/SMK | 63,28 | 81,17 | 79,65 |

Sumber : BPS Kab. Tabanan

1. **Angka Partisipasi Kasar (APK)**

APK adalah proporsi anak sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. APK yang tinggi tentu menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat menunjukkan bahwa wilayah/negara tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK Kabupaten Tabanan menunjukkan nilai yang tinggi sebesar 98,93 untuk SD/MI, 102,97 untuk SD/MTs dan 101,18 untuk SMA/SMK/MA. Terdapat dua nilai untuk tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang melebihi 100 yang diakibatkan adanya siswa dari luar Tabanan yang bersekolah di Kabupaten Tabanan.

Tabel 2.11

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar(APK)

Tahun 2010 - 2014 di Kabupaten Tabanan

| **NO** | **Jenjang Pendidikan** | **2012** | **2013** | **2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APK SD/MI | 98,87 | 105,47 | 98,93 |
| 2. | APK SMP/MTs | 95,73 | 92,46 | 102,97 |
| 3. | APK SMA/MA/SMK | 86,47 | 105,14 | 101,18 |

Sumber : BPS Kab. Tabanan

1. **Kesehatan** 
   1. **Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)**

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKHB Kabupaten Tabanan mengalami penurunan sejak tahun 2010 hingga 2014 yaitu sebesar 995 pada tahun 2010 dengan AKB sebesar 5 dan 988 pada tahun 2014 dengan AKB sebesar 12. Hal ini berarti terjadi peningkatan angka kematian bayi sejak tahun 2010 hingga 2014.

Tabel 2.12

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Tahun 2010 - 2014

di Kabupaten Tabanan

| **No** | **Kecamatan** | **2010** | | **2011** | | **2012** | | **2013** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKB** | **AKHB** | **AKB** | **AKHB** | **AKB** | **AKHB** | **AKB** | **AKHB** | **AKB** | **AKHB** |
| 1 | Tabanan | 6 | 994 | 12 | 988 | 4 | 996 | 15 | 985 | 15 | 985 |
| 2 | Kerambitan | 7 | 993 | 17 | 983 | 19 | 981 | 11 | 989 | 14 | 986 |
| 3 | Selemadeg | 11 | 989 | 16 | 984 | 9 | 991 | 53 | 947 | 9 | 991 |
| 4 | Selemadeg Barat | 4 | 996 | 5 | 995 | 19 | 981 | 9 | 991 | 5 | 995 |
| 5 | Selemadeg Timur | 8 | 992 | 17 | 983 | 20 | 980 | 16 | 984 | 17 | 983 |
| 6 | Pupuan | 2 | 998 | 0 | 1000 | 2 | 998 | 9 | 991 | 19 | 981 |
| 7 | Penebel | 4 | 996 | 10 | 990 | 10 | 990 | 18 | 982 | 9 | 991 |
| 8 | Marga | 11 | 989 | 9 | 991 | 4 | 996 | 7 | 993 | 15 | 985 |
| 9 | Baturiti | 3 | 997 | 3 | 997 | 8 | 992 | 8 | 992 | 8 | 992 |
| 10 | Kediri | 5 | 995 | 10 | 990 | 5 | 995 | 20 | 980 | 9 | 991 |
|  | **Kabupaten Tabanan** | **5** | **995** | **9** | **991** | **8** | **992** | **15** | **985** | **12** | **988** |

Sumber : BPS Kab. Tabanan

Angka harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tabanan tahun 2011 hingga 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 72,02 pada tahun 2010 hingga 72,64 pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabanan.

Tabel 2.13

Angka Harapan Hidup Tahun 2010 - 2014

di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Hasil Sensus Penduduk** | | | | |
| 1 | **Tahun 2010** | **Tahun 2011** | **Tahun 2012** | **Tahun 2013** | **Tahun 2014** |
| 2 | 72,02 | 72,18 | 72,35 | 72,52 | 72,64 |

Sumber : BPS Kab. Tabanan

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita, Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO/NCHS. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Tabanan menurun 0,13 dari tahun sebelumnya sebesar 0,15 pada tahun 2013 menjadi 0,02 pada tahun 0,02. Hal ini menunjukkan terjadi perbaikan pelayanan kesehatan tentang gizi balita.

Tabel 2.14

Persentase Balita Gizi Buruk 2010 - 2014

di Kabupaten Tabanan

| **No** | **Kecamatan** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tabanan | 0 | 0,41 | 0 | 0,19 | 0 |
| 2 | Kerambitan | 0,12 | 0 | 0,8 | 0,32 | 0,10 |
| 3 | Selemadeg | 0 | 0 | 1,10 | 0 | 0 |
| 4 | Selemadeg Barat | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0,09 |
| 5 | Selemadeg Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pupuan | 0 | 0 | 4,69 | 0,31 | 0 |
| 7 | Penebel | 0,18 | 0 | 0,36 | 0,6 | 0,04 |
| 8 | Marga | 0,15 | 0,11 | 0 | 0,09 | 0 |
| 9 | Baturiti | 0 | 0 | 1,21 | 0,4 | 0,03 |
| 10 | Kediri | 0,12 | 0 | 0 | 0,18 | 0,02 |
|  | **Kabupaten Tabanan** | **0,04** | **0,01** | **0,98** | **0,15** | **0,02** |

Sumber : BPS Kab. Tabanan

**2.3 Aspek PELAYANAN UMUM**

**2.3.1 Fokus Urusan Wajibyang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

1. **Pendidikan**

Kondisi pelayanan pendidikan di Kabupaten Tabanan akan dilihat dari pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS), rasio ketersediaan sekolah per usia sekolah, dan rasio murid terhadap guru.

1. **Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

APS adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian, meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APS Kabupaten Tabanan telah menunjukkan angka yang cukup tinggi, rata-rata lebih dari 99 persen untuk tingkat SD/MI, dan 93 persen untuk tingkat SMP/MTs (Tabel 2.15).

Tabel 2.15

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Tahun 2010 - 2014 di Kabupaten Tabanan

| **NO** | **Jenjang Pendidikan** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APS SD/MI | 99,12 | 99,12 | 99,34 | 99,47 | 99,17 |
| 2. | APS SMP/MTs | 91,68 | 91,68 | 92,25 | 94,95 | 96,70 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan,2014

1. **Rasio Ketersediaan Sekolah**

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan seluruh sekolah yang ada di suatu daerah untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan SD sederajat per 10.000 penduduk usia sekolah (7-12 tahun) di Kabupaten Tabanan dalam periode tahun 2010-2014 rata-rata adalah 95 dan rasio ketersediaan sekolah SLTP sederajat (usia 13-15 tahun) rata-rata adalah 24.

Ketersediaan sekolah telah dipandang cukup, baik pada jenjang SD maupun SMP adalah 52 per 10.000 penduduk. Mencermati kondisi di Kabupaten Tabanan nampak terjadi ketimpangan pemenuhan yang cukup ekstrim antara kersediaan SD dan SMP-sederajat. Pada jenjang pendidikan SD-sederajat terjadi kelebihan gedung sedangkan pada jenjang SMP-sederajat terjadi kekurangan gedung. Bertolak dari kondisi ini, kebijakan ke depan perlu diarahkan pada *regrouping* SD dan peningkatan jumlah gedung SMP.

Tabel 2.16

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Tahun 2010 - 2014 di Kabupaten Tabanan

| **NO** | **Jenjang Pendidikan** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SD/MI |  | | | | |
| 1.1. | Jumlah gedung sekolah | 330 | 333 | 333 | 331 | 329 |
| 1.2. | jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun | 35.625 | 32.259 | 34.325 | 34.610 | 37.885 |
| 1.3. | Rasio | 92,63 | 103,23 | 97,01 | 95,64 | 86,84 |
| 2 | SMP/MTs |  | | | | |
| 2.1. | Jumlah gedung sekolah | 42 | 41 | 42 | 42 | 43 |
| 2.2. | jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | 13.506 | 17.983 | 18.389 | 18.297 | 19.172 |
| 2.3. | Rasio | 31,10 | 22,80 | 22,84 | 22,95 | 22,43 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan,2014

Sama halnya dengan SD/MA, rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK mengalami penurunan. Penurunan ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu meningkatnya jumlah sekolah SMA/MA/MK atau tingginya angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs.

1. **Rasio Ketersediaan Guru**

Berkenaan dengan ketersediaan guru, indikator yang digunakan adalah rasio urid:guru. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dan jumlah ideal murid untuk satu guru. Mutu pengajaran sangat tergantung dari keberadaan tenaga pengajar. Pada jenjang pendidikan SD/MI, rasio murid : guru telah menunjukkan angka yang cukup ideal, yaitu mendekati angka 11. Angka ini dapat diinterpretasikan, rata-rata 1 orang guru melayani (mengajar) 11 orang murid. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs kondisinya tidak jauh berbeda dengan jenjang SD/MI (Tabel 2.17).

Tabel 2.17

Rasio Murid : Guru pada Jenjang Pendidikan Dasar

Tahun 2010 – 2014di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Jenjang Pendidikan** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1 | SD/MI |  | | | | |
| 1.1 | Jumlah Murid | 35.969 | 39.442 | 38.911 | 38.371 | 37.265 |
| 1.2 | Jumlah Guru | 3.383 | 6.198 | 3.263 | 3.555 | 3.419 |
| 1.3 | Rasio | 10,63 | 6,36 | 11,92 | 10,79 | 10,90 |
| 2 | SMP/MTs |  | | | | |
| 2.1 | Jumlah Murid | 18.232 | 18.549 | 19.052 | 19.345 | 19.122 |
| 2.2 | Jumlah Guru | 1.644 | 1.635 | 1.595 | 1.750 | 1.689 |
| 2.3 | Rasio | 11,09 | 11,34 | 11,94 | 11,05 | 11,32 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan,2014

Walaupun rasio murid : guru secara makro telah memenuhi standar ideal, belum berarti kondisi yang ideal tersebut telah terpenuhi secara merata di setiap sekolah. Demikian pula kondisi rasio murid : guru tidak merata di setiap wilayah kecamatan. Secara faktual, terdapat beberapa sekolah yang rasio murid:guru-nya tinggi terutama terjadi pada sekolah-sekolah favorit di perkotaan, sebaliknya ada sekolah-sekolah yang kekurangan murid atau guru. Pada jenjang Sekolah Dasar sebetulnya dibutuhkan penggabungan beberapa sekolah (regrouping) untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proses pembelajaran.Pada jenjang SMP, permasalahan bukan pada rasio murid : guru, tapi ketidakmerataan guru untuk mata pelajaran tertentu.

1. **Pencapaian SPM Bidang Pendidikan**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dasar menetapkan 48 (empat puluh delapan) indikator dan target kinerja (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang SPM bidang Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota). Pencapaian indikator-indikator SPM tersebut sampai tahun 2015 di Kabupaten Tabanan tertuang dalam Tabel 2.18 di bawah ini.

Tabel 2.18

Pencapaian Indikator SPM Bidang Pendidikan Dasar

Kabupaten Tabanan sampai Tahun 2015

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| No | Indikator |  | Target | Batas Waktu Pencapaian Target | Realisasi Tahun  2015 |
|  |
| 1 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD-MI-Paket A (%) |  | 92.40 | 2021 | 92.09 |
| 2 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP-MTs-Paket B (%) |  | 77.50 | 2021 | 77.05 |
| 3 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MI-Paket A |  | 106.20 | 2021 | 105.08 |
| 4 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP-MTs-Paket B |  | 105.80 | 2021 | 104.76 |
| 5 | APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |  | 77.45 | 2021 | 77.26 |
| 6 | Persentase satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil | SD | 100.00 | 2021 | 100 |
|  | SMP | 100.00 | 2021 | 100 |
| 7 | Persentase sekolah yang jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. | SD | 100.00 | 2021 | 91,97 |
| 8 | Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis | SMP | 100.00 | 2021 | 89,74 |
| 9 | Persentase sekolah SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik. | | 100.00 | 2021 | 38.46 |
| 10 | Persentase SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiapSMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru | SD | 100.00 | 2021 | 52,46 |
| SMP | 100.00 | 2021 | 64,10 |
| 11 | Persentase SD yang tersedia 1 (satu) orang untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan | | 100.00 | 2021 | 98.76 |
| 12 | Persentase SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran | | 100.00 | 2021 | 51.28 |
| 13 | Persentase SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik | | 100.00 | 2021 | 100.00 |
| 14 | Persentase SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35%) dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikasi pendidik, untuk daerah khusus masingmasing sebanyak 40% dan 20% | | 100.00 | 2021 | 100.00 |
| 15 | Persentase SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S- 1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Inggris dan Bahasa | | 100.00 | 2021 | 100.00 |
| 16 | Persentase kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik | | 100.00 | 2021 | 100.00 |
| 17 | Persentase kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik | | 100.00 | 2021 | 97.44 |
| 18 | Persentase pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik | | 100.00 | 2021 | 100.00 |
| 19 | Kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif | | 100.00 | 2021 | 100.00 |
| 20 | Persentase Kunjungan pengawas ke satuan pendidikadilakukan satu kali setiap | SD | 100.00 | 2021 | 100 |
| 21 | bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan | SMP | 100.00 | 2021 | 100 |
| 22 | Persentase SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik | | 100.00 | 2021 | 46.30 |
| 23 | Persentase SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik | | 100.00 | 2021 | 51.28 |
| 24 | Persentase SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA | | 100.00 | 2021 | 46.30 |
| 25 | Prosentase SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,  dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi | SD | 100.00 | 2021 | 61,73 |
| SMP | 100.00 | 2021 | 100 |
| 26 | Prosentase guru tetap bekerja 37,5 jam perminggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran,  melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan | SD | 100.00 | 2021 | 100 |
| SMP | 100.00 | 2021 | 100 |
| 27 | Persentase Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut:  a) Kelas I-II : 18 jam per minggu;  b) Kelas III : 24 jam per minggu;  c) Kelas IV-VI : 27 jam per minggu;  d) Kelas VII-IX : 27 jam per minggu; | SD | 100.00 | 2021 | 100 |
|  |  |  |  |
| SMP | 100.00 | 2021 | 100 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 28 | Persentase Satuan pendidikan menerapkan kurikulum | SD | 100.00 | 2021 | 100 |
| 29 | Tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku | SMP | 100.00 | 2021 | 100 |
| 30 | Persentase guru menerapkan rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya | SD | 100.00 | 2021 | 100 |
| SMP | 100.00 | 2021 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
| 31 | Persentase guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk  Membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik | SD | 100.00 | 2021 | 100 |
| SMP | 100.00 | 2021 | 100 |
| 32 | Persentase Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester | SD | 100.00 | 2021 | 100 |
| SMP | 100.00 | 2021 | 100 |
| 40 | Persentase guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik | SD | 100.00 | 2021 | 100 |
| 41 | Kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik | SMP | 100.00 | 2021 | 100 |
| 42 | Persentase Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) | SD | 100.00 | 2021 | 100 |
| 43 | kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ | SMP | 100.00 | 2021 | 100 |
| 44 | Persentase setiap satuan pendidikan | SD | 100.00 | 2021 | 99.08 |
| 45 | menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) | SMP | 100.00 | 2021 | 94.74 |
| 46 | Persentase Sekolah yang melaksanakan MBS |  | 100.00 | 2021 | 95.93 |
| 47 | persentase kelulusan UKG dengan kategori “baik” |  | 78.62 | 2021 | 46.62 |
| 48 | Persentase Lembaga Pendidikan Masyarakat Terakreditasi "A" |  | 5.43 | 2021 | 0 |

Sumber : BPS Kab. Tabanan

Dari 48 (empat puluh delapan) indikator SPM tersebut di atas, 40 indikator telah mencapai target nasional, sedangkan 8 (delapan) indikator lainnya masih di bawah target SPM. Beberapa kondisi yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. masih adanya beberapa sekolah SMP yang belum mempunyai laboratorium IPA dan alat praktek IPA yang belum sesuai standar;
2. masih adanya beberapa sekolah yang memanfaatkan ruang kelas sebagai ruang guru karena tidak adanya lahan untuk membangun ruang guru;
3. kurangnya tenaga pendidik terutama guru TIK; dan
4. terbatasnya kemampuan pemerintah dalam penyediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya. Namun kondisi ini optimis dapat dipenuhi dalam dua tahun ke depan melalui dana BOS.
5. **Kesehatan**

Kondisi pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabanan akan dikaji dari beberapa indikator, meliputi: angka harapan hidup;rasio jumlah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) terhadap jumlah Balita;rasiojumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu(Pustu) terhadap jumlah penduduk;rasio jumlah Rumah Sakit per jumlah penduduk; dan rasio jumlah tenaga medis terhadap jumlah penduduk.

1. **Angka Harapan Hidup (AHH)**

Angka harapan hidup (AHH) merupakan indikator penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. AHH pada suatu umur X adalah rata-rata tahun hidup yang masih dijalani seseorang yang telah berhasil mencapai umur X pada tahun tertentu. AHH penduduk Kabupaten Tabanan terus mengalami peningkatan.Tahun 2010 AHH tercatat sebesar 70,02 meningkat menjadi 72,64 pada tahun 2014. Jika dibandingkan dengan Provinsi Bali, AHH Kabupaten Tabanan selama kurun waktu tersebut sudah berada di atas rata-rata (Tabel 2.22)

Melihat perkembangan angka harapan hidup Tabanan dan Provinsi Bali dapat dimaknai bahwa tingkat kesehatan masyarakat Tabanan secara umum lebih baik dibandingkan dengan rata-rata penduduk Bali.Hal ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya akses, mutu pelayanan, fasilitas pelayanan serta meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku kesehatan masyarakat.Namun demikian, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Bali maka AHH Kabupaten Tabanan tahun 2014 masih berada di posisi ke-4 terbaik di bawah Kabupaten Badung (74,31), Denpasar (73,91), dan Gianyar (72,78).

Tabel 2.19

Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali Tahun 2010 - 2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kabupaten / Kota** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1 | Kabupaten Jembrana | 70,75 | 70,92 | 71,09 | 71,26 | 71,39 |
| 2 | Kabupaten Tabanan | 72,02 | 72,18 | 72,35 | 72,52 | 72,64 |
| 3 | Kabupaten Badung | 73,77 | 73,91 | 74,05 | 74,19 | 74,30 |
| 4 | Kabupaten Gianyar | 72,31 | 72,43 | 72,57 | 72,71 | 72,78 |
| 5 | Kabupaten Kelungkung | 69,26 | 69,45 | 69,66 | 69,84 | 69,91 |
| 6 | Kabupaten Bangli | 68,80 | 68,98 | 69,18 | 69,36 | 69,44 |
| 7 | Kabupaten Karangasem | 68,56 | 68,76 | 68,96 | 69,12 | 69,18 |
| 8 | Kabupaten Buleleng | 70,06 | 70,23 | 70,41 | 70,58 | 70,71 |
| 9 | Kota Denpasar | 73,24 | 73,34 | 73,44 | 73,56 | 73,71 |
| 10 | Provinsi Bali | 70,61 | 70,78 | 70,94 | 71,11 | 71,20 |

Sumber: BPS Provinsi Bali

1. **Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita**

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anakusia dini merupakan bagian dari upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar, meliputi: peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat. Upaya ini dimaksudkan untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, khususnya berkenaan dengan upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.20

Jumlah Posyandu dan Balita

Menurut Kecamatan Tahun 2013 di Kabupaten Tabanan

| **NO** | **Kecamatan** | **Jumlah Posyandu** | **Jumlah Balita** | **Rasio Posyandu per 100 Balita** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5=3/4 x 100)* |
| 1 | Tabanan | 86 | 4.376 | 1,97 |
| 2 | Kerambitan | 90 | 2.616 | 3,44 |
| 3 | Selemadeg | 60 | 1.437 | 4,18 |
| 4 | Selemadeg Barat | 50 | 1.454 | 3,44 |
| 5 | Selemadeg Timur | 93 | 1.584 | 5,87 |
| 6 | Pupuan | 72 | 2.792 | 2,58 |
| 7 | Penebel | 130 | 3.307 | 3,93 |
| 8 | Marga | 71 | 2.862 | 2,48 |
| 9 | Baturiti | 65 | 3.400 | 1,91 |
| 10 | Kediri | 111 | 5.103 | 2,18 |
|  | Jumlah | 828 | 28.931 | 2,86 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan,2014

Tahun 2014, jumlah Posyandu di Kabupaten Tabanan tercatat sebanyak 828 buah dan jumlah Balita sebanyak 27.600 jiwamaka rasio Posyandu per 100 Balita mencapai 3,00. Hal ini berarti bahwa dari 100 Balita yang ada di Kabupaten Tabanan rata-rata dilayani oleh 3 Posyandu.

Tabel 2.21

Jumlah Posyandu dan BalitaTahun 2010 – 2014

di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1. | Jumlah Posyandu | 821 | 821 | 828 | 828 | 828 |
| 2. | Jumlah Balita | 24.157 | 28.340 | 28.834 | 28.931 | 27.600 |
| 3. | Rasio per 100 Balita | 3,40 | 2,90 | 2,87 | 2,86 | 3,00 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan,2014

1. **Rasio Puskesmasdan Puskesmas Pembantu**

Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Tabanan saat ini masing-masing berjumlah 20 dan 78 unit. Jumlah ini belum mengalami perkembangan perkembangan sejak lebih dari 5 tahun yang lalu. Bila dibandingkan dengan perkembangan jumlah penduduk, tidak terjadi perubahan rasio yang cukup signifikan.

Tahun 2014, rasio jumlah Puskesmas per 1000 penduduk adalah sebesar 0,046 dan rasio jumlah Pustu per 1000 penduduk adalah 0,18. Angka ini dapat diterjemahkan, bahwa 100.000 jiwa penduduk rata-rata dilayani oleh hampir 5 Puskesmas dan 18 Pustu(Tabel 2.22). Kondisi ini dapat diinterpretasikan, secara kuantitas prasarana kesehatan dasar di Kabupaten Tabanan keberadaannya telah cukup memadai. Oleh karenanya, penambahan jumlah Puskesmas dan Pustu tidak dibutuhkan lagi, namun hal yang paling dibutuhkan adalah peningkatan kualitas prasarana dan prasarana serta peningkatan mutu dan integritas SDM.

Bila ditinjau sebaran Puskesmas dan Pustu per kecamatan,rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk tertinggi ditemukan di Kecamatan Selemadeg Timur (0,094 per 1.000 jiwa) sedangkan terendah adalah di Kecamatan Kediri (0,033 per 1.000 jiwa) (Tabel 2.23). Walaupun rasio terendah ada di Kecamatan Kediri, tidak berarti akses pelayanan kesehatan di daerah ini lebih rendah dibanding daerah lain karena pusat-pusat pelayanan kesehatan lainnya seperti rumah sakit, dokter praktek, dan lain-lain keberadaannya cukup banyak dan terjangkau.

Tabel 2.22

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu

Tahun 2010 - 2014 di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1. | Jumlah Puskesmas | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Jumlah Pustu | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 3. | Jumlah Penduduk | 422.300 | 425.100 | 427.800 | 430.600 | 433.300 |
| 4. | Rasio Puskesmas per 1000 penduduk | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,046 | 0,046 |
| 5. | Rasio Pustu per 1.000 penduduk | 0,185 | 0,183 | 0,182 | 0,181 | 0,180 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan,2014

Tabel 2.23

Rasio Puskesmas dan Pustu per 1000 penduduk

Menurut Kecamatan Tahun 2014 di Kabupaten Tabanan

| **NO** | **Kecamatan** | **Jumlah Penduduk** | **Puskesmas** | | **Pustu** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jumlah** | **Rasio** | **Jumlah** | **Rasio** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) | (8) | (9=8/3) |
| 1 | Tabanan | 72.860 | 3 | 0,041 | 5 | 0,069 |
| 2 | Kerambitan | 38.520 | 2 | 0,052 | 9 | 0,234 |
| 3 | Selemadeg | 19.520 | 1 | 0,051 | 4 | 0,205 |
| 4 | Selemadeg Barat | 19.200 | 1 | 0,052 | 7 | 0,365 |
| 5 | Selemadeg Timur | 21.380 | 2 | 0,094 | 7 | 0,327 |
| 6 | Pupuan | 38.830 | 2 | 0,052 | 10 | 0,258 |
| 7 | Penebel | 44.520 | 2 | 0,045 | 13 | 0,292 |
| 8 | Marga | 41.280 | 2 | 0,048 | 6 | 0,145 |
| 9 | Baturiti | 47.610 | 2 | 0,042 | 9 | 0,189 |
| 10 | Kediri | 89.580 | 3 | 0,033 | 8 | 0,089 |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan,2014

1. **Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk**

Rumah sakit merupakan salah satu prasarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Tabanan pada tahun 2014 sebanyak 7 unit, terdiri dari rumah sakit umum sebanyak 1 unit dan rumah sakit swasta sebanyak 6 unit. Cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Tabanan tahun 2014 mencapai 0,016. Hal ini berarti bahwa untuk 100.000 jumlah penduduk Kabupaten Tabanan dilayani oleh sebanyak1-2 rumah sakit.

Tabel 2.24

Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk

Tahun 2010 s.d. 2014di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1. | Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Jumlah Rumah Sakit Daerah (Swasta) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 3. | Jumlah seluruh Rumah Sakit | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 4. | Jumlah Penduduk | 422.300 | 425.100 | 427.800 | 430.600 | 433.300 |
| 5. | Rasio | 0,012 | 0,012 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan,2014

Di samping faktor jumlah dan sebaran, akses pelayanan rumah sakit juga sangat dipengaruhi oleh jumlah ketersediaan bed (tempat tidur) di rumah sakit. Indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit adalah BOR (*Bed Occupancy Ratio*). BOR dihitung dengan rumus:

**Jumlah hari perawatan rumah sakit**

**X 100%**

**Jumlah tempat tidur x jumlah hari dalam satu periode**

Nilai BOR yang ideal adalah 60 – 85 % (Depkes RI, 2005)

Kondisi BOR rumah sakit yang ada di Tabanan dapat dilihat pada Tabel 2.25 di bawah ini

Tabel 2.25.

Kondisi BOR (*Bed Occupancy Ratio*)Rumah Sakit di Tabanan Tahun 2011 - 2015

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **KELAS KAMAR** | **2011 (%)** | **2012 (%)** | **2013 (%)** | **2014 (%)** | **2015 (%)** |
| 1 | Utama | 92.26 | 83.49 | 80.27 | 79.25 | 74.32 |
| 2 | Madya Tama plus | 82.55 | 85.85 | 79.75 | 81.14 | 89.27 |
| 3 | Madya Tama | 84.38 | 76.51 | 70.41 | 76.48 | 78.56 |
| 4 | Pratama | 97.23 | 80.17 | 58.44 | 73.86 | 69.69 |
| 5 | Kelas I | 56.26 | 60.20 | 58.63 | 68.12 | 86.04 |
| 6 | Kelas II | 11.13 | 10.72 | 8.13 | 12.24 | 19.89 |
| 7 | Kelas III | 130.66 | 138.33 | 124.83 | 125.00 | 134.67 |
| 8 | Rata-rata | 88,71 | 89,74 | 86,67 | 84,38 | 89,08 |

Sumber: Dinas Kesehatan dan Badan Rumah Sakit Tabanan, 2015

Dari Tabel 2.25 di atas terlihat bahwa BOR rumah sakit rata-rata di atas 85 persen, melebihi angka normal. Hal ini berarti ketersediaan kamar rumah sakit untuk mampu melayani pasien sesuai standar pelayanan belum tercukupi. Kondisi yang sangat ekstrim terjadi pada kamar kelas III, angka BOR kelas III ternyata melebihi 100 %. Artinya, cukup banyak pasien kelas III dialihkan ke kamar kelas lain (kelas II) namun standar pelayanan yang diberikan adalah standar kelas III.Oleh karenanya, penambahan kamar rumah sakit terutama untuk pelayanan kelas III merupakan prioritas yang mesti digarap pada tahun-tahun ke depan.

1. **Rasio Tenaga Medis per Jumlah Penduduk**

Tuntutan masyarakat pada mutu pelayanan semakin meningkat sehingga dibutuhkan jumlah tenaga medis yang memadai, terampil dan siap pakai.Tenaga medis yang dimaksud adalah dokter umum, dokter gigi,dan dokter spesialis sedangkan tenaga keperawatan mencakupbidan dan perawat.Jumlah tenaga medis per 1.000 penduduk di Kabupaten Tabanan pada tahun 2014 tercatat sebesar 0,515 atau 5 tenaga medis per 10.000 penduduk(Tabel 2.26). Khusus untuk tenaga medis di Puskesmas (tidak termasuk) tenaga medis yang ada di rumah sakit), kondisinya cukup beragam di sepuluh kecamatan. Kecamatan Kediri dan Penebel rasio tenaga medis per 1000 penduduk relatif paling kecil (kurang dari 0,2), sedangkan Kecamatan Selemadeg Timur dan Tabanan relatif besar (lebih dari 0,3)(Tabel 2.27). Pemerataan sebaran tenaga medis harus menjadi perhatian semua pihak untuk mampu mewujudkan pelayanan kesehataan yang maksimal bagi masyarakat.

Tabel 2.26

Jumlah Tenaga Medis Tahun 2010 - 2014

di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1 | Jumlah Tenaga Medis (dokter spesialis, Umum, Gigi) | 173 | 186 | 208 | 235 | 223 |
| 2 | Jumlah Penduduk | 422.300 | 425.100 | 427.800 | 430.600 | 433.300 |
| 3 | Rasio (per 1.000 pddk) | 0,410 | 0,438 | 0,486 | 0,546 | 0,515 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan,2014

Tabel 2.27

Jumlah Tenaga Medis per 1.000 Penduduk di Puskesmas

Menurut Kecamatan Tahun 2014 di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kecamatan** | **Jumlah Penduduk** | **Jumlah Tenaga Medis (Dokter spesialis, Umum, Gigi)** | **Rasio** |
| 1 | Tabanan | 72.860 | 26 | 0,357 |
| 2 | Kerambitan | 38.520 | 8 | 0,208 |
| 3 | Selemadeg | 19.520 | 5 | 0,256 |
| 4 | Selemadeg Barat | 19.200 | 5 | 0,260 |
| 5 | Selemadeg Timur | 21.380 | 7 | 0,327 |
| 6 | Pupuan | 38.830 | 11 | 0,283 |
| 7 | Penebel | 44.520 | 8 | 0,180 |
| 8 | Marga | 41.280 | 9 | 0,218 |
| 9 | Baturiti | 47.610 | 13 | 0,273 |
| 10 | Kediri | 89.580 | 15 | 0,167 |
|  | Jumlah | 433.300 | 107 | 0,247 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan,2014

Di samping tenaga medis, pelayanan kesehatan juga didukung oleh tenaga para medis. Tenaga para medis terdiri dari bidan dan perawat Keberadaan tenaga para medis di Rumah Sakit, Puskesmas, dan pusat kesehatan lainnya di Kabupaten Tabanan telah mencapai rasio 1,576 per 1000 penduduk (Tabel 2.27). Setiap 1000 penduduk hampir telah mampu dilayani oleh 2 orang tenaga para medis. Jumlah ini sudah dapat dinyatakan cukup baik. Ditinjau dari sisi persebarannya, tercatat Kecamatan Selemadeg memiliki rasio tertinggi (2,715 per 1000 penduduk), sedangkan terendah terdapat di Kecamatan Kediri (1,027 per 1000 penduduk). Selengkapnya dapat dilihat Tabel 2.28 dan Tabel 2.29. Di samping dari sisi jumlah tenaga kesehatan, akses pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh faktor geografis serta sarana dan prasarana wilayah yang kondisinya belum merata di seluruh wilayah.

Tabel 2.28

Jumlah Tenaga Para Medis pada Puskesmas

Tahun 2010 s.d. 2014di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1 | Jumlah Tenaga Para Medis | 434 | 571 | 561 | 683 | 683 |
| 2 | Jumlah Penduduk | 422.300 | 425.100 | 427.800 | 430.600 | 433.300 |
| 3 | Rasio | 1,028 | 1,343 | 1,311 | 1,586 | 1,576 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan,2014

Tabel 2.29

Jumlah Tenaga Para Medis Menurut Kecamatan

Tahun2014di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kecamatan** | **Jumlah Penduduk** | **Jumlah Tenaga Para Medis** | **Rasio** |
| 1 | Tabanan | 72.860 | 111 | 1,523 |
| 2 | Kerambitan | 38.520 | 66 | 1,713 |
| 3 | Selemadeg | 19.520 | 53 | 2,715 |
| 4 | Selemadeg Barat | 19.200 | 37 | 1,927 |
| 5 | Selemadeg Timur | 21.380 | 53 | 2,479 |
| 6 | Pupuan | 38.830 | 70 | 1,803 |
| 7 | Penebel | 44.520 | 67 | 1,505 |
| 8 | Marga | 41.280 | 65 | 1,575 |
| 9 | Baturiti | 47.610 | 69 | 1,449 |
| 10 | Kediri | 89.580 | 92 | 1,027 |
|  | Jumlah |  | 683 | 1,576 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan,2014

1. **Pencapaian SPM Kesehatan**

Terdapatdelapanbelas indikator StandarPelayanan Minimal (SPM) BidangKesehatanyang mestidilaksanakandaerahmengacupadaPermenkes RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/ 2008. Berdasarkan target yang ditetapkansecara nasional, secaraumumcapaian SPM bidangkesehatanrelatif sudahcukupbaik(Tabel 2.33), hanyapadabeberapa SPM saja yang capaiannyatidaksesuaidengan target yang telahditetapkan. Beberapa SPM yang tidakmencapai target antara lain:

1. Penemuanpenderita pneumonia Balitadari target 100% tercapai 67,26%.Halinidisebabkankarena target yang ditetapkanberdasarkanprevalensi nasionaltidakmencerminkanprevalensi kabupaten. Prevalensi pneumonia Balita Kabupaten Tabanan tidak sebesar prevalensi yang titetapkan secara nasional
2. 2). Penemuanpasienbaru TB BTA positifcapaiannyahanya 33,81% daritaget 100%. Kasusinisamadengan yang terjadipadapneumonia Balita.
3. Cakupanpelayanankesehatandasarmasyarakatmiskinrealisasinya 58,10% dari target 100%. Tidaktercapainya SPM inikarena tidak semua masyarakat miskin membutuhkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara umum dibutuhkan saat mereka menderita sakit.
4. Cakupanpelayanankesehatandasarpasienmasyarakatmiskinrealisasinya 48,71% dari target 100%. Penyebabnya adanya kekeliruan asumsi dalam SPM, yaitusemuamasyarakatmiskin yang sakitharusdirujuk, padahaltidaksemuapenyakit yang dideritaolehmasyarakatmiskin membutuhkan rujukan, melainkan sebagian dapat ditangani di tingkat pelayanan pertama (Puskesmas).

Tabel 2.30

Pencapaian SPM Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2015

(Permenkes RI No. 741/MENKES/PER/VII/2008)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |  |  |  |  |
| NO | INDIKATOR SPM | | | TARGET | PENCAPAIAN | | |
|  |  | |  | 2015 | HASIL | % | |
| **A** | **Pelayanan Kesehatan Dasar** | | |  |  |  | |
|  | 1 | Cakupan kunjungan Bumil (K4) | | 95 | 5.162 | 96,49 | |
|  | 2 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | | 80 | 1009 | 94,21 | |
|  | 3 | Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan | | 95 | 5.067 | 94,71 | |
|  | 4 | Cakupan pelayanan nifas | | 90 | 5.037 | 98,69 | |
|  | 5 | Cakupan neonatus dengan komplikasi yg ditangani | | 80 | 640 | 87,55 | |
|  | 6 | Cakupan kunjungan bayi | | 90 | 4.586 | 94,32 | |
|  | 7 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | | 100 | 133 | 100 | |
|  | 8 | Cakupan pelayanan anak balita | | 90 | 17.728 | 90,97 | |
|  | 9 | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin | | 100 | 10 | 100 | |
|  | 10 | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan | | 100 | 15 | 100 | |
|  | 11 | Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat | | 100 | 6.042 | 100 | |
|  | 12 | Cakupan peserta KB aktif | | 70 | 65.847 | 79,92 | |
|  | 13 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit | |  |  |  | |
|  | a | Acute Placid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun | | ≥ 2/100.000 | 8 | 8,7/100000 | |
|  | b | Penemuan penderita pneumonia balita | | 100 | 452 | 67,26 | |
|  | c | Penemuan pasien baru TB BTA positif | | 100 | 94 | 33,81 | |
|  | d | Penderita DBD yang ditangani | | 100 | 846 | 352,87 | |
|  | e | Penemuan penderita diare | | 100 | 9.073 | 97,26 | |
|  | 14 | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | | 100 | 60.399 | 58,10 | |
|  |  |  | |  |  |  | |
| **B** | **Pelayanan Kesehatan Rujukan** | | |  |  |  | |
|  | 1 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien maskin | | 100 | 5.064 | 48,71 | |
|  | 2 | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan | | 100 | 6 | 100 | |
|  |  | sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota | |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |
| **C** | **Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian** | | |  |  |  | |
|  | 1 | Kejadian Luar Biasa/KLB Desa/Kelurahan mengalami KLB | |  |  |  | |
|  | 2 | yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | | 100 | 6 | 100 | |
|  |  |  | |  |  |  | |
| **D** | **Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat** | | |  |  |  | |
|  | 1 | Cakupan Desa Siaga Aktif | | 80 | 80 | 60,15 | |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan,2014

1. **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Urusan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang akan dilihat dari 2 (dua) indikator utamapanjang jalan dalam kondisi baik dan indekskinerja penanganan jaringan irigasi.

1. **Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik**

Keberadaan dan kondisi jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya suatu wilayah. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik (buatan) akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kelemahan ini terindikasi dari seringnya terjadi banjir di jalur-jalur utama ekonomi sebagai dampak darikurangnya perhatian terhadap fungsi sistem sungai dan drainase. Kasus *bottle neck*(jaringan jalan yang menyempit) juga kerap terjadi di berbagai jaringan transportasi akibat tidak diperhatikannya tataguna lahan sehingga kapasitas sumber daya fisik (buatan) tidak lagi mampu menampung perjalanan barang dan manusia.

Panjang jalan dalam kondisi rusak, baik jalan nasional, provinsi, maupun jalan kabupaten, di Kabupaten Tabanan relatif tinggi. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik tahun 2014 adalah 390,89 km (37 %),menurun sejak tahun 2012(Tabel 2.34). Kondisi kerusakan jalan terpanjang terjadi pada jalan kabupaten. Jalan kabupaten di Tabanan yang memiliki ruas terpanjang di Bali, kondisinya sangat mengkhawatirkan. Kondisi tahun terakhir menunjukkan jalan kabupaten dalam kondisi baik hanya 289,457 km dari total panjang 860,95 km atau 33,62% (Tabel 2.34). Oleh karenanya, permasalahan peningkatan kualitas jaringan jalan merupakan prioritas yang mendesak untuk ditangani dalam pembangunan Tabanan ke depan.

Tabel 2.31

Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi

Tahun 2010 – 2014di Kabupaten Tabanan

| **NO** | **Kondisi Jalan** | **Panjang Jalan (km)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1. | Kondisi Baik | 347,66 | 347,66 | 439,32 | 454,98 | 390,89 |
| 2. | Kondisi Rusak Sedang | 353,26 | 353,26 | 240,08 | 226,02 | 151,56 |
| 3. | Kondisi Rusak | 223,20 | 223,20 | 220,67 | 237,66 | 292,90 |
| 4. | Kondisi Rusak Berat | 133,41 | 133,41 | 157,45 | 138,45 | 221,76 |
|  | Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) | 1.057,53 | 1.057,53 | 1.057,53 | 1.057,11 | 1.057,11 |

Sumber :Dinas PU Kabupaten Tabanan,2014

Tabel 2.32

Kondisi Jalan Berdasarkan Status Jalan di Kabupaten Tabanan Tahun 2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | STATUS JALAN | KONDISI JALAN (km) | | | | JUMLAH |
| Baik | Rusak Sedang | Rusak | Rusak Berat |
| 1. | JALAN NASIONAL | 34,85 | 14,17 | 16,36 | - | 65,38 |
| 2. | JALAN PROVINSI | 57,58 | 37,57 | 35,63 | - | 130,78 |
| 3. | JALAN KABUPATEN | 298,457 | 99,821 | 240,910 | 221,760 | 860,95 |
|  | JUMLAH | 390,89 | 151,56 | 292,90 |  | 1.057,11 |

Sumber: Dinas PU Kabupaten Tabanan

1. **Indeks Kinerja Penanganan Saluran Irigasi**

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian sampai penggunaannya. Secara operasional saluran irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu:saluran irigasi primer, sekunder dan tersier.

Panjang saluran irigasi yang telahdiinventasir adalah sepanjang 712.600 km. Dari total panjang saluran irigasi ini, baru sebagian kecil yang mampu ditanganimelalui rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan (Tabel 2.34).Keterbatasan fiskal daerah menjadi penyebab kurangnya penanganan irigasi di Kabupaten Tabanan sehingga indeks kinerja penanganan irigasi jauh dari kondisi ideal. Oleh karenanya, peran swadaya masyarakat, khususnya Subak menjadi sangat penting dalam memeliharajaringan irigasi di wilayah masing-masing.

Ketersediaan air irigasi untuk lahan sawah dapat diamati dari luas sawah yang bisa ditanami, dalam setiap musim tanam (2 kali setahun). Persentase luas lahan yang dapat ditanami padi terhadap luas baku sawah dikenal dengan indeks pertanaman (IP). Apabila kondisi saluran baik dan curah hujan normal maka IP yang ideal akan mencapai 200 %. Kondisi ideal tersebut belum mampu tercapai (Tabel 2.33) sehingga upaya meningkatkan kondisi sarana dan prasarana irigasi tetap harus menjadi perhatian ke depan.

Tabel 2.33

Panjang dan Indeks Penanganan Saluran Irigasi

Tahun 2010 s.d 2014 di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Jaringan Irigasi** | **Panjang Jaringan** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| 1. | Panjang Saluran Irigasi (km) | 712.600 | 712.600 | 712.600 | 712.600 | 712.600 |
| 2. | Panjang Penanganan Saluran (km) | 6,217 | 7,729 | 9,161 | 7,163 | 5,575 |
| 3. | Indeks Kinerja (%) | 0,872 | 1,085 | 1,286 | 1,005 | 0,782 |
| 4. | Indeks Kinerja Komulatif (%) | 0,872 | 1,960 | 3,240 | 4,250 | 5,030 |
| 5. | Indeks Pertanaman (IP) Padi (%) | 184,58 | 182,76 | 193,05 | 148,44 | 152,16 |

Sumber :Dinas PU Kabupaten TabananDinas Pertanian Kab. Tabanan

1. **SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabanan mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 01 tahun 2014, yang terdiri dari 5 (lima) sub bidang yaitu Sub Bidang Sumber daya air dengan 2 (dua) indikator kinerja, Sub Bidang Jalan dengan 2 (dua) indikator kinerja, Sub Bidang Cipta Karya dengan 8 (satu) indikator Kinerja, Sub Bidang Jasa Konstruksi dengan 2 (dua) indikator kinerja), dan Sub Bidang Penataan Ruang dengan 2 (dua) indikator kinerja. Dari Capaian tahun 2015 masih ada yang masih terus ditingkatkan capaiannya antara lain seperti beberapa indikator kinerja pada Sub Bid jalan, Sub Bidang Cipta Karya, Sub Bidang Jasa Konstrksi dan yang masih jauh dari SPM yang ditargetkan. Namun sebagian besar indikator lainnya, memerlukan perhatian khusus karena berada dibawah capaian kinerja yang ditargetkan. Rincian capaian layanan Dasar dan Capaian Indikator SPM Bidang PUPR tahun 2015 disajikan pada tabel 2.34.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| Tabel 2.34  Jenis Layanan Dasar dan Capaian Indikator SPM Bidang PUPR tahun 2015 | | | | | |
| No | Bidang/Jenis Layanan Dasar | Indikator Kinerja | Target Rencana Pencapaian | Batas Waktu Pencapaian | Pencapaian Target |
| 2015 |
| 1 | Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat | Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari | 100% | 2019 | 76.50% |
|  |  | Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya | 100% | 2016 | 100% |
| 2 | Penydiaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat | Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten /kota baik dan sedang | 100% | 2019 | 54% |
| 3 | Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat | Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota | 95% | 2021 | 25% |
| 4 | Penyediaan air minum | Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman | 100% | 2019 | 68.41% |
| 5 | Penyediaan Sanitasi | Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai | 70% | 2021 | 35% |
| Persentase pengurangan sampah perkotaan | 90% | 2016 | 90% |
| Persentase pengangkutan sampah | 90% | 2016 | 90% |
|  |  | Persentase pengoprasian TPA | 70% | 2019 | 50% |
| Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun | 100% | 2021 | 84.64% |
| 6 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan | 100% | 2019 | 75% |
| 7 | Penanganan permukiman kumuh perkotaan | Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | 100% | 2019 | 30.87 |
| 8 | Pengembangan sistem informasi jasa kontruksi | Persentase tersedianya tujuh layanan informasi jasa kontruksi tingkat Kabupaten/Kota pada sistem informasi Pembina Jasa Kontruksi (SIPJAKI) | 70% | 2021 | 45% |
| 9 | Izin Usaha Jasa Kontruksi | Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap | 100% | 2021 | 100% |
| 10 | Informasi Penataan Ruang | Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital | 100% | 2021 | 100% |
| 11 | Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik | Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | 70% | 2021 | 20% |

Sumber DPU Kab. Tabanan 2015

1. **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Kinerja penanganan bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman akan dilihat dari kondisi sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman seperti: air minum, air limbah, drainase, dan daerah genangan.

1. Air Minum

Air minum adalah air yang memenuhi syarat kesehatan untuk diminum, baik melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan. Penyediaan air minum dilakukan melalui sistem perpipaan dan bukan perpipaan untuk mencukupi kebutuhan minimal 60 liter/orang/hari. Jangkauan pelayanan air minum di Tabanan sampai tahun 2014 telah mencapai hampir 70 persen penduduk seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.35

Cakupan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tabanan

Tahun 2011 - 2015

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Tahun 2011** | **Tahun 2012** | **Tahun 2013** | **Tahun 2014** |
| 1 | Cakupan penduduk terlayani | 250.936 | 263.920 | 281.490 | 308.820 |
| 2 | Jumlah penduduk | 431.162 | 437.679 | 441.900 | 448.033 |
| 3 | Persentase | 58,20 | 60,30 | 63,70 | 68,93 |

Sumber: Dinas PU Kab. Tabanan 2014

1. Air Limbah

Penanganan air limbah di Kabupaten Tabanan difokuskan pada penanganan air limbah domestik dengan target penyediaan sistem air limbah setempat yang memadai. Air limbah domestik merupakan air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

Cakupan pelayanan air limbah di Kabupaten Tabanan masih sangat terbatas, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.36 Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan, khusunya di lingkungan perkotaan, penanganan air limbah perlu terus digalakkan.

Tabel 2.36

Cakupan Pelayanan Air Limbah di Kabupaten Tabanan

Tahun 2011 - 2015

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Tahun 2011** | **Tahun 2012** | **Tahun 2013** | **Tahun 2014** | **Tahun 2015** |
| 1 | Cakupan penduduk terlayani | 2.761 | 3.972 | 5.400 | 6.706 | 8.555 |
| 2 | Jumlah penduduk | 431.162 | 437.679 | 441.900 | 448.033 | 452.513 |
| 3 | Persentase | 0,64 | 0,91 | 1,22 | 1,50 | 1,91 |

Sumber: Dinas PUPR Kab. Tabanan

1. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rujukan yang dipergunakan untuk Standar Pelayanan Minimal untuk bidang Permahan Rakyat Kabupaten Tabanan masih mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 / Permen/M/2008, tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Prov,Kabupaten/Kota. Permenpera tersebut terdiri dari 2 (dua) 2 (dua) jenis pelayanan dasar yaitu (1) rumah layak huni dan terjangkau dengan 2 (dua) indikator kinerja, dan (2) lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan 1 (satu) indikator kinerja. Dari Capaian tahun 2015 capaiannya masih dibawah SPM yang ditargetkan. Capaian Layanan Dasar dan Capaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman disajikan seperti tabel 2.37

Tabel 2.37

Capaian Layanan Dasar dan Capaian Indikator SPM

Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun 2015

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS PELAYANAN DASAR SKALA PROVINSI** | **STANDAR PELAYANAN MINIMAL** | | **BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)** | **CAPAIAN TAHUN 2015** |
| **INDIKATOR** | **NILAI** |
| I | Rumah layak huni dan terjangkau | Cakupan ketersedian rumah layak huni | 100 % | 2009-2025 |  |
|  |  | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | 70% | 2009-2025 |  |
| II | Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum(PSU) | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | 100% | 2009-2025 |  |

Sumber: Dinas PU Kab. Tabanan 2015

**E.Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat**

Urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindunganmasyarakat erat kaitannya dengan keberadaan Polisi Pamong Praja dan Linmas. Polisi Pramong Praja bertugas dalam menjaga ketertiban masyarakat dalam mentaati pelaksanaan peraturan daerah, sedangkan Linmas berperan dalam membantu menjaga ketertiban di desa. Berikut keberadaan Polisi Pamong Praja dan Linmas yang ada di Kabupaten Tabanan.

1. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

Jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk di Kabupaten Tabanan mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2010 jumlah polisi pamong praja sebanyak 89 orang kemudian bertambah menjadi 171 pada tahun 2014. Rasio terhadap jumlah per 10.000 penduduk sebesar 3,95. Hal ini dapat diinterpretasikan, bahwa rata-rata setiap10.000 penduduk dapat dilayani oleh 4 orang polisi pamong praja.

Tabel 2.38

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja

Tahun 2010 - 2014di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1. | Jumlah polisi pamong praja | 89 | 161 | 165 | 171 | 171 |
| 2. | Jumlah penduduk | 422.300 | 431.162 | 437.679 | 441.900 | 448.033 |
| 3. | Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk | 2,11 | 3,79 | 3,86 | 3,97 | 3,95 |

Sumber:Satpol PP Kabupaten Tabanan,2014

1. **Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk**

Linmas di Kabupaten Tabanan keberadaannya ada di setiap desa. Setiap desa wajib merekrut anggota Linmas dalam jumlah yang telah ditentukan, yakni sebanyak 31 orang. Dengan demikian di Kabupaten Tabanan terdapat 4.123 orang yang tersebar di 133 desa. Apabila dihitung jumlah Linmas per 10.000 nilai rasionya mencapai 95,15.

Di samping polisi pamong praja dan Linmas, di Bali juga dibentuk organisasi “Pecalang” yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah desa adat/desa pakraman. Pecalang umumnya diberi tugas mengamankan pelaksanaan upacara adat, namun di beberapa desa adat ada pula Pecalang diberi tugas tambahan di luar kegiatan upacara adat. Keberadaan Pecalang dibentuk di setiap Banjar Adat. Setiap Desa Pakraman umumnya terdiri dari beberapa Banjar Adat, namun ada pula satu Desa Pakraman terdiri dari satu banjar Adat. Setiap Banjar Adat merekrut satu kelompok Pecalang dengan jumlah anggota bervariasi di setiap Banjar Adat.

1. **SPM BidangKetentraman,Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat**

Penerapan SPM bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, di Kabupaten Tabanan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 69 tahun 2012 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota Permendagri terebut menetapkan sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja. Adapu SPM difokuskan pada Bidang/Jenis Layanan DasarPemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, serta Penanggulanagan bencana kebakaran Dari Jumlah tersebut Capaian SPM sampai tahun 2015 sebagian sudah ada yang dapat dicapai bahkan melampaui, dan sebagiannya lagi mendekati dapat dicapai, serta masih ada yang memerlukan perhatian khusus karena masih di bawah SPM yang ditargetkan Rincian jenis layanan dasar dan capaian indikator SPM Bidang Ketentraman,Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat tahun 2015 sampai tahun 2015 disajikan seperti pada tabel 2.39.

Tabel 2.39

Capaian Layanan Dasar dan Capaian Indikator SPM Bidang Ketentraman,Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat tahun 2015

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bidang/Jenis Layanan Dasar** | **Indikator Kinerja** | | **Target Rencana Pencapaian** | **Batas Waktu Pencapaian** | **Pencapai**  **an Target** |
| **2015** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | |
| 1.1 | Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat | a. | Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten | 100% | 2021 | 75% |
| b. | Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | 3 x patroli dalam sehari | 2021 | 2,4 x patroli dalam sehari |
| c | Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)di Kabupaten | 1 org setiap Dusun | 2021 | 5,05 org setiap dusun |
| 1.2 | Penanggulanagan bencana kebakaran | a. | Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten | 80% | 2021 | 75% |
| b. | Tingkat waktu tanggap (response time rate) | 75% | 2021 | 25% |
| c. | Persentaase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi | 85% | 2021 | 53% |
| d. | Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter pada WMK | 90% | 2021 | 60% |

Sumber : BPS Kab. Tabanan

1. **Sosial**

Pelayanan urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial akan digambarkan melalui kondisi PMKS secara umum, keragaan kemiskinan, dan pencapaian SPM Bidang Sosal.

1. **Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

Penduduk yang tercakup dalam PMKS terdiri dari 26 jenis, yaitu: anak balita terlantar (ABT), anak terlantar (AT), anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas (ADK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP), orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan nafsa, korban traffiking, korban tindak kekerasan, korban migra bermasalah sosial (BMBS), korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin (FM), keluarga bermasalah sosial psikologis dan komunitas adat terpencil (KAT).

Dari 26 jenis PMKS, yang ditangani di Kabupaten Tabanan sebanyak 19 jenis PMKS. Sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, terdapat 7 (tujuh) jenis PMKS yang belum dilaksanakan di Kabupaten Tabanan, yaitu: anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, tuna susila, pengemis, kelompok minoritas, korban trafficking, korban bencana sosial, dan komunitas adat terpencil. Jenis PMKS yang dominan ditemukan di Tabanan sampai tahun 2015 adalah kelompok fakir miskin (18.781 orang), penyandang disabilitas (2.736 orang),dan wanita rawan sosial ekonomi (1.088 orang). Secara umum penangan kasus PMKS di Kabupaten Tabanan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan(Tabel 2.40 )

Tabel 2.40

Jenis dan Jumlah PMKS yang ditangani di Kabupaten Tabanan

Tahun 2015

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis PMKS | Satuan | Jenis Kelamin | | Jumlah | Keterangan |
| L | P |
| 1 | Anak Balita Terlantar | Orang | 11 | 5 | 16 |  |
| 2 | Anak Terlantar | Orang | 288 | 231 | 519 |  |
| 3 | Anak yang berhadapan dengan hokum | Orang | 1 | 0 | 1 |  |
| 4 | Anak Jalanan | Orang | 5 | 2 | 7 |  |
| 5 | Anak dengan kedissabilitasan (ADK) | Orang | 168 | 127 | 295 |  |
| 6 | Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah | Orang | 0 | 0 | 0 | Tidak ada kasus |
| 7 | Anak yang memerlukan perlindungan khusus | Orang | 2 | 0 | 2 |  |
| 8 | Lanjut Usia Terlantar | Orang | 288 | 674 | 962 |  |
| 9 | Penyandang Disabilitas | Orang | 1.628 | 1.108 | 2.736 |  |
| 10 | Tuna Susila | Orang | 0 | 0 | 0 | Tidak ada kasus |
| 11 | Gelandangan | Orang | 6 | 0 | 6 |  |
| 12 | Pengemis | Orang | 0 | 0 | 0 | Tidak ada kasus |
| 13 | Pemulung | Orang | 13 | 4 | 17 |  |
| 14 | Kelompok Minoritas | Orang | 0 | 0 | 0 | Tidak ada kasus |
| 15 | Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) | Orang | 316 | 19 | 335 |  |
| 16 | Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) | Orang | 5 | 7 | 12 |  |
| 17 | Korban Penyalahgunaan NAPZA | Orang | 9 | 0 | 9 |  |
| 18 | Korban Trafficking | Orang | 0 | 0 | 0 | Tidak ada kasus |
| 19 | Korban Tindak Kekerasan (KTK) | Orang | 0 | 4 | 4 |  |
| 20 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial | Orang | 2 | 0 | 2 |  |
| 21 | Korban Bencana Alam | Orang | 13 | 1 | 14 |  |
| 22 | Korban Bencana Sosial | Orang | 0 | 0 | 0 | Tidak ada kasus |
| 23 | Wanita Rawan Sosial Ekonomi | Orang | 0 | 1.088 | 1.088 |  |
| 24 | Fakir Miskin | KK | 17.180 | 1.601 | 18.781 |  |
| 25 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | KK | 24 | 11 | 35 |  |
| 26 | Komunitas Adat Terpencil | KK | 0 | 0 | 0 | Tidak ada kasus |
| **JUMLAH** | | | **19.959** | **4.882** | **24.841** |  |

Sumber : BPS Kab. Tabanan

1. **Keragaan Kemiskinan**

Capaian kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tabanan akan dilihat dari keragaan kemiskinan yang meliputi: jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan.

1. **Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**

Tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tabanan tercatat sebanyak 24.050 jiwa,beradapadaposisiterbanyak ketiga diantara 9 kabupaten/kota se-Bali, setelah KabupatenBuleleng (37.550 jiwa) danKarangasemsebanyak27.120 jiwa. Tingkatkemiskinanpenduduk di KabupatenTabanan pada kuruntahun 2010 s.d 2015masih menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2010 tingkat kemiskinan mencapai 6,96 persen, menurun menjadi 5,21 persen pada tahun 2013, namun pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan menjadi 5,61 persen. Kondisi tahun 2015 tingkat kemiskinan tercatat 5,52 persen. Bila dibandingkan terhadap wilayah lain, posisi relatif kemiskinan di Tabanan masih berada di atas rata-rata Provinsi Bali (4,74 persen), namun telah cukup baik jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional (11,22 persen).

1. **Tingkat kedalaman kemiskinan**

Tingkat kedalaman kemiskinan (*proverty gap index*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Kabupaten Tabanan tahun 2015 adalah sebesar Rp. 365.022 /kapita/bulan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Tabananpadatahun 2015 sebesar 0,50 padaposisilebihbaikdaritingkatNasionaldanProvinsi(0,51). JikaditinjaudariposisirelativenyaindekskedalamankemiskinanKabupatenTabananberadapadaposisi ke-4terendahsetelahBadung(0,19) danKota Denpasar (0,20),namunposisilebihtinggidarilimaKabupatenlainnya di Bali. Perkembanganantarwaktu,indekskedalamankemiskinandalamkurunwaktu2010 - 2016 menurun dari 1,13 menjadi 0,57.

1. **Tingkat keparahan Kemiskinan**

Tingkat Keparahan kemiskinan (*property severity index*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Kabupaten Tabanan tahun 2015 pada posisi 0,09 lebih baik dari nasional 0,48 dan provinsi 0,14. Posisi relatifnya berada pada posisi ke 3 setelah Kabupaten Badung (0,02) dan Kota Denpasar (0,04). Dalam periode tahun 2010 – 2015 indeks keparahan kemiskinan penduduk Tabanan telah menurun dari 0,31 menjadi 0,09. Hal ini menunjukkan program-program penanggulangan kemiskinan, baik nasional, provinsi maupun kabupaten telah berjalan secara efektif dan menunjukkan hasil yang cukup nyata.

1. **Pencapaian SPM Bidang Sosial**

SPM Bidang Sosial di Kabupaten Tabanan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 80 tahun 2010 tentang SPM Bidang Sosial. Peraturan tersebut mewajibkan 4 (empat) jenis pelayanan dasar dan sub kegiatan dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. Dari jumlah tersebut,capaian SPM sampai tahun 2015, sebanyak 5 (lima) indikator yang telah mencapai target, sedangkan 2 (dua) indikator belum mencapai target. Kedua indakator yang belum mencapai target adalah:

1. Persentase PMKSskala kab/kota yangmenerima programpemberdayaan socialmelalui kelompok usahabersama (Kube) ataukelompok sosial ekonomisejenis lainnya. Capaian indikator ini sampai tahun 2015 baru mencapai angka 12,40 persen dari target 80 persen yang harus dicapai tahun 2021. Tingkat kesulitan membentuk dan mengembangkan kelompok usaha bersama di tingkat masyarakat memang sangat nyata adanya karena sebagian besar masyarakat sulit diajak merintis sesuatu yang belum terlihat hasilnya. Kondisi ini membutuhkan kerja keras dari seluruh stakeholder yang terlibat.
2. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Capaian indikator ini sampai tahun 2015 baru mencapai 25,96 persen dari target 60 persen yang harus dapat dicapai pada tahun 2021. Untuk memenuhi capaian ini juga memerlukan perhatian khusus dan fokus serta kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada**.**

Rincian jenis layanan dasar dan capaian indikator SPM Bidang Sosial sampai tahun 2015 disajikan seperti pada Tabel 2.41

Tabel 2.41

Capaian Layanan Dasar dan Capaian Indikator SPM Bidang Sosial Tahun 2015

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Bidang / Jenis Layanan Dasar | | Indikator | Target | Batas | Pencapaian  Tahun |
|  | Waktu |
|  | Pencapaiaan | 2015 |
| 1 | KEGIATAN BIDANG SOSIAL | |  |  |  |  |
| a. | Pemberian bantuan sosial  bagi Penyandang masalah  Kesejahteraan Sosial skala  Kabupaten/Kota. | Persentase PMKS  skala Kab/Kota yang  memperoleh bantuan  sosial untuk pemenuhan  kebutuhan dasar | 80% | 2021 | 83,35% |
|  | b. | Pelaksanaan kegiatan  pemberdayaan sosial skala  Kabupaten/Kota | Persentase PMKS  skala Kab/Kota yang  menerima program  pemberdayaan sosial  melalui kelompok usaha  bersama (Kube) atau  kelompok sosial ekonomi  sejenis lainnya | 80% | 2021 | 12,40% |
| 2 | PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL | | | | | |
|  | a. | Penyediaan sarana prasarana  panti sosial skala kab/kota | Persentase panti sosial  skala Kab/Kota yang  menyediakan sarana  prasarana pelayanan  kesejahteraan sosial | 80% | 2021 | 87,50% |
|  | b. | penyediaan sarana prasarana  pelayanan luar panti skala  Kab/Kota | Persentase Wahana  Kesejahteraan Sosial  berbasis masyarakat  (WKBSM) yang menyediakan  sarana prasarana pelayanan  Kesejahteraan Sosial | 60% | 2021 | 25,95% |
| 3 | PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA | | | | | |
|  | a. | Bantuan sosial bagi korban  bencana skala Kab/Kota | Persentase korban  bencana skala Kab/Kota yang  menerima bantuan sosial  selama masa tanggap darurat | 80% | 2021 | 100% |
|  | b. | Evakuasi korban bencana skala  Kab/Kota | Persentase korban  bencana skala Kab/Kota yang  dievakuasi dengan  menggunakan sarana  prasarana tanggap darurat  lengkap | 80% | 2021 | 100% |
| 4 | PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN JAMINAN SOSIAL | | | | | |
|  | a. | Bagi penyandang cacat fisik dan  mental serta lanjut usia tidak  potensial  Penyelenggaraan jaminan  sosial skala Kab/Kota | Persentase penyandang  cacat fisik dan mental, serta  lanjut usia tidak potensial  yang telah menerima jaminan  sosial | 40% | 2021 | 59,14% |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tabanan 2015.

**2.3.2 Fokus Urusan Wajib non Pelayanan Dasar**

1. **TENAGA KERJA**

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) menunjukkan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tabanan tahun 2014 adalah sebanyak 268.033 jiwa (Tabel 2.45) Dari angkatan kerja yang ada, rata-rata 98,09 persen diantaranya adalah penduduk yang bekerja, dan sisanya 1,91 persen merupakan pengangguran terbuka. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tabanan berada pada posisi yang cukup baik. Tingkat pengangguran terbuka nasional mencapai 6 persen, Provinsi Bali rata-rata 1,79 persen, sedangkan kabupaten terendah dicapai oleh Kabupaten Bangli (0,75 persen) dan Badung (0,77 persen).Pencapaian tingkat pengangguran yang rendah mesti dibarengi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja sehingga terwujud tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat yang semakin baik.

Tabel 2.42

Angkatan Kerja, Rasio Penduduk Yang Bekerja Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2010 - 2014

di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1 | Angkatan Kerja (Jiwa) | 261.534 | 264.590 | 273.502 | 267.320 | 268.033 |
| 2 | Rasio Penduduk yang Bekerja (%) | 97,27 | 98,23 | 97,78 | 99,21 | 97,75 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 2,73 | 1,77 | 2,22 | 0,79 | 2,25 |

Sumber: BPS Kabupaten Tabanan,2014

Dalam upaya meningkatkan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Kabupaten Tabanan terus melakukan pembinaan hubungan industrial yang baik antara lembaga kerjasama tripartit yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Dengan adanya hubungan kerjasama yang baik ini angka sengketa antara pengusaha dan pekerja di Kabupaten Tabanan yang sampai masuk ke ranah hukum nyaris tidak pernah ada. Penyebaran informasi lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja terus ditingkatkan. Dalam empat tahun terakhir telah berhasil ditempatkan sejumlah 2.523 orang dari 19.236 orang pencari kerja (Tabel 2.43).

Tabel 2.43

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan

Tahun 2010 - 2014 Di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1 | Pencari kerja yang ditempatkan | - | 566 | 570 | 92 | 777 |

Sumber: BPS Kabupaten Tabanan

1. **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan oleh masyarakat diberikan pelayanan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tabanan. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan dalam kurun waktu 2011-2014 mengalami penurunan yaitu dari 32 kasus tahun 2011 menjadi 23 kasus tahun 2014. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, diharapkan dapat lebih memastikan jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari korban tindak kekerasan.

Tabel 2.44

Jumlah kasus KDRTTahun 2011- 2014 di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Tahun** | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1 | Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan | 32 kasus | 26 kasus | 29 kasus | 23 kasus |

Sumber Dinas Sosial Kabupaten Tabanan,2014

1. **PANGAN**

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan ketahanan pangan bagi setiap warganya. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Berbicara ketahanan pangan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan ketersediaan beras. Dalam skala Bali, Tabanan disebut sebagai lumbung berasnya Bali. Disebut lumbung beras karena dari 81.235 hektar lahan sawah yang ada di Bali, 27,7% atau 22.479 hektar berada di Kabupaten Tabanan; dan dari 858.316 ton gabah kering giling (GKG) yang diproduksi Bali, 24,5% di produksi di Tabanan.

Pada saat ini, untuk meningkatkan produksi beras dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain: tingginya alih fungsi lahan dan produktivitas padi masih rendah. Berdasarkan data BPS Tabanan (2013), mulai tahun 2011 luas sawah yang mengalami alih fungsi ke bukan sawah di Kabupaten Tabanan meningkat tajam. Luas sawah meningkat tajam dari 47 ha, menjadi 204 ha selanjutnya menjadi 378 ha pada tahun 2013 (Gambar 2.4) Kecamatan Kerambitan merupakan kecamatan yang mengalami alih fungsi lahan sawah terluas (Gambar 2.5).

Gambar 2.4 Perkembangan luas lahan sawah yang beralih fungsi di Kabupaten Tabanan 2008 – 2013

Gambar 2.5 Luas lahan sawah yang mengalami alih fungsi di tiap-tiap kecamatan Kabupaten Tabanan 2013

Produktivitas padi di Kabupaten Tabanan dari tahun 2008 sampai dengan 2013 cenderung stagnan. Produktivitas padi rata-rata mencapai 56,68 kwintal/ha pada tahun 2008, justru hanya mencapai 56,16 pada tahun 2013 (Gambar.2.6). Produktivitas tanaman padi di Tabanan ini lebih rendah dari rata-rata produktivitas padi di Provinsi Bali (Gambar 2.7) Selain permasalahan alih fungsi dan stagnannya produktivitas, ancaman lainnya terhadap ketahanan pangan adalah serangan hama/penyakit tanaman, krisis air akibat perubahan iklim, dan penurunan kesuburan tanah.Faktor-faktor di atas harus menjadi perhatian serius semua pihak untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan yang lebih mantap di kemudian hari.

Gambar 2.6. Perkembangan produksi padi di Kabupaten Tabanan 2008 – 2013

Gambar 2.7 Perbandingan produktivitas padi di sembilan kabupaten kota di Bali 2013

Kondisi ketahanan pangan di Tabanan lebih dominan dipengaruhi dari sisi produksi, sedangkan menyangkut distribusi belum menghadapi kendala yang berarti karena tidak ada wilayah/desa yang terisolir dan telah terkoneksi dengan infrstruktur transportasi yang cukup memadai. Tingkat konsumsi beras masyarakat Tabanan sebesar 130 kg/kapita/tahun, tergolong relatif tinggi (Bali: 116 kg/kapita/tahun). Upaya-upaya diversifikasi pangan (sumber karbohidrat) perlu terus digalakkan sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama tingkat konsumsi beras mampu ditekan menjadi 100 kg/kapita/tahun.

Kendala lain yang dihadapi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan adalah tingkat kepemilikan lahan sawah yang semakin rendah akibat sistem bagi waris. Kepemilikan lahan rata-rata petani Tabanan mencapai 0,25 – 0,5 ha per KK petani). Oleh karenanya, ketahanan pangan perlu diperkuat dengan pemanfaatan lahan pekarangan dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan yang berimbang, yang lebih dikenal dengan istilah Pola Pangan Harapan (PPH). Selain padi, jenis pangan yang termasuk dalam PPH ini terdiri dari: umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain.

Tabel 2.45

Persentase desa yang memiliki status ketersediaan pangan (beras) dalam kategori cukupTahun 2011 – 2014

di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Program** | **Kondisi Awal RPJMD** | **Capaian Kinerja** | | | |
| **Tahun 2011** | **Tahun 2012** | **Tahun 2013** | **Tahun 2014** |
| Persentase desa yang memiliki status ketersediaan pangan (beras) dalam kategori cukup | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Sumber Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan,2014

1. **LINGKUNGAN HIDUP**
2. **Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk**

Penyediaan pelayanan tempat pembuangan sampah menjadi prioritas dalam menjaga kebersihan lingkunan di Kabupaten Tabanan. Jumlah TPS di Kabupaten Tabanan tahun 2010 sampai tahun 2014 mengalami penurunan sehingga berdampak terhadap rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk yang kian meningkat. Jumlah TPS tahun 2014 adalah sebanyak 150 dengan rasio terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 1,50.

Tabel 2.46

Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk

Tahun 2010 - 2014 di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1. | Jumlah TPS | 186 | 185 | 182 | 153 | 150 |
| 2. | Jumlah Daya Tampung TPS | 558,00 | 769,00 | 808,00 | 695,00 | 648,00 |
| 3. | Jumlah Penduduk | 422.300 | 425.100 | 427.800 | 430.600 | 433.300 |
| 4. | Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk | 1,32 | 1,81 | 1,89 | 1,61 | 1,50 |

Sumber Dinas Lingkungan Hidup, 2014

1. **Persentase Penanganan Sampah**

Jumlah volume produksi sampah Kabupaten Tabanan dari tahun 2011 sampai dengan 2014 semakin meningkat. Berbagai upaya terus menerus dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah. Namun terdapat beberapa faktor yang menjadi permasalahan, seperti kondisi TPA yang sudah *overload* dan keterbatasan sarana dan prasarana.

Tabel 2.47

Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah

Tahun 2010 S.D 2014 Di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1. | Jumlah sampah yang ditangani | 241,49 | 252,00 | 255,45 | 245,31 |
| 2. | Jumlah volume produksi sampah | 656,52 | 658,16 | 659,81 | 661,45 |
| 3. | Persentase | 36,78 | 38,29 | 38,72 | 37,09 |

Sumber Dinas Lingkungan Hidup, 2014

1. **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Penataan dan penertiban dokumen/data kependudukan melalui pelayanan e-KTP telah dilaksanakan serentak di 10 kecamatan di Kabupaten Tabanan. Selain itu, pelayanan akta perkawinan dan akta kelahiran telah mencapai angka maksimal yaitu 100 persen sejak tahun 2012 (Tabel 2.48).Ini berarti bahwa pencatatan kependudukandi Kabupaten Tabanan telah terwujud tertib administrasi. Kondisi ini perlu terus dipertahankan.

Tabel 2.48

Persentase Penduduk Memiliki KTP, Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran Tahun 2011- 2014 di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Kondisi Awal RPJMD** | **Capaian Kinerja** | | | |
| **Tahun 2011** | **Tahun 2012** | **Tahun 2013** | **Tahun 2014** |
| 1 | Cakupan pelayanan E-KTP yang telah beroperasi secara optimal (kecamatan) a. KTP/KK b. Akta Perkawinan c. Akta Kelahiran | 10 kecamatan  90 % 45 % 60 % | 96%  50% 65% | 89% 100% 100% | 100% 100% 100% | 100% 100% 100% |

Sumber:Disdukcapil Kabupaten Tabanan,2014

1. **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Pemberdayaan masyarakat dan desa secara garis besar mengandung 2 (dua) elemen, yaitu: a) meningkatkan kemampuan masyarakat melalui penerapan kebijakan dan program pembangunan sehingga tercapai kondisi yang diharapkan; dan b) mendelegasikan, memberikan otoritas kepada masyarakat agar memiliki kemandirian dalam membangun diri dan lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat di Bali umumnya, dan Tabanan khususnya tidak terlepas dari keberadaan lembaga, baik formal maupun tradisional. Berikut keberadaan lembaga formal dan tradisional yang ada di Kabupaten Tabanan.

Tabel 2.49

Jumlah Desa Dinas, Desa Pakraman, dan Banjar

di Kabupaten Tabanan Tahun 2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah Desa Pakraman | Jumlah Banjar |
| 1. | Kediri | 15 | 22 | 106 |
| 2. | Tabanan | 12 | 12 | 82 |
| 3. | Kerambitan | 15 | 28 | 90 |
| 4. | Selemadeg Timur | 10 | 32 | 71 |
| 5. | Selemadeg | 10 | 36 | 59 |
| 6. | Selemadeg Barat | 11 | 37 | 72 |
| 7. | Marga | 16 | 28 | 71 |
| 8. | Baturiti | 12 | 53 | 64 |
| 9. | Penebel | 18 | 72 | 130 |
| 10. | Pupuan | 14 | 24 | 71 |
| Jumlah | | 133 | 344 | 816 |

Sumber: BPS Kab. Tabanan

Di samping kelembagaan tersebut di atas, masih terdapat lembaga yang cukup berperan dalam pembangunan, khususnya dalam pembangunan pertanian, yaitu Subak (lembaga tradisional yang terlibat dalam urusan sosial, budaya, dan usahatani pada lahan sawah) dan Subak Abian (organisasi petani yang bekerja pada lahan kering/kebun). Jumlah organisasi subak (lahan basah) di Tabanan sampai saat ini tercatat 232subak, sedangkan subak abian(lahan kering) sebanyak 174.Kesungguhan pemerintah dalam pemberdayaan SDM dan lembaga-lembaga tersebut di atas sangat besar peranannya bagi keberhasilan program-program pembangunan.

Berdasarkan klasifikasi tingkat perkembangannya, desa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: Desa Swadaya, Desa Swakarsa, dan Desa Swasembada. Dari 133 desa (dinas) yang ada di Kabupaten Tabanan, tidak ada desa masuk dalam klasifikasi swadaya, 84 desa swakarya, dan 49 desa swasembada. Desa Swakarsa memiliki beberapa cirri, yaitu: adat-istiadat sudah tidak mengikat penuh, sudah mulai menggunakan alat-alat dan teknologi, sudah tidak terisolasi dari pusat perekonomian, dan telah memiliki fasilitas ekonomi, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain, serta jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar. Selanjutnya, Desa Swasembada memiliki ciri: berlokasi di ibukota kecamatan, penduduknya padat, tidak terikat adat-istiadat, telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai, dan partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.

Dalam upaya mengembangkan kemandirian ekonomi, Pemerintah Kabupaten Tabanan juga telah memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan memanfaatkan potensi desa sebagai *core business*. Tahun 2015 telah berdiri 50 BUMDes di 10 kecamatan dengan *core business* pengolahan hasil pertanian. Pengolahan hasil pertanian yang menjadi pilihan usaha kelima puluh BUMDes tersebut antara lain: pengolahan kopi, kelapa, ikan, abon, kripik/krupuk, dan lain-lain.

1. **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam kurun waktu tahun 2011-2014 jumlah penduduk Kabupaten Tabanan terus mengalami peningkatan. Sementara itu laju pertumbuhan penduduk secara konsisten mengalami penurunan yaitu dari 1,28 persenmenjadi 1,22 persen. Persentase pasangan usia subur (PUS) sebagai peserta KB aktif terjadi penurunan dari 87,39% tahun 2011 menjadi 82,72% tahun 2014(Tabel 2.53).Kesadaran dan partisipasi PUS dalam mengikuti program KB perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan ke depan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Tabel2.50

Perkembangan Penduduk dan Keluarga Berencana

di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Jumlah Penduduk | 42.5100 | 42.7800 | 43.0600 | 43.3300 |
| Jumlah Kelahiran | 4.923 | 4.960 | 5.118 | 4.954 |
| Laju Pertumbuhan Penduduk (%) | 1,28 | 1,26 | 1,24 | 1,22 |
| Pasangan Usia Subur (PUS) | 84.985 | 86.381 | 85.646 | 86.510 |
| Pangan Usia Subur (PUS) peserta KB Aktif | 74.249 (87,39%) | 75.996  (87,98%) | 71.901  (83,95%) | 71.562  (82,72%) |
| Pangan Usia Subur (PUS) bukan peserta KB | 10.736 | 10.385 | 13.745 | 14.948 |

Sumber: Kantor KB Kabupaten Tabanan,2014

1. **PERHUBUNGAN**

**Tabanan sebagai salah satu daerah dalam kawasan metropolitan SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) mengalami perkembangan yang cukup pesat. Tabanan tidak lagi sebagai kota penyangga yang tidur, melainkan sudah tumbuh menjadi kota dengan pertumbuhan aktivitas sosial dan ekonomi yang cukup pesat. Hal ini perlu didukung oleh sistem transportasi yang tertata baik. Sebagimana dimaklumi, fungsi utama sistem transportasi adalah menciptakan kelancaran, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pergerakan orang, barang, dan jasa dari tempat asal ke tempat tujuan. Beberapa aspek yang berkaitan dengan sistem transportasi di Kabupaten Tabanan akan diuraikan dalam bahasan di bawah ini.**

1. **Angkutan Jalan**

Jumlah Sarana Angkutan (umum dan pribadi) dalam tiga tahun terakhir dirinci pada Tabel 2.51

Tabel 2.51

Jenis Angkutan Umum di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Kendaraan** | **2013**  **(unit)** | **2014**  **(unit)** | **2015**  **(unit)** |
| 1 | Mobil Penumpang | 18.011 | 19.224 | 24.685 |
| 2 | Mobil Barang | 12.801 | 12.746 | 16.671 |
| 3 | Bus Besar | 589 | 408 | 623 |
| 4 | Sepeda Motor | 250.104 | 197.410 | 309.860 |
| Jumlah | | 281.505 | 229.788 | 351.839 |

Sumber:Dishub Kabupaten Tabanan,2015

Kabupaten Tabanan telah mengeluarkan kebijakan strategis berupa pengembangan angkutan “Trans Serasi” yang memfasilitasi transportasi untuk siswa. Angkutan Trans Serasi ini dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh siswa sehingga dapat menekan angka kecelakaan dan memberikan rasa aman pada orang tua di rumah. Saat ini angkutan ini telah mampu melayani 4 kecamatan, yaitu: Kecamatan Tabanan, Kediri, Kerambitan, dan Penebel.

Dalam lingkup regional (kawasan SARBAGITA), telah dikembangkan angkutan massal “Trans Sarbagita” dan sejak tahun 2015 telah dibuka koridor Tabanan – Mengwi – Bandara. Namun, angkutan umum ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

1. **Arus Penumpang Angkutan Umum**

Minat masyarakat terhadap angkutan umum mengalami kecenderungan menurun setiap tahun. Angkutan umum yang dimaksud adalah angkutan darat (bis). Hal ini ditunjukkan oleh menurunnya jumlah penumpang setiap tahun (Tabel 2.52)

Tabel 2.52

Jumlah Penumpang Angkutan Umum

Tahun 2010 - 2014 di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Jumlah penumpang Bis | 38.158 | 35.778 | 36.225 | 35.158 |

Sumber: DisHub Kabupaten Tabanan,2014

Rendahnya minat masyarakat terhadap angkutan umum tidak terlepas dari kondisi angkutan umum yang mahal, kumuh, dan tidak tepat waktu. Di samping itu, faktor budaya berkenaan dengan status sosial-ekonomi juga berpengaruh terhadap pilihan penggunaan mobil pribadi atau angkutan umum. Alat transportasi sepeda motor yang terjangkau oleh daya beli sebagian besar masyarakat menjadi pilihan yang dianggap lebih praktis dibandingkan dengan angkutan umum.

1. **Ijin Trayek**

Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga dapat meminimalisir trayek ilegal.

Ijin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan pada tahun 2014 sebanyak 129 izin. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan maupun penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2010-2013). Adapun rasio izin trayek terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tabanan pada tahun 2010-2014, masing-masing adalah 0,00022, 0,00020, 0,00023 dan 0,00030.

Tabel 2.53

Rasio Ijin Trayek Tahun 2010 - Di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1. | Izin Trayek perkotaan | n.a | 89 | 80 | 93 | 125 |
| 2. | Izin Trayek perdesaan | n.a | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 3. | Jumlah Izin Trayek | n.a | 93 | 85 | 99 | 129 |
| 4. | Jumlah penduduk | 422.300 | 425.100 | 427.800 | 430.600 | 433.300 |
| 5. | Rasio Izin Trayek | n.a | 0,00022 | 0,00020 | 0,00023 | 0,00030 |

Sumber: DisHub Kabupaten Tabanan,2014

1. **Jumlah uji kir angkutan umum**

Seluruh angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan tidak mencemari lingkungan. Jumlah angkutan umum yang telah melakukan uji kir pada tahun 2014 sebanyak 6.239 unit atau sebesar 350 %. Jumlah ini tidak signifikan peningkatnannya dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 (Tabel 2.54)

Tabel 2.54

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Tahun 2010 - 2014 Di Kabupaten Tabanan

| **No** | **Angkutan Umum** | **2010** | | | **2011** | | | **2012** | | | **2013** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jmlh** | **Jmlh KIR** | **%** | **Jmlh** | **Jmlh KIR** | **%** | **Jmlh** | **Jmlh KIR** | **%** | **Jmlh** | **Jmlh KIR** | **%** | **Jmlh** | **Jmlh KIR** | **%** |
| 1. | Mobil penumpang umum | 194 | 396 | 102,1 | 265 | 470 | 88,7 | 292 | 700 | 119,9 | 375 | 864 | 115,2 | 508 | 1.133 | 111,5 |
| 2. | Mobil bus | 222 | 441 | 99,3 | 216 | 419 | 97,0 | 230 | 457 | 99,3 | 228 | 444 | 97,4 | 229 | 454 | 99,1 |
| 3. | Mobil barang | 1.596 | 3.056 | 95,7 | 1.773 | 3.466 | 97,7 | 1.925 | 3.796 | 98,6 | 2.254 | 4.308 | 95,6 | 2.358 | 4.651 | 98,6 |
| 4. | Kereta gandengan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Kereta tempelan | 1 | 1 | 50,0 | 1 | 1 | 50,0 | 2 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 50,0 |
|  | Jumlah | 2.013 | 3.894 | 347 | 2.255 | 4.356 | 333 | 2.449 | 4.955 | 368 | 2.858 | 5.618 | 408 | 3.096 | 6.239 | 359 |

Sumber: DisHub Kabupaten Tabanan,2014

1. **Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis**

Kabupaten Tabanan tidak memiliki pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Prasarana yang dimiliki adalah terminal bis sebanyak 3 unit.Ketiga terminal bis tersebut tidak berfungsi maksimal sebagai terminal penumpang, melainkan lebih dominan dimanfaatkan untuk parkir dan pasar.

1. **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa di internal Pemerintah Kabupaten Tabanan dilakukan dengan mengintegrasikan jaringan, perangkat lunak, dan perangkat keras antar Perangkat Daerah. Disamping itu untuk penyebaran informasi, dilaksanakan melalui website daerah dan kerjasama dengan pengelola siaran radio, televisi, dan surat kabar. Adapun kerjasama yang telah dilaksanakan untuk penyebaran informasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk Jenis surat kabar yang masuk ke daerah kerjasama dengan :
2. Surat kabar lokal sebanyak sembilan ( 9 ) penerbit
3. Surat kabar Nasional sebanyak dua ( 2 ) penerbit
4. Untuk jumlah penyiaran media elektronik yang masuk ke daerah kerjasama dengan :
5. TV Lokal sebanyak tiga ( 3 ) stasiun
6. Siaran radio lokal sebanyak satu ( 1 ) stasiun

Berkenaan dengan keberadaan prasarana komunikasi di Kabupaten Tabanan akan dijelaskan dalam uraian berikut.

1. **Jumlah Jaringan Komunikasi**

Jumlah jaringan telekomunikasi di Kabupaten Tabanan sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami penurunan dari 13.146 pada tahun 2010 menjadi 12.571 pada tahun 2014

Tabel 2.55

Jaringan Komunikasi di Kabupaten Tabanan

Tahun 2010 – 2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1 | Jumlah jaringan telepon genggam | - | - | - | - | - |
| 2 | Jumlah jaringan telepon stasioner | 13.146 | 13.583 | 12.515 | 12.160 | 12.571 |
| 3 | Total jaringan Komunikasi (1+2) | 13.146 | 13.583 | 12.515 | 12.160 | 12.571 |

Sumber: Inforkom Kabupaten Tabanan,2014

1. **Jumlah surat kabar nasional/lokal**

Jumlah surat kabar nasional/lokal di Kabupaten Tabanan sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 tidak mengalami perubahan dimana data menunjukkan hanya terdapat 1 koran lokal yang ada di Kabupaten Tabanan

1. **Jumlah penyiaran radio/TV lokal**

Jumlah stasiun penyiaran radio lokal di Kabupaten Tabanan sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 tidak mengalami perubahan, yakni 7 stasiun radio lokal.

1. **KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (KUKM)**

Dalam upaya menggerakkan dan menumbuhkan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat dan memperkokoh ketahanan ekonomi daerah, keberadaan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) harus mampu ditingkatkan peran dan kontribusinya. Kondisi kedua lembaga pelaku ekonomi tersebut di Kabupaten Tabanan dijelaskan dalam uraian berikut.

1. **Persentase Koperasi Aktif**

Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Tabanan dari sisi jumlah kian meningkat (Tabel 3.36). Koperasi aktif dicirikan oleh koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Jenis usaha yang digeluti adalah koperasi simpan pinjam sebanyak 23%, koperasi serba usaha sebanyak 60%, koperasi usaha lainnya 8%. Dari Jumlah tersebut hanya 8,8% koperasi yang menggeluti sektor riil seperti koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan lainnya. Kondisi ini mensyaratkan, ke depan bidang usaha koperasi mesti dikembangkan tidak hanya terbatas pada usaha simpan-pinjam, serba usaha saja melainkan pada usaha-usaha sektor riil, seperti koperasi tani.

Tabel 2.56

Persentase Koperasi Aktif

Tahun 2010 - 2014 Di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1 | Jumlah koperasi aktif | 432 | 446 | 468 | 478 | 493 |
| 2 | Jumlah koperasi | 477 | 490 | 512 | 528 | 540 |
| 3 | Persentase koperasi aktif | 90,57 | 91,02 | 91,41 | 90,53 | 91,30 |

Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Tabanan,2014

1. **Jumlah UKM non BPR/LKMUKM**

Jumlah UKM di Kabupaten Tabanan sejak tahun 2011 mengalami peningkatan yang signifikan dari 545 UKM meningkat menjadi 1.260 UKM di tahun 2014. Peningkatan ini menunjukkan semakin bergairahnya industri kecil dan menengah bagi masyarakat di Kabupaten Tabanan.

Tabel 2.57

Jumlah UKM Non BPR/LKM

Tahun 2011 - 2014 di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1 | Jumlah seluruh UKM | 545 | 1.358 | 1.512 | 1.260 |
| 2 | Jumlah BPR/LKM | - | - | - | - |
| 3 | Jumlah UKM non BPR/LKM | 545 | 1.358 | 1.512 | 1.260 |

Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Tabanan,2014

**K PENANAMAN MODAL**

Kabupaten Tabanan memiliki potensi dalam hal penanaman modal, baik bagi investor dalam negeri maupun asing. Sejak tahun 2010 jumlah investor dalam negeri tercatat sebanyak 1.059, namun pada tahun 2014 menurun menjadi 563. Jumlah investor asing jumlahnya masih sangat terbatas walaupun ada kecenderungan meningkat (Tabel 2.58). Kondisi ini mengindikasikan bahwa daya tarik investasi di Tabanan masih belum menggembirakan. Oleh karenanya, upaya-upaya meningkatkan daya tarik investasi harus dilakukan secara lebih serius. Pembenahan-pembenahan dalam hal: sarana-prasarana, kepastian hukum, perijinan, serta promosi harus mendapat prioritas penanganan.

Tabel 2.58

Jumlah Investor PMDN/PMA

Tahun 2010 s.d. 2014 di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1 | Jumlah investor PMDN | 1.059 | 932 | 1.264 | 634 | 563 |
| 2 | Jumlah investor PMA | 2 | 7 | 12 | 15 | 17 |
|  | Total investor | 1.061 | 939 | 1.276 | 649 | 580 |

Sumber: Dinas Perijinan Kabupaten Tabanan,2014

1. **ENERGI DAN SUMBER DAYA MENERAL**

Kabupaten Tabanan tidak memiliki sumber daya alam berupa energi dan sumber daya mineral. Gambaran rumah tangga yang menggunakan listrik PLN di sajikan dalam table 2.59

Tabel 2.59

Jumlah Rumah Tangga yang Meggunakan Listrik PLN

Tahun 2012- 2014 Di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **TAHUN** | | | | **SATUAN** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| 1. | Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (PLN) | 98.880 | 104.329 | 108.751 | 111.380 | KK |
|  | a. Rumah Tangga dengan daya 450 watt | 39.389 | 38.719 | 35.664 | 34.711 | KK |
|  | b. Rumah Tangga dengan daya 900 watt | 31.767 | 35.672 | 40.167 | 39.963 | RT |
|  | c. Rumah Tangga dengan daya 1300 watt | 22.154 | 23.410 | 25.406 | 28.618 | RT |
|  | d. Rumah Tangga dengan daya 2200 watt | 4.161 | 4.841 | 5.530 | 5.890 | RT |
|  | e. Rumah Tangga dengan daya >2200 watt | 1.409 | 1.687 | 1.984 | 2.198 | RT |
| 2. | Daya Listrik Terpasang | 91.601.650 | 99.422.350 | 108.076.300 | 113.627.550 | VA |
| 3. | Jumlah Kebutuhan Listrik | 10.485 | 11.694 | 12.533 | 12.567 | GWH |

Sumber : PLN Kabupaten Tabanan, 2012

1. **KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Tabanan. Kondisi saat ini, jumlah gedung olah raga yang representative masih berjumlah 1 gedung. Demikian halnya cabang olahraga yang telah diikuti dari tahun 2010-2014 semakin mengalami peningkatan sebanyak 27 di tahun 2014. Peningkatan Cabang olahraga ini belum mapu menaikan rangking perolehan mendali dalam ajang Porprov Bali. Ke depan persoalan ini perlu mendapat perhatian semua pihak untuk meningkatkan kinerja di bidang pemuda dan olahraga.

Tabel 2.60

Jumlah cabang dan gedung olahraga

Tahun 2012- 2014 Di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1 | Jumlah Cabang Olah Raga | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 |
| 2 | Jumlah Gedung Olah Raga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ranking Kabupaten dalam POR Prov | - | 9 | - | 8 | - |
| 4 | Jumlah Organisasi Kepemudaan | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Kegiatan Kepemudaan | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 6. | Kegiatan Keolahragaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Sumber: Dinas Pendidikan,2014

1. **STATISTIK**

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 274 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem Informasi Pembangunan Daerah ( SIPD ) dan dalam pasal 391 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (Informasi pembangunan dan Keuangan Daerah) yang dikelola dalam suatu sistem informasi. Data SIPD bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, melalui ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi satu kesatuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Adapun capaian kinerja pelayanan urusan wajib bidang statistik adalah:Tersusunnya buku Basis Data Dukungan Perencanaan Daerah (Data Series Tahun 2012–2015).

1. **KEBUDAYAAN**

Kinerja urusan wajib non pelayanan dasar capaian kinerja bidang kebudayaan di Kabupaten Tabanan diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ada sebanyak 320 cagar budaya. Pelestarian cagar budaya tersebut tahun 2011- 2014 tidak ada penambahan jumlah cagar budaya yang dilestarikan;
2. Kesenian sakral yang ada di Kabupaten Tabanan sejumlah 85 jenis kesenian sakral. Dari jumlah tersebut pada tahun 2011 hanya 4 jenis kesenian sakral yang dapat dilestarikan. Sejak tahun 2012-2014 tidak ada aktifitas kesenian sakral yang dapat dilestarikan. Untuk menghindari kepunahan kesenian sakral kedepan kondisi ini patut menjadi perhatian lebih serius lagi.
3. Pagelaran seni yang dilakukan Kabupaten Tabanandari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari 8 pagelaran tahun 2010 hingga 15 pagelaran seni yang dapat dipagelarkan pada tahun 2014.
4. Kasus adat pada 344Desa Adat (Desa Pekraman) yang ada di Kabupaten Tabanan kejadiannya dari 10 kejadian pada tahun 2010, dapat diturunkan menjadi tersisa kejadian pada tahun 2015.

Tabel 2.61

Jumlah Cagar Budaya,Pagelaran Senibudaya dan kasus adat

Tahun 2012- 2014 Di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1 | Jumlah cagar budaya yang dilestarikan | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 2 | Jumlah Kesenian Sakral yang Dapat Dilestarikan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jumlah Pagelaran Seni Budaya | 3 | 0 | 10 | 6 | 15 |
| 4 | Jumlah desa yang ditemukan kasus adat | 10 | 2 desa | 2 desa | 3 desa | 1 desa |

Sumber: Disbudpar Kabupaten Taabanan,2014

1. **PERPUSTAKAAN**

Kinerja urusan Perpustakaan di Kabupaten Tabanan diuraikan sebagai berikut:

1. **Jumlah Perpustakaan**

Jumlah perpustakaan milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Tabanan berjumlah satu unit,tidak terdapat penambahan jumlah sejak 2010 hingga 2014 yang dimilik oleh non pemerintah Daerah.

1. **Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun**

Jumlah pengunjung perpustakaan sejak tahun 2010 mengalami peningkatan dan penurunan, puncak menurunnya adalah pada tahun 2014 yang hanya 7.356 pengunjung selama setahun. Hal ini mengindikasikan budaya baca masyarakat belum konsisten dan terus perlu ditingkatkan sosialisasinya disamping melengkapi dengan penambahan jumlah judul buku bacaan, dan sarana dan prasarana perpustakaan perlu terus dilengkapi sehingga dapat menarik minat pengunjung untuk datang ke perpustakaan.

Tabel 2.62

Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Tahun 2010 - 2014 Di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1. | Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (orang) | 8.624 | 10.134 | 8.017 | 10.466 | 7.356 |
| 2. | Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda | - | - | - | - | - |
| 3. | Total pengunjung Perpustakaan (1+2) | 8.624 | 10.134 | 8.017 | 10.466 | 7.356 |

Sumber: Disperpus,2014

1. **Kearsipan**

Arsip merupakan rekaman Kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kearsipan daerah yang diselenggarkan di Kabupaten Tabanan dimaksudkan tidak saja penting untuk mempelajari masa lalu tetapi juga dampak pengetahuan masa kini dan masa yang akan datang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang – undang No. 43 Tahun 2009, ada 5 fungsi arsip yang diharapkan sebagai berikut:

1. Membantu pengambilan keputusan para manager atau pimpinan yang memerlukan informasi yang bersumber dari Arsip – arsip yang tercipta.
2. Menunjang perencanaan dalam rangkap penyiapan dokumen perencanaan, diperlukan pula informasi. Perencanaan jangka panjang memerluka informasi dari Arsip inaktif dan statis, sedangkan perencanaan jangka pendek memerlukan informasi dari Arsip Aktif.
3. Mendukung pengawasan, untuk melaksanakan pengawasan diperlukan informasi tentang rencana apa yang akan dilakukan dan apa yang belum dilaksanakan.
4. Sebagai alat pembuktian, dalam proses pengadilan perkara pidana maupun perdata, semua pihak memerlukan Arsip untuk pembuktian dalam menunjang tuntutan maupun pembelaan.
5. Sebagai bahan penelitian ; arsip digunakan untuk kepentingan penelitian , tuntutan maupun kegiatan yang menunjuk pada masa lampau.

Sampai tahun 2015 urusan tugas pokok dan fungsi tersebut belum optimal dapat diselenggarakan disebabkan karena sumber daya manusia pendukungnya tidak memadai dan sering dimutasi ke tempat tugas OPD yang lain, disamping kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kearsipan daerah.

Capaian kinerja pelayanan urusan wajib di bidang kearsipan sampai tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dari total 48 OPD yang ada di Kabupaten Tabanan jumlah pengelolaan arsip secara baku/benar capaiannya sangat kecil. Pada tahun 2014 baru hanya mencapai 20%, hal ini disebabkan karena bidang tugas kearsipan tidak tersosialisasi dengan baik sehingga belum dianggap urusan penting;

B. Jumlah partisipasi perangkat daerah (arsip Pemerintahan) yang melakukan penyimpanan di kantor arsip daerah juga masih sangat kecil. Sampai tahun 2014 tercatat hanya 20 box arsip yang tersimpan. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi penyimpanan arsip-arsip OPD di Kantor Arsip daerah masih sangat kecil sehingga hal ini perlu mendapat perhatian serius.

C. Tingkat partisipasi arsip yang masuk katagori kesejahteraan masyarakat seeperti arsip-arsip yang berhubungan dengan bidang keuangan, dan arsip-arsip yang berhubungan dengan kependudukan dan pencatatan sipil, partisipasinya cukup tinggi. Sampai tahun 2014 (table 2.63) sudah mencapai 1.348 box arsip tersimpan di kantor kearsipan daerah.

Tabel 2.63

Capaian kinerja urusan kearsipan Kabupaten Tabanan

Tahun 2010 - 2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1. | Pengelolaan arsip (OPD) | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% |
| 2. | Pemerintahan | 10 Box | 10 Box | 15 Box | 20 Box | 20 Box |
| 3. | Kesejahteraan | 1.248 Box | 1.300 Box | 1.320 Box | 1.348 Box | 1.348 Box |

Sumber: Kantor Persip Kab. Tabanan tahun 2014

1. **Pertanahan**
2. **Persentase Luas Lahan Bersertifikat**

Jumlah luas tanah bersertifikat di Kabupaten Tabanan berjumlah 77.366.651 dengan rincian 74.366.651 bersertifikat hak milik dan 3.380.939 bersertifikat hak guna bangunan. Sedangkan luas tanah bersertifikat hak guna usaha berjumlah hanya 500.

Tabel 2.64

Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2015

Di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **2015** |
| 1. | Luas wilayah daratan (km2) | 839,33 |
| 2. | Luas tanah bersertifikat HGB | 3.380.939 |
| 3. | Luas tanah bersertifikat HGU | 500 |
| 4. | Luas tanah bersertifikat HM | 74.366.651 |
| 5. | Luas tanah bersertifikat HPL | 8 |
| 6. | Total luas tanah bersertifikat | 77.748.094 |

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Tabanan,,2015

**2.3.3.Fokus Urusan Pilihan**

1. **Kelautan Dan Perikanan**

Capaian kinerja urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Tabanan untuk aktivitas di hulu, tengah dan hilir dapat dijelaskn sebagai berikut:

1. Pada sektor hulu tingkat produksi perikanan budidaya dan tangkap dari tahun 2011-2014 semakin meningkat. Pada tahun 2011 produksi perikanan budidaya sebesar 2.093,1 ton, meningkat produksinya menjadi 3.900,2 Ton pada tahun 2014. Sedangkan produksi perikanan tangkap pada tahun 2011 sebesar 810,7 ton, meningkat menjadi 881,0 ton pada tahun 2014 (Tabel 2.68). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tabanan mempunyai potensi yang dapat dikembangkan dalam sector perikanan, tidak hanya pada produksi perikanan, namun pada pengolahan hasil perikanan.
2. Pada sektor tengah yang didefinisikan sebagai kegiatan pengolah hasil produksi telah diolah menjadi aneka olahan oleh 63 kelompok pengolah dan pemasaran (Polahsar) menjadi 14 jenis aneka olahan ikan dengan jumlah produksi 2.264,4 Ton. Dari jumlah tersebut sebanyak 27 Polahsar jenis olahan sudah memperoleh ijin keamanan pangan seperti SIUP/SITU. Aneka olahan perikanan tersebut sebanyak 14 jenis aneka olahan sudah memiliki daya saing regional dan produknya sudah beredar dan dipasarkan ke kota Denpasar, Mangupura dan Jembrana. Produk olahan yang memiliki daya saing tersebut antara lain seperti olahan sate ikan, keripik belut, triwijen, bakso ikan, Abon ikan, naget ikan dan lain-lain. Ada satu produk Polashar yang diakui secara nasional dan berhak atas ijin/SNI yaitu Polahsar Taman Griya.
3. Capaian kinerja di sektor hilir bidang perikanan yang diukur dari tingkat mengkonsumsi ikan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tingkat konsumsi ikan Kabupaten Tabanan pada tahun 2011 tercatat sebesar 25,7 kg/kapita/tahun, meningkat pada tahun 2015 menjadi 29,3 kg/kapita/tahun. Angka ini masih dibawah tingkat konsumsi ikan provinsi Bali sebesar 32 kg/kapita/tahun. Untuk mengejar kekurangan ini perlu usaha-usaha untuk menggalakan gerakan gemar makan ikan (GMI).

Tabel 2.65

Tingkat produksi perikanan

Tahun 2011- 2014 Di Kabupaten Tabanan

| **No** | **Uraian** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produksi perikanan budidaya | 2.093,1 ton | 2.616 ton | 3356,6 ton | 3.900,2 ton |
| 2 | Produksi perikanan tangkap | 810,7 ton | 813,3 ton | 857,9 ton | 881,0ton |

Sumber Dinas Perikanan,2014

1. **Pariwisata**

Maraknya kemajuan sektor pariwisata di Provinsi Bali berdampak positif bagi pariwisata Tabanan. Dua obyek Wisata yang sudah sangat terkenal serta menjadi icon Bali adalah Tanah Lot dan Pura Ulun Danu Beratan. Kunjungan obyek wisata terbanyak di Bali juga diraih oleh Tanah Lot. Disamping itu ditetapkannya Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) oleh Unesco pada 20 Juni 2012, menambah dikenalnya pariwisata Tabanan di mancanegara. Kunjungan Wiasta dari tahun- ketahun terus mengalami peningkatan sebagaimana yang ditunjukan pada tabel 2.66.

Tabel 2.66

Data Kunjungan Wisatawan Nusantara Dan Mancanegara Pada Daya Tarik Wisata Kabupaten Tabanan Tahun 2012 - 2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Jumlah Kunjungan** | | **Jumlah** |
| **Nusantara** | **Mancanegara** |
| 1 | 2012 | 1.336.074 | 1.093.788 | 2.429.862 |
| 2 | 2013 | 1.224.204 | 803.599 | 2.027.803 |
| 3 | 2014 | 1.246.262 | 1.070.562 | 2.316.824 |
| 4 | 2015 | 1.344.573 | 1.133.958 | 2.478.531 |

Sumber Disbudpar,2014

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari tahun 2012 sd tahun 2014 juga mengalami peningkatan. Hanya pada tahun 2009 dan 2012 sempat menurun, dimana pada tahun 2012 kontribusi pariwisata terhadap PDRB sebesar 18,68 %, pada tahun 2013 menjadi 19,88%, pada tahun 2014 meningkat menjadi 21,66 %, rata rata peningkatan Empat Tahun terakhir sebesar 1,49%.

1. **Pertanian**

Pertanian menjadi faktor kunci dalam penyelamatan ekonomi masyarakat Tabanan karena sektor ini masih menjadi kontributor terbesar dalam struktur lapangan usaha ekonomi daerah. Sektor pertanian terbagi menjadi beberapa sub sektor, yaitu: sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Masing-masing sub sektor ini memiliki beberapa komoditi unggulan yang memiliki nilai ekonominya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan komoditi-komoditi lainnya. Berikut disajikan perkembangan kinerja beberapa komodititi unggulan tersebut.

1. Sub sektor tanaman pangan dan hortikultura terdiri dari beberapa komoditi penting yang berpengaruh sangat besar terhadap inflasi karena menjadi kebutuhan pokok. Di samping itu, komoditi ini juga sebagai bahan baku industri pangan dan pakan ternak. Komoditi dimaksud adalah: padi, jagung, kedele, dan cabe. Komoditi padi sebagai sumber utama karbohidrat telah dibahas secara khusus pada sub bahasan Urusan Pangan, selanjutnya dalam bahasan ini difokuskan pada komoditi jagung, kedele, dan cabe yang merupakan komoditi strategis selain padi. Kebutuhan jagung dan kedele dalam negeri masih dipenuhi dari impor. Animo petani mengusahakan tanaman ini masih sangat rendah, termasuk petani di Tabanan. Hal ini terlihat dari luas tanam, tingkat produksi, dan produktivitas kedua kemoditi ini masih sangat rendah (Tabel 2.67). Pertanaman yang terpencar atau sporadis, keterbatasan informasi pasar, serta tidak adanya kepasatian harga bagi petani menjadi kendala utama dalam pengembangan komoditi ini. Oleh karenanya, intervensi pemerintah yang lebih komprehensif hulu-hilir sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman jagung dan kedele. Berbeda halnya dengan tanaman cabe, animo petani membudidayakan tanaman ini cukup besar karena komoditi ini relatif lebih luas pemasarannya. Kendala utama yang dihadapi adalah daya simpan/ketahanan produk ini sangat terbatas. Kecamatan Baturiti merupakan sentra penghasil cabe di Tabanan dan mempunyai pengaruh besar terhadap stok cabe di Bali apabila di kawasan ini mengalami gagal panen.

Tabel 2.67

Tingkat Produksi, Luas Tanam, dan Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2011-2015

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | KOMODITAS | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | JAGUNG |  |  |  |  |  |
|  | produksi (ton) | 7.620 | 1.222 | 3.023 | 2.128 | 5.035 |
|  | luas tanam (ha) | 1.624 | 349 | 508 | 582 | 836 |
|  | produktivitas (ku/ha) | 60,96 | 61,00 | 84,73 | 54,14 | 72,45 |
| 2 | KEDELE |  |  |  |  |  |
|  | produksi (ton) | 996 | 1.251 | 439 | 683 | 679 |
|  | luas tanam (ha) | 1.098 | 1.301 | 494 | 634 | 610 |
|  | produktivitas (ku/ha) | 9,50 | 10,50 | 9,26 | 11,70 | 11,81 |
| 3 | CABE (ton) | 1.961 | 4.021 | 27.506 | 36.339 | 20.554 |

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Tabanan

1. Sub sektor perkebunan di Kabupaten Tabanan terdiri dari beberapa komoditi unggulan, yaitu: kelapa, kakao, kopi robusta, cengkeh, aren, dan lain-lain. Sentra produksi tanaman kelapa dan kakao ada di 3 kecamatan, yaitu: Kecamatan Selemadeg Timur, Selemadeg, dan Selemadeg Barat. Tingkat produksi kelapa di Tabanan hampir stagnan dari tahun ke tahun. Peremajaan kelapa sangat jarang dilakukan mengingat saat ini nilai jual hasil panen kelapa sangat fluktuatif. Petani pemilik kebun kelapa hampir tidak memiliki nilai tawar terhadap hasil panen. Harga panen sangat dominan dikendalikan oleh pedagang pengepul dan tukang panjat. Tanaman kakao yang umumnya ditanam tumpangsari dengan kelapa tingkat produksinya masih sangat rendah, jauh di bawah potensi yang dimiliki. Keseriusan petani dalam merawat tanamannya (pemangkasan, pemupukan, dan pembersihan kebun) secara rutin dan adanya serangan hama/penyakit busuk buah merupakan faktor penyebab rendahnya produksi. Tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomi relatif baik adalah kopi dan cengkeh. Kecamatan Pupuan sebagai sentra penghasil kopi robusta terbaik memiliki peluang yang sangat besar untuk meningkatkan produksi dan pendapatan dari tanaman kopi. Kondisi yang terjadi di lapangan, sebagian besar tanaman kopi tidak dirawat dengan baik dan sebagian lagi kebun kopi perlu diremajakan. Setelah lama terjadi tanaman cengkeh ditebang oleh pemiliknya, saat ini tanaman cengkeh kembali menunjukkan harga panen yang cukup baik. Petani kembali bergairah menanam dan memelihara tanaman yang masih ada sehingga tingkat produksi per tahun cenderung mengalami peningkatan (Tabel 2.68).Tanaman kebun yang tidak kalah menjadi sumber pendapatan petani adalah pohon aren. Pohon ini diambil niranya untuk diproses menjadi gula merah. Pusat produksi gula merah ada di Desa Karyasari dan Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan. Nilai tambah yang dihasilkan dari produksi gula merah belum maksimal karena proses pembuatannya masih tradisional dan sentuhan teknologi modern masih sangat terbatas. Dari sisi budidaya, tanaman ini tidak dibudidyakan secara khusus, tumbuh dengan sendirinya dan hanya dipanen niranya dengan teknologi yang sudah diwariskan secara turun-temurun.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | KOMODITAS | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | KELAPA | 16.231,75 | 15.234,17 | 14.540,44 | 15.639,05 | 14.634,28 |
| 2 | KOPI ROBUSTA | 3.867,37 | 4.681,17 | 6.368,40 | 4.529,59 | 6.368,47 |
| 3 | KAKAO | 1.397,11 | 1.058,20 | 2.106,67 | 2.333,04 | 2.105,84 |
| 4 | CENGKEH | 8,71 | 677,45 | 710,7 | 502,94 | 710,7 |
| 5 | AREN | 3,40 | 3,40 | 1.403,01 | 5,60 | 1.403,02 |

Tabel 2.68

Perkembangan Produksi beberapa Komoditas Perkebunan (ton)

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Tabanan

1. Sub sektor peternakan terdiri dari beberapa ternak utama, yaitu: sapi, babi, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, dan itik. Populasi sapi di Tabanan terus mengalami penurunan, demikian pula di Bali. Keberadaan sapi di Tabanan menempati peringkat lima di Bali, setelah Kabupaten Karangasem, Buleleng, Bangli, dan Jembrana. Data terakhir menunjukkan populasi sapi di Tabanan diperkirakan mencapai 51.567 ekor (Tabel 2.69). Kecamatan Baturiti, Marga, dan Penebel memiliki populasi sapi terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya. Ternak sapi sebagian besar dimiliki oleh petani dengan kepemilikan rata-rata 1-2 ekor per petani. Sebagian besar ternak sapi diperuntukkan sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dijual untuk kepentingan pendidikan anak, upacara, biaya rumah sakit, dan lain-lain. Selain sapi, ternak babi dan ayam ras petelur juga banyak diternakkan di Tabanan. Kedua jenis ternak ini Tabanan menempati urutan ke dua di Bali. Stabilitas harga pakan dan nilai jual hasil ternak sangat besar pengaruhnya terhadap populasi ternak. Babi sangat rentan terhadap gejolak harga pakan dan nilai jual hasil ternak. Ayam petelur relatif lebih stabil dari harga jual telur namun harga pakan yang terus meningkat merupakan keluhan utama dari peternak ayam. Kecamatan Marga, Selemadeg Timur, dan Tabanan adalah tiga kecamatan dengan populasi ternak babi terbanyak, sedangkan untuk ayam petelur populasi terbanyak ada di Kecamatan Penebel, Baturiti, dan Tabanan. Ayam ras pedaging populasi terbanyak di Bali ada di Kabupaten Tabanan, dengan sentra-sentra ternak ada di Kecamatan Baturiti, Penebel, dan Tabanan. Peningkatan jumlah pusat-pusat wisata kuliner di Bali berimbas pada peningkatan peternak dalam budidaya itik. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya populasi itik di Tabanan, khususnya di Kecamatan Baturiti, Kerambitan, dan Kediri. Ternak lain yang cukup potensial sebagai sumber pendapatan petani khususnya di Kecamatan Pupuan, Selemadeg Barat, dan Selemadeg pada wilayah-wilayah dataran tinggi adalah kambing. Integrasi ternak ini dengan tanaman kopi sangat baik karena kambing juga sebagai sumber pupuk organik yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kesuburan tanah. Demikian pula, tanaman kopi membutuhkan pohon penaung yang sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai pakan kambing.

Tabel 2.69

Perkembangan Populasi beberapa Ternak Utama di Tabanan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | SAPI | 53.800 | 52.916 | 51.567 |
| 2 | BABI | 91.272 | 92.932 | 99.378 |
| 3 | AYAM RAS PETELUR | 1.900.455 | 1.772.325 | 1.877.492 |
| 4 | AYAM RAS PEDAGING | 2.137.080 | 2.761.465 | 2.883.908 |
| 5 | ITIK | 95.601 | 103.068 | 111.397 |
| 6 | KAMBING | 4.249 | 5.009 | 4.832 |

Sumber: Cacah Jiwa Ternak Bali, 2015

1. **Perdagangan**

Aktivitas ekonomi yang mengatur arus barang dan jasa di Kabupaten Tabanan periode 2010-2015 baik dari ketersediaa maupun pendistribusiannya dapat berjalan dengan baik hal ini diuraikan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perdagangan Dalam Negeri

Untuk memenuhi kebutuhan komuditi bahan makanan pokok seperti beras, minyak goreng dan gula tahun 2015 menurut BPS Tabanan harganya merata sepanjang tahun dan tidak terjadi fluktuasi harga yang tinggi. Dilaporkan juga untuk harga beberapa komuditi hasil pertanian seperti ikan laut, bayam dan bawang merah juga tidak terjadi peningkatan harga yang tinggi. Sedangkan untuk harga beberapa komuditi bahan bangunan seperti batako, dan kayu balokan sepanjang tahun 2015 relatif stabil walaupun ada peningkatan aktivitas fisik pembangunan seperti sarana dan prasarana perumahan.

1. Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan luar negeri di Kabupaten Tabanan meliputi ekpor dan impor. Perkembangan nilai ekspor non migas selama periode tahun 2012-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 nilai ekspor non migas mencapai Rp. 50.400.000.000,00 dan perkembangannya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 62.542.288.784,00

1. Prasarana dan Sarana Perdagangan

Prasarana perdagangan yang tersedia dan dilaksanakan di Kabupaten Tabanan adalah Pasar tradisional/pasar rakyat yang sampai tahun 2015 berjumlah 13 pasar tradisional tersebar diseluruh wilayah kecamatan. Keberadaan pasar-pasar tersebut dari segi fisik bangunan, kenyamanan pengunjung dan kebersihannya kurang memadai. Sampai saat ini baru hanya 5 (lima) pasar rakyat yang mendapat penanganan melalui revitalisasi pasar. Masih Ada 8 (delapan) pasar yang perlu mendapat penganan segera. Disisi lain pasar rakyat mendapat persaingan sesuai dengan perkembangan ekonomi global yaitu pasar modern tumbuh dengan pesat terutama diwilayah perkotaan bahkan sudah sampai merambah kewilayah pedesaan sehingga menjadi saingan dari pasar rakyat. Sehingga kebutuhan untuk meningkatkan sarana prasarana pasar rakyat dan kebijakan perijinan pasar modern ke depan perlu mendapat perhatian yang serius

1. **Perindustrian**

Capaian kinerja pelayanan urusan pilihan di bidang perindustrian tahun 2010-2015 cukup membanggakan. Lingkupan capaian kinerja bidang perindustrian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perkembangan industri kecil dan menengah Kabupaten Tabanan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan dilihat dari jumlah sentra, dan jumlah unit usaha. Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah pada tahun 2010 sebanyak 528 unit, meningkat pada tahun 2015 menjadi sebanyak 752 unit usaha;
2. Jumlah tenaga kerja yang dapat diserap pada IKM Kabupaten Tabanan kecenderungan mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja tahun 2010-2015. Tercatan pada tahun 2010 sebanyak 5.315 tenaga kerja yang dapat diserap dan meningkat sebanyak 6.382 orang pada tahun 2015;
3. Nilai investasi bidang IKM juga mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar Rp. 80.826.886.000,00 meningkat menjadi Rp. 345.350.608.000,00 pada tahun 2015, dan
4. Nilai produksi bidang IKM juga mengalami peningkatan pada lima tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2010 sebesar Rp. 308.160.525.000,00 meningkat menjadi Rp. 511.368.468 pada tahun 2015.

Jumlah IKM, tenaga kerja dan nilai investasi di Kabupaten Tabanan tahun 2010-2015 disajikan dalam tabel 2.70

Tabel 2.70

Jumlah IKM,Tenaga Kerja dan Nilai Investasi di Tabanan

Tahun 2010 - 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| 1 | Jumlah IKM | 528 | 644 | 614 | 678 | 699 | 752 |
| 2 | Tenaga kerja | 5.315 | 12.332 | 5.820 | 6.013 | 5.976 | 6.382 |
| 3 | Nilai Investasi (Rp.000) | 80.826.886 | 112.419.978 | 91.694.170 | 171.248.356 | 321.047.932 | 345.350.608 |
| 4 | Nilai Produksi (Rp.000) | 308.160.525 | 499.309.668 | 384.106.262 | 443.235.390 | 473.800.021 | 511.368.468 |

Sumber Disperindag,2015

1. **Transmigrasi**

Salah satu upaya yang dilakukan untuk pemerataan penyebaran penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui program transmigrasi. Pemerintah kabupaten Tabanan selalu berupaya untuk memenuhi minat masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan kesempatan kepada warganya untuk bertransmigrasi. Sepanjang tahun 2010-2014 Pemerintah Kabupaten Tabanan telah memberangkatkan 60 KK ke lokasi transmigrasi yang tersebar di Kabupaten-Kabupaten di Sulawesi.

Tabel 2.71

Jumlah transmigran dan Lokasi Transmigrasi di Tabanan

Tahun 2010 - 2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1. | Jumlah Transmigran (KK) | 10 | 15 | 25 | 10 | - |
| 2. | Lokasi Penempatan Transmigran | Kab. Toraja, Prov. Sulawesi Selatan | Kab. Konawe, prov. Sultra | Kab. Konawe, prov. Sultra | Kab. Minsel, prov. Sulawesi Utara | - |

Sumber Disnakertrans,2014

**2.3.4 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan**

* + - 1. **Perencanaan.**

Dukungan perencanaan dalam konteks pembangunan daerah sangatlah strategis dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Oleh karenanya ASN yang menangani bidang perencanaan haruslah memiliki kualifikasi tertentu dan dalam jumlah yang memadai. Keberadaan ASN yang menangani perencanaan di masing-masing OPD di Kabupaten Tabanan sampai tahun 2015 belum memadai dari sisi kualitas. Hal ini dibuktikan dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan oleh Kementerian Menpan dan RB masih katagori cukup (C). Hal ini mengindikasikan perencanaan yang dilakukan kurang efisien karena:

1. Tidak jelas hasil yang akan dicapai karena tujuan dan sasaran tidak berorientasi hasil;
2. Ukuran kinerja tidak jelas;
3. Tidak ada keterkaitan antara Program dan Kegiatan dengan Sasaran;dan
4. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

SAKIP ke depan diperlukanagar dapat berperan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran yang berorientasi pada hasil, hal ini sesuai PerpresNomor 29Tahun 2014tentang SAKIP. Walaupun sampai saat ini ketersediaan dan ketepatan waktu dalam menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD/RENSTRA, RKPD/RENJA, KUA/PPAS sudah tepat waktu, namun dari sisi kualitas masih perlu ditingkatkan. Salah usaha untuk meningkatkan kualitas perencanaan adalah mempercepat penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* yang terintegrasi dengan *e-performance,* serta meningkatkan kualitas perencana dengan berbagai pelatihan dan bimbingan teknis (Bintek).

* + - 1. **Kepegawaian**

Keberhasilan capaian pembangunan pada semua bidang sesuai yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan, tidak bisa dilepaskan dari peran sumberdaya manusia pendukungnya. Keterampilan, desiplin, ketaatan dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memadai sudah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tabanan sejak tahun 2010-2015. Untuk meningkatkan efisiensi aparatur pemerintahan di Kabupaten Tabanan telah diefektifkan dengan tidak melakukan rekrutmen CPNS baru dari umum. Pengangkatan dilakukan hanya dari tenaga honorer mulai tahun 2013 sampai 2014. Kebijakan ini mengakibatkan terjadi pertumbuhan negatif atau terjadi penurunan jumlah PNS sebanyak 4,6%. Penurunan ini dapat mengurangi anggaran belanja tidak langsung yang sampai tahun 2015 masih diatas 50%. Seperti tercantum dalam tabel 2.72

Tabel 2.72

Data Pegawai Pemerintah Kabupaten Tabanan 2010-2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| 1. | Jumlah ASN | 9834 | 9995 | 9424 | 9279 | 9030 | 9376 |
| 2 | SK Pengangkatan CPNS   1. Dari Umum 2. Dari Tenaga honorer | -  - | 306  - | -  - | -  207 | -  32 | 127  359 |
| 3 | Jumlah peserta Prajabatan | 289 | 496 | 680 | - | 206 | 401 |
| 4 | Jumlah tenaga Kontrak | - | 339 | 1213 | 1871 | 2248 | 2796 |
| 5 | Jumlah PNS yang Pensiun | 321 | 309 | 363 | 346 | 338 | 218 |

Sumber Badan Kepegawaian Daerah,2015

Kualitas PNS di Kabupaten Tabanan cukup memadai hal ini dapat disimak pada tabel 2.73 yang menunjukan bahwa tingkat pendidikan PNS sampai tahun 2015 rata-rata 50% lebih mengenyam pendidikan sarjana (S1) dan pendidikan master (S2).

Tabel 2.73

Tingkat pendidikan PNS dan CPNS

Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2010-2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tingkat Pendidikan** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| 1 | SD | 46 | 65 | 78 | 104 | 97 | 120 |
| 2 | SMP/SLTP | 162 | 170 | 168 | 181 | 154 | 173 |
| 3 | SMA/SLTA | 2379 | 2554 | 2111 | 2146 | 2050 | 2253 |
| 4 | Diploma 1 (D1) | 20 | 21 | 161 | 153 | 148 | 149 |
| 5 | Diploma 2 (D2) | 136 | 139 | 514 | 431 | 366 | 350 |
| 6 | Sarjana Muda (D3) | 368 | 401 | 704 | 689 | 664 | 699 |
| 7 | Sarjana S1 (D4) | 6140 | 6307 | 5389 | 5278 | 5260 | 5320 |
| 8 | Master (S2 | 583 | 306 | 299 | 297 | 291 | 312 |
| 9 | Doktor (S3) | - | - | - | - | - | - |
|  | Jumlah | 9834 | 9995 | 9424 | 9279 | 9030 | 9376 |

Sumber Badan Kepegawaian Daerah,2015

Pada sisi lain tabel 2.74 menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi pejabat srtuktural sampai tahun 2015, pejabat eselon II yang mendapatkan kesempatan untuk Diklat Pim II hanya 3 orang. Sedangkan bagi pejabat srtuktural eselon III dan IV sama sekali belum mendapat perhatian. Kondisi ini kedepan perlu mendapat perhatian lebih serius mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 sudah mengatur lebih lanjut Pendidikan dan Pelatihan bagi jabatan PNS.

Tabel 2.74

Jumlah PNS yang telah memenuhi

Pendidikan dan Pelatihan strutural

Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2010-2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Diklat** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| 1 | Diklatpim IV | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Diklatpim III | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Diklatpim II | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| 4 | Diklat Fungsional | - | 58 | 1 | 101 | 246 | 74 |
| 5 | Bimbingan Teknis | - | 360 | 136 | 84 | - | - |

Sumber Badan Kepegawaian Daerah,2015

* + - 1. **Sekretariat DPRD**

Peran lembaga Sekretariat Dewan dalam menunjang tugas-tugas Dewan Perwakilan Daerah secara teknis operasional dalam bidang fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan pembangunan, sangatlah strategis. Keberhasilan Sekretariat Dewan dalam menunjang tupoksi DPRD Kabupaten Tabanan,sejak tahun 2010 -2015 disajikan dalam table 2.75.

Tabel 2.75

Jumlah Perda yang berhasil disahkan

tahun 2010-2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| 1 | Jumlah Perda yang disahkan terkait fungsi legislasi | 8 | 34 | 10 | 12 | 17 | 15 |
| 2 | Jumlah kunjungan pimpina dan anggota | - | - | - | - | 22 | 23 |

Sumber Setwan Kabupaten Tabanan 2015

* + - 1. **Sekretariat Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah menetapkan kembali Sekretariat Daerah sebagai unsur penunjang urusan. Capaian kinerja yang telah berhasil diraih disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan seperti di bawah ini**.**

1. **Hukum dan perundang-undangan**

Dalam kurun waktu 2010-2015 telah berhasil menyelesaikan sebanyak 98buah Peraturan Daerah (Perda), dan 410 buah Peraturan Bupati serta 2.640 buah Keputusan Bupati. Penanganan sengketa hukum yang ada sebanyak 3 perkara, yang dapat diselesaikan sebanyak 3 perkara, dan sisanya dalam proses banding. Sedangkan dalam rangka penyeesaian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tidak ada, Jaringan Informasi Hukum (JDIH) telah melaksanakan proses input baik pusat maupun daerah sebanyak 142 buah.

1. **Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,Pemerintah Kabupaten Tabanan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Bagian Ortal Setda Kabupaten Tabanan. Standar Pelayanan (SP) tersebar pada 26 SKPD tahun 2013, SOP tahun 2014 sebanyak 1.500 buah, SINOVIK tahun 2015 sebanyak 7 Inovasi dan SPM 12 kali pelaporan.

1. **Persandian**

Dalam upaya meningkat kecepatan arus informasi baik dalam rangka penyelenggaraan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah pusat, peran persandian berperan sangat penting. Persandian memanfaatkan kemajuan informasi dan telekomunikasi yang dimungkinkan pengiriman dan penerimaan berita dengan akurat dan cepat dapat dilakukan.

dengan Hal ini untuk mencegah. Sampai tahun 2015 persandian telah melaksanakan 9.600 surat dikirim.

**E. Inspektorat**

Tugas mengawal jalanan Pemerintahan Daerah dibebankan kepada lembaga Inspektorat Kabupaten Tabanan. Lembaga ini merupakan Aparatur Pengawas Fungsional (APF), dengan tugas utama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tabanan.

Disamping melakukan pemeriksaan reguler, khusus dan kasus Inspektorat Kabupaten juga melaksanakan evaluasi Sakip dan review laporan keuangan pemerintahan Daerah.Tabel 2.76 menunjukan hasil kinerja yang telah dicapai Inpektorat tahun 2010-2015.

Tabel 2.76

Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Tahun 2010-2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| 1 | Jumlah LHP Pemeriksaan Reguler, Khusus dan Kasus | 73 | 71 | 73 | 73 | 71 | 73 |
| 2 | Jumlah Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan | 103 | 124 | 130 | 145 | 237 | 230 |
| 3 | Jumlah Laporan Evaluasi Lakip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Sumber : Inspektorat Tabanan 2015

**F. Kesatuan Bangsa dan Politik**

Capaian kinerja urusan wajib bidang Kesatuan Bangsa dan politik di Kabupaten Tabanan periode 2010-2015 diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam Mempersiapkan SDM aparatur yang berkualitas dibidang Intelejen telah dilakukan pendidikan dan pelatihan intelijen di BAIS TNI \_Bogor sebanyak 1 Orang;
2. Dalam rangka membina kerukunan antar–inter umat beragama diwilayah Kabupaten Tabanan telah dibentuk forum komunikasi kerukunan umat beragama tingkat Kabupaten Tabanan pada tanggal 8 Oktober 2013;
3. Guna mendukung terwujudnya pembangunan dibidang politik masyarakat telah dilakukan safari pendidikan politik kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta tokoh masyarakat lainnya di Kecamatan Se- Kabupaten Tabanan, dan
4. Jumlah Kasus konflik SARA dan Adat yang terekspose di media masa tahun 2011 ada 4 kasus dan tahun 2012 ada 3 kasus.

**G.Penanggulangan Bencana**

Urusan wajib Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dilaksanakan berdasarkan Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan. dan pengisian personilnya mulai tahun 2012 merupakan SKPDyang menangani Bidang Kebencanaan yang didalamnya termuat dalam Pra bencana, Pada saat Bencana, dan Pasca Bencana. Kinerja Penanggulan Bencana Kabupaten Tabanandijelaskan sebagai berikut.

1. **Kejadian Becana**

Jenis bencana yang termasuk pada kategori bencana geologi adalah gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi.

1. Gempa bumi

Kabupaten Tabanan merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap gempa bumi karena terletak pada daerah penujaman (terutama wilayah pantai selatan Bali) dan zona sesar aktif. Menurut hasil penelitian dari Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), gempa besar pernah terjadi di wilayah Kabupaten Tabanan sekitar tahun 1800-an, tahun 1979, dan 8 kejadian gempa besar lainnya. Kejadian tersebut dikatakan besar sebab kekuatannya mencapai 7 SR. Khusus gempa yang terjadi pada tanggal 12 September 1976 terdapat korban sebesar 7 orang di Kabupaten Tabanan, berdasarkan data dari DIBI BNPB. Dua kejadian gempa sedang yang juga dirasakan sampai di Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir tercatat pernah terjadi pada 19 September 2009 sekitar pukul 06.06 WIB berkekuatan 6,4 SR. Gempa dengan kekuatan sekitar 6.8 skala Richter dan intensitas 4 MMI kembali mengguncang Bali pada tanggal 13 Oktober 2011. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, gempa terjadi sekitar pukul 10.16 WIB, dengan pusat gempa terletak pada 143 km barat daya Nusa Dua pada kedalaman 10 km. Berdasarkan data kejadian bencana tahun 2011 tercatat 11 rumah penduduk, tempat ibadah dan sekolah yang rusak akibat gempa ini. Gempa terakhir yang pernah dirasakan di Kabupaten Tabanan adalah gempa dengan kekuatan 5,4 SR yang terjadi pada tanggal 22 Juni 2013 pada pukul 12.42 WIB, dimana pusat gempa berada 8.43 LS, 116,04 BT(14 km Barat Laut Lombok Barat NTB), gempa ini tidak menimbulkan kerugian dan korban jiwa di Kabupaten Tabanan.

1. Tsunami

Tsunami dapat terjadi karena beberapa hal yaitu; gempa bumi yang terjadi di dasar laut dengan spesifikasi tertentu, longsoran yang terjadi di dasar laut, jatuhnya meteor ke laut, material letusan gunung berapi yang jatuh ke laut dan longsoran gunung es. Kabupaten Tabanan sebagian wilayahnya terletak pada pesisir selatan Pulau Bali. Hal ini yang menyebabkan pesisir selatan Kabupaten Tabanan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dimana disana terdapat zona tumbukan tektonik yang dapat memicu terjadinya tsunami.

Dalam sejarahnya Kabupaten Tabanan mengalami tsunami kecil kira-kira dengan ketinggian 2-3 meter sebanyak dua kali yaitu pada tahun 1977 yang merupakan tsunami kiriman dari Sumbawa dan tsunami yang terjadi pada tahun 1994 yang merupakan tsunami kiriman dari Banyuwangi.

1. Letusan Gunung Api

Kabupaten Tabanan memiliki gunung yang sudah tidak aktif lagi. Namun pada saat terjadinya letusan gunung berapi Gunung Agung pada tanggal 16 Pebruari 1963 memang tidak mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Tabanan namun dampak letusan sangat berdampak di Kabupaten Tabanan dimana debu semburan material Gunung Agung menutupi langit di wilayah Kabupaten Tabanan sehingga siang hari terasa seperti malam hari.

1. **Bencana hydrometeorology**

Bencana yang masuk dalam katagori hydrometeorology adalah cuaca ekstrim (banjir dan banjir bandang, angin kencang/puting beliung, abrasi, kekeringan, dan longsor.

* 1. Cuaca Ekstrim

Salah satu akibat dari adanya cuaca ekstrim adalah hujan yang turun sepanjang tahun sehingga berpeluang menimbulkan genangan air/banjir, penggerusan akibat air yang besar dan menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana serta rumah penduduk. Berdasarkan data yang ada pada BPBD Kabupaten Tabanan jumlah kejadian yang diakibatkan cuaca ekstrim dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2010-2013, cenderung mengalami peningkatan. Hal ini diakibatkan sebagai akibat adanya efek rumah kaca yang dialami bumi sehingga menyebabkan pemanasan global dan berdampak pada cuaca di Indonesia pada umumnya khususnya Kabupaten Tabanan.

Pada tahun 2010 terdapat 2 kejadian dimana akibat hujan yang deras dan berkepanjangan menyebabkan sarana ibadah rusak dan bouh decker menjadi jebol. Tahun 2011 sebanyak 12 kejadian dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 45 kejadian karena adanya perubahan cuaca yang cukup ekstrim dan juga sebagai akibat badai yang terjadi di Australia yang juga berdampak pada pulau Bali. Disamping hujan lebat diatas ambang normal tersebut, beberapa jenis bencana yang tergolong cuaca ekstrem adalah :

1. Banjir dan Banjir Bandang

Melihat topografinya yang berbukit, Kabupaten Tabanan tidak memiliki resiko banjir. Yang terjadi adalah adanya genangan air yang diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi dan disatu sisi saluran air tidak mampu menampung debit air yang cukup besar. Sedangkan potensi banjir bandang di Kabupaten terdapat di daerah sekitar lereng Gunung Batukaru. Sedangkan genangan air yang cukup besar pernah terjadi di jalan masuk perumahan Taman Sekar pada tahun 2011 yang diakibatkan oleh rusaknya saluran air dan ditambah dengan curah hujan yang cukup tinggi sehingga menimbulkan kemacetan pada ruas jalan Gilimanuk-Denpasar.

1. Angin Kencang/Puting Beliung

Pada awalnya BPBD Kabupaten Tabanan terbentuk (Tahun 2011) sudah diuji dengan adanya hujan lebat yang disertai dengan angin kencang/puting beliung. Pada tahun 2011 angin kencang/puting beliung merusak sebanyak 15 rumah. Korban meninggal sebanyak 3 orang dan puluhan luka-luka. Pada tahun 2012 kejadian akibat angin kencang/puting beliung meningkat menjadi 483 menyebabkan kerusakan rumah dan fasilitas masyarakat.

1. Abrasi

Kabupaten Tabanan memiliki garis pantai kurang lebih sepanjang 35 km. Berdasarkan hasil penelitian Sekretariat Kerja Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (SKPPLH) Bali, kenaikan muka air laut di wilayah Provinsi Bali sebesar 4 meter per tahunnya. Kabupaten Tabanan memiliki pantai yang langsung menghadap Samudera Hindia sehingga menyebabkan potensi abrasi di Kabupaten Tabanan menjadi tinggi. Potensi abrasi pantai di Kabupaten Tabanan membentang dari pantai nyanyi sampai pantai selabih.

Kabupaten Tabanan memiliki lima segmen pantai yang rawan erosi pantai yaitu pantai Selabih dan Mekayu, pantai Suraberata, Pantai Kelating, pantai Kedungu dan pantai Nyanyi.

1. Pantai Selabih dan Mekayu terletak di Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat rawan erosi kurang lebih 3,5 km, akan tetapi sebagian besar telah ditangani dengan tembok pantai. Fasilitas yang terancam meliputi jalan raya, rumah penduduk, tempat suci (pura) dan lahan pertanian. Faktor-faktor yang diperkirakan menyebabkan erosi pantai ini antara lain adanya pengambilan material pantai, gelombang badai dan terbatasnya masukan sedimen dari daratan.
2. Pantai Suraberata terletak di Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat rawan erosi lebih kurang 0,6 km, di mana fasilitas yang terancam adalah lahan pertanian dan obyek rekreasi/pariwisata. Faktor utama penyebab erosi pantai adalah gelombang badai dan terbatasnya suplai sedimen dari daratan ke laut.
3. Pantai Kelating terletak di Desa Kelating, Kabupaten Tabanan rawan erosi sepanjang lebih kurang 0,6 km. Fasilitas yang terancam akibat erosi pantai adalah lahan pertanian. Erosi pantai terutama terjadi di sebelah barat muara Tukad Yeh Kelating. Faktor penyebab selain karena pengaruh alam yaitu gelombang badai, juga dipengaruhi oleh pengambilan material pantai seperti pasir dan kerikil.
4. Pantai Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, rawan erosi pantai sepanjang lebih kurang 0,3 km, di mana fasilitas yang terancam adalah tempat rekreasi dan tempat suci (pura).
5. Pantai Kedungu terletak di Desa Belalang, Kecamatan Kediri rawan erosi sepanjang lebih kurang 0,5 km, di mana fasilitas yang terancam adalah tempat rekreasi dan tempat suci (pura).
6. Pantai Nyanyi terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri rawan erosi sepanjang lebih kurang 0,5 km. Fasilitas yang terancam adalah tempat rekreasi.
7. **Kekeringan**

Meskipun Kabupaten Tabanan terkenal sebagai lumbung berasnya Bali, namun pernah tercatat terjadi kekeringan. Kekeringan yang paling banyak terjadi pada Juli 2004 dengan jumlah masyarakat yang mengalami gagal panen sebanyak 454 orang. Pada bulan Agustus 2004 terdapat sebanyak 21 orang gagal panen. Sedangkan pada bulan Juni 2005 sebanyak 63 orang gagal panen. Kekeringan ini terjadi pada kawasan selatan Kabupaten Tabanan, yang diakibatkan karena perubahan cuaca dan bendungan Telaga Tunjung masih dalam proses pembangunan sehingga sawah yang berada dibawahnya belum bisa dialiri air dengan cukup. Namun sejak lima tahun terakhir peristiwa kekeringan di Kabupaten Tabanan tidak pernah terjadi.

1. **Longsor**

Dengan melihat topografi Kabupaten Tabanan yang berbukit-bukit, Kabupaten Tabanan mempunyai resiko longsor yang cukup besar. Sebaran longsor dan daerah rawan longsor pada umumnya terdapat di kawasan utara Kabupaten Tabanan yaitu Kecamatan Pupuan, Kecamatan Penebel dan Kecamatan Baturiti. Pada tahun 2011 kejadian tanah longsor yang tercatat di BPBD Kabupaten Tabanan tercatat sebanyak 11 kejadian bencana. Disamping itu juga terjadi beberapa kejadian tanah longsor yang menutupi beberapa jalan di Kecamatan Pupuan. Tahun 2012 terjadi tanah longsor sebanyak 13 kejadian yang mengakibatkan sarana ibadah masyarakat rusak dan rumah penduduk yang rusak. Dari tiga belas kejadian ini, 3 kejadian merupakan kejadian yang cukup besar. Salah satunya adalah longsornya badan jalan Dr.Ir Soekarno yang amblas hampir setengah badan jalan dan mengakibatkan arus lalu lintas dialihkan melalui Kota Tabanan.

1. **Kendala dalam kegiatan penanggulangan becana**

Kendala atau hambatan dalam kegiatan penanggulangan bencana yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Tabanan, terkait dengan Sarana, Prasarana, personil, dan pembiayaan sebagai pendukung anggarannya sangat minim yang diakibatkan terbatasnya ABPD yang dimikili oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan. Beberapa prasarana dan sarana serta pencapaian pengelolaan bencana di Kabupaaten Tabanan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk sarana prasarana kesiapsiagaan dalam mengatasi bencana,telah memiliki sarana antara lain Watergenzet penyedot air, perahu karet, mesin sensor dan genzet listrik;
2. Untuk penanganan di lapangan telah terbentuk personil Tim Rescue Cepat **(TRC)** beranggotakan 31 orang;
3. Telah terbentuk Tim Pengecekan Verifikasi dan Monitoring Bencana Kabupaten Tabanan, dan
4. Telah terbentuk Tim Panitia Sosialisasi Kebencanaan di Kabupaten Tabanan.
5. **Aspek daya saing daerah**
6. **Fokus Fasilitas Wilayah Infrasruktur**
7. **Aksesibilitas Daerah**
8. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Jumlah panjang jalan di Kabupaten Tabanan sepanjang 1.057,11 km dengan jumlah kendaraan 305.838, sehingga rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah 0,0034 mengalami penurunan dari tahun 2013.

Tabel 2.77

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Tahun 2010 s.d 2014 Di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1. | Panjang Jalan | 1057,53 | 1057,53 | 1057,53 | 1057,11 | 1057,11 |
| 2. | Jumlah Kendaraan | 174.676 | 264.431 | 281.505 | 229.788 | 305.838 |
| 3. | Rasio | 0,0060 | 0,0040 | 0,0037 | 0,0046 | 0,0034 |

Sumber : DPU Kab. Tabanan

1. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Tabanan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan yang diakibatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum semakin menurun. Dari data terdapat 32.208 orang yang terangkut oleh angkutan umum pada tahun 2014.

Tabel 2.78

Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Tahun 2010 s.d 2014 Di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **Satuan** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1. | Jumlah orang | Orang | 40.540 | 38.158 | 35.778 | 33.398 | 32.208 |
| 2. | Jumlah Barang | Ton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Sumber : Dishub Kab. Tabanan

1. Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun

Jumlah barang yang terangkut angkutan umum melalui terminal per tahun di Kabupaten Tabanan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan. Jumlah barang yang terangkut sebanyak1.445.800 pada tahun 2014.

Tabel 2.79

Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Tahun 2010 - 2014 Di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **2010** | | **2011** | | **2012** | | **2013** | | **2014** | |
| **Orang** | **Brng** | **Orang** | **Brng** | **Orang** | **Brng** | **Orang** | **Brng** | **Orang** | **Brng** |
| 1. | Terminal | 40.540 | 677.500 | 38158 | 757600 | 35778 | 962.800 | 33.398 | 1.216.400 | 32.208 | 1.445.800 |

1. **Fokus Fasilitas Listrik dan Telepon**

Jumlah Rasio ketersediaan daya listrik di Kabupaten Tabanan ditunjukkan dalam kebutuhan beban tenaga listrik tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Prakiraan peningkatan penggunaan beban tenaga listrik terjadi dari tahun 2010 sampai tahun 2014 baik dari sektor industri hingga sektor rumah tangga disajikan pada tabel 2.80.

Tabel 2.80

Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik

Tahun 2010 - 2014 Di Kabupaten Tabanan

| **NO** | **Uraian** | **Satuan** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kebutuhan |  |  |  |  |  |  |
|  | - rumah tangga | GWH | N/A | 8.459.352 | 9.459.050 | 10.485.126 | N/A |
|  | -Komersial | GWH | N/A | 2.411.261 | 2.740.444 | 2.893.183 | N/A |
|  | - Public | GWH | N/A | 870.844 | 890.540 | 1.430.474 | N/A |
|  | - Industri | GWH | N/A | 543.312 | 626.432 | 702.388 | N/A |
|  | Susut & Losses (T&D) | % | 5.16 | N/A | 4.69 | 8.94 | 5 |
|  | Susut Pemakaian Sendiri | % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Total Susut & Losses | % | 5.6 | N/A | 4.69 | 8.94 | 5 |
|  | Faktor Beban | % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Produksi | GWH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Beban Puncak | MW | N/A | N/A | 24.71 | 24.71 | 26.175 |
|  | Kapasitas Terpasang (Existing) | MW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Cummulated Commited Projects | MW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | TOTAL KAPASITAS SISTEM | MW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | DAYA YANG DIBUTUHKAN\* | MW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Sumber : PLN Tabanan

1. **Fokus Iklim Berinvestasi**

Iklim berinvestasi di Kabupaten Tabanan akan di fokuskan terhadap salah satu gangguan dalam berinvestasi yaitu Tingkat kriminal di Kabupaten Tabanan pada tahun 2014 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 6,43 menjadi 0,16. Hal ini menunjukkan tingkat keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tabanan mengalami peningkatan. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan iklim berinvestasi kabupaten Tabanan.

Tabel 2.81

Angka Kriminalitas Tahun 2010 - 2014 Di Kabupaten Tabanan

| **No** | **Jenis Kriminal** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah kasus Narkoba | n.a | 41 | 51 | 35 | 0 |
| 2. | Jumlah kasus Pembunuhan | n.a | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Jumlah Kejahatan Seksual | n.a | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Jumlah kasus Penganiayaan | n.a | 21 | 16 | 13 | 1 |
| 5. | Jumlah kasus Pencurian | n.a | 55 | 75 | 87 | 0 |
| 6. | Jumlah kasus Penipuan | n.a | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Jumlah kasus Pemalsuan uang | n.a | 141 | 146 | 139 | 4 |
| 8. | Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun | n.a | 261 | 291 | 277 | 7 |
| 9. | Jumlah Penduduk | 422.300 | 425.100 | 427.800 | 430.600 | 433.300 |
| 10. | Angka Kriminalitas (8)/(9) | n.a | 6,14 | 6,80 | 6,43 | 0,16 |

Sumber : Kesbang Pol Linmas Kab. Tabanan

1. **Fokus Sumber Daya Manusia**
2. **Tingkat Ketergantungan**

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.Rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependencyratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Menurunnya rasio ketergantungan penduduk selama kurun waktu tahun 2011-2015 menunjukkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mengendalikan tingkat kelahiran dan meningkatkan kualitas kesehatan penduduk.

Momentum ini harus dimanfaatkan. Karena jika melihat trend-nya, maka dapat diproyeksikan rasio ketergantungan penduduk semakin rendah pada tahun-tahun kedepannya. Oleh karena itu alokasi anggaran belanja daerah dapat diarahkan pada program-program yang menyasar pada peningkatan produktifitas masyarakat.

Tabel 2.82

Rasio Ketergantungan Tahun 2011 - 2015

Di Kabupaten Tabanan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
|  | Rasio ketergantungan | 46,86 | 46,54 | 46,25 | 45,98 | 45,61 |

Sumber : BPS Kab. Tabanan

**BAB III**

**GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN**

Era otonomi daerah memberikan kesempatan penuh kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan. Pengelolaan keuangan tersebut dilakukan melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan APBD merupakan upaya untuk menselaraskan antara sumber daya yang dimiliki daerah dengan pencapaian visi dan misi pembangunan. Sumber daya yang ada harus dialokasikan secara tepat melalui kebijakan pemerintah sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya. Mengatasi keterbatasan sumber daya guna mencapai tujuan maksimal merupakan kunci dalam pelaksanaan penyusunan APBD tersebut. Selain itu aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah serta antara pemerintah daerah.

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kita harus melihat kondisi pengelolaan keuangan daerah beberapa tahun ke belakang. Hal ini guna mengurai permasalahan pengelolaan keuangan daerah serta kendala-kendala yang muncul selama pengelolaannya sehingga potensi keuangan daerah dapat dikenali. Pengenalan potensi tersebut sangat penting mengingat kita harus memproyeksikan kondisi keuangan daerah kita lima tahun mendatang sebagai dasar penyusunan kerangka pendanaan selama lima tahun kedepan. Melalui kerangka pendanaan tersebut kita dapat menyusun tahapan pencapain target pembangunan secara tepat dan terukur demi kemajuan daerah.

* 1. **Kinerja Keuangan Tahun 2010-2015**

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk satu tahun tertentu. Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 junto Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. **Kinerja Pelaksanaan APBD**

Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan selalu mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama lima tahun terakhir adalah 14,57%. Peningkatan pertumbuhan yang tertinggi dicapai pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 21,58 % (Tabel 3.1). Pertumbuhan PAD terbesar berasal dari pajak daerah yang dikarenakan oleh dikelolanya pajak bumi dan bangunan terutama BPHTB. BPHTB berkontribusi sangat besar mengingat banyaknya transaksi jual beli tanah pada lima tahun terakhir namun peningkatan tersebut tidak banyak dapat diharapkan karena sangat tergantung dari jumlah transaksi. PAD juga bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan 13,83% selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan dari Badan Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah. Sektor PAD yang masih dapat digali adalah Retribusi Daerah. Selama ini Retribusi Daerah mengalami pertumbuhan sebesar 24,10 %, peningkatan pendapatan masih dimungkinkan dengan mengelola objek dengan lebih efektif dan mengembangkan objek baru.

Pendapatan daerah Kabupaten Tabanan masih bertumpu pada dana perimbangan pusat dengan proporsi lebih dari 50 % dari total pendapatan. Dominasi dana perimbangan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan belum mampu mandiri dalam penyediaan dana penyelenggaraan Pemerintahan. Hal ini juga ditunjukkan dengan besarnya Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang merupakan pendapatan yang bersumber dari pihak lain yang mana diluar kendali Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi tumpuan utama sumber pendanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dana tersebut lebih difokuskan pada pendanaan gaji dan tunjangan. Perkembangan dana DAU bervariasi sangat tergantung kebijakan Pemerintah Pusat. DAU rata-rata tumbuh 12,08% dimana pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2015 yang hanya 0,3% dari tahun sebelumnya. Selain DAU dana perimbangan yang menjadi tumpuan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK mengalami pertumbuhan 16,89 % yang digunakan sesuai dengan jenis DAK yang di distribusikan Pemerintah Pusat. DAK sangat membantu dalam menunjang pembangunan wilayah Kabupaten Tabanan.

Sumber pendapatan daerah lainnya adalah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendanaan dari sektor ini didominasi pendapatan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang merupakan dana pembayaran tunjangan sertifikasi tenaga pendidik. Penyumbang terbesar kedua adalah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Sektor ini berasal dari pembagian hasil pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan, selain itu juga dari pembagian hasil Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dari Pemerintah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Sumber lainnya adalah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi. Sumber ini sangat tergantung dari program pembangunan Pemerintah Provinsi dimana perkembangannya bervariasi.

**Tabel 3.1**

**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah**

**Tahun 2010 s/d Tahun 2015**

**Kabupaten Tabanan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K e t e r a n g a n** | | | **2010** | **2011** | | **2012** | | | **2013** | | | **2014** | | | **2015** | | **RATA-RATA PERTUMUMBUHAN** | |
| **Pendapatan Asli Daerah** | | | **116.860,66** | **141.045,80** | | **183.295,01** | | | **255.418,22** | | | **273.411,75** | | | **312.008,17** | | **22,62% (\*21,58%)** | |
|  | Hasil Pajak Daerah | | 23.703,37 | 31.009,80 | | 50.214,00 | | | 99.762,26 | | | 94.769,53 | | | 105.792,97 | | 41,81% | |
|  | Hasil Retribusi Daerah | | 16.536,40 | 20.524,70 | | 28.540,91 | | | 40.405,10 | | | 42.569,53 | | | 46.997,05 | | 24,10% | |
|  | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 4.788,03 | 5.404,90 | | 5.925,32 | | | 8.397,26 | | | 7.197,50 | | | 7.322,11 | | 9,70% | |
|  | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | | 71.832,86 | 84.106,40 | | 98.614,77 | | | 106.853,60 | | | 128.875,19 | | | 151.896,03 | | 16,02%(\*13,83%) | |
| **Dana Perimbangan** | | | **513.683,61** | **534.403,50** | | **656.500,46** | | | **734.577,59** | | | **799.770,75** | | | **815.846,44** | | **11,41%** | |
|  | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | | 36.121,46 | 29.814,50 | | 34.787,68 | | | 22.499,52 | | | 21.634,73 | | | 17.441,96 | | -10,47% | |
|  | Dana Alokasi Umum | | 429.919,45 | 463.073,00 | | 574.346,24 | | | 663.156,60 | | | 719.621,53 | | | 722.004,64 | | 12,08% | |
|  | Dana Alokasi Khusus | | 47.642,70 | 41.516,00 | | | 47.366,54 | | | 48.921,47 | | | 58.514,49 | | | 76.399,84 | | 16,89% |
| **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | | **154.334,91** | | | **210.856,80** | | **216.523,86** | **263.031,01** | | | **293.881,18** | | | **498.073,27** | | | **26,34%(\*18,52%)** | |
|  | Pendapatan Hibah | | - | - | | - | | | - | | | - | | | 92.000,00 | | 0,00% | |
|  | Dana Darurat | | - | - | | - | | | - | | | - | | | - | | 0,00% | |
|  | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | | 60.796,92 | 76.643,20 | | 92.041,97 | | | 108.713,96 | | | 129.514,01 | | | 157.674,59 | | 19,77% | |
|  | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | | 88.718,17 | 127.082,00 | | 118.390,17 | | | 146.900,37 | | | 159.747,18 | | | 247.995,68 | | 20,31% | |
|  | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | | 4.819,82 | 7.131,60 | | 6.091,72 | | | 7.416,68 | | | 4.620,00 | | | 403,00 | | -30,45% | |
|  | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya | | - | - | | - | | | - | | | - | | | - | |  | |
| **TOTAL** | | | **784.879,18** | **886.306,10** | | **1.056.319,33** | | | **1.253.026,82** | | | **1.367.063,68** | | | **1.625.927,89** | | **16,46%(\*14,57%)** | |
| *Sumber : Bagian Keuangan, Setda Kab. Tabanan 2010 - 2015, diolah*  Keterangan: (\*..) adalah angka rata – rata pertumbuhan sebelum revisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. **Neraca Daerah**

Neraca Daerah menggambarkan besarnya jumlah kekayaan daerah yang dimiliki dan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Tabanan dari kegiatan dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan. Analisis Neraca Daerah juga akan dapat disimpulkan kemampuan keuangan daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah di masa yang akan datang. Dengan demikian akan membantu dalam menentukan kebijakan daerah terkait dengan keuangan daerah.

Perkembangan dan rata-rata pertumbuhan neraca Kabupaten Tabanan tahun 2011-2013 dapat dilihat pada tabel 3.2 seperti berikut :

**Tabel 3.2**

**Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah**

**Kabupaten Tabanan Tahun 2011-2013**

| **NO** | **URAIAN** | **2011** | **2012** | **2013** | **RATA-RATA PERTUMBUHAN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **ASET** |  |  |  |  |
| 2 | **ASET LANCAR** |  |  |  |  |
| 3 | Kas di Kas Daerah | 51.153.319.621,37 | 36.414.272.120,45 | 84.920.689.916,67 | 52,20% |
| 4 | Kas di Bendahara Penerimaan | 5.793.699,60 | 25.000,00 | 41.914.587,57 | 83729,39% |
| 5 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 184.975.433,00 | 33.829,00 | 0,00 | -99,99% |
| 6 | Kas di BLUD | 2.566.471.007,89 | 6.955.190.802,66 | 7.608.008.465,38 | 90,19% |
| 7 | Piutang Pajak | 324.758.445,00 | 2.157.484.034,00 | 41.765.795.209,00 | 1200,10% |
| 8 | Piutang Retribusi | 104.014.883,00 | 760.566.658,00 | 330.356.273,00 | 287,32% |
| 9 | Piutang Dana Bagi Hasil | 16.575.512.363,82 | 14.816.360.482,67 | 23.261.977.031,45 | 23,19% |
| 10 | Piutang Bagian Lancar dari Piutang Tuntutan Ganti Rugi | 1.086.679.728,27 | 1.047.170.899,39 | 5.207.321.645,62 | 196,82% |
| 11 | Biaya Dibayar Di Muka | 21.409.722,00 | 21.188.468,00 | 21.152.465,75 | -0,60% |
| 12 | Piutang Lainnya | 4.153.594.079,00 | 11.077.680.951,26 | 9.442.547.400,26 | 75,97% |
| 13 | Persediaan | 7.676.195.695,00 | 7.265.425.384,03 | 11.792.033.812,88 | 28,48% |
| 14 | **JUMLAH ASET LANCAR (3 s/d 13)** | **83.852.724.677,95** | **80.515.398.629,46** | **184.391.796.807,58** | 62,52% |
| 15 | **INVESTASI JANGKA PANJANG** |  |  |  |  |
| 16 | **Investasi Non Permanen** |  |  |  |  |
| 17 | Investasi Non Permanen Lainnya | 865.000.000,00 | 1.104.880.000,00 | 1.992.155.000,00 | 54,02% |
| 18 | **JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN (17 s/d 17)** | **865.000.000,00** | **1.104.880.000,00** | **1.992.155.000,00** | 54,02% |
| 19 | **Investasi Permanen** |  |  |  |  |
| 20 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 41.692.723.426,42 | 65.049.463.743,05 | 75.720.329.049,75 | 36,21% |
| 21 | **JUMLAH INVESTASI PERMANEN (20 s/d 20)** | **41.692.723.426,42** | **65.049.463.743,05** | **75.720.329.049,75** | 36,21% |
| 22 | **JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (18 + 21)** | **42.557.723.426,42** | **66.154.343.743,05** | **77.712.484.049,75** | 36,46% |
| 23 | **ASET TETAP** |  |  |  |  |
| 24 | Tanah | 538.628.040.264,84 | 537.856.422.264,84 | 541.643.198.264,84 | 0,28% |
| 25 | Peralatan Dan Mesin | 197.166.121.764,25 | 222.785.485.277,20 | 224.194.781.462,60 | 6,81% |
| 26 | Gedung Dan Bangunan | 405.214.729.034,14 | 470.623.793.125,92 | 504.623.349.789,76 | 11,68% |
| 27 | Jalan, Irigasi Dan Jaringan | 748.616.922.630,00 | 835.850.697.753,00 | 903.168.489.558,00 | 9,85% |
| 28 | Aset Tetap Lainnya | 16.602.266.922,80 | 15.875.829.347,80 | 16.541.945.963,00 | -0,09% |
| 29 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 7.613.644.000,00 | 0,00 | 4.535.251.000,00 | 0,00% |
| 30 | **JUMLAH ASET TETAP (24 s/d 29)** | **1.913.841.724.616,03** | **2.082.992.227.768,76** | **2.194.707.016.038,20** | 7,10% |
| 31 | **ASET LAINNYA** |  |  |  |  |
| 32 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 1.884.000.000,00 | 1.884.000.000,00 | 1.884.000.000,00 | 0,00% |
| 33 | Aset Tidak Berwujud | 457.600.000,00 | 618.900.000,00 | 2.872.103.500,00 | 199,66% |
| 34 | Aset Lain-Lain | 9.845.737.088,50 | 5.467.185.328,00 | 10.931.408.815,17 | 27,74% |
| 35 | **JUMLAH ASET LAINNYA (32 s/d 34)** | **12.187.337.088,50** | **7.970.085.328,00** | **15.687.512.315,17** | 31,11% |
| 36 | **JUMLAH ASET (14 + 22 + 30 + 35)** | **2.052.439.509.808,90** | **2.237.632.055.469,27** | **2.472.498.809.210,70** | 9,76% |
| 37 | **KEWAJIBAN** |  |  |  |  |
| 38 | **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** |  |  |  |  |
| 39 | Utang Bunga | 33.416.447,06 | 29.239.391,18 | 25.062.335,25 | -13,39% |
| 40 | Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | 78.035.294,12 | 78.035.294,12 | 78.035.294,12 | 0,00% |
| 41 | Utang Kepada Pihak Ketiga | 8.052.304.044,27 | 8.858.970.976,50 | 3.257.166.446,29 | -26,61% |
| 42 | **JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (39 s/d 41)** | **8.163.755.785,45** | **8.966.245.661,80** | **3.360.264.075,66** | -26,35% |
| 43 | **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** |  |  |  |  |
| 44 | Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | 546.247.058,80 | 468.211.764,68 | 390.176.470,56 | -15,48% |
| 45 | **JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (44 s/d 44)** | **546.247.058,80** | **468.211.764,68** | **390.176.470,56** | -15,48% |
| 46 | **JUMLAH KEWAJIBAN (42 + 45)** | **8.710.002.844,25** | **9.434.457.426,48** | **3.750.440.546,22** | -25,96% |
| 47 | **EKUITAS DANA** |  |  |  |  |
| 48 | **EKUITAS DANA LANCAR** |  |  |  |  |
| 49 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | 53.904.766.062,26 | 43.369.496.752,11 | 92.528.698.382,05 | 46,90% |
| 50 | Pendapatan Yang Ditangguhkan | 5.793.699,60 | 25.000,00 | 41.914.587,57 | 83729,39% |
| 51 | Cadangan Piutang | 22.265.969.221,09 | 29.880.451.493,32 | 80.029.150.025,08 | 101,01% |
| 52 | Cadangan Persediaan | 7.676.195.695,00 | 7.265.425.384,03 | 11.792.033.812,88 | 28,48% |
| 53 | Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek | (8.163.755.785,45) | (8.966.245.661,80) | (3.360.264.075,66) | -26,35% |
| 54 | **JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR (49 s/d 53)** | **75.688.968.892,50** | **71.549.152.967,66** | **181.031.532.731,92** | 73,77% |
| 55 | **EKUITAS DANA INVESTASI** |  |  |  |  |
| 56 | Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang | 42.557.723.426,42 | 66.154.343.743,05 | 77.712.484.049,75 | 36,46% |
| 57 | Diinvestasikan dalam Aset Tetap | 1.913.841.724.616,03 | 2.082.992.227.768,76 | 2.194.707.016.038,20 | 7,10% |
| 58 | Diinvestasikan dalam Aset Lainnya | 12.187.337.088,50 | 7.970.085.328,00 | 15.687.512.315,17 | 31,11% |
| 59 | Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utanq Jangka Panjang | (546.247.058,80) | (468.211.764,68) | (390.176.470,56) | -15,48% |
| 60 | **JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI (56 s/d 59)** | **1.968.040.538.072,15** | **2.156.648.445.075,13** | **2.287.716.835.932,56** | 7,83% |
| 61 | **JUMLAH EKUITAS (54 + 60)** | **2.043.729.506.964,65** | **2.228.197.598.042,79** | **2.468.748.368.664,48** | 9,91% |
| 62 | **JUMLAH ASET (14 + 22 + 30 + 35)** | **2.052.439.509.808,90** | **2.237.632.055.469,27** | **2.472.498.809.210,70** | 9,76% |

*Sumber : Bagian Keuangan, Setda Kab. Tabanan 2010 - 2015, diolah*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan rasio likuiditas yaitu Rasio Lancar dan *Rasio Quick*. Dari angka rasio yang dihasilkan, Pemerintah Kabupaten Tabanan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
2. Rasio solvabilitas dipergunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Jenis rasio yang digunakan adalah rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal. Berdasarkan hasil perhitungan yang didapat ternyata Pemerintah Kabupaten Tabanan masih sangat mampu untuk memenuhi kewajiban jangka panjang.

Perkembangan rasio keuangan Kabupaten Tabanan tahun 2011-2013 seperti tabel berikut.

**Tabel 3.3**

**Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Tabanan Tahun 2011-2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | 2011 | 2012 | 2013 |
| (%) | (%) | (%) |
| 1. | Rasio lancar (*current ratio*) | 962,72% | 853,42% | 4916,54% |
| 2. | Rasio quick (*quick ratio*) | 868,99% | 758,38% | 4826,94% |
| 3. | Rasio total hutang terhadap total aset | 0,42% | 0,42% | 0,15% |
| 4. | Rasio hutang terhadap modal | 0,43% | 0,42% | 0,15% |

Sumber: Hasil analisis

* 1. **Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**
     1. **Proporsi Penggunaan Anggaran**

Perkembangan Pendapatan Daerah sangat mempengaruhi Belanja Daerah karena besar belanja dan jenis belanja akan sangat dipengaruhi besar pendapatan dan jenis pendapatan. Semakin besar pendapatan berarti belanja yang lebih besar untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Namun pendapatan yang besar tidak serta merta meningkatkan belanja publik, ada banyak komponen pendapatan yang memiliki kekhususan. Beberapa jenis pendapatan harus digunakan untuk kegiatan khusus seperti DAK yang harus digunakan untuk sektor yang jelas, selain itu pendapatan seperti Bantuan Keuangan Khusus juga sudah terkait belanja yang khusus.

**Tabel 3.4**

**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah**

**Tahun 2010 s/d Tahun 2015**

**Kabupaten Tabanan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K e t e r a n g a n** | | **Relaisasi Belanja Daerah (Dalam Juta Rupiah)** | | | | | | **Rata-Rata Pertumbuhan** |
| **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A.** | **Belanja Tak Langsung** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belanja Pegawai | 504.113,15 | 561.091,40 | 632.274,85 | 691.380,83 | 779.613,37 | 818.155,62 | 9,94%(\*10,13%) |
|  | Belanja Bunga | 535,05 | 81,40 | 72,32 | 62,83 | 53,53 | 44,20 | -14,13% |
|  | Belanja Subsidi | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
|  | Belanja Hibah | 19.358,11 | 16.911,04 | 40.389,13 | 65.078,66 | 74.829,38 | 45.344,11 | 43,89% |
|  | Belanja Bantuan Sosial | 8.916,50 | 8.641,80 | - | 6.000,00 | 7.938,00 | 3.204,50 | -31,83% |
|  | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 1.900,00 | 2.350,64 | 3.327,29 | 6.099,80 | 6.689,00 | 12.978,45 | 57,14% |
|  | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 49.908,70 | 48.810,03 | 59.370,87 | 67.735,17 | 80.174,69 | 164.630,14 | 39,86% |
|  | Belanja Tidak Terduga | 878,56 | 1.273,90 | 2.189,26 | 3.231,76 | 636,91 | 865,40 | 18,76% |
|  | **Total** | **585.610,08** | **639.160,21** | **737.623,71** | **839.589,05** | **949.934,89** | **1.045.222,42** | **13,10%(\*13,26)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B.** | **Belanja Langsung** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belanja Pegawai | 12.302,50 | 12.058,00 | 13.018,90 | 13.194,05 | 14.513,46 | 33.326,14 | 37,23% |
|  | Belanja Barang dan Jasa | 101.150,93 | 160.797,50 | 176.171,00 | 217.732,82 | 246.921,15 | 376.074,14 | 24,72% |
|  | Belanja Modal | 74.637,50 | 70.442,60 | 138.723,07 | 128.186,38 | 136.344,86 | 112.712,06 | 19,59% |
|  | **Total** | **188.090,93** | **243.298,10** | **327.912,97** | **359.113,25** | **397.779,47** | **522.112,34** | 21,58% |
|  | **total belanja daerah** | **773.701,01** | **882.458,31** | **1.065.536,68** | **1.198.702,31** | **1.347.714,36** | **1.567.334,77** | **15,49%(\*15,60%)** |
| *Sumber : Bagian Keuangan, Setda Kab. Tabanan 2010 - 2015, diolah*  Keterangan: (\*..) adalah angka rata – rata pertumbuhan sebelum revisi | | | | | | | | |

Tabel 3.4 menunjukkan pertumbuhan realisasi Belanja Daerah kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015. Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan selama tahun 2010-2015 berpengaruh pada tumbuhnya belanja daerah dengan rata-rata 15,49%. Peningkatan belanja daerah yang paling signifikan terjadi pada belanja langsung. Pada tahun 2010, belanja langsung menyentuh angka Rp. 188 Milyar dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai Rp 522 Milyar di tahun 2015. Dengan belanja langsung yang tinggi diharapkan dapat mempercepat proses mensejahterakan masyarakat Tabanan dan ke depan harus terus diupayakan peningkatannya.

Belanja Tidak Langsung selama kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 13,1 %. Belanja tidak langsung terbesar adalah Belanja Pegawai dimana belanja ini merupakan pembayaran gaji dan tunjangan. Belanja tidak langsung yang besar lainnya adalah belanja Bantuan Keuangan Khusus yang merupakan belanja bantuan kepada pemerintahan desa atau pemerintahan daerah lainnya. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Tabanan tumbuh rata-rata 39,86 %. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan oleh peningkatan Belanja Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk pembiayaan JKBM. Semenjak digulirkan, pembiayaan JKBM terus meningkat yang disebabkan semakin banyaknya warga memanfaatkan fasilitas jaminan kesehatan ini serta peningkatan penyakit yang ditanggung oleh JKBM. Belanja tidak langsung yang besar lainnya adalah belanja hibah. Selama periode tahun 2010 hingga tahun 2015 belanja hibah mengalami perubahan yang signifikan ada yang meningkat drastis ada pula yang menurun. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan pemerintah khususnya setelah terbitnya Permendagri yang mengatur tentang pemberian dana hibah dan bansos.

Jika dilihat dari realisasi belanja terhadap anggaran belanja, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik (Tabel 3.5). Di tahun 2013, realisasi belanja mencapai 95,67 % yang berarti pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan anggaran. Selisih realisasi dengan anggaran dikarenakan adanya penghematan di masing-masing kegiatan yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan yang efektif. Pada tahun 2014, perkembangan realisasi belanja kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya. Yang perlu dicermati adalah realisasi belanja di tahun 2015 dikarenakan adanya penurunan yang sangat drastis. Dari segi realisasi belanja tidak langsung, yang berkontribusi pada penurunan proporsi realisasi belanja adalah belanja gaji pegawai. Realisasi belanja pegawai pada belanja tidak langsung adalah 89,87 % dari Rp 916 Milyar yang dianggarkan. Hal ini disebabkan adanya permasalahan realisasi tunjangan sertifikasi guru. Setiap tahun selalu terjadi kendala pencairan dana sertifikasi guru yang disebabkan oleh penyiapan berkas termasuk verifikasinya. Jumlah guru yang banyak dan tersebar di seluruh wilayah serta ketidaksamaan informasi menyebabkan proses ini menyita waktu. Ke depan perlu diupayakan cara yang lebih efektif dalam proses pencairan dana ini. Dari segi belanja langsung, kecilnya realisasi belanja lebih disebabkan oleh belanja barang dan jasa serta belanja modal. Realisasi belanja langsung dikarenakan adanya penghematan dari pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien serta akibat pelelangan. Selain itu juga terjadi kendala dalam merealisasikan beberapa kegiatan karena terkendala petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seperti dana DAK dan dana lainnya.

**Tabel 3.5**

**Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja**

**Kabupaten Tabanan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | | **2013** | **2014** | **2015** |
| % | % | % |
| **A** | **Belanja Tak Langsung** |  | |  |  |
|  | Belanja Pegawai | 95,72% | | 94,38% | 89,87% |
|  | Belanja Bunga | 62,83% | | 53,53% | 44,20% |
|  | Belanja Subsidi |  | |  |  |
|  | Belanja Hibah | 98,67% | | 94,41% | 99,24% |
|  | Belanja Bantuan Sosial | 100,00% | | 91,24% | 97,11% |
|  | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 96,83% | | 100,00% | 100,00% |
|  | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 99,50% | | 99,46% | 99,92% |
|  | Belanja Tidak Terduga | 90,25% | | 32,04% | 0,00% |
|  | **Total** | **96,16%** | | **94,68%** | **91,79%** |
|  |  |  | |  |  |
| **B** | **Belanja Langsung** |  | |  |  |
|  | Belanja Pegawai | 90,44% | | 89,59% | 59,06% |
|  | Belanja Barang dan Jasa | 96,59% | | 93,80% | 79,07% |
|  | Belanja Modal | 91,61% | | 92,15% | 80,66% |
|  | **Total** | 94,67% | | 93,13% | 78,24% |
|  |  |  | |  |  |
|  | **TOTAL BELANJA** | **95,67%** | | **94,18%** | **87,28%** |

*Sumber : Bagian Keuangan, Setda Kab. Tabanan 2013 - 2015, diolah*

Belanja yang menyita sebagian besar APBD adalah belanja aparatur. Belanja aparatur merupakan belanja yang digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan yang mana didalamnya termasuk belanja operasional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Tabel 3.6 menunjukkan realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Pemerintah Kabupaten Tabanan. Belanja aparatur meningkat signifikan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2013, belanja aparatur Rp. 830,7 Milyar atau mencapai 69 % dari total APBD ( Tabel 3.7). Jumlah tersebut didominasi oleh belanja gaji dan tunjangan serta belanja tambahan penghasilan. Pada Tahun 2014, belanja untuk kebutuhan aparatur meningkat menjadi Rp 903 Milyar atau 67,5 % dari total APBD tahun 2014. Kenaikan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2015 dimana belanja aparatur mencapai Rp. 1.015 Milyar atau 67,68 % dari total belanja ABPD Tahun 2015. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya gaji dan tunjangan pegawai serta peningkatan belanja jasa kantor akibat peningkatan gaji tenaga kontrak dari Rp 700.000,00 menjadi Rp. 1.100.000,00.

* + 1. **Analisis Pembiayaan**

1. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Anggaran

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelummya, pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pemberlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD. APBD Kabupaten Tabanan disusun dengan pola defisit yang ditutup dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dan juga dari pinjaman jangka pendek atau jangka menengah (kurang dari lima tahun).

Defisit riil APBD Kabupaten Tabanan tahun 2013, 2014, dan 2015 berturut-turut sebesar Rp. 49 milyar, Rp. 28,4 milyar, dan Rp 21,77 milyar. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan pada tahun 2013, 2014, dan 2015 berturut-turut adalah Rp. 92,64 milyar, Rp. 121,3 milyar, dan Rp. 143,7 milyar (Tabel 3.8). Secara rinci komposisi defisit riil anggaran ditampilkan dalam Tabel 3.9. Komposisi defisit riil anggaran terbentuk dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya dan penerimaan piutang. Pada tabel tampak terlihat dominasi SiLPA sebagai penutup defisit anggaran di Pemerintah Kabupaten Tabanan.

**Tabel 3.6**

**Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**

**Kabupaten Tabanan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (dalam juta rupiah) | |  |  |  |
| No | Uraian | 2013 | 2014 | 2015 |
| (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| **A** | **Belanja Tidak Langsung** | **691.380,83** | **765.788,65** | **824.144,12** |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 502.590,96 | 524.995,02 | 563.137,91 |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan | 158.137,58 | 201.663,60 | 212.955,83 |
| 3 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH | 2.939,17 | 3.623,91 | 3.623,76 |
| 4 | Belanja Jasa Peayanan Medik | 24.680,24 | 31.720,91 | 39.633,69 |
| 5 | Belanja pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah | 3.032,89 | 3.785,20 | 4.792,92 |
|  |  |  |  |  |
| **B** | **Belanja Langsung** | **139.418,26** | **137.807,00** | **191.711,79** |
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 8.995,30 | 8.702,71 | 12.548,77 |
| 2 | Belanja Honorarium Non PNS | 2.257,80 | 1.189,58 | 2.301,50 |
| 3 | Belanja Pegawai Pengelola Dana BLUD. |  | 3.932,43 | 5.042,41 |
| 4 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 532,62 | 78,50 | 191,50 |
| 5 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 2.573,07 | 1.911,53 | 2.660,43 |
| 6 | Belanja premi asuransi kesehatan | 381,60 | 428,30 | 142,76 |
| 7 | Belanja makanan dan minuman pegawai | 15.199,32 | 12.170,35 | 18.214,27 |
| 8 | Belanja pakaian dinas dan atributnya | 1.999,83 | 2.139,46 | 2.142,08 |
| 9 | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu | 458,17 | 316,87 | 406,79 |
| 10 | Belanja perjalanan dinas | 26.122,28 | 25.860,76 | 18.269,95 |
| 11 | belanja Jasa Kantor | 56.565,37 | 54.718,25 | 101.321,19 |
| 12 | Belanja Sewa Gedung | 617,90 | 1.093,80 | 1.163,64 |
| 13 | Belanja Sewa Kendaraan | 3.944,23 | 5.471,20 | 7.393,19 |
| 14 | Belanja Modal (Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll) | 19.770,77 | 19.793,27 | 19.913,31 |
|  | **TOTAL** | **830.799,09** | **903.595,65** | **1.015.855,90** |

*Sumber : Bagian Keuangan, Setda Kab. Tabanan 2013 - 2015, diolah*

**Tabel 3.7**

**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**

**Kabupaten Tabanan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)** | **Total Belanja Daerah**  **(Rp)** | **Prosentase** |
| **(a)** | **(b)** | **(a) / (b) x 100%** |
| 1 | Tahun anggaran 2013 | 830.799,09 | 1.203.980,34 | 69,00% |
| 2 | Tahun anggaran 2014 | 903.595,65 | 1.338.633,93 | 67,50% |
| 3 | Tahun anggaran 2015 | 1.015.855,90 | 1.500.864,07 | 67,68% |

*Sumber : Bagian Keuangan, Setda Kab. Tabanan 2013 - 2015, diolah*

**Tabel 3.8**

**Penutup Defisit Riil Anggaran**

**Kabupaten Tabanan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Dalam Juta Rupiah) | |  |  |  |
| NO | Uraian | 2013 | 2014 | 2015 |
| (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 1 | Realisasi Pendapatan Daerah | 1.253.026,82 | 1.367.063,68 | 1.522.637,96 |
|  | Dikurangi realisasi: |  |  |  |
| 2 | Belanja Daerah | 1.198.702,31 | 1.333.200,90 | 1.496.586,03 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 5.278,04 | 5.433,04 | 4.278,04 |
| **A** | **Defisit riil** | **49.046,48** | **28.429,75** | **21.773,89** |
|  | Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan: |  |  |  |
| 4 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 43.482,22 | 92.528,70 | 121.329,37 |
| 5 | Pencairan Dana Cadangan |  |  | - |
| 6 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan |  |  | - |
| 7 | Penerimaan Pinjaman Daerah |  |  | - |
| 8 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah |  |  |  |
| 9 | Penerimaan Piutang Daerah | 112,73 | 370,93 | 638,95 |
| **B** | **Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah** | **43.594,95** | **92.899,62** | **121.968,33** |
| **A-B** | **Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan** | **92.641,42** | **121.329,37** | **143.742,22** |

*Sumber : Bagian Keuangan, Setda Kab. Tabanan 2013 - 2015, diolah*

**Tabel 3.9**

**Komposisi Defisit Riil Anggaran**

**Kabupaten Tabanan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (dalam Juta Rupiah) | |  |  |  |  |  |  |
| NO | Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| (Rp) | (Rp) | (Rp) | % | % | % |
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 43.482,22 | 92.528,70 | 121.329,37 | 99,74% | 99,60% | 99,48% |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Penerimaan Piutang Daerah | 112,73 | 370,93 | 638,95 | 0,26% | 0,40% | 0,52% |
|  | Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah | 43.594,95 | 92.899,62 | 121.968,33 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

*Sumber : Bagian Keuangan, Setda Kab. Tabanan 2013 - 2015, diolah*

1. Analisis Realisasi Lebih Perhitungan Anggaran

Realisasi SiLPA tahun berkenanan sangat besar disebabkan oleh pelampauan pendapatan serta kecilnya realisasi belanja (Tabel 3.9). Permasalahan utamanya adalah bagaimana pada realisasi belanja dapat dimaksimalkan dengan mengatasi kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Di masa mendatang diharapakan SiLPA harus semakin menurun karena dengan semakin menurunnya SiLPA merupakan salah satu indikasi semakin sinergisnya antara perencanaan dengan penganggaran. Selain itu semakin besar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan maka akan memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 3.10**

**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**

**Kabupaten Tabanan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Rata-rata pertumbuhan |
| Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA |
| 1 | Jumlah SiLPA | **43.369,50** |  | **92.528,70** |  | **121.329,37** |  |  |
| 2 | Pelampauan penerimaan PAD | 15.670,95 | 36,13% | 52.676,53 | 56,93% | 40.000,00 | 32,97% | 106,04% |
| 3 | Pelampauan penerimaan dana perimbangan | 4.258,57 | 9,82% | (106,90) | -0,12% |  | 0,00% | -101,26% |
| 4 | Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah | (19.374,15) | -44,67% | (14.352,41) | -15,51% |  | 0,00% | -62,96% |
| 5 | Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya | 42.652,03 | 98,35% | 54.196,80 | 58,57% | 81.329,37 | 67,03% | 38,57% |
| 6 | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | - |  |  |  |  |  | 0,00% |
| 7 | Kegiatan lanjutan | - |  |  |  |  |  | 0,00% |
|  | **Pembiayaan** | **162,08** | **0,37%** | **114,69** | **0,12%** |  | **0,00%** | **-64,62%** |

* 1. **Kerangka Pendanaan 2016-2021**

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama. Selanjutnya mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

* + 1. **Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama**

Pengeluaran periodik dan wajib difokuskan kepada belanja operasional ditampilkan pada Tabel 3.11. Tabel 3.11 menunjukkan adanya peningkatan belanja periodik wajib dan proioritas utama dengan rata-rata pertumbuhan 17,52%. Hal yang harus menjadi perhatian dalam perkembangan tahun berikutnya adalah belanja gaji dan tunjangan ada kebijakan tidak menambah pegawai (zero growth) dan terjadinya perpidahan status kepegawaian guru sekolah menengah, selain itu setiap tahun selalu terjadi kenaikan gaji pegawai dan wacana pemberian tambahan tunjangan hari raya yang di berikan setahun sekali. Belanja yang meningkat drastis adalah belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Tahun 2013, bantuan keuangan khusus mencapai Rp. 32 Milyar dan meeningkat menjadi berkisar Rp 50 Milyar pada tahun 2014. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2015 mencapai Rp. 141 milyar yang dipicu oleh pemberlakuan secara efektif Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut menyiratkan pembangunan akan dilakukan mulai tingkat terbawah dengan memberikan dana lebih besar kepada pemerintah desa sehingga mereka akan dapat berkreasi membangun wilayahnya. Di tahun yang akan datang dana bantuan keuangan khusus kepada desa tentu akan semakin besar sesuai dengan perkembangan pendapatan daerah serta dana transfer dari pemerintah pusat.

**Tabel 3.11**

**Pengeluaran Periodik,Wajib Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Tabanan**

| No | Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | Rata-rata Pertumbuhan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| **A** | **Belanja Tidak Langsung** | **730.056,27** | **825.920,29** | **978.962,78** | **15,83%** |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 502.590,96 | 524.995,02 | 563.137,91 | 5,86% |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan | 158.137,58 | 201.663,60 | 212.955,83 | 16,56% |
| 3 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH | 2.939,17 | 3.623,91 | 3.623,76 | 11,65% |
|  | Belanja Bunga | 62,83 | 53,53 | 44,20 | -16,12% |
| 4 | Belanja Jasa Pelayanan Medik | 24.680,24 | 31.720,91 | 39.633,69 | 26,74% |
| 5 | Belanja pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah | 3.032,89 | 3.785,20 | 4.792,92 | 25,71% |
| 6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa | 6.099,80 | 6.689,00 | 12.978,45 | 51,84% |
| 7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa | 32.512,81 | 53.389,11 | 141.796,01 | 114,90% |
| **B** | **Belanja Langsung** | **72.364,36** | **73.760,48** | **126.960,84** | **37,03%** |
| 1 | Belanja Honorarium Non PNS (Tenaga Harian Daerah) | 1.280,06 | 758,13 | 1.071,88 | 0,31% |
| 2 | Belanja Pegawai Pengelola Dana BLUD. |  | 3.932,43 | 5.042,41 | 14,11% |
| 3 | Belanja Administrasi Perkatoran | 6.469,51 | 5.368,35 | 7.973,84 | 15,76% |
| 4 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 532,62 | 78,50 | 191,50 | 29,34% |
| 5 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 2.573,07 | 1.911,53 | 2.660,43 | 6,73% |
| 6 | Belanja premi asuransi kesehatan | 381,60 | 428,30 | 142,76 | -27,22% |
| 7 | Belanja Jasa Kantor | 56.565,37 | 54.718,25 | 101.321,19 | 40,95% |
| 8 | Belanja Sewa Gedung | 617,90 | 1.093,80 | 1.163,64 | 41,70% |
| 9 | Belanja Sewa Kendaraan | 3.944,23 | 5.471,20 | 7.393,19 | 36,92% |
| **C** | **Pembiayaan Pengeluaran** |  |  |  |  |
| 1 | Penyertaan Modal | 5.200,00 | 5.355,00 | 4.000,00 | -11,16% |
| 2 | Pembayaran pokok utang | 78,04 | 78,04 | 78,04 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** | **802.420,62** | **899.680,77** | **1.105.923,62** | **17,52%** |

Dari sisi Belanja Langsung, belanja yang harus menjadi perhatian adalah belanja jasa kantor yang terkait dengan gaji tenaga kontrak. Mengingat UMK yang terus mengalami peningkatan perlu dipikirkan peningkatan gaji tenaga kontrak untuk menyesuaikan dengan UMK. Belanja Sewa Kendaraan juga harus mendapat perhatian. Ke depan perlu dikembangkan pola pengadaan kendaraan dinas secara bertahap mengingat kebutuhan kendaraan semakin meningkat dan juga meningkatkan nilai aset yang menjadi milik pemerintah kabupaten.

* + 1. **Proyeksi Data Masa Lalu**

Proyeksi data masa lalu dilakukan guna memberikan gambaran tentang potensi keuangan dimasa yang akan datang. Proyeksi dilakukan dengan menggunakan data lima tahun terakhir menggunakan pendekatan trend dan juga memperhatikan rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir. Selain itu proyeksi juga mempertimbangan kemungkinan perubahan kebijakan akibat berubahnya peraturan yang mengatur pendapatan daerah. Proyeksi dilakukan hingga tahun 2021 mengingat untuk menyediakan ruang transisi akibat dilakukannya pemilihan kepala daerah di tahun 2020. Masa transisi ini penting agar selalu tersedia acuan dalam penyusunan rencana tahunan meskipun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru belum ditetapkan.

1. Pendapatan Daerah

Tabel 3.12 menunjukkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat rata-rata 8,92% per tahun, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,75–7,59 persen per tahun, inflasi rata–rata 4,5–6 % per tahun. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di proyeksikan sebesar 4,48 % dengan beberapa asumsi:

* Hingga tahun 2015 sumber pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi telah maksimal dikelola serta telah mengalami kenaikan tarif sehingga peningkatannya sangat terbatas sebesar 3 %.
* Peningkatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diperkirakan naik sebesar 6% karena diasumsikan tahun 2018 akan terjadi peningkatan penerimaan dari rumah sakit di Nyitdah yang akan dibangun tahun 2017. Sedangkan tahun 2016 dan 2017 peningkatan diasumsikan akibat penyesuaian tarif di beberapa objek wisata.

Dari sisi Dana Perimbangan, penerimaan diperkirakan mengalami kenaikan 9,89 % yang bersumber dari dana DAU dan DAK diperkirakan tumbuh 10 % sesuai dengan trend yang terjadi lima tahun terakhir. Sedangkan bagi hasil pajak/bukan pajak diperkirakan naik hanya 5 % mengingat banyak kewenangan yang telah di daerah dan dana transfer di proporsikan melalui DAU dan DAK.

Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diasumsikan naik sebesar 9,28 %. Pendapatan Hibah diperkirakan menurun di tahun 2017 mengingat perubahan kewenangan daerah pada pendidikan menengah yang menjadi urusan pemerintah provinsi. Namun setelah tahun 2017 diperkirakan naik sebesar 5 %, sedangkan subsektor yang lain diperkirakan naik sebesar 10 %. Kenaikan Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan Bantuan Keuangan Khusus dimungkinkan naik mengingat pertumbuhan kendaraan dan penggunaan bahan bakar serta peningkatan pendapatan Kabupaten Badung dan Kodya Denpasar. Peningkatan Dana Penyesuaian Otonomi khusus akan dapat tumbuh 10 % mengingat kebijakan Pemerintah Pusat untuk memenuhi alokasi Dana Desa sesuai peraturan perundangan. Untuk mencapai pendapatan daerah sebagaimana yang diproyeksikan pada Tabel 3.12 kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada :

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
2. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan OPD Penghasil;
3. Membangun Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
5. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah;
6. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
7. Meningkatkan pendapatan melalui review peraturan daerah yang terkait dengan pendapatan seperti dasar penetapan tarif dan pengelolaan objek pendapatan daerah lainnya;
8. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

**Tabel 3.12**

**Proyeksi Pedapatan Daerah**

**Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Proyeksi** | | | | | | **RATA-RATA PERTUMBUHAN** |
| **K e t e r a n g a n** | | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pendapatan Asli Daerah** | | **318.033,60** | **327.462,53** | **343.355,04** | **360.088,44** | **377.709,81** | **396.268,95** | **4,88%(\*3,00%)** |
|  | Hasil Pajak Daerah | 105.186,77 | 96.019,40 | 98.899,98 | 101.866,98 | 104.922,99 | 108.070,68 | **3,00%** |
|  | Hasil Retribusi Daerah | 44.161,31 | 21.833,20 | 22.488,19 | 23.162,84 | 23.857,72 | 24.573,45 | **3,00%** |
|  | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 8.742,00 | 7.322,11 | 7.541,78 | 7.768,03 | 8.001,07 | 8.241,10 | **3,00%** |
|  | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 159.943,52 | 202.287,82 | 214.425,09 | 227.290,60 | 240.928,03 | 255.383,71 | **6,00%(\*3,00%)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dana Perimbangan** | | **1.102.265,09** | **1.135.165,88** | **1.247.325,96** | **1.370.634,22** | **1.506.202,09** | **1.655.251,97** | **9,89%(\*10,25%)** |
|  | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 23.775,52 | 27.130,19 | 28.486,70 | 29.911,04 | 31.406,59 | 32.976,92 | **5,00%** |
|  | Dana Alokasi Umum | 826.283,78 | 826.283,78 | 908.912,16 | 999.803,37 | 1.099.783,71 | 1.209.762,08 | **10,00%** |
|  | Dana Alokasi Khusus | 252.205,79 | 281.751,91 | 309.927,10 | 340.919,81 | 375.011,79 | 412.512,97 | **10,00%(\*12,56%)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | | **371.637,11** | **400.201,12** | **437.160,54** | **477.662,86** | **522.054,73** | **570.717,07** | **9,28%(\*13,41%)** |
|  | Pendapatan Hibah | 98.465,51 | 61.213,91 | 64.274,60 | 67.488,33 | 70.862,75 | 74.405,89 | **5,00%(\*7,93%)** |
|  | Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 162.018,33 | 173.426,76 | 190.769,44 | 209.846,38 | 230.831,02 | 253.914,12 | **10,00%(\*14,41%)** |
|  | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 88.183,81 | 113.917,87 | 125.309,66 | 137.840,63 | 151.624,69 | 166.787,16 | **10,00%(\*14,68%)** |
|  | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 22.969,45 | 51.642,58 | 56.806,84 | 62.487,52 | 68.736,27 | 75.609,90 | **10,00%** |
|  | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **1.791.935,80** | **1.862.829,53** | **2.027.841,54** | **2.208.385,53** | **2.405.966,64** | **2.622.237,99** | **8,92%(\*10,41%)** |

Keterangan: (\*..) adalah angka rata – rata pertumbuhan sebelum revisi

1. Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran Belanja Daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan Belanja Daerah tahun anggaran 2016 - 2021 sebagai berikut :

* 1. Pengelolaan Belanja Daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) berdasarkan prinsip *Money Follow Program Priority* untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tabanan dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
  2. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tabanan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang undangan;
  3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
  4. Stimulus belanja untuk pengembangan infrastruktur pedesaan;
  5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewengan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Proyeksi belanja dilakukan pada belanja wajib, mengikat dan prioritas utama seperti yang ditampilkan pada tabel 3.13. Belanja wajib, mengikat dan prioritas utama diproyeksikan meningkat 3,47%. Proyeksi tersebut diperoleh dengan memperhatikan pertumbuhan belanja yang terjadi selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 serta beberapa kondisi yang diasumsikan terjadi selama lima tahun kedepan. Belanja tidak langsung diproyeksikan meningkat hanya sebesar 1,87% dikarenakan terjadinya perubahan kewenangan khususnya pada pendidikan menengah yang berakibat pada berkurangnya belanja untuk gaji dan tunjangan guru serta sertifikasi. Hal ini sangat berdampak besar pada belanja pegawai di belanja tidak langsung yang dimulai terjadi pada tahun 2017 sehingga diperkirakan tumbuh hanya 0,07%.

Belanja yang paling meningkat kedua terbesar adalah belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang tumbuh mencapai 4,53 %. Hal ini lebih disebabkan oleh penerapan Undang-Undang Desa, dimana pembangunan nantinya akan dimulai dari desa. Sehingga dana desa akan bertambah besar seiring peningkatan pendapatan daerah serta dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan selain dana transfer alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat. Belanja yang pertumbuhannya paling tinggi adalah belanja jasa pelayanan medik yang merupakan belanja pada Rumah Sakit yang tumbuh sebesar 5,37%. Peningkatan ini disebabkan mulai tahun 2017 Rumah Sakit Nyitdah akan beroperasi secara mandiri terpisah dari BRSUD Tabanan dan akan mulai dibangun seluruh gedung yang dibutuhkan melalui dana pinjaman daerah. Beroperasinya Rumah Sakit Nyitdah akan meningkatkan pendapatan pada layanan kesehatan yang juga berarti peningkatan belanja jasa pelayanan medik.

Pada sisi Belanja Langsung, belanja wajib mengikat akan tumbuh sebesar 9,3% yang hampir semua adalah belanja operasional OPD. Pertumbuhan tersebut didasarkan oleh pertumbuhan belanja selama tahun 2010 hingga tahun 2015. Sangat disadari bahwa belanja operasional OPD akan meningkat secara bertahap mengingat kedepan kita akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga berdampak pada belanja jasa kantor yang tumbuh sebesar 9,5%.

Belanja wajib mengikat pada sisi pembiayaan pengeluaran mengalami pertumbuhan yang signifikan dikarenakan beberapa kebijakan yang akan ditempuh guna mempercepat pembangunan. Pada tahun 2017 dan 2018 akan dilakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Dharma Santika sebagai modal kerja guna mempercepat penyerapan hasil BUMDes. Sedangkan empat ratus juta rupiah dari tahun 2016 hingga 2021 digunakan untuk penyertaan modal kepada Jamkrida. Peningkatan besar Belanja Pembiayaan Pengeluaran terjadi pada tahun 2019 dikarenakan akan dilakukannya pembayaran cicilan atas pinjaman daerah untuk pembangunan Rumah Sakit Nyitdah sebesar Rp. 201 Milyar. Untuk itu diasumsikan dibutuhkan dana sebesar Rp. 45 Milyar setiap tahun mulai tahun 2019 hingga tahun 2025.

**Tabel 3.13**

**Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib, dan Mengikat serta Prioritas Utama**

**Kabupaten Tabanan Tahun 2016 -2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | URAIAN | PROYEKSI | | | | | | **RATA-RATA PERTUMBUHAN** |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Rp. (dalam Jutaan Rupiah) | | | | | |
| **A** | **Belanja Tidak Langsung** | **1.130.891,64** | **1.080.648,26** | **1.083.377,18** | **1.132.939,92** | **1.183.954,46** | **1.236.542,10** | **1,87%(\*6,27%)** |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 746.553,12 | 666.555,14 | 651.335,20 | 681.608,67 | 711.882,14 | 742.155,62 | 0,07%(\*4,67%) |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan | 110.825,73 | 120.514,30 | 127.745,16 | 135.409,87 | 143.534,46 | 152.146,53 | 6,55%(\*9,28%) |
| 3 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH | 3.617,48 | 3.624,00 | 3.805,20 | 3.995,46 | 4.195,23 | 4.404,99 | 4,04%(\*7,26%) |
| 4 | Belanja Jasa Pelayanan Medik | 44.711,80 | 51.356,39 | 52.897,08 | 54.484,00 | 56.118,52 | 57.802,07 | 5,37%(\*12,45%) |
| 5 | Belanja pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah | 5.644,78 | 5.814,12 | 5.988,54 | 6.168,20 | 6.353,25 | 6.543,84 | 3,00%(\*12,26%) |
| 6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa | 13.367,81 | 14.417,34 | 14.849,86 | 15.295,35 | 15.754,21 | 16.226,84 | 3,97%(\*16,18%) |
| 7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa | 206.136,05 | 218.341,40 | 226.739,89 | 235.971,44 | 246.119,03 | 257.273,90 | 4,53%(\*4,30%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **Belanja Langsung** | **136.488,32** | **146.961,13** | **161.254,38** | **176.919,66** | **194.092,36** | **212.921,29** | **9,30%(\*14,35%)** |
| 1 | Belanja Honorarium Non PNS (Tenaga Harian Daerah) | 2.510,94 | 2.661,60 | 2.821,30 | 2.990,57 | 3.170,01 | 3.360,21 | 6,00%(\*10,00%) |
| 2 | Belanja Pegawai Pengelola Dana BLUD. | 629,87 | 667,66 | 707,72 | 750,18 | 795,19 | 842,90 | 6,00%(\*20,93%) |
| 3 | Belanja Administrasi Perkatoran | 8.452,27 | 8.959,41 | 9.496,97 | 10.066,79 | 10.670,80 | 11.311,04 | 6,00%(\*7,92%) |
| 4 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 191,50 | 210,65 | 231,72 | 254,89 | 280,38 | 308,41 | 10,00% |
| 5 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 2.926,47 | 3.219,12 | 3.541,03 | 3.895,13 | 4.284,64 | 4.713,11 | 10,00%(\*1,71%) |
| 6 | Belanja premi asuransi kesehatan | 300,00 | 324,00 | 349,92 | 377,91 | 408,15 | 440,80 | 8,00% |
| 7 | Belanja Jasa Kantor | 112.637,08 | 121.072,04 | 133.179,25 | 146.497,17 | 161.146,89 | 177.261,58 | 9,50%(\*14,54%) |
| 8 | Belanja Sewa Gedung | 1.504,19 | 1.777,06 | 2.049,93 | 2.322,80 | 2.595,67 | 2.868,54 | 13,81% |
| 9 | Belanja Sewa Kendaraan | 7.336,00 | 8.069,60 | 8.876,56 | 9.764,22 | 10.740,64 | 11.814,70 | 10,00%(\*14,36%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | **Pembiayaan Pengeluaran** | **1.478,04** | **10.478,04** | **10.478,04** | **55.478,00** | **55.478,00** | **50.278,00** | **205,80%(\*-9,93%)** |
| 1 | Penyertaan Modal | 1.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 5.200,00 | 118,57%(\*-10,0%) |
| 2 | Pembayaran pokok utang | 78,04 | 78,04 | 78,04 | 45.078,00 | 45.078,00 | 45.078,00 | 11533,23%(\*0,0%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** | **1.268.857,99** | **1.238.087,43** | **1.255.109,60** | **1.365.337,59** | **1.433.524,82** | **1.499.741,39** | **3,47%(\*7,21%)** |

Keterangan: (\*..) adalah angka rata – rata pertumbuhan sebelum revisi

1. Pembiayaan

Berdasarkan perkembangan Sisa Lebih Anggaran dari kurun waktu tahun 2010 - 2015, proyeksi SiLPA dari tahun 2016 hingga tahun 2021 dihitung sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.14. SiLPA merupakan pencerminan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran serta realisasi kegiatan. Nilai SiLPA yang besar selain akibat pelampauan pendapatan juga dapat mengindikasikan perencanaan penganggaran yang kurang tepat atau ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan. SiLPA yang terjadi selama tiga tahun terakhir dalam realisasi APBD Kabupaten Tabanan merupakan pelampauan pendapatan khususnya pajak daerah dan efisiensi belanja. Untuk itu proyeksi SiLPA diupayakan proporsinya menurun dari proyeksi belanja daerah dengan dasar selama lima tahun ke depan akan dilakukan upaya-upaya dalam pemantapan perencanaan dan penganggaran melalui penerapan teknologi informasi.

**Tabel 3.14**

**Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran**

**Kabupaten Tabanan Tahun 2016 -2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (Rp) dalam juta | | | | | |
| 1 | Saldo kas neraca daerah | 84.470,72 | 63.100,49 | 51.679,64 | 55.457,08 | 59.404,04 | 63.533,91 |
|  | Dikurangi: | (\*89.807,54) | (\*92.303,34) | (\*94.291,84) | (\*98.646,90) | (\*80.980,62) | (\*88.373,56) |
| 2 | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kegiatan lanjutan |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran | 84.470,72 | 63.100,49 | 51.679,64 | 55.457,08 | 59.404,04 | 63.533,91 |

Keterangan: (\*..) adalah angka proyeksi sisa lebih sebelum revisi

* + 1. **Analisis Kerangka Pendanaan**

Analisis kerangka pendanaan dapat dilakukan dengan melakukan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Proyeksi didasarkan atas proyeksi pendapatan dan proyeksi SiLPA dikurang dengan proyeksi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama, seperti pada Tabel 3.15. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tabanan tahun 2016-2021 meningkat dari Rp 607 Milyar di tahun 2016 menjadi Rp. 1.186 Milyar di tahun 2021. Hal ini menunjukkan ke depan Kabupaten Tabanan akan memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk membiayai pembangunan jika perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan baik, efektif, efisien dan berbasis pada kinerja yang menunjang visi dan misi pembangunan daerah.

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam 3 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut :

**Prioritas I**, merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% dan bidang kesehatan 10 %. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Prioritas II**, Program Prioritas II merupakan program prioritas di tingkat OPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan pendanaan program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Tabanan tahun 2016-2021, yaitu “Tabanan Sejahtera Aman dan Berprestasi”. Kebijakan alokasi anggaran untuk prioritas II diarahkan pada :

1. Sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar (selain pendidikan dan kesehatan yang sudah menjadi prioritas I), fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, terutama bagi masyarakat miskin.
2. Pembangunan infrastruktur pedesaan yang mendukung pembangunan sektor pertanian, dan pencegahan terhadap bencana alam, serta sekaligus yang dapat memperluas lapangan kerja di pedesaan.

**Tabel 3.15**

**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**

**Kabupaten Tabanan Tahun 2016 -2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | Proyeksi | | | | |  |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (Rp) dalam juta | | | | | |
| 1 | Pendapatan | 1.791.935,80 | 2.063.829,53 | 2.027.841,54 | 2.208.385,53 | 2.405.966,64 | 2.622.237,99 |
| 2 | Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran | 84.470,72 | 63.100,49 | 51.679,64 | 55.457,08 | 59.404,04 | 63.533,91 |
|  | **Total penerimaan** | **1.876.406,52** | **2.126.930,02** | **2.079.521,18** | **2.263.842,61** | **2.465.370,68** | **2.685.771,90** |
|  | Dikurangi: | (\*1.916.278,02) | (\*2.103.358,06) | (\*2.311.053,61) | (\*2.544.813,53) | (\*2.783.152,06) | (\*3.076.421,82) |
| 4 | Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama | 1.268.857,99 | 1.238.087,43 | 1.255.109,60 | 1.365.337,59 | 1.433.524,82 | 1.499.741,39 |
|  | **Kapasitas riil kemampuan keuangan** | **607.548,53**  **(\*632.547,83)** | **888.842,59**  **(\*718.777,12)** | **824.411,58**  **(\*819.573,85)** | **898.505,02**  **(\*945.502,44)** | **1.031.845,86**  **(\*1.074.984,23)** | **1.186.030,51**  **(\*1.258.269,71)** |

Keterangan: (\*..) adalah angka Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah sebelum revisi

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanganan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan melalui revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.
2. Menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan diarahkan pada kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.

**Prioritas III**, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja untuk memenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap program-program Pemerintah Pusat sesuai dengan perundang undangan yang berlaku dan belanja tidak langsung yang dilakukan dengan prinsip pendekatan sektoral dan spasial, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
3. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk kegiatan bersifat umum atau khusus dari Kabupaten, Pemerintah Desa dan kepada Pemerintah Daerah lainnya. Belanja bantuan keuangan Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah dari Kabupaten Tabanan.

Pengunaan kapasaitas riil kemampuan keuangan daerah akan diproporsikan kedalam tiga prioritas sebagaimana uraian diatas. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan proporsi tiap prioritas ditampilkan Tabel 3.16 dan Tabel 3.17. Rencana pengeluaran untuk prioritas I tumbuh berkisar 2,81 persen setiap tahunnya sehingga dari Rp. 561 Milyar di tahun 2016 menjadi Rp. 897 Milyar di tahun 2021. Prioritas I ini akan mendanai kegiatan program yang wajib sesuai dengan peraturan perundangan seperti kewajiban pemenuhan belanja bidang pendidikan yang harus mencapai 20 % dari anggaran belanja dan juga kewajiban belanja bidang kesehatan yang harus 10 %.

Penggunaan kapasitas riil berikutnya ditujukan untuk rencana alokasi pengeluaran prioritas II. Rencana pengeluaran prioritas II meningkat signifikan seiring meningkatnya kepasitas riil kemampuan daerah. Prioritas II diharapkan dapat tumbuh 38,85 % setiap tahunnya guna menciptakan masyarakat Tabanan yang sejahtera. Penggunaan alokasi dana tersebut akan diarahkan untuk program yang secara langsung berkontribusi pada pencapain visi dan misi daerah yang akan dijabarkan dalam bab-bab berikutnya.

Setelah kebutuhan utama dalam Prioritas I dan Prioritas II barulah sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah digunakan untuk Prioritas III yang terkait dengan peningkatan pendapatan pegawai, belanja hibah dan lain-lain. Pertumbuhan rencana alokasi pengeluaran Prioritas III akan sangat tergantung pada Prirotas I dan Prioritas II. Pada awal periode RPJMD diasumsikan belanja Prioritas III ini sangat kecil mengingat besarnya kebutuhan Prioritas I dan II. Namun selepas tahun 2016 dan tahun 2017 barulah ada kapasitas yang lebih besar.

Proporsi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah di tampilkan pada Tabel 3.17. Pada tahun pertama RPJMD, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah akan digunakan sepenuhnya untuk prioritas pertama. Hal ini mengingat perlu banyaknya perbaikan pada sektor penting di Kabupaten Tabanan seperti bidang kesehatan dan infrastruktur. Selepas tahun 2017 terlihat adanya penurunan proporsi prioritas I sedangkan prioritas II dan III mulai meningkat hingga pada tahun akhir RPJMD belanja Prioritas II dan Prioritas III terlihat mulai berimbang. Hal ini memberikan gambaran bahwa dengan kapasitas kemampuan keuangan yang kecil pada awal periode RPJMD, Kabupaten Tabanan harus berfokus pada sektor utama dan penting yang berkaitan dengan pelayanan publik. Penanganan prioritas utama pun harus jelas dan terarah karena jika tidak akan menjadi kendala pada tahun-tahun berikutnya dan bukan tidak mungkin hingga akhir tahun periode RPJMD kita akan terus berkutat dengan prioritas I. Hal yang menjadi tantangan utama adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tabanan. Perlu sebuah tindakan nyata, penuh kerja keras dan berdampak besar dalam peningkatan kapasitas kemampuan keuangan daerah sehingga anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan jauh lebih besar.

**Tabel 3.16**

**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**

**Kabupaten Tabanan Tahun 2016 -2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Proyeksi | | | | | | **RATA-RATA PERTUMBUHAN** |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Rp. (dalam Jutaan Rupiah) | | | | | |  |
| **I** | **Kapasitas riil kemampuan keuangan** | **607.548,53** | **888.842,59** | **824.411,58** | **898.505,02** | **1.031.845,86** | **1.186.030,51** | **7,88%(\*15,03%)** |
|  | Rencana alokasi pengeluaran prioritas I |  |  |  |  |  |  |  |
| II.a | Belanja Langsung | 699.606,04 | 976.001,22 | 881.404,56 | 970.939,40 | 1.063.947,68 | 1.160.776,76 | **4,79%(\*9,26%)** |
| II.b | Pembentukan dana cadangan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dikurangi: |  |  |  |  |  |  |  |
| II.c | Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama | 136.488,32 | 146.961,13 | 161.254,38 | 176.919,66 | 194.092,36 | 212.921,29 | **9,71%(\*13,18%)** |
| II.d | Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama | 1.478,04 | 10.478,04 | 10.478,04 | 55.478,00 | 55.478,00 | 50.278,00 | **105,02%(\*0,0%)** |
| **II** | **Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)** | **561.639,69** | **818.562,06** | **709.672,14** | **738.541,74** | **814.377,32** | **897.577,46** | **2,81%(\*7,84%)** |
|  | Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rencana alokasi pengeluaran prioritas II |  |  |  |  |  |  |  |
| III.a | Belanja Tidak Langsung | 1.172.428,44 | 1.127.348,31 | 1.185.780,99 | 1.247.343,74 | 1.312.213,91 | 1.380.579,80 | 5,20%(\*9,57%) |
|  | Dikurangi: |  |  |  |  |  |  |  |
| III.b | Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama | 1.130.891,64 | 1.080.648,26 | 1.083.377,18 | 1.132.939,92 | 1.183.954,46 | 1.236.542,10 | 3,44%(\*6,10%) |
| **III** | **Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)** | **41.536,80** | **46.700,05** | **102.403,81** | **114.403,82** | **128.259,45** | **144.037,70** | **38,85%(\*27,0%)** |
|  | Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)\* | **4.372,04** | **23.580,49** | **12.335,62** | **45.559,46** | **89.209,08** | **144.415,35** | **94,83%(\*27,03%)** |

Keterangan: (\*..) adalah angka rata – rata pertumbuhan sebelum revisi

**Tabel 3.17**

**Kerangka Pendanaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**

**Kabupaten Tabanan Tahun 2016 -2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Dana | Alokasi | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp |
| 1 | Prioritas I | 92,44% | 561.639,69 | 92,09% | 818.562,06 | 86,08% | 709.672,14 | 82,20% | 738.541,74 | 78,92% | 814.377,32 | 75,68% | 897.577,46 |
| 2 | Prioritas II | 6,84% | 41.536,80 | 5,25% | 46.700,05 | 12,42% | 102.403,81 | 12,73% | 114.403,82 | 12,43% | 128.259,45 | 12,14% | 144.037,70 |
| 3 | Prioritas III | 0,72% | 4.372,04 | 2,65% | 23.580,49 | 1,50% | 12.335,62 | 5,07% | 45.559,46 | 8,65% | 89.209,08 | 12,18% | 144.415,35 |
|  | Total | 100,00% | 607.548,53  (\*632.547,83) | 100,00% | 888.842,59  (\*718.777,12) | 100,00% | 824.411,58  (\*819.573,85) | 100,00% | 898.505,02  (\*945.502,44) | 100,00% | 1.031.845,86  (\*1.074.984,23) | 100,00% | 1.186.030,51  (\*1.258.269,71) |

Keterangan: (\*..) adalah angka Kerangka Pendanaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah sebelum revisi

bab IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama perumusan dan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian isu-isu strategis meliputi identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis.

1. **PERMASALAHAN PEMBANGUNAN**

Permasalahan pembangunan yang akan disajikan berikut ini bersumber dari analisis data Bab II, dokumen APBD, persandingan terhadap permasalahan regional/nasional, serta hasil FGD (*Focus Group Discussion*) dengan berbagai *stakeholders*. Permasalahan dan tantangan tersebut dapat diklasifikasi menjadi beberapa bidang/sektor sebagai berikut:

1. **Geomorfologi Dan Lingkungan Hidup**

Bentang lahan wilayah Kabupaten Tabanan sebagian besar ditutupi oleh lapisan tanah yang subur karena terbentuk dari formasi batuan induk yang beragam dan iklim hujan tropis bermusim. Kabupaten Tabanan memiliki ekosistem pegunungan, danau, lembah, dataran rendah, pesisir, dan laut. Dari karakteristik alam dan iklimtersebut menjadikan Tabanan sangat kaya dengan sumber daya air, dimana terdapat satu danau, puluhan sungai, dan ratusan mata air. Akibat pertambahan penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat, Tabanan dihadapkan pada sejumlah permasalahan dalam rangka mempertahankan kondisi lingkungan yang tetap lestari, antara lain:

1. Meningkatnya persaingan pemanfaatan air, antara air untuk pertanian dan air minum;
2. Tidak terkendalinya alih fungsi lahan pertanian subur;
3. Terancamnya Danau Beratan terhadap pendangkalan akibat erosi dan pencemaran air dari aktivitas wisata dan budidaya pertanian di sekitar danau;
4. Ancaman bencanaalam seperti: gempa bumi tektonik, tsunami, angin topan/badai, banjir, dan tanah longsortetap menjadi tantangan akibat kondisigeografi, topografi, dan oseanografi Tabanansehingga usaha penanggulangan bencana dan penyadaran masyarakat harus terus dilakukan;
5. Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan;
6. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
7. **Kependudukan Dan Demografi**

Mencermati perkembangan kondisi kependudukan dan demografi Kabupaten Tabanan, beberapa hal dapat disimpulkan sebagai permasalahan dan tantangan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, antara lain:

1. Angka ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Tabanan, yaitu beban ketergantungan usia non produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) terhadap usia produktif 15 – 64 tahun tergolong “tinggi”, rata-rata di atas 45 persen. Hal ini menuntut penyiapanSDM generasi muda yang berkualitas melalui pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja, dan iklim investasi yang kondusif;
2. Sebaran penduduk cenderung padat di 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Kediri dan Tabanan. Pertumbuhan oleh migrasi dari luar pulau juga menjadi penyebab relatif tingginya pertumbuhan penduduk di kedua kecamatan tersebut. Ketimpangan distribusi penduduk akan memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, dan infrastruktur;
3. Penduduk Tabanan memiliki usia harapan hidup tertinggi di Bali sehingga semakin banyak penduduk lanjut usia memerlukan perhatian dan pelayanan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia;
4. Kecenderungan angkatan kerja lebih memilih pekerjaan formal dibandingkan dengan sektor informal sehingga peluang yang ada pada sektor informal dimanfaatkan oleh penduduk pendatang.
5. **Ekonomi Dan Sumber Daya Alam**

Pertumbuhan ekonomi Tabanan belum menunjukkan kinerja yang memuaskan. Ketimpangan struktur ekonomi antara sektor primer, sekunder, dan tersier juga masih lebar. Efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumberdaya alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan masih menghadapi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Berkenaan dengan hal tersebut, berikut akan dikelompokkan dan diuraikan permasalahan-permasahan ekonomi dan sumberdaya alam sebagai berikut:

1. Investasi, Industri, dan Perdagangan:
2. Daya tarik investasi Tabanan masih rendah karena belum adanya upaya pemberian insentif dan kemudahan investasi;
3. Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi;
4. Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur masih kurang;
5. UMKM yang berkembang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan sektor primer atau sumber bahan baku yang digunakan hanya sebagian kecil dari bahan baku lokal;
6. Daya saing UMKM masih lemah;
7. Adopsi teknologi oleh Industri Kecil Menengah (IKM) masih kurang;
8. Lembaga Koperasi yang terlibat dalam sektor riil sangat terbatas, sedangkan sebagian besar (lebih dari 90 persen) koperasi yang ada bergerak pada usaha utama simpan-pinjam;
9. Tidak terkendalinya pasar, toko, supermarket berjaringan yang mengancam keberadaan pasar rakyat;
10. Serapan hotel dan restoran terhadap produk lokal sangat terbatas;
11. Intervensi kebijakan pemerintah terhadap proses produksi, distribusi, dan pemasaran masih lemah;
12. Peran lembaga keuangan bank nasional dan bank daerah terhadap petani, nelayan dan IKM masih kurang.
13. Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan):
14. Belum ada kebijakan yang efektif untuk menekan alih fungsi dan alih kepemilikan lahan pertanian;
15. Tingkat pertumbuhan sektor pertanian cenderung rendah dan menurun terutama pada sektor pertanian tanaman pangan;
16. Masih rendahnya kemandirian petani dalam hal penyediaan benih/bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya sehingga kedaulatan pangan dalam arti yang sesungguhnya belum dapat terwujud. Hal yang sama terjadi terhadap pakan ternak, dimana sebagian besar pakan ternak (ayam, babi, ikan, dan lain-lain) dipasok dari luar Bali;
17. SDM pertanian sebagian besar berumur di atas 50 tahun dan minat generasi muda memilih pertanian sebagai mata pencaharian semakin menurun;
18. Skala usaha pertanian yang digeluti masyarakat adalah skala kecil sehingga dari sisi bisnis sulit digarap agar memberikan keuntungan yang wajar;
19. Produktivitas lahan sawah cenderung stagnan pada 5,6 ton/ha gabah kering panen sehingga peningkatan pendapatan petani sulit dicapai;
20. Ancaman kekeringan setiap tahun meningkat yang berdampak pada sulitnya memenuhi target tanam dan panen.
21. Tanaman palawija belum diusahakan secara sungguh-sungguh karena tidak menjanjikan pendapatan yang menarik bagi petani;
22. Kelembagaan usaha pertanian belum digarap dan diberdayakan secara maksimal untuk mampu memberikan pendapatan yang wajar kepada petani kecil;
23. Persaingan pemanfaatan sumber-sumber air, antara kebutuhan air irigasi dan air minum semakin meningkat sehingga pasokan air untuk kebutuhan pertanian menjadi semakin mengecil;
24. Hasil-hasil pertanian belum dijadikan bahan baku industri olahan pangan, artinya aktivitas pertanian cenderung terfokus pada sektor hulu;
25. Pertanian perkebunan relatif lebih menjanjikan dibandingkan pertanian sawah namun juga menghadapi masalah-masalah seperti: produksi rendah, hama/penyakit yang belum ditemukan teknologi pengendaliannya, pasar dikuasai tengkulak, dan lain-lain;
26. Masih minimnya infrastruktur pertanian, khususnya menyangkut: irigasi, jalan, dan industri pengolahan hasil-hasilnya;
27. Masih rendahnya kualitas dan kemampuan petani dalam akses teknologi dan modal;
28. Ancaman melemahnya daya saing produk pertanian akibat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) dan perdagangan bebas lainnya;
29. Keterpaduan usaha ternak dan tanaman belum berjalan optimal;
30. Sumber daya perikanan belum mampu dikembangkan menjadi produk unggulan daerah;
31. Sinergi sektor pertanian dengan pariwisata tidak terjalin dengan baik, justru ada kecenderungan perkembangan pariwisata memacu alih fungsi dan atau alih kepemilikan lahan pertanian.
32. Ketergantungan petani pada pupuk, pestisida/herbisida, benih/bibit masih sangat tinggi;
33. Praktek pertanian yang baik (*good agriculture practise*) yang memberi perhatian pada aspek teknologi, agribisnis, kesehatan (petani sendiri dan konsumen) dan lingkungan hidup dalam aktivitas pertanian belum mendapat penanganan yang memadai.
34. Pariwisata:
35. Jumlah kunjungan wisatawan yang cukup tinggi belum diikuti dengan tingkat hunian hotel yang cenderung sangat rendah, hal ini mengindikasikan waktu kunjungan wisatawan di Kabupaten Tabanan relatif singkat. Upaya peningkatan lama kunjungan wisatawan merupakan salah satu tantangan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tabanan pada masa mendatang;
36. Optimalisasi destinasi pariwisata sangat dibutuhkan guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, melalui peningkatan kualitas jaringan infrastruktur, peningkatan SDM pengelola destinasi pariwisata, pengembangan jalur-jalur wisata, serta peningkatan lahan parkir utamanya pada saat puncak kunjungan;
37. Aksesibilitas menuju destinasi pariwisata masih rendah, akibat kondisi jalan yang rusak maupun belum mengalami perkerasan;
38. Ketimpangan konsep pengembangan kepariwisataan yang berbasis budaya dan lingkungan serta bersifat kerakyatan belum tergarap secara sistematis dan terintegrasi;
39. Belum terjalin kerjasama yang intensif antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata sehingga pengelolaan kawasan wisata masih jauh dari profesional;
40. Penentuan pangsa pasar untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Tabanan perlu kejelasan untuk menghindari pelemahan perekonomian masyarakat setempat, akibat pembangunan kepariwisataan yang tidak terencana dengan baik. Diperlukan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mencapai tujuan pariwisata berkelanjutan;
41. Persawahan dan bentang alam yang hijau dan asri banyak dikorbankan untuk pembangunan hotel atau pun sarana penunjang pariwisata lainnya;
42. Sampah dan pedagang keliling (pedagang acung) banyak dikeluhkan oleh wisatawan yang berkunjung ke Tabanan khususnya dan Bali umumnya;
43. Pengelolaan obyek wisata yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat lokal belum dilakukan secara profesional;
44. Tanah Lot sebagai obyek wisata dengan tingkat kunjungan tertinggi belum memberikan peningkatan PAD yang signifikan bagi daerah.
45. **Sosial Dan Budaya**

Bidang sosial budaya melingkupi ranah yang sangat luas, namun jika disederhanakandapat dikatakan bahwa bidang ini berkaitan dengan aspek manusia dan interaksinya satu dengan yang lainnya, baik secara individu maupun komunitas. Aspek-aspek sosial budaya yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pembangunan Tabanan lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan telah berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat dengan cukup bermakna. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, antara lain:

* 1. Adanya indikasi meningkatnyaangka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) melahirkan;
  2. Masih tingginya prevalensi kasus penyakit menular dan tidak menular;
  3. Sumber daya manusia kesehatan masih terbatas, yaitu ketersediaan tenaga medis dan paramedis yang ditugaskan di Puskesmas Pembantu, Puskesmas/Puskesmas Rawat Inap dan Rumah Sakit Umum;
  4. Masih terbatasnya ketersediaan obat serta pengawasan obat dan makanan;
  5. Pembiayaan, kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan, masyarakat masih terbatas;
  6. Masih rendahnya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan;
  7. Masih rendahnya akses, masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga dibutuhkan pembangunan dan perkuatan Puskesdes dan Pustu di masing-masing Desa;
  8. Belum efektifnya manajemen pembangunan kesehatan, termasuk dalam pengelolaan administrasi, hukum, dan penelitian pengembangan kesehatan;
  9. Masih lebarnya kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antartingkat sosial ekonomi;
  10. Masih berjangkitnya berbagai penyakit yang berpotensi wabah seperti penyakit malaria, DBD, dan gizi buruk, dan adanya pengaruh iklim global terhadap wabah penyakit dan ketersediaan pangan;
  11. Tingginya pencapaian BOR (Bed Occupancy Rate) BRSUD Tabanan sehingga pembangunan rumah sakit baru untuk penambahan ruang perawatan wajib dilakukan.

1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Tabanan yang ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah pada tahun 2014 yang mencapai 8,40 tahun. Keberhasilan pembangunan pendidikan masih menyisakan berbagai permasalahan antara lain:

1. Belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. Pemerataan akses terhadap pendidikan terutama pada jenjangpendidikan PAUD/TK perlu didorong, termasuk penanaman nilai-nilai agama, sopan santun, toleransi, dan disiplin sudah dimulai sejak usia dini;
2. Belum berimbangnya orientasi pendidikan, antara akademis dan karakter pada semua jenjang pendidikan sehingga dikhawatirkan pendidikan hanya menghasilkan anak pintar tanpa budi-pakerti;
3. Rendahnya relevansikurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja;
4. Masih rendahnya profesionalisme dan disiplin guru, belum meratanya distribusi guru, dan masih terbatasnya jumlah guru agama Hindu dan guru bahasa daerah;
5. Terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan seperti ketersediaan perpustakaan, UKS, laboratorium, sarana teknologi informasi (IT), toilet, dan air bersih;
6. Masih rendahnya manajemen dan tatakelola pendidikan, termasuk kualitas pengawas dan administrasi sekolah;
7. Belum terwujudnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan;
8. Rendahnya budaya baca masyarakat karena masih dominannya budaya lisan di masyarakat dan minimnya ketersediaan sumber bacaan dalam pemenuhan kebutuhan informasi dan ilmu pengetahuan;
9. Pendidikan non formal berkenaan dengan pendidikan kecakapan hidup belum mendapat perhatian yang serius;
10. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) belum diperankan secara optimal dalam rangka menampung siswa yang putus sekolah untuk mendapat penyetaraan ijasah.Hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan jenjang pendidikan masyarakat tanpa terkendala oleh biaya yang cukup mahal.
11. Minat Baca

Sejalan dengan perkembangan kemajuan teknologi, budaya baca menunjukan kecendrungan menurun yang ditandai dengan adanya kecenderungan penurunan kunjungan perpustakaan daerah. Budaya baca yang dimaksud adalah suatu kebiasan yang didalamnya terjadi proses berfikir yang kompleks, terdiri dari sejumlah kegiatan seperti keterampilan menangkap atau memahami kata – kata atau kalimat yang tertulis, menginterpretasikan, dan merefleksikan. Permasalahan yang terkait dengan perpustakaan di Kabupaten Tabanan adalah :

1. Minimnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah, sekolah dan perpustakaan keliling;
2. Minimnya koleksi buku perpustakaan;
3. Kurangnya iklim sekolah dan lingkungan sosial yang mendorong anak suka membaca;
4. Kurangnya daya tarik perpustakaan.
5. Pemuda dan Olahraga

Pembangunan pemuda berkenaan denganproses penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda. Sementara pembangunan olahraga berkenaan dengan pengembangan fisik, mental, sportivitas, dan disiplin. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pemuda dan olah raga di Kabupaten Tabanan antara lain:

1. Belum optimalnya pendidikan kepemudaan dalam membentuk kepribadian pemuda yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup.
2. Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda masih terbatas yang ditandai dengan sedikitnya aktivitas kepemudaan yang terorganisir dengan baik.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga masih rendah;
4. Prasarana dan sarana olahraga relatif terbatas;
5. Kurangnya jumlah pelatih, pembina dan wasit yang profesional;
6. Apresiasi dan penghargaan masih rendah bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi;
7. Adat dan Budaya

Adat dan budaya merupakan bagian dari jati diri dan karakter suatu daerah atau bangsa. Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi penurunan pada penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa, solidaritas sosial, sikap toleransi dan tenggang rasa dalam masyarakat Bali. Berkaitan dengan adat dan budaya, permasalahan yang dihadapi Tabanan khususnya dan Bali umumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Adanya kecenderungan menurunnya minat generasi muda dalam memelihara dan mengembangkan seni dan budaya local;
2. Belum terpola dan terprogram upaya-upaya pelestarian peninggalan budaya, baik berwujud benda/bangunan maupun berupa nilai-nilai/kearifan lokal, bahasa dan seni;
3. Belum adanya jaminan kesejahteraan bagi pihak atau masyarakat yang berkiprah dalam pelestarian adat, seni dan budaya (prajuru adat, subak, tokoh agama, tokoh dan pelaku seni);
4. Adanya infiltrasi dan intervensi budaya asing;
5. Kurang representatifnya tempat pagelaran seni dan budaya (gedung kesenian I Ketut Maria).
6. Kesejahteraan Sosial

Secara umum permasalahan kesejahteraan sosial berkaitan dengan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, tunasosial, kerawanan sosial, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi dan diskriminasi.Kelompok-kelompok sosial tertentubelum dan atau tidak dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara selayaknya. Berkenaan dengan kesejahteraan sosial di Tabanan, masih ditemui sejumlah permasalahan sebagai berikut:

1. Tindakan kekerasan dalam keluarga cenderung meningkat akibat tekanan ekonomi dan permasalahan sosial;
2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum mampu menjangkau seluruh penduduk penyandang PMKS;
3. Angka kemiskinan Tabanan (5,61%) masih di atas rata-rata Provinsi Bali (5,25%) dan menyisakan penduduk miskin dengan tingkat katagori kronis (*hardcore poperty*);
4. Akses masyarakat miskin mendapatkan pendidikan ketrampilan masih terbatas;
5. Sinergi program penanggulangan kemiskinan belum terjalin dengan baik;
6. Program kemiskinan yang bersifat umum tidak mampu menanggulangi/ mengurangi penduduk miskin, dibutuhkan penanganan *by name by address*dan *by problem;*
7. Validitas data kemisikinan masih rendah;
8. Masih terdapat 300-an rumah tidak layak huni yang masih dihuni oleh masyarakat miskin;
9. Kesadaran masyarakat miskin untuk keluar dari kondisinya saat ini masih sangat rendah sehingga bantuan pemerintah cenderung memanjakan mereka.
10. **Pemerintahan Dan Hukum**

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) di Kabupaten Tabanan masih menghadapi banyak kendala, baik bersumber dari SDM, kelembagaan dan tata kelola pemerintahan maupun dari lemahnya regulasi/hukum yang ada.

1. Pemerintahan Daerah

Permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan pemerintahan daerah di kabupaten Tabanan adalah:

1. Struktur organiasi perangkat daerah sangat besar, dengan TUPOKSI yang tidak jelas dan cenderung tumpang tindih.
2. Analisis jabatan sebagai salah satu syarat penting tidak menjadi panduan dalam mengukur kebutuhan jabatandan penyusunan formasi jabatan mengacu pola maksimal yang tersuratdalam Peraturan Perundang-undangan;
3. Kompetensi, profesionalisme, sikap dan mental aparatur yang lemah sehingga kinerja organisasi cenderung stagnan dari tahun ke tahun;
4. Budaya kerja/etos kerja aparatur rendah;
5. Pemanfaatan teknologi dalam rangka mewujudkan kecepatan, ketepatan, transparansi dan konsistensi tata kelola pemerintahan masih terbatas;
6. Manajemen kinerja pemerintahan belum didukung oleh perangkat-perangkat manajemen yang memadai sehingga perencanaan – pelaksanaan – pelaporan – pengawasan belum berjalan dalam alur yang konsisten;
7. Beban Belanja Aparatur masih sangat berat sehingga kemampuan menyediakan sarana-prasarana gedung dan kesejahteraan bagi aparatur tidak mendapat perhatian yang memadai;
8. Perlunya meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa;
9. Implementasi good governance belum dilakukan secara sungguh-sungguh.
10. Hukum

Permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan bidang hukum adalah:

1. Masih banyaknya Peraturan Perundangan yang belum lengkap dan atau masih tumpang tindih dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata;
3. Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;
4. Pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal;
5. Penegakan supremasi hukummasih lemah.
6. **Keamanan Dan Ketertiban**

Keamanan dan ketertiban merupakan kebutuhan dasar masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Keamanan dan ketertiban saat ini menjadi sorotan masyarakat karena beberapa permasalahan yang sering muncul belakangan ini terkait dengan gerakan-gerakan separatis, konflik antar lembaga-lembaga sosial masyarakat, permasalahan adat dan lain-lain. Hal tersebut membuat masyarakat berupaya untuk lebih meningkatkan keamanannya. Beberapa permasalahan keamanan dan ketertiban yang menjadi permasalahan pembangunan di Kabupaten Tabanan antara lain:

1. Beberapa kasus adat yang terjadi Kabupaten Tabanan sempat mencuat dan menyita perhatian pemeritntah daerah terkait sengketa lahan maupun tapal batas. Permasalahan adat tersebut apabila tidak diantisipasi dengan cepat, maka dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas keamanan masyarakat;
2. Pendirian ormas/LSM yang semakin marak potensial menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal, baik antara ormas/LSM dengan masyarakat maupun ormas/LSM dengan Pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam aktivitasnya;
3. Beberapa kasus kriminal yang terjadi seperti kasus pencurian pratima di pura milik masyarakat yang sering terjadi sebagian besar disebabkan karena lemahnya pengawasan dan peran serta desa pekraman dalam meningkatkan keamanan lingkungan;
4. Sulitnya pendataan jumlah penduduk pendatang yang masuk ke Kabupaten Tabanan karena tersebar hampir diseluruh kecamatan dan jumlahnya sulit untuk dikontrol;
5. Permasalahan lampu penerangan jalan belum merata sehingga daerah-daerah yang belum maksimal mendapat penerangan jalan, rawan terjadi tindak kriminalitas;
6. Bertambahnya jumlah pedagang kaki lima dan gepengdapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
7. **Prasarana Wilayah**

Prasarana wilayah meliputi prasarana transportasi (jalan dan sarana perhubungan), sumberdaya air, keciptakaryaan, tata ruang, komunikasi dan informatika.

* + - 1. Prasarana Transportasi

Rendahnya kualitas layanan transportasi di Kabupaten Tabanan telah menjadi isu sentral yang berdampak sangat besar terhadap daya saing ekonomi daerah. Permasalahan utama berkenaan dengan prasarana transportasi di Kabupaten Tabanan adalah:

1. Panjang jalan kabupaten 860,96 km dengan kondisi rusak sedang dan rusak berat mencapai 55,75 persen atau sepanjang 480 km;
2. Dukungan jalan desa, jalan usaha tani dan jalan produksi dalam mendukung lancarnya distribusi hasil pertanian masih sangat kurang;
3. Jalan nasional yang melintasi Tabanan yang menghubungkan daerah Jawa – Bali – NTB kondisinya masih rawan terhadap kecelakaan lalu lintas sehingga dibutuhkan pembangunan *short cut* Yeh Enu (Kec. Tabanan-Kerambitan) dan Yeh Otan (Kec. Selemadeg), pemantapan sarana pendukung (ruang milik jalan dan drainase), dan pelebaran jalan di daerah rawan kecelakaan dan ibukota kecamatan;
4. Penanganan jalan kabupaten belum mengacu pada sistem penanganan yang jelas dan transparan sehingga dibutuhkan regulasi (perda) untuk meningkatkan efektivitas, efisensi, dan transparansi dalam menentukan prioritas penanganannya;
5. Delapan puluh lima persen dari 59 (lima puluh sembilan) jembatan yang ada di wilayah Tabanan kondisinya rusak;
6. Perlunya pengembangan poros tengah (arah timur – barat ) di bagian utara wilayah kabupaten (Kec. Pupuan, Penebel, Baturiti), dan poros tengah (arah utara – selatan) di bagian barat wilayah kabupaten (Kecamatan Selemadeg Barat dan Pupuan) sebagai upaya mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah;
7. Peningkatan jumlah kendaraan yang pesat belum mampu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan pembangunan ruas jalan baru;
8. Lemahnya pelayanan angkutan umum antar kecamatan dan antar desa, serta kurang berfungsinya terminal sebagai simpul layanan angkutan.
   * + 1. Sumberdaya Air

Air merupakan kebutuhan utama setiap makhluk hidup sehingga keberadaannya perlu perlindungan dan pemanfaatan yang efisien. Pertambahan jumlah penduduk dan aktivitasnya, persaingan pemanfaatan air tidak dapat dihindari. Permasalahan yang terjadi di Tabanan dalam kaitannya dengan sumberdaya air adalah:

1. Meningkatnya konversi lahan menjadi lahan terbangun berpotensi mengurangi ketersediaan air;
2. Konflik pemanfaatan air antara air minum (termasuk untuk kepentingan komersial) dan irigasi pertanian belum menemukan solusi yang memuaskan para pihak yang bersengketa;
3. Waduk Telaga Tunjung sebagai salah satu sumber air baku baik untuk pengairan maupun air minum belum berfungsi secara maksimal;
4. Pemanfaatan air sungai di bagian hilir untuk diolah sebagai air baku belum mendapat perhatian dan penanganan;
5. Cakupan pelayanan air minum masih kurang, perkotaan 73 persen, perdesaan 60,02 persen serta masih terdapat desa rawan air sebanyak 2 desa yaitu Desa Lumbung Kauh dan Mundeh Kangin, Kecamatan Selemadeg Barat;
6. Regulasi yang mengatur pengelolaan air besih masih terbatas.
   * + 1. Keciptakaryaan

Dalam upaya mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman dibutuhkan sarana sanitasi, limbah, dan penanganan sampah yang memadai. Permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi adalah:

1. Belum tertatanya sistem sanitasi di kawasan strategis kabupaten seperti pusat kota Tabanan dan DTWK Tanah Lot;
2. Sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik belum memadai sesuai kebutuhan;
3. Buangan limbah cair UKM dan limbah peternakan dibuang bersama limbah cair domestik ke saluran umum;
4. Pertumbuhan dan perkembangan permukiman baru yang pesat tidak dibarengi dengan penyediaan sarana air limbah yang memadai;
5. Cakupan pelayanan persampahan oleh pemerintah masih terbatas (baru mencapai 26 persen dari rumah tangga);
6. Tingkat kesadaran masyarakat memperlakukan sampah secara benar masih sangat kurang;
7. Partisipasi masyarakat dan swasta masih rendah dalam pengelolaan sampah;
8. Terdapat peluang kerjasama pengelolaan persampahan dengan swasta namun belum dimanfaatkan secara maksimal;
9. Permukiman kumuh cenderung meluas sejalan dengan meningkatnya kepadatan penduduk perkotaan.
   * + 1. Tata Ruang

Pertumbuhan penduduk membawa konsekwensi pada peningkatan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal, aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Dalam rangka mewujudkan pembangunan selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dibutuhkan perangkat berupa rencana tata ruang yang mestinya dijadikan dasar dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kondisi ideal tersebut tidak mudah dilaksanakan di Tabanan oleh berbagai penyebab. Beberapa permasalahan yang sering menjadi kendala adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan;
2. Belum tersusunnya Rencana Rinci Kawasan Strategis Kabupaten maupun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten;
3. Rendahnya keterkaitan fungsional antar wilayah perkotaan dan pedesaan;
4. Menurunnya ketersedianya lahan/ruang untuk ketahanan pangan dan ruang terbuka hijau (RTH) publik;
5. Belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi pada kawasan strategis Kabupaten;
6. Belum optimalnya perwujudan ruang investasi di kawasan pusat – pusat pertumbuhan di Kabupaten Tabanan;
7. Kinerja Badan koordinasi Penataan Ruang daerah (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
8. Masih lemahnya kepastian hukum (insentif dan desinsentif) terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
9. Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat dibidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
10. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.
11. **ISU STRATEGIS**

Penetapan isu strategis daerah untuk menjadi prioritas penanganan dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan mempertimbangkan kondisi dan dinamika yang terjadi pada lingkungan eksternal, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan rencana tata ruang wilayah. Berikut akan diidentifikasi isu-isu strategis dari berbagai sumber tersebut.

1. **Identifikasi Isu Strategis Internasional**

Isu penting dalam pembangunan ekonomi yang menuntut kesiapan seluruh pelaku ekonomi, termasuk pelaku ekonomi di daerah adalah pemberlakuan pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai akhir tahun 2015. Pemberlakuan MEA akan membebaskan aliran barang jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara. Dalam menghadapi pasar bebas ini dibutuhkan penguatan dalam beberapa hal, antara lain:

1. Penguatan daya saing ekonomi;
2. Kebanggaan pada produksi dalam negeri;
3. Penguatan sektor UMKM;
4. Perbaikan Infrastruktur;
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
6. Reformasi Kelembagaan dan Pemerintahan.

Dengan adanya MEAdiharapkan perekonomian Indonesia dapat memanfaatkan peluang meluasnya jangkauan pasar barang dan jasa dalam negeri ke seluruh negara ASEAN lainnya.Pangsa pasar ASEAN sejumlah 625 juta orang bisa disasar oleh Indonesia. Ekspor dan impor juga dapat dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Tenaga kerja Indonesia (TKI) bisa bebas bekerja di negara-negara lain di ASEAN dan begitu pula tenaga kerja dari negara-negara lain di ASEAN bisa bebas bekerja di Indonesia.

Apabila kita lengah, beberapa dampak negatif MEA akan dikhawatirkan terjadi di Bali, seperti:

* 1. tergusurnya tenaga kerja lokal yang bekerja di sektor jasa: hotel, restoran dan sektor jasa pariwisata lainnya;
  2. tergusurnya tenaga professional di bidang Pendidikan, Kesehatan, Hukum, Pemandu Wisata dan lapangan profesi lainnya;
  3. Penguasaan lahan, sektor jasa dan sumber ekonomi lainnya;
  4. Membanjirnya produk-produk impor menggantikan produk-produk lokal.

Selain MEA, terjadi kesepakatan 193 negara anggota PBB pada tanggal 2 Agustus 2015 tentang SDG’s (*Sustainable Development Goals*), “Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan” sebagai kelanjutan dari Milenium Development Goals (MDG’s). SDG’s memiliki 5 pondasi yaitu: manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa: mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global, sebagai berikut:

1. Tanpa Kemiskinan

Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia;

1. Tanpa Kelaparan

Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan;

1. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan

Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur;

1. Pendidikan Berkualitas

Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;

1. Kesetaraan Gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan;

1. Air Bersih dan Sanitasi

Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang;

1. Energi Bersih dan Terjangkau

Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang;

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak

Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang;

1. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

1. Mengurangi Kesenjangan

Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia;

1. Keberlanjutan Kota dan Komunitas

Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan bekelanjutan;

1. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab

Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi;

1. Aksi Terhadap Iklim

Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;

1. Kehidupan Bawah Laut

Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan;

1. Kehidupan di Darat

Melindungi, mengembalikan dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;

1. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian

Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan;

1. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

1. **Identifikasi Isu Strategis Nasional**

Pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 menggariskan hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Norma Pembangunan

a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;

b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteran, kemakmuran, dan produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;

c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

1. Tiga Dimensi Pembangunan

a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi.Manusia Indonesia unggul tersebut diharap-kan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berde-dikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:

1. Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain;
2. Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri;
3. Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat;
4. Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasiskan penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas:

1. Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;
2. Wilayah pinggiran;
3. Luar Jawa;
4. Kawasan Timur.
5. Kondisi sosial, politik, hukum dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi tersebut membutuhkan beberapa hal, antara lain:
6. Kepastian dan penegakan hukum;
7. Keamanan dan ketertiban;
8. Politik dan demokrasi; dan
9. Tatakelola dan reformasi birokrasi.
10. *Quickwins* (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan *output* cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA yangterdiri dari:

* + 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
    2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
    3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
    4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
    5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
    6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
    7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic;
    8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
    9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

1. **Identifikasi Isu Strategis Provinsi Bali**

Isu-isu strategis pembangunan Bali merujuk pada RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut:

1. Masalah Kependudukan

Pertumbuhan penduduk yang tinggi akibat tingginya arus migrasi dari luar Bali, ketimpangan pertumbuhan antar kabupaten/kota serta tingginya perpindahan penduduk dari kabupaten lain ke Kabupaten Badung dan Kota Denpasar merupakan isu yang strategis pada masalah kependudukan;

1. Kualitas Daya Saing Daerah yang Belum Optimal

Dalam menyambut AFTA 2015, salah satu faktor yang sangat menunjang keberhasilan dalam persaingan itu adalah faktor sumber daya manusia.Bagi Provinsi Bali peningkatan sumberdaya manusia merupakan syarat utama untuk dapat ikut secara aktif dalam persaingan bebas tersebut;

1. Adanya Disparitas Tingkat Kemiskinan Antar Daerah

Perbedaan potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing wilayah berkorelasi dengan proporsi penduduk miskin di kabupaten/kota tersebut.Proporsi rumah tangga miskin terendah dijumpai di Kota Denpasar sedangkan proporsi rumah tangga termiskin hingga saat ini masih berada di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng;

1. Kesehatan

Kejadian beberapa penyakit infeksi masih cukup banyak seperti misalnya TBC, demam dengue, diare, infeksi saluran nafas akut dan lain-lainnya. Sementara itu penyakit-penyakit infeksi baru (*new emerging diseases*) akan mengalami peningkatan pula, seperti misalnya SARS, flu burung, HIV/AIDS dan lain-lainnya. Penyakit-penyakit sebagai akibat perilaku juga akan terus meningkat seperti misalnya penyakit-penyakit yang muncul karena kecanduan alkohol, narkoba, merokok, kegemukan dan lain-lainnya. Kejadian penyakit-penyakit degeneratif seperti misalnya penyakit jantung koroner, stroke dan kanker juga akan terus meningkat;

1. Terjadinya Kerusakan Sumber Daya Hutan

Permasalahan hutan yang menonjol di Bali adalah kebakaran hutan, penebangan liar dan pembibrikan/perambahan/pelanggaran hutan.Pada tahun 2012, luas kerusakan hutan akibat kebakaran dan pembibrikan/perambahan hutan mencapai 7.361,31 ha;

1. Menurunnya Potensi Sumber Daya Air

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya mempertahankan potensi sumber daya air adalah: Sumber daya air belum mendapatkan proteksi yang cukup untuk menghindari semakin langkanya air bersih; Ketersediaan sumber daya air dari waktu ke waktu relatif tetap sesuai dengan daur ulang hidrologi; Adanya kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), banjir dan kekeringan. Saat ini terdapat 34 buah sungai telah berada dalam kondisi kritis berupa banjir, erosi dan pendangkalan di hulu dan di hilir;

1. Tingginya Pencemaran Air dan Udara

Meningkatnya pencemaran sumber-sumber air oleh limbah buangan terutama yang berasal dari aktifitas manusia. Pencemaran udara bersumber dari kendaraan bermotor, industri dan kegiatan lain yang menghasilkan gas emisi rumah kac;

1. Menurunnya Kualitas Lingkungan Pesisir dan Laut

Ekosistem utama pesisir dan laut di Provinsi Bali adalah terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Dalam dekade belakangan ini telah terjadi penurunan kualitas ekosistem pesisir dan laut yang disebabkan oleh faktor alami dan dampak aktifitas manusia (*Antrophogenic*). Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut disebabkan oleh perubahan ekosistem di kawasan hulu dan tengah;

1. Meningkatnya Sampah dan Limbah

Meningkatnya sampah dan limbah dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas yang mereka lakukan. Jumlah penduduk akan berkorelasi positif dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Peningkatan jumlah sampah tidak diimbangi dengan kualitas dan kuantitas peralatan dan teknologi yang memadai;

1. Terjadinya Abrasi Pantai

Abrasi pantai yang terjadi di Bali hampir menyeluruh di semua Kabupaten yang memiliki pantai. Panjang pantai yang mengalami abrasi 102,470 km (23% dari total pantai yang mempunyai panjang 437,70 km) dengan lajur abrasi yang berbeda-beda. Pantai-pantai yang mengalami abrasi meliputi Kabupaten Buleleng sepanjang 30,560 km, Jembrana 7,510 km, Tabanan 12,500 km, Badung 16,500 km, Denpasar 10,000 km, Klungkung 12,600 km, Gianyar 6,500 km dan Karangasem 6,300 km;

1. Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Alih fungsi lahan sawah yang terjadi di Bali dalam 11 tahun terakhir rata-rata sekitar 0,5% per tahun dan apabila dilihat lima tahun terakhir, terjadi penurunan alih fungsi lahan sawah sebesar 0,18% pertahun. Alih fungsi lahan sawah ini terutama terjadi di kabupaten yang memiliki pembangunan yang pesat akibat perkembangan pariwisata, seperti di Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar;

Konflik dan pelanggaran pemanfaatan lahan terjadi pada akhir-akhir ini terutama yang terkait dengan ruang yang diperuntukkan bagi masyarakat banyak (*public*).Diantaranya adalah konflik pemanfaatan lahan Loloan, konflik pemanfaatan ruang terbuka hijau, konflik pemanfaatan ruang pesisir/pantai.Masyarakat memanfaatkan ruang tersebut untuk berbagai kepentingan yang telah berjalan secara turuntemurun, sedangkan investor memanfaatkan untuk fasilitas pariwisata.Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi kerancuan pemanfaatan ruang yang diklaim masyarakat dan investor;

1. Terancamnya Keberadaan Sumber Daya Hayati

Bali memiliki berbagai plasma nutfah hewan dan tanaman yang kondisinya mulai mengalami tekanan bahkan ada yang sudah dalam katagori sangat kritis.MDGs telah menekankan bahwa pemerintah harus mengupayakan menghambat terjadinya kehilangan sumberdaya hayati. Kambing gembrong, itik bali, babi bali, lembu putih, kakatua jambul kuning, jalak bali, dan ikan mola-mola adalah beberapa sumberdaya hayati yang perlu mendapatkan perhatian, demikian pula dengan tanaman wani, jeruk bali, salak bali dan sebagainya yang juga merupakan kekayaan hayati Bali;

1. Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup MasihRendah

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih dalam tataran teoritis dan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan.Salah satu permasalahannya adalah masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Untuk itu dibutuhkan upaya untuk meningkatkan upaya kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pengembangan Desa Sadar Lingkungan (DSL), Program Sekolah Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Sad Kertih, Karya Tulis Lingkungan, dan pelatihan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah (3R);

1. Bencana Alam

Bencana alam belakangan ini sering terjadi antara lain tanah longsor, banjir, gempa bumi, puting beliung, erupsi gunung berapi, arus laut dan gelombang tinggi, kebakaran hutan, dan lain-lain. Selain itu provinsi Bali juga rawan untuk terjadinya tsunami;

1. Belum Optimalnya Sektor Perhubungan (Darat, Laut dan Udara)

Pemusatan aktivitas pembangunan terbesar terjadi di Kota Denpasar dan Badung Selatan sehingga menyebabkan besarnya produksi dan tarikan perjalanan dari/ke Denpasar dan Badung Selatan, atau ke wilayah sekitarnya seperti Tabanan atau Kabupaten Gianyar. Pergerakan yang terjadi bersifat menerus (*external-externalmovement*) dimana pada jam-jam tertentu akan dapat menyebabkan kemacetan yang cukup vital;

1. Keamanan

Keamanan merupakan isu yang sangat sensitif bagi perkembangan pariwisata. Masih adanya ancaman teroris menuntut pemerintah dan masyarakat untuk selalu waspada dan mengupayakan tindakan-tindakan pencegahan;

1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Iptek (termasuk seni), tantangan yang dihadapi antara lain: lemahnya kelembagaan penelitian dan terbatasnya sumber daya manusia peneliti. Di samping itu, hasil pembangunan Iptek belum menjadi teknologi yang siap pakai untuk difungsikan dalam sistem produksi, masih lemahnya sinergi kebijakan Iptek, serta belum adanya keterkaitan antara kegiatan riset dengan kebutuhan nyata masyarakat.

1. **Kebijakan Pembangunan Daerah (RTRW Dan RPJPD)**

Kebijakan pembangunan daerah yang wajib menjadi rujukan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2021 adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabanan Tahun 2012 – 2032 merumuskan 3 (tiga) arahan pokok, yakni berkenaan dengan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah memberikan arahan pembentukan sistem pusat kegiatan wilayah kawasan perkotaan dan perdesaan serta sistem jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitan pusat-pusat kegiatan tersebut.Pusat pelayanan pada Kawasan Perkotaan terbagi menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). PKN meliputi sebagian wilayah Kecamatan Tabanan meliputi: Desa Dauh Peken, Desa Delod Peken, Desa Dajan Peken, dan Desa Denbantas dan sebagian wilayah Kecamatan Kediri meliputi: Desa Kediri, Desa Abiantuwung dan Desa Banjar Anyar.

Kawasan Perdesaan memiliki Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang meliputi: pusat permukiman perdesaan dan kegiatan sosial ekonomi yang melayani kegiatan skala antar desa; dan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan yang mendorong tumbuhnya kota pertanian melalui berjalannya sistem dan usaha agribisnis untuk melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan agrisbisnis pembangunan pertanian dan agribisnis perikanan di wilayah sekitarnya.

Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi dan sumber daya air untuk mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten.

Rencana pola ruang memberikan arahan pada rencana Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung terdiri dari:

* 1. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 8.668 (delapan ribu enam ratus enam puluh delapan) hektar atau kurang lebih 13 (tiga belas) persen tersebar di beberapa kecamatan meliputi: Hutan Lindung Gunung Batukau seluas kurang lebih 6.808 (enam ribu delapan ratus delapan) hektar tersebar di Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Penebel, Kecamatan Baturiti dan Kecamatan Pupuan, Hutan Lindung Yeh Leh Yeh Lebah seluas kurang lebih 1.039 (seribu tiga puluh sembilan) hektar tersebar di Kecamatan Selemadeg dan Kecamatan Pupuan; dan Hutan Lindung Yeh Ayah seluas kurang lebih 820 (delapan ratus dua puluh) hektar tersebar di Kecamatan Selemadeg dan Kecamatan Pupuan;

* 1. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya adalah berupa kawasan resapan air yang merupakan kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan berupa tempat pengisian air (*akuifer*) yang tersebar pada bagian tengah dan utara wilayah Kabupaten Tabanan;

* 1. Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:

1. Kawasan Suci;
2. Kawasan Tempat Suci;
3. Kawasan Sempadan Pantai
4. Kawasan Sempadan Sungai;
5. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan.

Kawasan budidaya ditetapkan 87,73 persen dari luas wilayah kabupaten, meliputi:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat;
2. Kawasan Peruntukan Pertanian;
3. Kawasan Peruntukan Perkebunan;
4. Kawasan Peruntukan Perikanan (perikanan tangkap dan budidaya);
5. Kawasan Peruntukan Pariwisata (Kawasan Pariwisata, Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, dan Daya Tarik Wisata);
6. Kawasan Peruntukan Industri;
7. Kawasan Peruntukan Permukiman;
8. Kawasan Peruntukan Penunjang Fasilitas Permukiman;
9. Kawasan Peruntukan Pertambangan Terbatas;
10. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025 adalah“TABANAN SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN“.Dalam mewujudkan visi pembangunan tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, produktif, dan religius;
2. Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataanekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan;
3. Mewujudkan pertanian yang tangguh;
4. Menjadikan Kabupaten Tabanan sebagai pusat Agrowisata Provinsi Bali;
5. Mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan membentuk sistem pemerintahan yang baik (*good goverment*);
6. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.

Arah pembangunan jangka panjang pada periodelimatahun ketiga (2016 – 2020) menitikberatkan dan fokus pada bidang pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan lanjut kualitas pelayanan dasar menuju masyarakat mandiri;
2. Pengembangan lanjut kompetensi SDM menuju persaingan globalisasi;
3. Pengembangan daya saing di tingkat regional produk unggulan daerah;
4. Pemeliharaan dan pengembangan lanjut infrastruktur menuju pembentukan daerah Agrowisata dengan menjadikan bidang pertanian sebagai penunjang utamanya;
5. Konservasi berkelanjutan terhadap kelestarian fungsi hutan dan perlindungan sumber-sumber air, termasuk Danau Beratan.
6. **Isu Strategis Kabupaten Tabanan**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat pada masa yang akan datang. Ada 7 (tujuh) kriteria yang digunakan untuk memilih isu strategis, yaitu: bersifat lintas sektor, bersifat lintas wilayah, dapat berupa fenomena atau persoalan nyata, berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan, berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, potensi dampaknya kumulatif dan berefek ganda, dan potensi dampaknya lebih luas dari wilayah perencanaan. Di samping itu, kondisi lingkungan eksternal, kebijakan pembangunan nasional, provinsi, rencana tata ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana diuraikan di atas, merupakan referensi untuk memperkaya perumusan isu strategis Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan daftar panjang permasalahan, tujuh kriteria isu strategis, dan kajian lingkungan eksternal, dapat dirumuskan isu-isu strategis yang akan dijadikan prioritas perhatian dalam 5 (lima) tahun ke depan. Isu strategis tersebut dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) tema utama yang berkenaan dengan hak-hak dasar masyarakat, pelayanan dasar, dan lingkungan hidup. Kesembilan tema utama dan isu-isu strategis dalam setiap kelompok tema adalah sebagai berikut:

1. Sandang, Pangan, dan Papan

Sandang, pangan, dan papan merupakan hak-hak dasar masyarakat sehingga membutuhkan perhatian khusus untuk pemenuhannya secara berkesinambungan.Dari ketiga sektor ini, pangan membutuhkan perhatian lebih berdasarkan potensi dan permasalahan Kabupaten Tabanan. Isu strategis di sektor pangan adalah: *Tingginya alih fungsi lahan pertanian, khususnya sawah.*Alih fungsi lahan sawah di Tabanan adalah tertinggi di Bali sehingga dibutuhkan perhatian dan tindakan yang serius untuk mengendalikannya.Tabanan sebagai lumbung beras Bali sangat ditentukan oleh keberadaan lahan pertanian/sawah. Beberapa faktor pendorong alih fungsi lahan pertanian di Tabanan adalah: rendahnya minat generasi muda terhadap pertanian, kecilnya pendapatan petani sehingga tidak mampu membiayai hidup dan pendidikan yang semakin mahal, maraknya pembangunan perumahan sebagai dampak perkembangan kotaDenpasar/Badung, banyaknya penduduk pendatang, maraknya pembangunan ruko, dan lain-lain.

1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan yang dilaksanakan sampai saat ini telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Tabanan yang ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah yang telah mencapai 8,40 tahun. Namun, bila dicermati lebih jauh pendidikan di Tabanan masih dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut:

1. Pendidikan karakter dan pendidikan yang berbasis potensi unggul anak belum mendapat perhatian yang memadai dalam sistem pendidikan.

Sistem pendidikan yang hanya menghasilkan anak yang pintar dan cerdas, dipandang tidak cukup. Beberapa indikasi gagalnya sistem pendidikan membangun karakter bangsa sudah dapat dirasakan, seperti: meningkatnya kriminalitas, korupsi, tindak kekerasan, tawuran pelajar, menurunnya nilai-nilai kejujuran, toleransi, kerja keras, dan lain-lain. Nilai-nilai budaya lokal dan bahasa daerah juga sudah mulai ditinggalkan generasi muda.Sudah saatnya kembali memperkenalkan dan menanamkan kearifan-kearifan budaya lokal (Bali) kepada anak didik agar produk pendidikan mampu menghasilkan SDM yang berbudi luhur. Kelemahan lainnya adalah sistem pendidikan yang memperlakukan metode dan materi yang sama untuk seluruh anak, padahal tidak semua anak memiliki potensi yang sama. Apabila sistem ini tetap dipertahankan, dalam jangka panjang, sulit mendapatkan SDM yang profesional dan mencintai profesinya karena mereka sudah salah menempuh jalur pendidikan yang sesuai dengan bakat yang dimiliki;

1. Penyelenggaraan pendidikan tidak efisien berdampak pada tidak meratanya mutu pendidikan antar sekolah dan antar wilayah*.*

Inefisiensi penyelenggaraan pendidikan terjadi pada jenjang pendidikan SD.Penyebabnya adalah karena banyaknya jumlah sekolah dan sebaran guru yang tidak merata.Kondisi ini menyulitkan sebagian besar sekolah dalam pemenuhan standar jumlah guru dan murid serta sarana dan prasarana pendidikan yang layak;

1. Akses pendidikan non formal masih rendah

Kesempatan belajar tidak hanya menjadi hak bagi usia sekolah tetapi terbuka bagi seluruh warga yang ingin meningkatkan pendidikan dan pengetahuannya. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah wajib meningkatkan akses pendidikan, baik akses melalui sekolah formal, non formal maupun informal.Perhatian terhadap pendidikan non formal dan informal perlu ditingkatkan melalui pengaktifan kembali peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di masyarakat dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan penambahan jumlah dan kompetensi bagi para pamong belajar. Akses masyarakat terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu juga merupakan bagian dari pendidikan non formal harus mendapat perhatian serius pemerintah;

1. Minat baca menurun

Menurunnya minat baca siswa sudah terindikasi dari menurunnya jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah.Kemajuan teknologi informasi yang menawarkan berbagai pilihan informasi dan hiburan menjadi tantangan yang berat untuk menumbuhkan minat baca anak pada bacaan-bacaan yang bermutu dan sesuai dengan fase perkembangannya.Kemajuan teknologi informasi beberapa tahun terakhir ini sangat dikhawatirkan menurunkan minat baca anak-anak.Penurunan tingkat kunjungan ke perpustakaan daerah telah menjadi petunjuk adanya kecenderungan tersebut.

1. Kesehatan

Pelayanan kesehatan di Tabanan ditemui ada 2 (dua) isu strategis, yaitu: **belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan dan akses pelayanan rumah sakit** ; dan **belum membudayanya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan akses pelayanan rumah sakit, isu-isu yang terkait adalah:

1. Sarana dan prasarana dan tenaga kesehatan sampai pada tingkat Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes belum memadai;
2. Sebaran tenaga kesehatan tidak merata, masih terkonsentrasi di daerah perkotaan;
3. Jumlah dan mutu pelayanan Puskesmas Rawat Inap belum memadai
4. Tingginya BOR (*Bed Occupancy Ratio*) rumah sakit atau terbatasnya jumlah kamar rawat inap.

PHBS merupakan syarat penting untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Dengan pertambahan jumlah penduduk dan berubahnya gaya hidup masyarakat maka PHBS tetap relevan dijadikan gerakan bersama. Kemajuan teknologi kedokteran tidak akan berarti dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat apabila gerakan PHBS tidak dijadikan kesadaran bersama. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menumbuhkan dan memelihara kesadaran PHBS masyarakat.

1. Jaminan Sosial dan Kemiskinan

**Penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya belum optimal** adalah isu strategis berkenaan dengan isu jaminan sosial.Terdapat dua puluh enam jenis PMKS yang membutuhkan peningkatan pelayanan. Sembilan dari 26 (dua puluh enam) jenis PMKS mestinya mendapatkan prioritas penanganan karena persentasenya yang dominan, antara lain: fakir miskin (51,26%), keluarga bermasalah sosial fisikologis (21,44%), penyandang disabilitas (8,96%), perempuan rawan sosial ekonomi (6,46%), lanjut usia terlantar (2,77%), korban bencana sosial (3,02%), anak terlantar (1,57%), pemulung (1,19%), dan anak dengan disabilitas (1,04%).Angka kemiskinan Tabanan saat ini sebesar 5,61% masih berada di atas rata-rata angka kemiskinan Provinsi Bali (4,76%). Kondisi kemiskinan yang kronis *(hardcore poverty*) dengan kecenderungan dalam dua tahun terakhir meningkat yaitu dari 4,90% pada tahun 2012 menjadi 5,21% pada tahun 2013 dan kembali meningkat menjadi 5,61% pada tahun 2014. Disamping itu, indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan dalam dua tahun terakhir terus meningkat yang berarti kondisinya semakin buruk. Kondisi ini mesti disikapi oleh pemerintah karena membutuhkan langkah-langkah penanganan yang lebih fokus dan terintegrasi oleh berbagai *stakeholders*. Pergeseran pendekatan penanganan dari berbasiskan bantuan langsung ke arah pendekatan yang bersifat pemberdayaan usaha ekonomi produktif menjadi tantangan bagi daerah untuk dijawab dengan program-program inovatif yang lebih efektif;

1. Ketenagakerjaan

Tingginya angka ketergantungan usia non produktif terhadap usia produktif (*dependency ratio*) penduduk Tabanan menuntut tersedianya lapangan kerja bagi penduduk pencari kerja. **Terbatasnya lapangan kerja bagi angkatan kerja** merupakan isu strategis yang mesti mendapat perhatian dalam rencana pembangunan jangka menengah. Isu strategis tersebut sangat terkait dengan isu-isu seperti:

1. Kecenderungan angkatan kerja lebih memilih pekerjaan formal dibandingkan dengan sektor informal sehingga peluang yang ada pada sektor informal dimanfaatkan oleh penduduk pendatang;
2. Masih banyaknya hambatan investasi;
3. Kurang tumbuhnya wirausaha-wirausaha baru;
4. Rendahnya daya saing angkatan kerja.
5. Adat, Budaya, dan Agama

Dalam upaya membentuk jati diri, harkat, dan martabat masyarakat Bali dibutuhkan penguatan pembangunan adat, budaya dan agama.Seiring dengan perkembangan zaman kemajuan IPTEK dan adanya pengaruh budaya luar, tidak dapat dipungkiri terjadi perubahan-perubahan perilaku masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai adat, budaya dan agama. Isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan adat, budaya dan agama adalah:

1. **terjadinya degradasi mental dan meningkatnya penyakit masyarakat;**
2. **menurunnya budaya komunal tradisional (gotong royong), termasuk di lembaga subak**.

Faktor-faktor yang berkaitan dengan degradasi mental dan meningkatnya penyakit masyarakat, antara lain:

1. Adanya pengaruh budaya luar;
2. Tingkat kepercayaan pada nilai sosial mulai menurun akibat pengaruh luar;
3. Meningkatnya individualisme di tengah-tengah masyarakat;
4. Turunnya semangat gotong royong masyarakat;
5. Pengikisan budaya lokal akibat kemajuan IPTEK;
6. Pendidikan budi pekerti di tingkat keluarga belum optimal;
7. Pembentukan karakter anak terganggu akibat pemanfaatan teknologi informasi yang tidak tepat;
8. Judi dan miras masih marak terjadi;
9. Pemakaian narkoba di masyarakat cenderung meningkat;
10. Berdirinya *cafe* hingga ke polosok desa;
11. Pengendalian HIV/AIDS belum ditangani maksimal, dan lain-lain.

Berkenaan dengan *menurunnya budaya komunal tradisional (gotong royong)* diidentifikasi beberapa isu yang terkait, antara lain:

1. Meningkatnya individualisme di tengah-tengah masyarakat
2. Turunnya semangat gotong royong masyarakat, termasuk pada organisasi subak
3. Pengikisan budaya lokal akibat kemajuan IPTEK
4. Pengenalan anak terhadap kesenian dan Bahasa Bali masih rendah
5. Ekonomi (Pertanian, UMKM, dan Pariwisata)

*Economy-base* Kabupaten Tabanan adalah sektor pertanian, meliputi: pertanian tanaman pangan, hortikuluta, perkebunan, hutan rakyat, peternakan, dan perikanan. Kesejahteraan petani yang ditunjukkan oleh Nilai Tukar Petani (NTP) masih sangat rendah, terutama pada sub sektor tanaman pangan.Hal ini berdampak pada semakin rendahnya minat generasi muda menjadikan pertanian sebagai pilihan pekerjaan.Demikian juga terjadi kecenderungan menjadikan pertanian sebagai matapencaharian sampingan sehingga produktivitas pertanian sulit ditingkatkan.Produktivitas pertanian yang stagnan juga berkaitan dengan semakin menurunnya tingkat kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida/herbisida yang tidak terkendali.Motivasi bertani semakin melemah ketika saat panen raya harga panen jatuh karena lemahnya daya tawar petani terhadap pelaku-pelaku pasar.Rantai pasar dari petani skala kecil ke tingkat konsumen akhir menempuh perjalanan yang sangat panjang sehingga petani sebagai produsen menjadi pihak yang paling dirugikan. Dalam era perdagangan bebas saat ini, persaingan produk pertanian lokal akan semakin berat dengan masuknya produk-produk pertanian impor. Dari kondisi dan fenomena di atas dapat disimpulkan, bahwa isu strategis yang dihadapi sektor pertanian Tabanan adalah: **rendahnya produktivitas dan daya saing produk pertanian**. Dalam upaya memperkuat sektor pertanian, perlu diciptakan terobosan-terobosan baru oleh pemerintah untuk memperkecil biaya sarana produksi, mengembangkan industri pengolahan agar bahan baku yang dihasilkan petani memiliki kepastian pasar/harga dan rantai pasar mampu diperpendek. Di samping itu, dibutuhkan keberanian untuk meninggalkan pertanian konvensional menuju pertanian organik yang ramah lingkungan karena kesadaran masyarakat mengkonsumsi bahan pangan sehat/organik semakin meningkat.Pertanian organik dalam jangka panjang, di samping berdampak positif terhadap lingkungan, juga menjadikan petani lepas dari ketergantungan terhadap pupuk kimia bersubsidi. Demikian juga melalui pertanian organik akan tercipta nilai tambah terhadap limbah ternak dan limbah organik lainnya.

Mahalnya pakan ternak dan ikan menyebabkan daya saing kedua potensi daerah ini menjadi lemah. Di sisi lain, sebagian besar petani adalah sebagai peternak juga. Apabila industri pakan dan industri pengolahan berbahan baku pertanian lokal dapat dikembangkan di Tabanan, pertanian akan mampu tumbuh dengan lebih baik.

Pelaku usaha yang perannya cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi daerah adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berkenaan dengan UMKM, beberapa isu strategis yang dihadapi adalah:

1. **Pasar tradisional sebagai tempat usaha UMKM eksistensinya semakin menurun dengan terkendalinya pertumbuhan pasar modern dan supermarket yang berjaringan;**
2. **Koperasi dan kelembagaan ekonomi kerakyatan lainnya belum mampu berperan sebagai pelaku distribusi hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan rakyat;**
3. **Lemahnya daya saing UMKM** yang berkaitan dengan:
4. sumber bahan baku sebagian besar tidak berasal dari potensi lokal sehingga tidak terjalin sinergi hulu-tengah-hilir dalam aktivitas ekonomi masyarakat;
5. masih lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar;
6. terbatasnya akses pembiayaan;
7. lemahnya kemampuan SDM dalam aspek-aspek *entrepreneurship*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produksi, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, teknik pemasaran, dan penelitian pasar;
8. terbatasnya teknologi sehingga berpengaruh terhadap kualitas dan efisiensi produksi.
9. **Semakin beratnya persaingan dalam era perdagangan bebas (AFTA, MEA dan APEC) sehingga mengharuskan UMKM mampu menghasilkan produk dengan kualitas dan harga yang kompetitif di pasar global.**

Penggerak ekonomi Bali, khususnya Tabanan tidak bisa dilepaskan dari peran sektor pariwisata.Tidak dipungkiri pula, bahwa perkembangan pariwisata dalam beberapa dekade terakhir memunculkan berbagai kekhawatiran adanya tekanan yang besar terhadap alam dan budaya. Daya tarik dan masa depan pariwisata Bali sangat ditentukan oleh kesungguhan pemerintah dan masyarakatnya dalam menjaga keunikan alam dan budaya yang dimiliki. Pada sisi lain, pembangunan pariwisata belum berhasil menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama sehingga manfaat ekonomi lebih besar dinikmati oleh para pemilik modal (investor).Masyarakat sebagai pelestari alam dan budaya, seperti petani hanya menjadi obyek tanpa mendapatkan manfaat yang berarti dari perkembangan industri pariwisata. Isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi Tabanan dari sektor pariwisata adalah **masih terbatasnya pemberdayaan penduduk lokal, tingginya tekanan terhadap lahan pertanian dan sumberdaya air, dan ketergantungan yang tinggi terhadap investasi asing**. Oleh karena itu, pariwisata yang dinilai paling cocok dikembangkan adalah pariwisata yang konsisten terhadap pelestarian nilai-nilai sosial, budaya, dan lingkungan, serta memungkinkan terjalin interaksi yang positif dan wajar antara masyarakat lokal dengan wisatawan.

1. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" Tiga pilar pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan perhatian yang lebih besar terhadap tata ruang dan lingkungan hidup. Berkenaan dengan hal tersebut, Tabanan menghadapi sejumlah isu strategis sebagai berikut:

1. Tingginya tingkat kerusakan infrastruktur jalan yang memperparah kesenjangan pembangunan antara Tabanan Barat dan Tabanan Timur;
2. Meningkatnya persaingan pemanfaatan air, antara air untuk pertanian dan air minum;
3. Tidak terkendalinya alih fungsi lahan pertanian subur.
4. Terancamnya Danau Beratan terhadap pendangkalan akibat erosi dan pencemaran air dari aktivitas wisata dan budidaya pertanian di sekitar danau;
5. Ancaman bencana alam seperti: gempa bumi tektonik, tsunami, angin topan/badai, banjir, dan tanah longsor karena faktor kondisi geografi, topografi, dan oseanografi Tabanan;
6. Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.
7. Pencemaran lingkungan oleh sampah dan air limbah;
8. Rendahnya sanitasi lingkungan yang berakibat berkembangnya permukiman kumuh
9. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Kebutuhan terhadap pembenahan tatakelola pemerintahan sudah merupakan tuntutan mendesak untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Tidak dapat disangkal, bahwa *good governance* menjadi elemen penting untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Pemerintah Kabupaten Tabanan menghadapi tantangan yang cukup berat untuk mewujudkan *good governance* tersebut. Sejumlah isu strategis yang berhasil diidentifikasi adalah:

1. Besarnya proporsi belanja pegawai (aparatur) yang melebihi enampuluh persen dari belanja APBD Struktur kelembagaan dan jumlah pegawai kurang efisien.
2. Kompetensi dan integritas SDM aparatur belum optimal.
3. Sistem akuntabilitas kinerja belum berjalan optimal
4. Pemerintahan Desa masih dalam masa transisi dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

**4.2.6Revisi Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021**

Sebagai dampak dari kecenderungan perlambatan perekonomian global, regional dan nasional, kondisi makro ekonomi Bali juga telah melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap target kinerjanya. Selanjutnya dengan memperhatikan indikator kondisi makro ekonomi Bali, kondisi makro ekonomi Tabanan wajib melakukan penyesuaaian-penyesuaian. Dengan memperhatikan dan mempertimbangan kondisi tersebut penyesuaian target indikator makro ekonomi Tabanan diprediksi sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1

Tabel 4.1

Revisi Prediksi Kondisi Makro Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator Makro Ekonomi | | | | | | | |
| NO | URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) | 438,750. | 441,502. | 444,270. | 447,055. | 449,857. | 452,676. |
| 2 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | 6,62 | 6,75 | 6,87 | 7,00 | 7,12 | 7,25 |
| 3 | Kemiskinan ( %) | 4,93 | 4,73 | 4,54 | 4,34 | 4,14 | 3,94 |
| 4 | Gini Ratio | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 |
| 5 | IPM (%) | 73,77 | 74.84 | 76.01 | 77.01 | 78.01 | 79.01 |

Sumber : Tim Penyusun RPJM SB Kab. Tabanan 2017

**BAB V**

**VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Visi dan misi rpjmd periode 2016-2021 merupakan visi dan misi pemimpin daerah terpilih yang juga merupakan pimpinan daerah terpilih pada periode 2011-2015.

* 1. **VISI**

Sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, maka visi RPJMD tahun 2016-2021 adalah :

**“TABANAN SERASI”**

**(SEJAHTERA, AMAN, DAN BERPRESTASI)**

Visi Tabanan Serasi 2016-2021 (disebut dengan Jilid II) merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya (disebut dengan Jilid I) dengan semangat baru dan landasan yang lebih kuat. Semangat baru yaitu menjalankan ajaran **Tri Sakti**, memperkuat landasan yaitu dengan menggali konsep-konsep dasar pembangunan dari para pendiri bangsa melalui **“Pembangunan Semesta Berencana”**, dan memperhatikan agenda perencanaan pembangunan nasional melalui **“Nawacita”**.

Makna Tabanan Sejahtera, Aman, dan Berprestasi (Jilid II) ini pun dijabarkan secara lebih luas dari makna periode sebelumnya, sehingga menjadi:

1. Kata “SERASI” sendiri diartikan sebagai: keselarasan atau keseimbangan atau keharmonisan antara unsur-unsur material – spiritual, fisik – non fisik, kota – desa, intelektual - budi pakerti, laki – perempuan, dan lain-lain agar tercipta kondisi masyarakat yang tenteram dan damai;
2. SEJAHTERA adalah terwujudnya peningkatan kondisi ekonomi dan daya beli, derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan life-skill masyarakat Tabanan sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik;
3. AMAN adalah terjaminnya rasa aman masyarakat dan dunia usaha yang ditandai dengan terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam pencapaian kesejahteraannya melalui penguatan di bidang hukum, peningkatan mutu pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan (good governance);
4. BERPRESTASI adalah terwujudnya rasa bangga sebagai masyarakat Tabanan melalui pencapaian prestasi oleh seluruh pelaku pembangunan di Tabanan di berbagai kancah penggalangan prestasi lingkup regional, nasional atau internasional. Pelaku pembangunan yang dimaksud adalah perempuan dan pemuda, pendidik, paramedis, petani, peternak, nelayan, pengerajin, budayawan, olahragawan, dunia usaha, penyelenggara pemerintahan, sekeha/kelompok tradisional, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
   1. **MISI**

Capaian dan prestasi pembangunan yang telah dicapai dalam periode 2011–2015 tetap harus dipelihara dan dilanjutkan dalam pembangunan lima tahun ke depan. Atas dasar evaluasi kekurangan dan kelemahan pencapaian Visi Tabanan Serasi periode sebelumnya, serta atas dasar analisis isu strategis, tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam rencana pembagunan 2016–2021 maka visi Tabanan Serasi (jilid II) akan menempuh 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Membentuk SDM yang berkualitas, berbudaya, dan berkeadilan sosial.
2. Membentuk SDM yang memiliki keungggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang memiliki karakter jujur, kreatif dan mandiri, serta menjunjung dan melestarikan nilai-nilai budaya Bali seperti: *tat twam asi* (empati), keselarasan/keharmonisan, gotong royong, dan lain-lain.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan pelayanan prima
5. Menyediakan akses kepada semua warga untuk mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas;
6. Membangun kebiasaan masyarakat yang perduli terhadap kebersihan lingkungan dan pangan sehat/gizi seimbang.
7. Menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata
8. Memperkuat ekonomi Tabanan dengan pelibatan masyarakat lokal seluas-luasnya untuk menggarap potensi unggulan di setiap wilayah;
9. Mensinergikan pembangunan pertanian dengan pariwisata agar pariwisata berkontribusi positif terhadap kesejahteraan petani dan tidak menjadi ancaman bagi terwujudnya pertanian berkelanjutan;
10. Menciptakan nilai tambah terhadap produksi pertanian sehingga pertanian semakin diminati dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat pedesaan.
11. Mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui peningkatan infrastruktur.
12. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong dan melancarkan interaksi ekonomi, sosial, dan budaya;
13. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, mengacu tata ruang dan ramah lingkungan;
14. Menggalang partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan infrastruktur ekonomi, sosial dan budaya.
15. Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan dan berdaya saing berbasis teknologi informasi.
16. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, efektif dan efisien;
17. Memperkuat sistem dan prosedur perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
18. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kompetensi pejabat;
19. Menata ulang organisasi perangkat daerah, TUPOKSI dan sistem rotasi/mutasi pegawai.
    1. **TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

Tujuan dan Sasaran pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil analisis isu-isu strategis daerah. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tabanan 2016–2021 maka disusun tujuan dan sasaran lima tahun ke depan sebagai berikut:

**Misi 1.** Membentuk SDM yang berkualitas, berbudaya dan berkeadilan sosial, dengan tujuan:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan sasaran:
2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan;
3. Meningkatnya kualitas pemuda dan olah raga;
4. Meningkatnya kualitas penanganan kependudukan.
5. Peningkatan nilai – nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat dengan sasaran:
6. Meningkatnya apresiasi terhadap seni budaya lokal
7. Peningkatan pemenuhan perlindungan sosial dengan sasaran :
8. Menurunnya angka kemiskinan;
9. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
10. Meningkatkan perlindungan terhadap keamanan dan ketertiban;
11. Meningkatnya keterampilan usia produktif;
12. Meningkatnya penanganan PMKS.

**Misi 2.** Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan pelayanan prima, dengan tujuan:

1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, dengan sasaran:
2. Meningkatnya upaya kesehatan perorangan;
3. Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat.

2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dengan sasaran:

1. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima;
2. Terselenggaranya pelayanan dasar kesehatan sesuai SPM.

**Misi 3.** Menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata, dengan tujuan:

1. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dengan sasaran:
2. Meningkatnya produksi pertanian yang berdaya saing;
3. Berkembangnya usaha – usaha pengolahan dan pemasaran pertanian;
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pariwisata dengan sasaran:
6. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata.

**Misi 4.** Mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui peningkatan infrastruktur, dengan tujuan:

1. Mempercepat pengembangan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, dengan sasaran:
2. Tumbuhnya generator ekonomi baru sesuai penataan ruang;
3. Berkembangnya pusat – pusat pertumbuhan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana penunjang pusat – pusat pertumbuhan.

**Misi 5.** Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, dan berdaya saing berbasis teknologi informasi, dengan tujuan:

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan sasaran:
2. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas instansi pemerintah;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tujuan akan ditetapkan berdasarkan masing-masing misi pembangunan daerah, dan pada setiap tujuan akan dijabarkan menjadi sasaran dengan indikator-indikatornya. Adapun tujuan dan sasaran beserta masing-masing indikatornya yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Tabanan 2016-2021 sesuai misi yang telah ditetapkan di atas adalah seperti Tabel 5.1 di bawah ini.

**Tabel 5.1**

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tabanan 2016-2021**

1. **MEMBENTUK SDM YANG BERKUALITAS, BERBUDAYA DAN BERKEADILAN SOSIAL**

| TUJUAN | | INDIKATOR TUJU  AN | SASARAN | | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL (2015) | TARGET | | | | | | KONDISI AKHIR (2021) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | IPM | 1 | Meningkat  nya Akses dan Kualitas Pendidikan. | Rata-rata lama sekolah | 8,40 | 8,40 | 8,50 | 8,60 | 8,70 | 8,80 | 9 | 9 |
| Lembaga pendidikan Terakreditasi A (%) | SD  60 | 65,5 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| SMP  70 | 71,8 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga | Peringkat PORPROV | IX | VIII | VII | VII | VI | VI | VI | VI |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Penanganan kependudukan | Laju pertumbuhan penduduk (%) | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  |  |  | Angka pengangguran (%) | 2,25 | 2,15 | 2,05 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,75 | 1,75 |
| 2 | Peningkatan nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat | 1 | Meningkatnya apresiasi terhadap seni budaya lokal | Jumlah kearifan budaya lokal yang diakui secara nasional/internasional | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 3 | Peningkatan Pemenuhan Perlindungan Sosial | 1 | Menurun  nya angka kemiski  nan | Tingkat kemiskinan (%) | 5,61 | 5,61 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 4,75 | 4,50 | 4,50 |
| 2 | Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan anak | Rasio KDRT  (%) | 0,32 | 0,27 | 0,22 | 0,17 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat | Indek rasa aman (%) | N.A | N.A | N.A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Indeks resiko bencana | 174,4 | 174,4 | 169,4 | 164,4 | 159,4 | 154,4 | 149,4 | 149,4 |
|  |  | 4 | Meningkatnya keterampilan usia produktif | Menurun  nya angka pengang  guran (%) | 2,25 | 2,15 | 2,05 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,75 | 1,75 |
| 5 | Mening  katnya penanganan PMKS | Tingkat kemandirian PMKS (%) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 |

1. **MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN AKSES DAN PELAYANAN PRIMA**

| TUJUAN | | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | | INDIKATOR SASARAN | | KONDISI AWAL (2015) | TARGET | | | | | | KONDISI AKHIR (2021) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Mening  katkan akses pelayanan kesehatan | AHH | 1 | Meningkatnya upaya kesehatan perorangan | | Utilisasi pelayanan kesehatan (%) | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat | | Angka morbiditas  (%) | 19,44 | 17 | **≤**15 | **≤**15 | **≤**15 | **≤**15 | **<**15 | **<**15 |
| 2 | Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan | 1 | Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Prima | | Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi (%) | 0 | 20 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| Tingkat akreditasi RSD | Pari  purna | Pari  purna | Pari  purna | Pari  purna | Pari  purna | Pari  purna | Pari  purna | Pari  purna |
|  | 2 | Terselengga  ranya pelayanan dasar kesehatan sesuai SPM | | Capaian SPM Bidang Kesehatan  (%) | n.a | n.a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. **MENGGERAKKAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA**

| TUJUAN | | INDIKATOR TUJU  AN | SASARAN | | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL  (2015) | TARGET | | | | | | KONDISI AKHIR (2021) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Meningkatkan Daya Saing Sektor Pertanian | NTP | 1 | Meningkat nya Produksi Pertanian yang Berdaya Saing | Pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB | 1,97 | 1,98 | 1,99 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,03 |
| 2 | Berkembangnya Usaha – Usaha Pengolahan dan Pemasaran Pertanian | Kontribusi Industri Pengolahan Pertanian Terhadap PDRB (%) | n.a | n.a | n.a | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 |
| 3 | Meningkat nya Pember dayaan Masyarakat Berbasis Pertanian | Desa mandiri (%) | n.a | n.a | n.a | 50 | 70 | 100 | 133 | 133 |
| 2 | Mengem  bangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pariwisata | 1 | Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat Berbasis Pariwisata | Jumlah Desa yang Mendapat PAD Desa dari Sektor Pariwisata | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten (%) | 20 | 21,84 | 22,84 | 23,84 | 23,84 | 24,84 | 25 | 25 |

1. **MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH MELALUI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR**

| TUJUAN | | INDIKATOR TUJU  AN | SASARAN | | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL (2015) | TARGET | | | | | | KONDISI AKHIR (2021) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Mempercepat Pengembangan Pusat – Pusat Pertumbuhan Wilayah | Indek Ketimpangan Wilayah | 1 | Tumbuhnya Generator Ekonomi Baru Sesuai Penataan ruang dan lingkungan hidup | Jumlah Kawasan Kabupa ten yang mampu berkem bang | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 19 |
|  | Indek Kualitas Lingkungan Hidup | Meme  nuhi baku mutu | Memenuhi baku mutu | Memenuhi baku mutu | Meme  nuhi baku mutu | Meme  nuhi baku mutu | Meme  nuhi baku mutu | Memenuhi baku mutu | Memenuhi baku mutu |
|  | 2 | Meningkat nya Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Pusat – Pusat Pertumbuhan | Indek kepuasan Masyarakat terhadap kondisi Sarana dan Prasarana infrastruk tur | NA | NA | Sedang | Sedang | Sedang | Tinggi | Tinggi | Tinggi |

1. **MEMPERKUAT BIROKRASI YANG BERORIENTASI KINERJA,TRANSPARAN DAN BERDAYA SAING BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

| TUJUAN | | INDIKATOR TUJU  AN | SASARAN | | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL (2015) | TARGET | | | | | | KONDISI AKHIR (2021) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Indek Refor masi Biro krasi | 1 | Meningkatnya kualitas SDM dan akuntabilitas instansi pemerintah | ASN yang memiliki kompetensi (%) | 27,73 | 42 | 57,42 | 71,69 | 85,96 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Nilai SAKIP | CC | CC | B | A | A | A | A | A |
|  | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
|  | Persentase Perangkat Daerah Pada Zona Hijau | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | IKM terhadap layanan publik | baik | baik | baik | baik | baik | baik | baik | baik |
|  | Layanan OPD berbasis IT (%) | Belum teru  kur | 30 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |

bab VI

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang dibuat secara lengkap dan komprehensif yang memuat tata cara Pemerintah Kabupaten Tabanan mencapai tujuan dan sasaran. Strategi pembangunan daerah dapat dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan program-program yang diprioritaskan oleh Kepala Daerah. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan arah kebijakan untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah ditetapkan agar memiliki fokus dan target dalam pelaksanaannya lima tahun kedepan.

Agenda pembangunan Tabanan sebagai tindak lanjut penanganan isu-isu strategis daerah terjabarkan ke dalam tujuan dan sasaran setiap misi dari kelima Misi Kepala Daerah terpilih. Secara umum, agenda pembangunan lima tahun ke depan terdiri dari 7 (tujuh) bidang prioritas dengan beberapa fokus, yaitu:

1. Bidang Pendidikan:
2. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan pendidikan formal dan non formal;
3. Mengembangkan pendidikan karakter dan pendidikan yang berbasis potensi unggul anak;
4. Memberikan ketrampilan usia produktif untuk mengurangi pengangguran dan ketergantungan hidup (*dependensy ratio*).
5. Bidang kesehatan:
6. Pembangunan Rumah Sakit Umum Tabanan di Nyitdah untuk memindahkan BRSUD Tabanan yang ada sekarang;
7. Membangun Puskesmas Rawat Inap premium di setiap kecamatan;
8. Mengadakan 10 ( sepuluh )Mobil Sehat untuk setiap kecamatan;
9. Mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui perbaikan puskesmas pembantu, mengadakan *ambulace* desa dan lain-lain.
10. Bidang Pertanian:
11. Pengembangan kawasan komoditas unggulan: padi, bawang merah, kopi robusta, cabai, jagung, dan kedelai;
12. Pengembangan pertanian organik di kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD) Jatiluwih dan di sekitar Danau Beratan serta memperluas pertanian padi ramah lingkungan (Beras Sehat Tabanan) di seluruh kecamatan;
13. Pengembangan perkebunan organik di Pupuan;
14. Membangun Taman Teknologi Pertanian dan kawasan pendukungnya;
15. Mengembangkan pabrik pakan ternak terbesar di Bali;
16. Memfasilitasi pasar dan harga minimal bagi petani binaan yang mendukung program pemerintah;
17. Melestarikan plasma nutfah, pembiakan tanaman/hewan langka serta budidaya kebutuhan upacara adat/agama (Taman Bumi Banten);
18. Pembentukkan koperasi tani serta mengembangkan koperasi dan lembaga usaha yang bergerak di sektor riil.
19. Bidang Pariwisata:
20. Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat yang dikelola secara profesional;
21. Membangun integrasi antara pariwisata dan pertanian sebagai basis pengembangan pariwisata berkelanjutan.
22. Bidang Ekonomi Kerakyatan:
23. Menjalin sinergi dan keterkaitan antara sektor primer, sekunder dan tersier;
24. Pembangunan BUMDES berbasis olahan hasil pertanian di seluruh desa untuk menyerap hasil olahan pertanian kelompok-kelompok masyarakat;
25. Pembangunan BUMD sebagai mitra kerja dari BUMDES untuk memfasilitasi pasar produk-produk Usaha Kecil Menengah (UKM);
26. Merevitalisasi Lembaga Latihan Kerja (LLK) meliputi: fisik bangunan, manajerial, SDM dan fokus program pelatihan sehingga LLK mampu menyiapkan tenaga kerja terampil sesuai potensi daerah dan permintaan pasar tenaga kerja.
27. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang :
28. Meningkatkan kualitas infrastruktur melalui program hotmix;
29. Membangun dan mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup sesuai dengan rencana tata ruang;
30. Menjalin sinergi dengan pemerintah pusat dalam rangka mengembangkan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang mencakup 5 (lima) kecamatan, 23 (dua puluh tiga) desa.
31. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
32. Mempercepat Infrastruktur pada Kawasan Kumuh.
33. Bidang Perhubungan
34. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan.
35. Bidang Birokrasi :
36. Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja,transparan dan berdaya saing berbasis teknologi informasi;
37. Membentuk struktur kelembagaan yang efektif dan efisien;
38. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan desa berbasis teknologi informasi.

Ketujuh bidang prioritas berserta fokus-fokusnya diterjemahkan ke dalam 9 (sembilan) tujuan dan 20 (dua puluh) sasaran dari 5 ( lima ) misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai setiap sasaran secara rinci tertuang dalam Tabel 6.1 di bawah ini

**Tabel 6.1.**

**Strategi dan Arah Kebijakan**

**Misi 1: MEMBENTUK SDM YANG BERKUALITAS, BERBUDAYA DAN BERKEADILAN SOSIAL**

| **TUJUAN** | | **SASARAN** | | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 1 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 1.1 | Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan | 1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan SD | 1. Melaksanakan Wajib Belajar12 Tahun dengan memenuhi hak seluruh masyarakat mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun |
|  |  |  | 1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan SMP |
|  |  |  | 1. Penuntasan angka putus sekolah melalui pendidikan kesetaraan |
|  |  |  | 1. Peningkatan sarana dan prasarana PAUD | 1. Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan AnakUsia Dini |
|  |  |  | 1. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik PAUD |
|  |  |  | 1. Meningkatkan jumlah sekolah yang menyertakan pendidikan karakter | 1. Penerapan pendidikan karakter berbasis potensi unggul anak |
|  |  |  | 1. Meningkatkan muatan pendidikan berbasis moral dan keagamaan didalam pendidikan sekolah |
|  |  |  | 1. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan SD | 1. Meningkatkan profesionalisme, kualitas,dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan |
|  |  |  | 1. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan SMP |
|  | 1. Peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian hasil belajar siswa | 1. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel |
| 1. Peningkatan Efektifitas Pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah | 1. Meningkatkan kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas |
| 1. Peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan | 1. Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, transparan dan akuntabel |
|  |  | 1. Penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan | 1. Mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEK serta perkembangan global, regional, nasional dan lokal |
|  |  |  | 1. Penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta | 1. Peningkatan capaian SPM dan standar nasional pendidikan |
|  |  |  | 1. Peningkatan kualitas guru melalui diklat kompetensi (UKG) |
|  | 1.2 | Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga | 1. Mendorong bangkitnya olahraga prestasi | 1. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga |
|  |  |  |  | 1. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga | 1. Peningkatan upaya pembibitan dan Pengembangan prestasi olahraga secarasistematik, berjenjang, dan berkelanjutan |
|  |  |  |  | 1. Peningkatan apresiasi terhadap pengembangan olahraga tradisional |
|  |  |  |  | 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasana olahraga | c. Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana olahraga |
|  |  |  |  | 1. Peningkatan kemampuan guru dan pembina olahraga | d. Melaksanakan diklat dan pelatihan bagi pelatih dan guru-guru olahraga |
|  |  |  |  | 1. Peningkatan kompetisi di semua cabang olahraga dalam rangka penjaringan atlit | e. Peningkatan pembinaan pemuda dan olahraga |
|  |  | 1.3 | Meningkatnya Kualitas Penanganan Kependudukan | 1. Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas | 1. Meningkatkan pengendalian kelahiran dan migrasi penduduk |
|  |  |  |  | 1. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin |
|  |  |  |  | 1. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan KB |
|  |  |  |  | 1. Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga |
|  |  |  |  | 1. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja | 1. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga |
|  |  |  |  | 1. Penguatan bina keluarga remaja |
|  |  |  |  | 1. Peningkatan kompetensi angkatan kerja dan hilirisasi sektor pertanian | 1. Mendorong calon wirausaha muda untuk pemberdayaan usaha mandiri |
|  |  |  |  | 1. Peningkatan Fungsi dan Peran Lembaga Latihan Kerja (LLK) | 1. Revitalisasi BLK |
|  |  |  |  | 1. Meningkatkan kepatuhan perusahaan/industri terhadap peraturan ketenagakerjaan | 1. Menciptakan Hubungan Industrial yang harmonisdan memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan |
|  |  |  |  | 1. Pemberian pelatihan untuk memasuki pasar tenaga kerja serta pendampingan untuk pemberdayaan usaha mandiri | 1. Meningkatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan masyarakat |
|  |  |  |  | 1. Perluasan akses informasi Lapangan kerja | 1. Meningkatkan Peran Pasar Tenaga Kerja |
|  |  |  |  | 1. Fasilitasi penempatan dan penyiapan calon transmigran yang terampil | 1. Fasilitasi Penyiapan Daerah Tujuan Transmigrasi |
| 2 | Peningkatan nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat | 2.1 | Meningkatnya apresiasi terhadap seni budaya lokal | 1. Peningkatan aktivitas seni dan budaya lokal oleh masyarakat | 1. Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni budaya lokal |
| 1. Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman danpagelaran seni dan budaya |
| 1. Pemberian Penghargaan kepada pelaku seni dan para seniman |
| 3 | Peningkatan Pemenuhan Perlindungan Sosial | 3.1 | Menurunnya Angka Kemiskinan | 1. Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin | 1. Menurunkan persentase penduduk miskin |
| 1. Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin | 1. Mengembangkan kepedulian sosial terhadap masyarakat kurang mampu |
| 3.2 | Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak | 1. Meningkatkan upaya pemenuhan Kabupaten Layak Anak | 1. Meningkatkan gerakan Kabupaten yang layak dan ramah anak |
|  |  |  |  | 1. Menggalakkan Forum Anak Daerah |
|  |  |  |  | 1. Peningkatan efektivitas layanan bagi anak korban tindak kekerasan | 1. Meningkatkan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perdagangan anak |
|  |  |  |  | 1. Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban tindak kekerasan | 1. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO dan KDRT |
|  |  |  |  | 1. Penguatan lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) | 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan |
|  |  |  | 1. Meningkatkan upaya pengembangan usaha mikro perempuan | 1. Meningkatkan kualitas hidup dan peranperempuan di berbagai bidang pembangunan |
|  |  | 3.3 | Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat | 1. Peningkatan penanganan konflik sosial | 1. Mewujudkan perlindungan masyarakat dari ancaman konflik sosial dan dampak bencana |
|  |  |  |  | 1. Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana dan menyediakan sistem informasi dan deteksi dini bencana serta menangani korban bencana secara terpadu |
|  |  | 3.4 | Meningkatnya penanganan PMKS | 1. Memberikan perlindungan sosial, bantuan rumah layak huni, dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS | 1. Meningkatkan upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS |

**Misi 2 : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN AKSES DAN PELAYANAN PRIMA**

| **TUJUAN** | | **SASARAN** | | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Meningkatkan akses pelayanan kesehatan | 1.1 | Meningkatnya upaya kesehatan perorangan | 1. Memenuhi sarana dan prasarana pelayana kesehatan dasar | 1. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar |
|  |  | 1. Meningkatkan pemenuhan bantuan operasional kesehatan puskesmas |
|  |  | 1. Pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan untuk memperluas jenis layanan kesehatan rujukan yang mampu dilayani secara prima | 1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas |
|  |  | 1. Meningkatkan ketersediaan,penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan | 1. Peningkatan SDM, pemerataan tenaga kesehatan dan non kesehatan, sesuai kebutuhan di fasilitas pelayanan kesehatan |
|  |  | 1. Meningkatkan ketersediaan,keterjangkauan,pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan | 1. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensialgenerik di fasilitas pelayanan kesehatan dasar |
|  |  | 1. Integrasi dan Sinkronisasi Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) kedalam Program JKN | 1. Peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah bagi Penduduk Miskin |
| 1.2 | Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat | 1. Penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui desa siaga | 1. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat |
| 1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) sertaupaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) |
|  |  |  |  | 1. Peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru dan penyakit tidak menular | 1. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan |
|  |  |  |  | 1. Peningkatan dan pengembangan lingkungan sehat |
|  |  |  |  | 1. Pelayanan hiegine dan sanitasi |
|  |  |  |  | 1. Peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan | 1. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat |
| 2 | Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan | 2.1 | Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Prima | 1. Meningkatkan upaya pemenuhan syarat-syarat agar FKTP terakreditasi | 1. Pengembangan dan penerapan system akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar pada FKTP |
| 1. Penguatan manajemen puskesmas melalui pengembangan system informasi kesehatan |
| 1. Pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit untuk pencapaian BOR sesuai standar | 1. Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan melaluia kreditasi rumah sakit dan pengembangan standar *guideline* pelayanan kesehatan |
| 2.2 | Terselenggaranya pelayanan dasar kesehatan sesuai SPM | 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan Ibu dan anak | 1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan |
|  |  |  |  | 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja |
|  |  |  |  | 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan lanjut usia |
|  |  |  |  | 1. Meningkatkan pelayanan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita |

**Misi 3: MENGGERAKKAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA**

| **TUJUAN** | | **SASARAN** | | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Meningkatkan Daya Saing Sektor Pertanian | 1.1 | Meningkatnya Produksi Pertanian yang berdaya saing | 1. Memberikan pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai | 1. Intensifikasi komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan komoditas yang memiliki pangsa pasar yang jelas |
|  |  | 1. Menggalakkan kembali pola tanam untuk meningkatkan produksi jagung dan kedele dalam rangka memenuhi bahan baku pabrik pakan ternak yang ada di Tabanan |  |
|  |  | 1. Mengembangkan komoditas unggulan jagung, kedelai, cabe, bawang merah, kopi, kelapa, cengkeh berbasis kawasan | 1. Mengembangkan Kawasan Komoditi jagung, kedelai, bawang merah, cabe, kopi, cengkeh, dan kelapa serta Kawasan Pertanian Organik |
| 1. Mengembangkan komoditas unggulan jagung, kedelai, cabe, bawang merah, kopi, kelapa, cengkeh berbasis kawasan |
|  |  | 1. Mengembangkan populasi ternak (sapi dan kambing) serta pendampingan kepada petani untuk mewujudkan mandiri pupuk organik dan meningkat kan pendapatan petani |  |
|  |  | 1. Membangun Taman Teknologi Pertanian (TTP) di Kec. Pupuan | 1. Menjadikan Taman Teknologi Pertanian (TTP) sebagai destinasi agrowisata dan pelatihan teknologi pertanian |
| 1. Menyiapkan pengelolaan yang mandiri dan profesional terhadap Kawasan TTP Pupuan |
|  |  | 1. Melindungi WBD Jatiluwih dan mewujudkan sawah abadi |  |
|  |  | 1. Meningkatkan penangkaran benih padi, mengaktifkan benih antar lapang kedelai, dan pelestarian plasma nutfah hewan dan tumbuhan Tabanan yang terancam kepunahan | 1. Mewujudkan kedaulatan benih dan melindungi plasma nutfah |
|  |  | 1. Pemberian subsidi/bantuan benih/bibit yang bermutu kepada petani |  |
|  |  | 1. Memberikan fasilitasi pasar kepada petani |  |
|  |  | 1. Merehabilitasi tanaman kopi robusta di Kec. Pupuan dan Kelapa di Kec. Selemadeg Barat, Selemadeg, dan Selemadeg Timur | 1. Memperluas cakupan sertifikasi organik dan indikasi geografis untuk tanaman perkebunan |
|  |  | 1. Meningkatkan aplikasi teknologi tepatguna dalam perikanan untuk meningkat kan daya saing terhadap hasil perikanan dari luar pulau | 1. Meningkatkan produktivitas perikanan |
| 1.2 | Berkembangnya Usaha – Usaha Pengolahan dan Pemasaran Pertanian | 1. Mengembangkan industri perdesaan berbasis kelapa, kopi, dan komoditas unggulan lainnya | 1. Mempercepat industrialisasi perdesaan berbasis komoditi pertanian |
|  |  |  | 1. Membangun pabrik pakan ternak |
|  |  |  | 1. Membangun pabrik tepung ikan |
|  |  |  | 1. Mengaktifkan kembali perusahaan daerah untuk memfasilitasi pemasaran hasil/produk olahan pertanian |  |
|  | 1.3 | Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pertanian | 1. Mengembangkan ekonomi desa melalui BUMDES berbasis pertanian | 1. Menguatkan lembaga pemerintahan dan kelompok masyarakat berkenaan dengan pengembangan potensi ekonomi perdesaan |
|  |  | 1. Mengembangkan pelembagaan usaha ekonomi di tingkat petani, wanita tani dan UKM |
|  |  |  |  | 1. Memacu pertumbuhan koperasi sektor riil |  |
|  |  |  |  | 1. Pelatihan dan pendampingan Teknologi Tepatguna yang berkaitan dengan pengolahan pascapanen |  |
|  |  |  |  | 1. Meningkatkan prasarana dan sarana Pasar Tradisional |  |
|  |  |  |  | 1. Pemantauan periodik harga pangan di pasar tradisional | 1. Mewujudkan kedaulatan pangan masyarakat desa dan pola pangan harapan |
|  |  |  |  | 1. Mengembangkan Rumah Pangan Lestari |  |
| 2 | Mengembangkan Ekonomi kerakyatan berbasis Pariwisata | 2.1 | Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata | 1. Mengembangkan agro wisata | 1. Mengembangkan pariwisata yang dikelola oleh masyarakat lokal |
|  |  | 1. Mengembangkan Desa Wisata |  |
|  |  | 1. Meningkatkan sarana dan prasarana obyek wisata | 1. Mengembang kan paket-paket wisata untuk memacu pertumbuhan obyek wisata yang belum berkembang |
|  |  | 1. Meningkatkan kebersihan obyek wisata |  |
|  |  | 1. Meningkatkan efektivitas promosi wisata | 1. Meningkatkan profesionalisme dan transparansi pengelolaan obyek wisata |
|  |  |  |  | 1. Memperluas gerakan sadar pariwisata |
|  |  |  |  | 1. Meningkatkan kualitas jalan menuju dan antar obyek wisata |
|  |  |  |  | 1. Pengelolaan obyek wisata dengan memanfaatkan e-ticketing dan IT |  |

**Misi 4: MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH MELALUI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR**

| **TUJUAN** | | **SASARAN** | | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 1 | Mempercepat Pengembangan Pusat – Pusat Pertumbuhan Wilayah | 1.1 | Tumbuhnya generator ekonomi baru sesuai penataan ruang dan lingkungan hidup | 1. Mempercepat proses regulasi tata ruang kawasan | 1. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi dalam proses regulasi tata ruang kawasan di kabupaten |
| 1. Percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi yang terintegrasi dengan kawasan | 1. Pengembangan sarana dan prasarana produksi komoditas unggulan pada pusat – pusat pertumbuhan |
|  |  | 1. Melaksanakan kerjasama antar wilayah sekitarnya yang saling mendukung. |
|  |  | 1. Penerapan teknologi tepat guna. |
|  |  |  |  | 1. Pembangunan Taman Teknologi Pertanian (TTP) |  |
|  |  | 1. Pembangunan Infrastruktur Pada Kawasan Kumuh | 1. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Pada Kawasan Kumuh |
|  |  | 1. Meningkatkan dan mengendalikan secara komprehensif kualitas lingkungan hidup | 1. Mengendalikan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan regulasi |
|  |  | 1. Mengembangkan Bank sampah dan pengomposan |  |
|  |  | 1. Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu |  |
|  |  | 1. Menjaga kualitas dan ketersediaan data dan informasi parameter yang dipergunakan di dalam IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup) |  |
|  |  | 1.2 | Meningkatnya pemenuhan sarana prasana penunjang pusat – pusat pertumbuhan | 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur dalam kondisi mantap | 1. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah |
| 1. Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi untuk memperluas cakupan pelayanan |
|  |  | 1. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas antar wilayah |  |
|  |  |  |  | 1. Pembangunan sarana prasarana publik |
|  |  |  |  | 1. Pembangunan sarana transportasi untuk memperlancar arus perhubungan | 1. Mempercepat Infrastruktur Bidang Perhubungan |

**Misi 5 : MEMPERKUAT BIROKRASI YANG BERORIENTASI KINERJA, TRANSPARAN DAN BERDAYA SAING BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

| **TUJUAN** | | **SASARAN** | | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 1 | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 1.1 | Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah | 1. Mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan penjenjangan karier | 1. Meningkatkan Daya Saing Aparatur Sipil Negara melalui Peningkatan Tata Kelola Birokrasi |
|  |  |  |
|  |  |  | 1. Menerapkan System Merit dalam Birokrasi |
|  |  |  | 1. Implementasi sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi dengan CAT system | 1. Mengoptimalkan rasio jumlah aparatur dan beban kerja serta rasio jumlah aparatur dan jumlah masyarakat yang dilayani sesuai Standar Pelayanan Minimum |
|  |  |  | 1. Menerapkan Sistem Remunerasi berbasis Kinerja |
|  |  |  | 1. Meningkatkan Kapasitas Perencana Perangkat Daerah | 1. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Daerah |
|  |  |  | 1. Meningkatkan Kapasitas Pengawas Internal |
|  |  |  | 1. Penguatan Kelembagaan fungsi Penunjang |
|  |  |  | 1. Memaksimalkan fungsi Pembinaan dan Pengawasan internal |
|  |  |  | 1. Melakukan Evaluasi Keuangan | 1. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah |
|  |  | 1. Menggali Sumber Sumber Pendapatan Baru |
| 1. Meningkatkan Kordinasi Perencanaan | 1. Meningkatkan Kualitas Sakip |
|  | 1.2 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 1. Menyusun Regulasi Kebijakan integrasi Perijinan dan Non Perijinan melalui PTSP | 1. Mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat |
|  |  | 1. Mendorong Penerapan IT dalam Pelayanan Publik |  |
|  |  |  | 1. Meningkatkan inovasi pelayanan publik kecamatan |
|  |  |  | 1. Penyelenggaraan dan pengelola an perpustakaan berbasis IT sebagai pusat belajar siswa dan masyara kat | 1. Meningkatkan budaya gemar membaca siswa dan masyarakat |
|  |  |  | 1. Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi bahan pustaka |
|  |  |  | 1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan | 1. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik |
|  |  |  | 1. Percepatan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan sistem monev | 1. Mendorong implementasi e-goverment dalam rangka mewujudkan transparansi dan efektifitas dan efisiensi |
|  |  |  | 1. Peningkatan kapasitas SDM IT | 1. Memfasilitasi penguatan kapasitas aparatur Desa dalam Pemenfaatan IT |
|  |  |  | 1. Penyediaan Infrastruktur IT |
|  |  |  |  | 1. Meningkatkan Integrasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah | 1. Meningkatkan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah |

bab VII

**KEBIJAKAN UMUM DAN**

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah merupakan langkah berikutnya dalam menterjemahkan visi misi kepala daerah terpilih ke dalam program-program yang akan dilaksanakan oleh OPD. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah merupakan suatu jembatan konseptual yang akan menghubungkan rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan jangka pendek atau tahunan. Dengan adanya kebijakan umum dan program pembangunan daerah, sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bab VI akan dijabarkan ke dalam indikator kinerja sasaran. Capaian indikator kinerja sasaran ini diukur melalui indikator program yang menjadi bidang dan tanggung jawab OPD dalam melaksanakan program tersebut.

Berdasarkan misi, sasaran, dan target pencapaian indikator sasaran, RPJMD Kabupaten Tabanan 2016 – 2021 menetapkan kebijakan umum dan program pembangunan daerah dan SKPD penanggung jawab, seperti uraian tabel-tabel berikut

**7.1. Kebijakan Umum**

**1. Pendidikan**

1. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memenuhi hak seluruh masyarakat mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun;
2. Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Penerapan pendidikan karakter berbasis potensi unggul anak;
4. Meningkatkan profesionalisme, kualitas,dan akuntabilitas guru; dan tenaga kependidikan;
5. Meningkatkan kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas;
6. Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, transparan dan akuntabel;
7. Mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEK serta perkembangan global, regional, nasional dan lokal;
8. Peningkatan capaian SPM dan standar nasional pendidikan; dan
9. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga.

**2. Kesehatan**

1. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar;
2. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar;
3. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik di fasilitas pelayanan kesehatan dasar;
4. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Peningkatan SDM, pemerataan tenaga kesehatan dan non kesehatan, sesuai kebutuhan di fasilitas pelayanan kesehatan;
6. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik di fasilitas pelayanan kesehatan dasar;
7. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
8. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
9. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat;
10. Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar pada FKT;
11. Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan;
12. Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan standar guideline pelayanan kesehatan; dan
13. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan.

1. **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
2. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi dalam proses regulasi tata ruang kawasan di kabupaten;
3. Percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi yang terintegrasi dengan kawasan; dan
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur dalam kondisi mantap.

**4. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

1. Mewujudkan perlindungan masyarakat dari ancaman konflik social.

**5. Sosial**

1. Menurunnya Persentase Penduduk Miskin; dan
2. Meningkatkan upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS.

**6. Tenaga Kerja**

1. Mendorong calon wirausaha muda untuk pemberdayaan usaha mandiri;
2. Menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis dan memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan;
3. Meningkatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan masyarakat; dan
4. Meningkatkan Peran Pasar Tenaga Kerja.

**7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT; dan
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.

**8. Pangan**

1. Mewujudkan kedaulatan pangan masyarakat desa dan pola pangan harapan.
2. **Lingkungan Hidup**
3. Mengendalikan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan regulasi.

1. **Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik.

**11. Pemberdayaan Masyarakat Desa**

1. Menguatkan lembaga pemerintahan dan kelompok masyarakat berkenaan dengan pengembangan potesi ekonomi perdesaan.
2. **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
3. Meningkatkan pengendalikan kelahiran dan migrasi penduduk;
4. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga.
5. **Komunikasi dan Informatika**
6. Memfasilitasi penguatan kapasitas aparatur Desa dalam Pemanfaatan IT.
7. **Koperasi, Usaha Kecil Menengah**
8. Mengembangkan pengolahan dan pemasaran produk pertanian.

**15. Penanaman Modal**

1. Mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat.

**16. Kepemudaan dan Olah Raga**

1. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga.

**17. Statistik**

1. Memfasilitasi penguatan kapasitas aparatur Desa dalam Pemanfaatan IT.

**18. Kebudayaan**

1. Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni budaya local.

**19. Perpustakaan**

1. Meningkatkan budaya gemar membaca siswa dan masyarakat.

**20. Kearsipan**

1. Meningkatkan budaya gemar membaca siswa dan masyarakat.

**21. Kelautan Dan Perikanan**

1. Meningkatkan produktivitas perikanan.

**22. Pariwisata**

1. Mengembangkan pariwisata yang dikelola oleh masyarakat local;
2. Mengembangkan paket-paket wisata untuk memacu pertumbuhan obyek wisata yang belum berkembang; dan
3. Meningkatkan profesionalis me dan transparansi pengelolaan obyek wisata.

**23. Pertanian**

1. Intensifikasi komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan komoditas yang memiliki pangsa pasar yang jelas;
2. Mengembangkan Kawasan Pertanian Organik;
3. Menjadikan Taman Teknologi Pertanian (TTP) sebagai destinasi agrowisata dan pelatihan teknologi pertanian;
4. Mewujudkan kedaulatan benih dan melindungi plasma nutfah; dan
5. Memperluas cakupan sertifikasi organik dan indikasi geografis untuk tanaman perkebunan.

**24. Energi dan sumber daya mineral**

1. Mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat.

**25. Transmigrasi**

1. Fasilitasi Penyiapan Daerah Tujuan Transmigrasi.

**26. Perencanaan**

1. Meningkatkan Kualitas Sakip.

**27. Sekretariat Daerah**

1. Meningkatkan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah.

**28. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

1. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Pada Kawasan Kumuh.

**29. Perhubungan**

1. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan.

**30. Keuangan**

1. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah.

**7.2. Program Pembangunan Daerah**

Program pembangunan daerah adalah program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah dibuat berdasarkan kebijakan umum, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Program pembangunan daerah ini terdiri 2 (dua) program prioritas, yaitu; (1) program prioritas utama dan (2) program prioritas kedua.

Program prioritas utama merupakan suatu kebijakan program yang berpengaruh sangat besar dalam mencapai sasaran visi dan misi Kepala daerah Kabupaten Tabanan dan amanat/kebijakan nasional, yang terdiri dari program unggulan Kepala Daerah dan program-program prioritas lainnya sesuai tupoksi dari OPD di Kabupaten Tabanan.

Sedangkan program prioritas kedua merupakan program prioritas dalam menunjang urusan pelayanan pemerintahan dari masing-masing OPD di Kabupaten Tabanan.Program prioritas kedua ini sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan program prioritas utama.

Program pembangunan daerah Kabupaten Tabanan yang terdiri dari program prioritas utama, selanjutnya diuraikan berdasarkan bidang urusan layanan pemerintahan daerah Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut.

1. **Pendidikan**
2. Program Pendidikan Anak usia Dini;
3. Program Pendidikan kesetaraan dan pendidikan keberlanjutan lainnya ;
4. Program peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar;
5. Program peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama;
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar;
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
9. Program Pelayanan Manajemen Pendidikan;
10. Program pendidikan karakter berbasis budaya;
11. Program Pendidikan Masyarakat; dan
12. Program BOS.
13. **Kesehatan**
14. Program Pelayanan Kesehatan;
15. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan;
16. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
17. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK);
18. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
19. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular;
20. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
21. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat;
22. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
23. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan Jaringannya;
24. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;
25. Program Peningkatan kesehatan ibu;
26. Program peningkatan kesehatan anak;
27. Program peningakatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja;
28. Program peningkatan kesehatan lanjut usia;
29. Program peningkatan manajemen puskesmas.
30. **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
31. Program Perencanaan Tata Ruang;
32. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang;
33. Program perencanaan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional;
34. Program perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
35. Program Pembangunan Jalan baru kabupaten;
36. Program Pembangunan Jembatan Baru;
37. Program Peningkatan Jalan Kabupaten;
38. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
39. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
40. Program peningkatan sarana dan prasarana LPJU;
41. Program pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Air;
42. Program peningkatan Prasarana aparatur dan prasarana publik;
43. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
44. Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah;
45. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum;
46. Program pembangunan infrastruktur perdesaan;
47. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database infrastruktur;
48. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

1. **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
2. Program Pengembangan Perumahan;
3. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
4. Program peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh.

**5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

1. Program pemeliharaan, kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
2. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Program kesiap siagaan masyarakat;
4. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran; dan
5. Program Sumber Daya Aparatur.
6. **Sosial**
7. Program Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;
8. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
9. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
10. Program pembinaan anak terlantar;
11. Program pembinaan para penyandang Disabilitas dan trauma;
12. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo;
13. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
14. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
15. Program Pemberian santunan dan tunjangan kepada penderita Disabilitas permanen dan lanjut usia; dan
16. Program perlindungan dan jaminan sosial;
17. **Tenaga Kerja**
18. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
19. Program peningkatan kesempatan kerja;
20. Program Pengembangan hubungan Industrial dan Peningkatan; Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
21. Program Revitalisasi LLK.
22. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
23. Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; dan
24. Program peningkatan Mutu kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.
25. **Pangan**
26. Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
27. Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan; dan
28. Program Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.
29. **Lingkungan Hidup**
30. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
31. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup;
32. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
33. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
34. Program Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat; dan
35. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan IPLT.

**11. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

**12. Pemberdayaan Masyarakat Desa**

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa;
2. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
3. Program peningkatan pengelolaan pemerintahan Desa; dan
4. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

**13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja; dan
3. Progam penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.

**14. Perhubungan**

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
4. Program Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas;
5. Program peningkatan pelayanan angkutan;
6. Program peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor; dan
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

**15. Komunikasi dan Informatika**

1. Program Pengembangan e-Government;
2. Program Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi;
3. Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
4. Program pemanfaatan Teknologi Informasi bagi Masyarakat;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

**16. Koperasi, Usaha Kecil Menengah**

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
2. Program Fasilitasi Pemasaran Produksi Petani dan UMKM;
3. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM;
5. Program Peningkatan SDM UMKM;
6. Program Pembangunan Sarana Ekonomi Desa Adat; dan
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
8. **Penanaman Modal**
9. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Ivestasi;
10. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi.

**18. Kepemudaan dan Olah Raga**

1. Program Pembinaan Pemuda dan Pemasyarakatan Olahraga

**19. Statistik**

a. Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah.

**20. Kebudayaan**

1. Program Lembaga Adat/ Tradisional Yang terjaga Kelestariannya;
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
4. Program Pengembangan Nilai Budaya; dan
5. Program revitalisasi sarana prasarana kesenian/budaya.

**21. Perpustakaan**

1. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan; dan
2. Program pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan.

**22. Kearsipan**

1. Program pengembangan sarana dan prasarana kearsipan; dan
2. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.

**23. Kelautan Dan Perikanan**

1. Program pengembangan perikanan budidaya;
2. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar;
3. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan;
4. Program pengembangan perikanan tangkap;
5. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; dan
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

**24. Pariwisata**

1. Program Pengembangan Destinasi wisata; dan
2. Program Pengembangan Desa Wisata/Agrowisata.

**25. Pertanian**

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
2. Program Peningkatan Produksi Padi;
3. Program Peningkatan Produksi Hortikultura;
4. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
5. Program Peningkatan Produksi Perkebunan;
6. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
7. Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Petani;
8. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL);
9. Program Pengembangan Pertanian Organik;
10. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
11. Program Peningkatan Produksi Palawija;
12. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
13. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
14. Program Pengembangan Taman Teknologi Pertanian (TTP);
15. Program Peningkatan Kemandirian Benih/Bibit; dan
16. Program pelestarian dan perlindungan Plasma Nuftah.

**26. Energi dan sumber daya mineral**

1. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan; dan
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan.

**27.Perdagangan**

1. Program Pengamanan Perdagangan;
2. Program Pelayanan perlindungan Konsumen; dan
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan.

**28. Perindustrian**

1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
2. Program Pengendalian Mutu Produksi Industri Kecil dan Menengah;
3. Program Perlindungan Hasil Pertanian;
4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; dan
5. Program Fasilitasi Pemasaran Poduk Petani dan UMKM.

**29. Transmigrasi**

1. Program Transmigrasi Regional.

**30. Perencanaan**

1. Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan daerah;
2. Program perencanaan dan pengendalian bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan;
3. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Prasarana Wilayah dan tataruang;
4. Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Ekonomi dan sumber daya alam;
5. Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah; dan
6. Program perencanaan dan pengendalian bidang pembangunan manusia dan Masyarakat.

**31. Keuangan**

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah;
2. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

**32. Kepegawaian**

1. Program pembinaan ASN; dan
2. Program pengembangan ASN.

**33. Penelitian dan Pengembangan**

1. Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah.

**34. Sekretariat Daerah**

1. Program Penguatan Akuntabilitas;
2. Program Penataan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
3. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah/Lembaga Lainnya;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
5. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
6. Program Pengendalian Pembangunan Ekonomi Daerah;
7. Penyelenggaraan Hari-Hari Besar/ Nasional/ Keagamaan;
8. Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan;
9. Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan;
10. Program Pembinaan dan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah;
11. Program Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah daerah;
12. Program Penataan dan Penyusunan Regulasi Daerah; dan
13. Program Fasilitasi Masalah Hukum Daerah.

**35. Insfektorat**

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Kinerja Daerah; dan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

**36. Kesatuan Bangsa dan Politik**

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat; dan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

**37. Penanggulangan Bencana**

1. Program Pencegahan dan Kesiap siagaan;
2. Program Kedaruratan dan Logistik; dan
3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

**Tabel 7.1**

**Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Tabanan**

**MISI1. MEMBENTUK SDM YANG BERKUALITAS, BERBUDAYA DAN BERKEADILAN SOSIAL**

| **SASARAN** | | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** | **INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)** | **CAPAIAN KINERJA** | | **PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH** | **BIDANG**  **URUSAN** | **SKPD PENANGGUNG JAWAB** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONDISI AWAL** | **KONDISI AKHIR** |
| **(1)** | | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
| 1 | Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan SD | Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memenuhi hak seluruh masyarakat mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun | Persentase jumlah SD/MI yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SPM | 0,61% | 76,45% | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar | Pendidikan | DISDIK |
| 1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan SMP | Persentase jumlah SMP/MTs yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SPM | 0,00% | 100% | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pendidikan | DISDIK |
| Penuntasan angka putus sekolah melalui pendidikan kesetaraan |  | Peningkatan jumlah peserta pendidikan nonformal (pendidikan kesetaraan dan pendidikan keberlanjutan lainnya) | 717 or | 1267 or | Program Pendidikan kesetaraan dan pendidikan keberlanjutan lainnya | Pendidikan | DISDIK |
| Peningkatan sarana dan prasarana PAUD | Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini | Persentase jumlah PAUD yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 80% | 92% | Program Pendidikan Anak sia Dini | Pendidikan | DISDIK |
|  | Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik PAUD |
| Meningkatkan jumlah sekolah yang menyertakan pendidikan karakter | Penerapan pendidikan karakter berbasis potensi unggul anak | Persentase jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berbasis budaya | 6,06% | 100% | Program pendidikan karakter berbasis budaya | Pendidikan | DISDIK |
| Meningkatkan muatan pendidikan berbasis moral dan keagamaan didalam pendidikan sekolah |  |  |  |  |  |  |  |
| Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan SD | Meningkatkan profesionalisme, kualitas,dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan | Persentase Guru yang sudah bersertifikat pendidik | 82,38% | 99,63% | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pendidikan | DISDIK |
| Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan SMP |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Peningkatan Efektifitas Pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah | Meningkatkan kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas | Persentase Sekolah yang memenuhi SPM Pendidikan Dasar | 0,57% | 100% | Program BOS | Pendidikan | DISDIK |
| Peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan | Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, transparan dan akuntabel | Persentase sekolah yang mampu mengelola dana pendidikan dengan kategori baik | 27,62% | 100% | Program Pelayanan Manajemen Pendidikan | Pendidikan | DISDIK |
|  |  | Penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan | Mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEK serta perkembangan global, regional, nasional dan lokal | Persentase jumlah sekolah dasar dengan penyelenggaraan pendidikan sesuai SPM | 0,61% | 76,45% | Program peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar | Pendidikan | DISDIK |
|  |  |  |  | Persentase jumlah sekolah menengah pertama dengan penyelenggaraan pendidikan sesuai SPM | 0% | 35% | Program peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama | Pendidikan | DISDIK |
|  |  | Penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta | Peningkatan capaian SPM dan standar nasional pendidikan | Jumlah peserta kursus lulus uji kompetensi | 5% | 20% | Program Pendidikan Masyarakat | Pendidikan | DISDIK |
|  |  | Peningkatan kualitas guru melalui diklat kompetensi (UKG) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga | Peningkatan kompentisi di semua cabang olahraga dalam rangka penjaringan atlit | Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga | Jumlah peraihan medali terhadap cabang olah raga / seni yang diikuti dalam lomba tingka t provinsi | 95 | 120 | Program Pembinaan Pemuda dan Pemasyarakatan Olahraga | Kepemudaan Dan Olah Raga | DISDIK |
| 3 | Meningkatnya kualitas Penanganan Kependudukan | Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas | Meningkatkan pengendalikan kelahiran dan migrasi penduduk | Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif | 70,05% | 78% | Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | Pengendalian Penduduk Dan Kelurga Bencana | DISPENDUK KB |
| Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan KB |  |  |  |
| Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja | Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga | Persentase pasangan usia subur menikah diatas 21 tahun | 74,50 % | 78% | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | Pengendalian Penduduk Dan Kelurga Bencana | DISPENDUK KB |
| Penguatan bina keluarga remaja | Cakupan anggota bina keluarga balita ber KB | 87,10% | 89,50% | Progam penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga | Pengendalian Penduduk Dan Kelurga Bencana | DISPENDUK KB |
| Peningkatan Fungsi dan Peran Lembaga Latihan Kerja (LLK) | Mendorong calon wirausaha muda untuk pemberdayaan usaha mandiri | Persentase lulusan LLK yang terserap pasar kerja dan kerja mandiri | 25% | 100% | Program Revitalisasi LLK | Tenaga Kerja | DISNAKER |
| Meningkatkan kepatuhan perusahaan/industri terhadap peraturan ketenagakerjaan | Menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis dan memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan | persentase perusahaan memenuhi 10 kriteria dalam UU Ketenagakerjaaan | 100% | 100% | Program Pengembangan hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Tenaga Kerja | DISNAKER |
| Pemberian pelatihan untuk memasuki pasar tenaga kerja serta pendampingan untuk pemberdayaan usaha mandiri | Meningkatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan masyarakat | Persentase pencari kerja untuk mendapatkan pelatihan yang berbasis masyarakat dan kompetensi | 100% | 100% | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Tenaga Kerja | DISNAKER |
| Perluasan akses informasi Lapangan kerja | Meningkatkan Peran Pasar Tenaga Kerja | Persentase penempatan tenaga kerja | 45% | 70% | Program peningkatan kesempatan kerja | Tenaga Kerja | DISNAKER |
|  |  | Fasilitasi penempatan dan penyiapan calon transmigran yang terampil | Fasilitasi Penyiapan Daerah Tujuan Transmigrasi | Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan pada daerah tujuan transmigrasi | 100% | 100% | Program Transmigrasi Regional | Trans  migrasi | DISNAKER |
| 4 | Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya lokal | Peningkatan aktivitas seni dan budaya lokal oleh masyarakat | Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni budaya lokal | Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi | 320 | 360 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Kebudayaan | DISBUD |
| Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni dan budaya | Jumlah Kesenian tradisional yang di lestarikan | 105 | 178 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Kebudayaan | DISBUD |
| Pemberian Penghargaan kepada pelaku seni dan para seniman | Jumlah Lembaga adat Tradisional yang terjaga kelestariannya | 348 | 1012 | Program Lembaga Adat/Tradisional yang terjaga kelestariannya | Kebudayaan | DISBUD |
| Jumlah sapras Kesenian/budaya yang representatif | NA | 2 | Program revitalisasi sarana prasarana kesenian/budaya | Kebudayaan | DISBUD |
| 5 | Menurunnya Angka Kemiskinan | Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin | Menurunnya Persentase Penduduk Miskin | Persentase Jumlah masyarakat miskin yang mendapat perlindungan dan pemberdayaan ekonomi | 30% | 60% | Program Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin | Sosial | DINSOS PP&PA |
| 6 | Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak | Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan | Meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT | Persentase perempuan dan anak yang terwadahi dalam organisasi sosial | 40% | 100% | Program peningkatan Mutu kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | DINSOS PP&PA |
|  |  | Penguatan lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) | Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan | Persentase peningkatan pelayanan P2TP2A | 100% | 100% | Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | DINSOS PP&PA |
| 7 | Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat | Peningkatan penanganan konflik sosial | Mewujudkan perlindungan masyarakat dari ancaman konflik sosial | Jumlah generasi muda yang mendapatkan pembinaan wasbang | NA | 110 orang | Program pengembangan wawasan kebangsaan | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | KESBANGPOL |
| Persentase partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu | 74% | 85% | Program pendidikan politik masyarakat | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | KESBANGPOL |
| Persentase terkendalinya potensi konflik diwilayah Kabupaten Tabanan | 100% | 100% | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | KESBANGPOL |
| Persentase limas siap siaga | 4% | 7,5% | Program kesiap siagaan masyarakat | Ketentraman,Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat | POL PP |
|  | Presentase pengaduan kebakaran yang dapat ditangani sesuai SOP | NA | 100% | Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | Ketentraman,Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat | POL PP |
| Persentase menurunnya jumlah gangguan kantrantibmas | 100% | 100% | Program pemeliharaan, kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Ketentraman,Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat | POL PP |
| Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditertibkan | 200 Pelanggaran | 200 Pelanggaran | Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Ketentraman,Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat | POL PP |
|  |  | Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana dan menyediakan sistem informasi dan deteksi dini bencana serta menangani korban bencana secara terpadu | Meningkatkan perlindungan masyarakat dari dampak bencana | Menurunnya Indeks Resiko Bencana | 174,40 | 149,40 | Program Pencegahan dan Kesiap siagaan | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | BPBD |
|  |  |  |  | Persentase Korban yang Mampu Tertangani Sesuai SOP | 100% | 100% | Program Kedaruratan dan Logistik | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | BPBD |
|  |  |  |  | Persentase Korban yang di Rehabilitasi dan di Rekonstruksi Sesuai SOP | 100% | 100% | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | BPBD |
|  |  |  |  | Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial | 100% | 100% | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Sosial | DINSOS PP&PA |
| 8 | Meningkatnya penanganan PMKS | Memberikan perlindungan sosial, bantuan rumah layak huni, dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS | Meningkatkan upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS | Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial | 76,98% | 100% | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Sosial | DINSOS PP&PA |
| Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 49,62% | 60% | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. | Sosial | DINSOS PP&PA |
| Persentase Penyandang Disabilitas dan Eks-trauma yang tertangani | 65,85% | 95% | Program pembinaan para penyandang Disabilitas dan trauma | Sosial | DINSOS PP&PA |
| Jumlah panti asuhan yang mendapat penanganan sosial | 6 PA | 6 PA | Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo | Sosial | DINSOS PP&PA |
| Persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani | 91,71 % | 100% | Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya | Sosial | DINSOS PP&PA |
| Jumlah TKSK dan PSKS yang memenuhi tupoksi sesuai standar | 10 TKSK | 10 TKSK | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Sosial | DINSOS PP&PA |
| Persentase anak terlantar yang mendapat penanganan | 58,35% | 85% | Program pembinaan anak terlantar | Sosial | DINSOS PP&PA |
|  |  |  | Jumlah Penyandang Disabilitas permanen dan lanjut usia yang tersantuni | 207 org | 400 org | Program Pemberian santunan dan tunjangan kepada penderita Disabilitas permanen dan lanjut usia | Sosial | DINSOS PP&PA |

**MISI 2. MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN AKSES DAN PELAYANAN PRIMA**

| **SASARAN** | | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** | **INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)** | **CAPAIAN KINERJA** | | **PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH** | **BIDANG**  **URUSAN** | **SKPD PENANGGUNG JAWAB** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONDISI AWAL** | **KONDISI AKHIR** |
| **(1)** | | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
| 1 | Meningkatnya upaya kesehatan perorangan | Memenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar | Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar | Persentase jenis layanan kesehatan dasar yang mampu dilayani secara prima | 80% | 100% | Program Pelayanan Kesehatan | Kesehatan | DISKES |
| Meningkat kan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan | Peningkatan SDM, pemerataan tenaga kesehatan dan non kesehatan, sesuai kebutuhan di fasilitas pelayanan kesehatan | Jumlah SDM yang memenuhi standar jumlah dan kompetensi | 968 | 1.350 | Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) | Kesehatan | DISKES |
| Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan | Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik di fasilitas pelayanan kesehatan dasar | Persentase ketersediaan obat dan vaksin | 77% | 90% | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Kesehatan | DISKES |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat | Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) | Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | Persentase rumah tangga yang malaksanakan PHBS | 60,82%% | 75,00% | Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat | Kesehatan | DISKES |
| Peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru dan penyakit tidak menular | Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Persentase penyakit menular yang ditangani | 100% | 100% | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | Kesehatan | DISKES |
| Peningkatan dan pengembangan lingkungan sehat |  | Persentase penyakit tidak menular yang ditangani | 100% | 100% | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular | Kesehatan | DISKES |
| Pelayanan hiegine dan sanitasi |  | Persentase desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | 1,50% | 15,04% | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Kesehatan | DISKES |
| Peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan | Mempercepat perbaikan gizi masyarakat | Persentase balita gizi kurang | 4% | 3,6% | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Kesehatan | DISKES |
| 3 | Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Prima | Meningkatkan upaya pemenuhan syarat-syarat agar FKTP terakreditasi | Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar pada FKT | Persentase puskesmas yang memiliki sapras sesuai standar | 0% | 100% | Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan Jaringannya | Kesehatan | DISKES |
| Penguatan manajemen puskesmas melalui pengembangan sistem informasi kesehatan |  | Persentase jumlah puskesmas dengan indeks kepuasan pelanggan memuaskan | 10% | 100 % | Program peningkatan manajemen puskesmas | Kesehatan | DISKES |
| Pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit untuk pencapaian BOR sesuai standar | Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan standar guideline pelayanan kesehatan | Persentase jenis layanan kesehatan rujukan yang mampu dilayani secara prima | 80 % | 100 % | Program Pelayanan Kesehatan Rujukan | Kesehatan | BRSUD |
| Jumlah terbangunnya gedung rumah sakit (unit) | 2 UNIT | 10 UNIT | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | Kesehatan | BRSUD |
| 4 | Terselenggaranya pelayanan dasar kesehatan sesuai SPM | Meningkatkan pelayanan kesehatan Ibu dan anak | Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan | Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup | 58,9 | 55 | Program Peningkatan kesehatan ibu | Kesehatan | DISKES |
|  |  | Meningkatkan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja |  | Cakupan Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) | 20% | 100% | Program peningakatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja | Kesehatan | DISKES |
|  |  | Meningkatkan pelayanan kesehatan lanjut usia |  | Persentase Lansia yang dilayani | 59% | 70% | Program peningkatan kesehatan lanjut usia | Kesehatan | DISKES |
| Meningkatkan pelayanan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita | Angka kematian bayi dan balita per 1000 kelahiran hidup | 10,2 | 8 | Program peningkatan kesehatan anak | Kesehatan | DISKES |

**MISI 3. MENGGERAKKAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA**

| **SASARAN** | | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** | **INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)** | **CAPAIAN KINERJA** | | **PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH** | **BIDANG**  **URUSAN** | **SKPD PENANGGUNG JAWAB** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONDISI AWAL** | **KONDISI AKHIR** |
| **(1)** | | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
| 1 | Meningkatnya Produksi Pertanian yang berdaya saing | Memberikan pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan produksi padi, jagung dan kedele | Intensifikasi komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan komoditas yang memiliki pangsa pasar yang jelas | Persentase luas lahan pertanian yang menerima subsidi pupuk benih dan saprodi | 60% | 100% | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Pertanian | Dinas Pertanian |
| Menggalakkan kembali pola tanam untuk meningkat kan produksi jagung dan kedele dalam rangka memenuhi bahan baku pabrik pakan ternak yang ada di Tabanan | Angka produksi Padi (Ton) | 194.122 | 208.496 | Program Peningkatan Produksi Padi | Pertanian | Dinas Pertanian |
|  | Angka Produksi Sayuran pertahun (Kwintal) | 505.527 | 631.909 | Program Peningkatan Produksi Hortikultura | Pertanian | Dinas Pertanian |
|  |  |  | Angka Produksi Jagung (Ton) | 5.036 | 10.933 | Program Peningkatan Produksi Palawija | Pertanian | Dinas Pertanian |
| Memberikan bantuan benih, bibit dan menjamin kepastian pasar | Mengembangkan Kawasan Pertanian Organik | Luas Lahan Pertanian yang dikelola secara organik (Tanpa Memanfaatkan Bahan Kimia Sintesis) | 850 Ha | 2075 Ha | Program Pengembangan Pertanian Organik | Pertanian | Dinas Pertanian |
|  |  | Membangun Taman Teknologi Pertanian (TTP) di Kec. Pupuan | Menjadikan Taman Teknologi Pertanian (TTP) sebagai destinasi agrowisata dan pelatihan teknologi pertanian | Keberadaan TTP yang berfungsi sebagai kawasan pusat gelar produk, alih teknologi pertanian, dan agrowisata | 0 | 100% | Program Pengembangan Taman Teknologi Pertanian ( TTP) | Pertanian | Dinas Pertanian |
|  |  | Menyiapkan pengelolaan yang mandiri dan profesional terhadap Kawasan TTP Pupuan |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Meningkatkan penangkaran benih padi, mengaktifkan benih antar lapang kedele, dan pelestarian plasma nutfah hewan dan tumbuhan Tabanan yang terancam kepunahan | Mewujudkan kedaulatan benih dan melindungi plasma nutfah | Jumlah Satwa/Tanaman Langka yang dikonservasi | 1 | 6 | Program Pelestarian dan Perlindungan Plasma Nutfah | Pertanian | Dinas Pertanian |
|  |  | Persentase kebutuhan benih/ bibit (padi, Kedele, Hortikultura) yang dapat dipenuhi dari petani Tabanan | 10% | 50% | Program Peningkatan Kemandirian Benih/Bibit | Pertanian | Dinas Pertanian |
|  | Merehabilitasi tanaman kopi robusta di Kec. Pupuan dan Kelapa di Kec. Selemadeg Barat, Selemadeg, dan Selemadeg Timur | Memperluas cakupan sertifikasi organik dan indikasi geografis untuk tanaman perkebunan | Persentase produksi komoditas unggulan | 5% | 15% | Program Peningkatan Produksi Perkebunan | Pertanian | Dinas Pertanian |
| Persentase Produk olahan primer komoditi unggulan perkebunan (ton)) | 10% | 60% | Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan | Pertanian | Dinas Pertanian |
| Meningkatkan aplikasi teknologi tepatguna dalam perikanan untuk meningkat kan daya saing terhadap hasil perikanan | Meningkatkan produktivitas perikanan | Persentase peningkatan pelaku utama perikanan masyarakat pesisir | 1,0% | 1,5% | Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir | Perikanan | DISKAN |
| Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya | 1% | 6% | Program pengembangan perikanan budidaya | Perikanan | DISKAN |
|  |  | Tambahan penduduk yang menjadi nelayan di kecamatan pesisir (orang) | 935 | 992 | Program peningkatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat | Perikanan | DISKAN |
|  |  | Mengembangkan industri perdesaan berbasis kelapa, kopi, dan komoditas unggulan lainnya | Mempercepat industrialisasi perdesaan berbasis komoditi pertanian | Jumlah kelompok/subak binaan yang berhasil membentuk usaha bersama (agribisnis) yang menguntungkan | 5 | 50 | Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Petani | Pertanian | Dinas Pertanian |
|  |  |  | Persentase Peningkatan Kompetensi PPL | 20% | 50% | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) | Pertanian | Dinas Pertanian |
|  |  | Membangun pabrik pakan ternak |  | Persentase Peningkatan Produksi dan Populasi Ternak | 1,96% | 10% | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Pertanian | Dinas Pertanian |
|  |  |  |  | Persentase kelompok yang mengolah dan memasarkan hasil ternak secara kontinyu | 16% | 31% | Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan | Pertanian | Dinas Pertanian |
|  |  |  |  | Persentase Pelayanan Kesehatan ternak | 70% | 95% | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | Pertanian | Dinas Pertanian |
|  |  | Membangun pabrik tepung ikan |  | Produksi aneka olahan ikan bernilai tambah (ton) | 2.264,4 | 2.595,3 | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi | Perikanan | DISKAN |
|  |  |  |  | Cakupan bina kelompok utama perikanan | 131 | 196 | Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan | Perikanan | DISKAN |
|  |  |  |  | Tambahan produk unggulan daerah yang dikembangkan kawasan minapolitan | 1 | 1 | Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar | Perikanan | DISKAN |
|  |  |  |  | Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap | 1% | 6% | Program pengembangan perikanan tangkap | Perikanan | DISKAN |
|  |  | Mengaktifkan kembali perusahaan daerah untuk memfasilitasi pemasaran hasil/produk olahan pertanian |  | Persentase peningkatan kelompok/subak binaan yang berhasil menjalin kemitraan bisnis dengan pengusaha | 5% | 40% | Program peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian | Pertanian | Dinas Pertanian |
| 2 | Berkembangnya Usaha – Usaha Pengolahan dan Pemasaran Pertanian | Memacu pertumbuhan koperasi sektor riil | Mengembangkan pengolahan dan pemasaran produk pertanian | Jumlah Kelompok Usaha yang difasilitasi Pemasaran Produknya | 0 | 100 | Program Fasilitasi Pemasaran Produksi Petani dan UMKM | Koperasi, usaha kecil dan menengah | Dinas Koperasi |
|  | Persentase Koperasi Sektor Riil yang berkualitas | 0,55% | 1,46% | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Koperasi, usaha kecil dan menengah | Dinas Koperasi |
| Persentase UMKM yang Mengalami Pertumbuhan | 60% | 75% | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif | Koperasi, usaha kecil dan menengah | Dinas Koperasi |
|  |  | Jumlah IKM yang Mampu Mempromosikan Produknya | 32 IKM | 40 IKM | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM | Koperasi, usaha kecil dan menengah | Dinas Koperasi |
|  | Jumlah Kelompok UMKM yang mampu meningkatkan omset Penjualan | 0 | 151 | Program Peningkatan SDM UMKM | Koperasi, usaha kecil dan menengah | Dinas Koperasi |
|  |  | Persentase Gedung LPD dengan Kondisi Baik | 40% (123 LPD) | 43,3% (133 LPD) | Program Pembangunan Sarana Ekonomi Desa Adat | Koperasi, usaha kecil dan menengah | Dinas Koperasi |
| Pelatihan dan pendamping an Teknologi Tepatguna yang berkaitan dengan pengolahan pascapanen | Jumlah Komoditas Kebutuhan Pokok, Barang Penting dan Barang Strategis yang diawasi | 0% | 60% | Program Pengamanan Perdagangan | Perdagang an | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|  |  |  |  | Jumlah Pelayanan Tera/ Tera Ulang Per Tahun | 5000 UTTP | 18.000 UTTP | Program Pelayanan perlindungan Konsumen | Perdagang an | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|  |  | Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Legal dan Representatif | 10% | 60% | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan | Perdagang an | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| Meningkatkan prasarana dan sarana Pasar  Tradisional |  | Nilai Produksi IKM | 0 | 175 | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi | Perindus  trian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|  |  |  |  | Persentase IKM yang sudah menjalankan Gugus Kendali Mutu (GKM) | 50% | 80% | Program Pengendalian Mutu Produksi Industri Kecil dan Menengah | Perindus  trian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| Jumlah Hasil Pertanian yang mampu difasilitasi dalam distribusi dan pemasaran | 25% | 65% | Program Perlindungan Hasil Pertanian | Perindus  trian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| Jumlah Peningkatan Produksi IKM yang dapat disalurkan | 0 | 3 | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Perindu  strian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| Jumlah Kelompok Usaha yang difasilitasi Pemasaran Produknya | 32 | 55 | Program Fasilitasi Pemasaran Poduk Petani dan UMKM | Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pertanian | Mengembangkan ekonomi desa melalui BUMDES berbasis pertanian | Menguatkan lembaga pemerintahan dan kelompok masyarakat berkenaan dengan pengembangan potesi ekonomi perdesaan | Jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat yang difasilitasi oleh BUMDES | 0 | 814 | Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa | Pemberdayaan masyarakat dan desa | DINAS PMD |
|  |  | Mengembang kan pelembagaan usaha ekonomi di tingkat petani, wanita tani dan UKM |  | Jumlah desa yang memiliki kapasitas aparatur pemerintah desa memadai | 133 Desa | 133 Desa | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | Pemberdayaan masyarakat dan desa | DINAS PMD |
|  |  |  |  | Persentase Desa yang mendapatkan penilaian baik atas kinerja keuangan | N/A | 100% | Program peningkatan pengelolaan pemerintahan Desa | Pemberdayaan masyarakat dan desa | DINAS PMD |
|  |  | Jumlah desa berprestasi | 0 | 1 | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Pemberdayaan masyarakat dan desa | DINAS PMD |
| Pemantauan periodik harga pangan di pasar tradisional | Mewujudkan kedaulatan pangan masyarakat desa dan pola pangan harapan | Persentase desa yang memiliki percontohan pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan sehat | 45% | 45% | Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | Pangan | Ketahanan Pangan |
| Mengembang kan Rumah Pangan Lestari |  | Persentase Desa Mandiri Pangan | 10% | 10% | Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan | Pangan | Ketahanan Pangan |
|  |  | Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses pangan | ≥ 10% | ≥ 10% | Program Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan | Pangan | Ketahanan Pangan |
| 4 | Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata | Mengembangkan agro wisata | Mengembangkan pariwisata yang dikelola oleh masyarakat lokal | Jumlah desa wisata/Agrowisata yang berkembang | 6 | 15 | Program Pengembangan Desa Wisata/Agrowisata | Pariwisata | Dispar |
| Mengembangkan Desa Wisata |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkat kan sarana dan prasarana obyek wisata | Mengembangkan paket-paket wisata untuk memacu pertumbuhan obyek wisata yang belum berkembang | Jumlah DTW yang dikunjungi wisatawan | 3 obyek wisata | 9 obyek wisata | Program Pengembangan Destinasi wisata | Pariwisata | Dispar |
| Meningkat kan kebersihan obyek wisata |  |  |  |  |  |  |
| Meningkat kan efektivitas promosi wisata | Meningkatkan profesionalis me dan transparansi pengelolaan obyek wisata |
| Memperluas gerakan sadar pariwisata |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Meningkat kan kualitas jalan menuju dan antar obyek wisata |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pengelolaan obyek wisata dengan memanfaat kan e-ticketing dan IT |  |  |  |  |  |  |  |

**MISI 4. MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH MELALUI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR**

| **SASARAN** | | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** | **INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)** | **CAPAIAN KINERJA** | | **PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH** | **BIDANG**  **URUSAN** | **SKPD PENANGGUNG JAWAB** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONDISI AWAL** | **KONDISI AKHIR** |
| **(1)** | | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
| 1 | Tumbuhnya Generator Ekonomi Baru Sesuai Penataan ruang dan Lingkungan Hidup | Mempercepat proses regulasi tata ruang kawasan | Peningkatan koordinasi dan konsolidasi dalam proses regulasi tata ruang kawasan di kabupaten | Jumlah dokumen Tata Ruang yang dilegalisasi | 1 Dok (RTRW Kab.Tabanan) | 20 dokumen | Program Perencanaan Tata Ruang | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | DPUPRPKP |
| Persentase luas kawasan yang dapat dipertahankan sesuai dengan arahan rencana pola ruang | 25% | 100% | Program Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | DPUPRPKP |
| Pengembangan sarana dan prasarana penunjang infrastruktur pada pusat – pusat pertumbuhan | Percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi yang terintegrasi dengan kawasan | Jumlah perencanaan pada pusat pertumbuhan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional | NA | 5 pusat pertumbuhan | Program perencanaan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | DPUPRPKP |
|  | Jumlah perencanaan pada pusat pertumbuhan di Pembangunan Kawasan Perdesaan | NA | 2 pusat pertumbuhan | Program perencanaan pembangunan kawasan perdesaan | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | DPUPRPKP |
| Meningkatkan dan mengendalikan secara komprehensif kualitas lingkungan hidup | Mengendalikan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan regulasi | Rasio/persentase volume sampah yang mampu diangkut/diolah terhadap volume sampah yang ada | 44% | 90% | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Lingkungan Hidup | DPUPRPKP |
| Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu |  | Jumlah pengolahan persampahan berbasis masyarakat TPST 3R dan Bank sampah | TPST = 8 unit, Bank Sampah = 29 | TPST = 10unit, 25 Bank sampah | Program Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat | Lingkungan Hidup | DPUPRPKP |
| Menjaga kualitas dan ketersediaan data dan informasi parameter yang dipergunakan di dalam IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup) |  | Jumlah spot/titik taman, hutan dalam kondisi terpelihara dan dikembangkan | 11 taman dan 5 hutan | 12 taman dan 5 hutan | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Lingkungan Hidup | DPUPRPKP |
|  | Kapasitas tinja yang mampu ditanangani 0,76 ton/th | 987 m3/th | 1.480,5 m3/th | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan IPLT | Lingkungan Hidup | DPUPRPKP |
|  | Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh | 3 jenis penghargaan | 5 jenis penghargaan | Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup | DPUPRPKP |
|  | Jumlah kasus lingkungan yang dapat ditangani | 58 kasus | 82 kasus | Program Pengendalian Pencemaaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup | DPUPRPKP |
| 2 | Meningkatnya Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Pusat – Pusat Pertumbuhan | Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas antar wilayah | Mempercepat pembangunan infrastruktur dalam kondisi mantap | Panjang Jalan baru yang dibangun Dalam Rangka Membuka Akses Wilayah | NA | 22,05 Km | Program Pembangunan Jalan baru kabupaten | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | DPUPRPKP |
| Persentase jalan dalam kondisi baik | 61,71%) | 100% | Program Peningkatan Jalan Kabupaten | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | DPUPRPKP |
|  | Persentase sarana Bina Marga dalam kondisi baik | 45% | 100% | Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | DPUPRPKP |
|  |  | Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik | 79,66% | 100% | Program rehabilitasi/pemeliharaan JalandanJembatan | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | DPUPRPKP |
| Jumlah Jembatan baru yang dibangun | NA | 6 unit | Program Pembangunan Jembatan Baru | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | DPUPRPKP |
| Persentase jalan desa/lingkungan dalam kondisi baik | 28,46% | 90% | Program pembangunan infrastruktur perdesaaan | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | DPUPRPKP |
| Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi untuk memperluas cakupan pelayanan | Indek kinerja jaringan irigasi | 60% | 76% | Program pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Air | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | DPUPRPKP |
| Persentase layanan air minum kabupaten | 68,93% | 100% | Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | DPUPRPKP |
| Jumlah pusat pengolahan limbah komunal dalam kondisi baik | 35 Unit | 61 Unit | Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | DPUPRPKP |
|  |  | Pembangunan sarana prasarana publik | Persentase desa dalam cakupan layanan lampu penerangan jalan | 42,9 % | 100% | Program peningkatan sarana dan prasarana LPJU | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | DPUPRPKP |
| Persentase genangan yang dapat tertangani | 84,64% | 100% | Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | DPUPRPKP |
| Persentase sarana dan prasarana aparatur dan publik dalam kondisi baik | 60% | 90% | Program peningkatan Prasarana aparatur dan prasarana publik | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | DPUPRPKP |
| Tersedianya data berbasis GIS | 0 | 6 sistem informasi | Program Pembangunan Sistem Informasi/Database infrastruktur | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | DPUPRPKP |
| Pembangunan Infrastruktur pada Kawasan Kumuh | Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Pada Kawasan Kumuh | Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | 30.87% | 100% | Program peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh | Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman | DPUPRPKP |
| Persentase lingkungan perumahan yang tertangani | 85% | 100% | Program Pengembangan Perumahan | Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman | DPUPRPKP |
|  |  | Persentase lingkungan sehat dan aman | NA | 50% | Program Lingkungan Sehat Perumahan | Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman | DPUPRPKP |
| Pembangunan sarana transportasi untuk memperlancar arus perhubungan | Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan | Presentase jumlah kajian bidang perhubungan terhadap kebutuhan | 11% | 100% | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Perhubu-Ngan | DISHUB |
| Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang memadai | 0 | 100% | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Perhubu-Ngan | DISHUB |
| Persentase Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik | 60% | 100% | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Perhubu-Ngan | DISHUB |
| Rasio jumlah seat angkutan terhadap jumlah penduduk | 0,8 | 2,0 | Program peningkatan pelayanan angkutan | Perhubu-Ngan | DISHUB |
| Jumlah Kendaraan yang laik uji | 22.376 unit | 23.300 unit | Program peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | Perhubu-Ngan | DISHUB |
|  |  | Persentase ruas jalan kabupaten yang berkeselamatan | 19,54%  (59/302) | 40,07%  (121/302) | Program Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas | Perhubu-Ngan | DISHUB |

**MISI 5. MEMPERKUAT BIROKRASI YANG BERORIENTASI KINERJA, TRANSPARAN DAN BERDAYA SAING BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

| **SASARAN** | | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** | **INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)** | **CAPAIAN KINERJA** | | **PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH** | **BIDANG**  **URUSAN** | **SKPD PENANGGUNG JAWAB** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONDISI AWAL** | **KONDISI AKHIR** |
| **(1)** | | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas Instansi Pemerintah | Mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan penjenjangan karier | Meningkatkan Daya Saing Aparatur Sipil Negara melalui Peningkatan Tata Kelola Birokrasi  Meningkatkan kualitas Sakip | Persentase ASN tertib administrasi kepegawaian | 50% | 100% | Program Pembinaan ASN | Kepegawaian | BKPSDM |
| Menerapkan System Merit dalam Birokrasi | Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi | 46% | 100% | Program Pengembangan ASN | Kepegawaian | BKPSDM |
| Meningkatkan Kordinasi Perencanaan | Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan | NA | 5% | Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan daerah | Perencanaan | BAPELIT BANG |
|  | Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan | NA | 5% | Program perencanaan dan pengendalian bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan | Perencanaan | BAPELIT BANG |
|  | Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Prasarana Wilayah dan Tataruang | NA | 5% |  | Perencanaan | BAPELIT BANG |
| Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang ekonomi dan Sumber Daya Alam | NA | 5% | Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Ekonomi dan sumber daya alam | Perencanaan | BAPELIT BANG |
| Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang Pembangunan manusia dan masyarakat | NA | 5% | Program perencanaan dan pengendalian bidang pembangunan manusia dan Masyarakat | Perencanaan | BAPELIT BANG |
| Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan | 0 | 15 | Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah | Perencanaan | BAPELIT BANG |
| Melakukan Evaluasi Keuangan | Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah | Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori “BAIK” | 80,00% | 90% | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Keuangan | BAKEUDA |
| Menggali Sumber sumber Pendapatan Baru | Persentase peningkatan target penerimaan PAD | 11,25% | 13% | Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | Keuangan | BAKEUDA |
| Persentase penurunan nilai temuan BMD | 75% | 20% | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Keuangan | BAKEUDA |
| Meningkatkan Kapasitas Pengawas Internal | Memaksimalkan fungsi Pembinaan dan Pengawasan internal | Prosentase Penurunan Jumlah OPD dengan Temuan Kerugian Negara / Daerah | 90% | 90% | Program Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Inspektorat | INSPEKTORAT |
| Persentase peningkatan kinerja perangkat daerah dengan nilai LKJIP "A" | 90% | 90% | Program Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Kinerja Daerah | Inspektorat | INSPEKTORAT |
| Meningkatkan Integrasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah | Meningkatkan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah | Jumlah permasalahan kelembagaan serta tugas dan fungsi yang diselesaikan | 0 | 100% | Program Pembinaan dan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah. | Setda | BAGIAN ORGANISASI |
| Nilai LKJIP Perangkat daerah di Kabupaten Tabanan. | -/CC | Sangat Baik/BB | Program Penguatan Akuntabilitas | Setda | BAGIAN ORGANISASI |
| Persentase Kegiatan Pembangunan Infrastruktur yang dapat dilaksanakan sesuai target waktu dan tujuan program | 10% | 80% | Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Setda | BAGIAN PEMBANGUNAN |
| Jumlah aset tanah pemerintah daerah yang bersertifikat an Pemkab Tabanan | 40 | 50 | Program Penataan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah | Setda | BAGIAN TAPEM |
| Persentase Konflik-Konflik Pertanahan yang dapat diselesaikan. | 0 | 20% | Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan | Pertanahan | BAGIAN TAPEM |
| Jumlah Perjanjian Kerjasama Yang Diimplementasikan Dalam Setahun. | 15 Mou | 100 Mou | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah/Lembaga Lainnya. | Setda | BAGIAN TAPEM |
| Jumlah Kebijakan KDH Dalam Rangka Pengendalian Inflasi dan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah. | 5 | 25 | Program Pengendalian Pembangunan Ekonomi Daerah. | Setda | BAGIAN EKONOMI |
| Jumlah Aktifitas penyelenggaraan hari-hari besar/ nasional/ Keagamaan | 61 Keg | 305 Keg | Penyelenggaraan Hari-Hari Besar/ Nasional/ Keagamaan. | Setda | BAGIAN KESRA,BAGIAN TAPEM |
| jumlah pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan | NA | 250 Keg | Program Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah daerah | Setda | BAGIAN PENGADAAN |
| Percepatan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan sistem monev | Mendorong implementasi e-goverment dalam rangka mewujudkan transparansi dan efektifitas dan efisiensi | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Lintas Urusan | SELURUH OPD |
| Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 80% | 92% | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Lintas Urusan | SELURUH OPD |
| Persentase ASN yang memperoleh Diklat Teknis | 80% | 80% | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Lintas Urusan | SELURUH OPD |
|  |  | Persentase terbangunnya platform Smart Government Kabupaten Tabanan | 0% | 100% | Program Pengembangan e-Goverment | Komunikasi Dan Informatika | DISKOMINFO |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Menyusun Regulasi Kebijakan integrasi Perijinan dan Non Perijinan melalui PTSP | Mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat | Jumlah nilai investasi beskala nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah) | 609,48 | 8.172,57 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Ivestasi | Penanaman Modal Daerah | DPMPPTSP |
| Persentase Ijin dan Non Perijinan terbit terhadap Total Permohonan Ijin dan Non Perijinan | 98% | 99,6% | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi | Penanaman Modal Daerah | DPMPPTSP |
| Persentase usaha pertambangan yang dibina | NA | 60% | Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan | Energi dan Sumber daya mineral | DPMPPTSP |
| Persentase rumah tangga berlistrik | 28% | 50% | Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan | Energi dan Sumber daya mineral | DPMPPTSP |
| Persentase Kasus yang difasilitasi Hingga Mempunyai Ketetapan Hukum. | 50% | 100% | Program Fasilitasi Masalah Hukum Daerah | Setda | BAGIAN HUKUM & HAM |
|  | Persentase Penyebarluasan Informasi Kebijakan Kepala Daerah | 80% | 100% | Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan | Setda | BAGIAN HUMAS & PROTOKOL |
| Terselengaraanya Upacara/Acara-acara sesuai dengan standar keprotokolan yang berlaku | NA | 100% | Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan | Setda | BAGIAN HUMAS & PROTOKOL |
|  | Persentase penetapan Regulasi Daerah yang tepat waktu | 50% | 75% | Program Penataan dan Penyusunan Regulasi Daerah | Setda | BAGIAN HUKUM & HAM |
|  | Persentase perda, Ranperda, reses, risalah dapat terlaksana | 80% | 90% | Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | Setwan | SETWAN |
| Jumlah pemberitaan melalui media cetak dan elektronik | 900 exp | 900 exp | Program kerjasama informasi dan media massa | Setwan | SETWAN |
| Meningkatkan inovasi pelayanan publik kecamatan | Jenis Inovasi Pelayanan Publik | 0 | 15 | Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan | Kecamatan | KECAMATAN |
|  | Persentase Kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik | 100% | 100% | Program Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kecamatan | Kecamatan | KECAMATAN |
| Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan berbasis IT sebagai pusat belajar siswa dan masyarakat | Persentase sekolah dan Desa yang telah memiliki perpustakaan | 43% | 64% | Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan | Perpus takaan | DISPERSIP |
| Perssentase Bertambahnya sarana dan prasarana perpustakaan | 0% | 100% | Program pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan | Perpus takaan | DISPERSIP |
| Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi bahan pustaka | Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik | 0% | 65% | Program pengembangan sarana dan prasarana kearsipan | Kearsipan | DISPERSIP |
| Persentase dokumen/arsip daerah yang terdata | 0% | 22% | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | Kearsipan | DISPERSIP |
| Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan | Persentase kepemilikan dokumen kependudukan | 70% | 95% | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil | DISDUKCAPIL |
| Peningkatan kapasitas SDM IT |  | Persentase desa di wilayah kabupaten Tabanan berbasis IT | NA | 100% | Program pemanfaatan Teknologi Informasi bagi Masyarakat | Komunikasi Dan Informatika | DISKOMINFO |
|  |  | Penyediaan Infrastruktur IT | Persentase wilayah yang terlayani jaringan Telekomunikasi | 52% | 100% | Program Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi | Komunikasi Dan Informatika | DISKOMINFO |
| Persentase Informasi Daerah yang dipublikasikan | 25% | 100% | Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Komunikasi Dan Informatika | DISKOMINFO |
| Persentase penyediaan data dan informasi statistik daerah Kabupaten Tabanan | NA | 100% | Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah | Statistik | DISKOMINFO |

**Tabel 8.1**

**Indikasi Rencana Program Prioritas Tahun 2018 – 2021**

**yang disertai Kebutuhan Pendanaan dari APBD Kabupaten Tabanan**

| **KODE** | | | | **BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN** | **INDIKATOR KINERJA PROGRAM** | **KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)** | **CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | | | | | **SKPD PENANGGUNGJAWAB** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TAHUN 2018** | | **TAHUN 2019** | | **TAHUN 2020** | | **TAHUN 2021** | | **KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)** | |
| **(OUTCOME)** | **TARGET** | **JUTA Rp** | **TARGET** | **JUTA Rp** | **TARGET** | **JUTA Rp** | **TARGET** | **JUTA Rp** | **TARGET** | **JUTA Rp** |
| 1 | | | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1** | ***1*** |  |  | ***URUSAN WAJIB*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **1** | **1** |  | **PENDIDIKAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 23.858 | 100% | 24.956 | 100% | 25.856 | 100% | 26.856 | 100% | 101.526 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 1.755 | 88% | 635 | 90% | 1.210 | 92% | 725 | 92% | 4.325 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 56 | 100% | 62 | 100% | 68 | 100% | 74 | 100% | 259 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 4 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Persentase jumlah PAUD yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 80,00% | 86,00% | 1.370 | 88,00% | 1.410 | 90,00% | 1.520 | 92,00% | 1.520 | 92,00% | 5.820 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 5 | Program Pendidikan kesetaraan dan pendidikan keberlanjutan lainnya | Peningkatan jumlah peserta pendidikan nonformal (pendidikan kesetaraan dan pendidikan keberlanjutan lainnya) | 717 Or | 1,017 | 450 | 1,117 | 485 | 1,217 | 505 | 1,267 | 505 | 1267 Or | 1.945 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 6 | Program peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar | Persentase jumlah sekolah dasar dengan penyelenggaraan pendidikan sesuai SPM | 0,61% | 21,41% | 7.179 | 30,58% | 7.184 | 46% | 7.209 | 76,45% | 7.209 | 76% | 28.781 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 7 | Program peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama | Persentase jumlah sekolah menengah pertama dengan penyelenggaraan pendidikan sesuai SPM | 0,00% | 20,93% | 26.733 | 27,91% | 26.758 | 35% | 26.783 | 35% | 26.783 | 35% | 107.057 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 8 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase jumlah SD/MI yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SPM | 0,61% | 21,41% | 6.933 | 30,58% | 7.077 | 46% | 8.056 | 76,45% | 8.612 | 76,45% | 30.737 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 9 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase jumlah SMP/MTs yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SPM | 0,00% | 34,88% | 4.653 | 45,52% | 5.128 | 70% | 5.652 | 100% | 7.211 | 100% | 22.644 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 10 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase Guru yang sudah bersertifikat pendidik | 82,38% | 92,24% | 2.075 | 94,70% | 2.115 | 97,17% | 2.248 | 100% | 2.210 | 99,63% | 8.648 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 11 | Program Pelayanan Manajemen Pendidikan | persentase sekolah yang mampu mengelola dana pendidikan dengan kategori 'baik' | 27,62% | 44,20% | 1.260 | 55,25% | 1.300 | 69% | 1.305 | 100% | 1.305 | 100% | 5.170 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 12 | Program pendidikan karakter berbasis budaya | Persentase jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berbasis budaya | 6,06% | 42,34% | 2.425 | 100% | 2.570 | 100% | 2.495 | 100% | 2.495 | 100% | 9.985 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 13 | Program Pendidikan Masyarakat | Persentase peserta kursus lulus uji kompetensi | 5% | 10% | 130 | 12% | 140 | 15% | 145 | 20% | 145 | 20% | 560 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | Program BOS | Persentase Sekolah yang memenuhi SPM Pendidikan Dasar | 0,57% | 49,58% | 49.510 | 71% | 52.000 | 85% | 54.589 | 100% | 57.307 | 100% | 213.407 | DISDIK |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **128.447** |  | **131.821** |  | **137.640** |  | **142.957** |  | **540.865** |  |
| 1 | 1 | 2 |  | **KESEHATAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 9.963 | 100% | 10.535 | 100% | 11.139 | 100% | 11.608 | 100% | 43.245 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 1.694 | 88% | 1.863 | 90% | 2.050 | 92% | 2.050 | 92% | 7.657 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 301 | 100% | 327 | 100% | 352 | 100% | 352 | 100% | 1.332 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 4 | Program Pelayanan Kesehatan | Persentase jenis layanan kesehatan dasar yang mampu dilayani secara prima | 80% | 100% | 37.254 | 100% | 43.837 | 100% | 73.429 | 100% | 10.554 | 100% | 165.074 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 5 | Program Pelayanan Kesehatan Rujukan | Persentase jenis layanan kesehatan rujukan yang mampu dilayani secara prima | 80% | 100% | 110.902 | 100% | 114.537 | 100% | 122.106 | 100% | 130.374 | 100% | 477.919 | BRSUD |
| 1 | 1 | 2 | 6 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase ketersediaan obat dan vaksin | 77% | 86% | 6.430 | 90% | 7.211 | 90% | 7.766 | 90% | 7.766 | 90% | 29.173 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 7 | Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) | Jumlah SDM yang memenuhi standar jumlah dan kompetensi | 968 | 1.320 | 100 | 1.350 | 60 | 1.350 | 125 | 1.350 | 125 | 1.350 | 410 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | Persentase penyakit menular yang ditangani | 100% | 100% | 625 | 100% | 675 | 100% | 725 | 100% | 775 | 100% | 2.800 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 9 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular | Persentase penyakit tidak menular yang ditangani | 100% | 100% | 1.765 | 100% | 1.963 | 100% | 2.175 | 100% | 2.413 | 100% | 8.315 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 10 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM) | 1,50% | 6,00% | 960 | 7,50% | 1.020 | 11,28% | 1.190 | 15,04% | 1.190 | 15,04% | 4.360 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 11 | Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat | Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS | 60,82% | 75% | 610 | 75% | 685 | 75% | 830 | 75% | 930 | 75% | 3.055 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 12 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Persentase balita gizi kurang | 4% | 3,70% | 2.585 | 3,70% | 3.500 | 3,60% | 4.105 | 3,60% | 4.155 | 3,60% | 14.345 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 13 | Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan Jaringannya | Persentase puskesmas yang memiliki sapras sesuai standar | 0% | 70% | 9.800 | 100% | 12.330 | 100% | 15.363 | 100% | 18.399 | 100% | 55.892 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 14 | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | Jumlah terbangunnya gedung rumah sakit (unit) | 2 | 7 | 13.353 | 9 | 14.916 | 10 | 20.499 | 10 | 25.549 | 10 | 74.317 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 15 | Program Peningkatan kesehatan ibu | Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup | 58,9 | 55 | 4.239 | 55 | 4.259 | 55 | 4.277 | 55 | 4.277 | 55 | 17.052 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 16 | Program peningkatan kesehatan anak | Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup | 10,2 | 9 | 120 | 9 | 130 | 8 | 116 | 140 | 126 | 8 | 530 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 17 | Program peningakatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja | Cakupan Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) | 20% | 70% | 240 | 80% | 242 | 100% | 243 | 100% | 243 | 100% | 968 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 18 | Program peningkatan kesehatan lanjut usia | Persentase Lansia yang dilayani | 59% | 64% | 160 | 66% | 172 | 70% | 174 | 70% | 174 | 70% | 680 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 19 | Program Peningkatan Manajemen Puskesmas | Persentase jumlah puskesmas dengan indeks kepuasan pelanggan memuaskan | 10% | 60% | 232 | 80% | 232 | 100% | 232 | 100% | 232 | 100% | 928 | DIKES |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **201.333** |  | **218.493** |  | **266.920** |  | **221.307** |  | **908.053** |  |
| **1** | **1** | **3** |  | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 2.299 | 100% | 2.529 | 100% | 2.782 | 100% | 3.061 | 100% | 10.672 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 416 | 88% | 458 | 90% | 504 | 92% | 554 | 92% | 1.932 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 21 | 100% | 21 | 100% | 21 | 100% | 21 | 100% | 84 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 4 | Program Perencanaan Tata Ruang | Jumlah dokumen Tata Ruang yang dilegalisasi | 1Dok  (RTRW Kab Tabanan | 8 | 2.600 | 13 | 3.600 | 17 | 4.600 | 20 | 5.100 | 20 | 15.900 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 5 | Program Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang | Persentase luas kawasan yang dapat dipertahankan sesuai dengan arahan rencana pola ruang | 25% | 95% | 1.156 | 95% | 1.982 | 95% | 2.682 | 100% | 3.382 | 100% | 9.202 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 6 | Program perencanaan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional | Jumlah perencanaan pada pusat pertumbuhan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional | NA | 2 | 1000 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 5 | 2500 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 7 | Program perencanaan pembangunan kawasan perdesaan | Jumlah perencanaan pada pusat pertumbuhan di Pembangunan Kawasan Perdesaan | NA | 2 | 1000 | 2 | 1000 | 2 | 1000 | 2 | 1000 | 2 | 4.000 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 8 | Program Pembangunan Jalan baru kabupaten | Panjang Jalan Baru Yang yang dibangun dalam rangka membuka akses wilayah | NA | 20,05 | 10.647 | 20,05 | 12.976 | 20,05 | 19.628 | 20,05 | 22.500 | 22,05 km | 65.750 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 9 | Program Pembangunan Jembatan Baru | Jumlah jembatan baru yang dibangun | NA | 4 | 5.251 | 6 | 6.472 | 6 | 7.413 | 6 | 8.125 | 6 unit | 27.260 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 10 | Program Peningkatan Jalan Kabupaten | Persentase jalan dalam kondisi baik | 61,71% | 90,00% | 29.745 | 100% | 35.639 | 100% | 47.402 | 100% | 63.650 | 100% | 178.436 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 11 | Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik | 79,66% | 89,83% | 43.048 | 91,53% | 42.126 | 94,92% | 11.375 | 100% | 28.875 | 100% | 125.424 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 12 | Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan | Persentase sarana Binamarga dalam kondisi baik | 45% | 78% | 2.880 | 93% | 4.800 | 100% | 7.368 | 100% | 10.000 | 100% | 25.048 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 13 | Program peningkatan sarana dan prasarana LPJU | Persentase desa dalam cakupan layanan lampu penerangan jalan | 42,90% | 90,73% | 5.783 | 100% | 6.226 | 100% | 6.675 | 100% | 8.375 | 100% | 27.059 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 14 | Program pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Air | Indek kinerja jaringan irigasi | 60 | 66 | 23.116 | 70 | 26.789 | 73 | 34.158 | 76 | 86.684 | 76 | 1.71.746 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 15 | Program peningkatan Prasarana aparatur dan prasarana publik | Persentase sarana dan prasarana aparatur dan publik dalam kondisi baik | 60% | 80% | 6.490 | 85% | 7.095 | 85% | 8.183 | 90% | 8.183 | 90% | 29.951 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 16 | Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | Persentase genangan yang dapat tertangani | 84,64% | 90,88% | 6.300 | 92,92% | 8.300 | 95,00% | 10.000 | 100% | 12.100 | 100% | 36.700 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 17 | Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah | Jumlah pusat pengolahan limbah komunal dalam kondisi baik | 35 | 54 | 4.945 | 59 | 7.010 | 61 | 1.075 | 61 | 1.090 | 61 unit | 17.162 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 18 | Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum | Persentase layanan air minum kabupaten | 68,93% | 80,00% | 25.116 | 90,00% | 33.601 | 100,00% | 52.945 | 100,00% | 57.949 | 100,00% | 169.611 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 19 | Program pembangunan infrastruktur perdesaan; | Persentase jalan desa/lingkungan dalam kondisi baik | 28,46% | 45% | 8.500 | 60% | 9.850 | 75% | 10.995 | 90% | 12.719 | 90% | 42.064 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 20 | Program Pembangunan Sistem Informasi/Database infrastruktur | Tersedianya data berbasis GIS | NA | 4 | 500 | 5 | 500 | 6 | 600 | 6 | 700 | 6 | 2.300 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 21 | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | Persentase ASN Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang memperoleh diklat teknis | 11% | 34% | 50 | 56% | 50 | 78% | 50 | 100% | 50 | 100% | 200 | DPUPRPKP |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **180.863** |  | **221.523** |  | **229.956** |  | **334.617** |  | **956.959** |  |
| **1** | **1** | **4** |  | **PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 4 | 1 | Program Pengembangan Perumahan | Persentase lingkungan perumahan yang tertangani | 85% | 91% | 5.900 | 94% | 5.800 | 97% | 6.440 | 100% | 6.440 | 100% | 24.580 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 4 | 2 | Program Lingkungan Sehat Perumahan | Persentase lingkungan sehat dan aman | NA | 20% | 600 | 30% | 600 | 40% | 600 | 50% | 600 | 50% | 2.400 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 4 | 3 | Program peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh | Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | 30,87% | 92,27% | - | 100% | 1.050 | 100% | 2.050 | 100% | 3.050 | 100% | 6.150 | DPUPRPKP |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **6.500** |  | **7.450** |  | **9.090** |  | **10.090** |  | **33.130** |  |
| **1** | **1** | **5** |  | **KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 5 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 3.075 | 100% | 3.500 | 100% | 4.000 | 100% | 4.500 | 100% | 15.075 | SATPOL-PP |
| 1 | 1 | 5 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 3.750 | 88% | 6.375 | 90% | 7.785 | 92% | 7.773 | 92% | 25.683 | SATPOL-PP |
| 1 | 1 | 5 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 44 | SATPOL-PP |
| 1 | 1 | 5 | 4 | Program Pemeliharaan dan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Persentase menurunnya jumlah gangguan kantrantibmas | 100% | 100% | 625 | 100% | 740 | 100% | 830 | 100% | 935 | 100% | 3.130 | SATPOL-PP |
| 1 | 1 | 5 | 5 | Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang dapat ditertibkan | 100% | 100% | 443 | 100% | 490 | 100% | 353 | 100% | 580 | 100% | 2.048 | SATPOL-PP |
| 1 | 1 | 5 | 6 | Program Kesiapsiagaan Masyarakat | Persentase limas siap siaga | 4% | 7,5% | 1.835 | 133 desa | 1.875 | 133 desa | 1.910 | 133 desa | 2.035 | 133 desa | 7.655 | SATPOL-PP |
| 1 | 1 | 5 | 7 | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | Presentase pengaduan kebakaran yang dapat ditangani sesuai SOP | NA | 100% | 290 | 100% | 320 | 100% | 350 | 100% | 380 | 100% | 1.340 | SATPOL-PP |
| 1 | 1 | 5 |  | Program Sumber Daya Aparatur | Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis | 100% | 100% | 445 | 100% | 1.445 | 100% | 1.480 | 100% | 1.505 | 100% | 4.884 | SATPOL-PP |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **10.475** |  | **14.766** |  | **16.901** |  | **17.719** |  | **59.859** |  |
| **1** | **1** | **6** |  | **SOSIAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 991 | 100% | 1.198 | 100% | 1.695 | 100% | 3.335 | 100% | 7.219 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 1 | 6 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 299 | 88% | 150 | 90% | 4.127 | 92% | 140 | 92% | 4.716 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 1 | 6 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 44 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 1 | 6 | 4 | Program Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin | Persentase Jumlah masyarakat miskin yang mendapat perlindungan dan pemberdayaan ekonomi | 30% | 45% | 2.881 | 59% | 3.506 | 55% | 4.356 | 60% | 5.813 | 60% | 16.546 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 1 | 6 | 5 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 49,62% | 54% | 775 | 56% | 1.020 | 58% | 1.195 | 60% | 1.410 | 60% | 4.400 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 1 | 6 | 6 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial | 76,98% | 70% | 575 | 80% | 655 | 90% | 716 | 100% | 850 | 100% | 2.796 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 1 | 6 | 7 | Program pembinaan anak terlantar | Persentase anak terlantar yang mendapat Penanganan | 58,35% | 82% | 496 | 83% | 570 | 84% | 646 | 85% | 738 | 100% | 2.266 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 1 | 6 | 8 | Program pembinaan para penyandang Disabilitas dan trauma | Persentase Penyandang Disabilitas dan Eks-trauma yang tertangani | 65,85% | 80% | 200 | 85% | 200 | 90% | 200 | 95% | 200 | 95% | 800 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 1 | 6 | 9 | Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo | Jumlah panti asuhan yang mendapat penanganan sosial | 1 Panti Jompo | 7 | 896 | 7 | 980 | 7 | 1.066 | 7 | 1.188 | 1 Panti Jompo | 4.130 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 1 | 6 | 10 | Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) | Persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani | 91,71% | 100% | 50 | 100% | 75 | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% | 325 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 1 | 6 | 11 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Persentase PSKS yang memenuhi tupoksi sesuai standar dalam penanganan PMKS | 10% | 25% | 1.060 | 30% | 1.250 | 35% | 1.405 | 40% | 1.930 | 40% PSKS | 5.645 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 1 | 6 | 12 | Program Pemberian santunan dan tunjangan kepada penderita Disabilitas permanen dan lanjut usia | Jumlah Penyandang Disabilitas permanen dan lanjut usia yang tersantuni | 207 orang | 250 | 546 | 400 | 600 | 400 | 666 | 400 | 768 | 400 orang | 2.580 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 1 | 6 | 13 | Program perlindungan dan jaminan sosial | Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial | 100% | 100% | 100 | 100% | 120 | 100% | 150 | 100% | 150 | 100% | 520 | DINSOS PP&PA |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **8.880** |  | **10.335** |  | **16.323** |  | **16.633** |  | **52.171** |  |
| **1** | **2** |  |  | **URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **1** |  | **TENAGA KERJA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 1 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 693 | 100% | 763 | 100% | 836 | 100% | 913 | 100% | 3.205 | DISNAKER |
| 1 | 2 | 1 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 5.486 | 88% | 5.491 | 90% | 5.496 | 92% | 5.501 | 92% | 21.973 | DISNAKER |
| 1 | 2 | 1 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 10 | 100% | 11 | 100% | 12 | 100% | 13 | 100% | 46 | DISNAKER |
| 1 | 2 | 1 | 4 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase pencari kerja untuk mendapatkan pelatihan yang berbasis masyarakat dan kompetensi | 100% | 100% | 3.926 | 100% | 4.393 | 100% | 5.184 | 100% | 5.524 | 100% | 19.027 | DISNAKER |
| 1 | 2 | 1 | 5 | Program peningkatan kesempatan kerja | Persentase penempatan tenaga kerja | 45% | 70% | 3.667 | 70% | 4.059 | 70% | 4.475 | 70% | 4.898 | 70% | 17.110 | DISNAKER |
| 1 | 2 | 1 | 6 | Program Pengembangan hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Persentase perusahaan memenuhi 10 kriteria dalam UU Ketenagakerjaaan | 100% | 100% | 787 | 100% | 865 | 100% | 935 | 100% | 1.016 | 100% | 3.602 | DISNAKER |
| 1 | 2 | 1 | 7 | Program Revitalisasi LLK | Persentase lulusan LLK yang terserap pasar kerja dan kerja mandiri | 25% | 100% | 2.000 | 100% | 2.000 | 100% | 2.000 | 100% | 2.000 | 100% | 8.000 | DISNAKER |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **16.578** |  | **17.582** |  | **18.938** |  | **19.865** |  | **72.963** |  |
| **1** | **2** | **2** |  | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 1 | Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tertangani | 100% | 100% | 500 | 100% | 625 | 100% | 775 | 100% | 850 | 100% | 2.750 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 2 | 2 | 2 | Program peningkatan Mutu kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak | persentase perempuan dan anak yang terpenuhi hak nya | 40% | 70% | 815 | 80% | 950 | 90% | 1.000 | 100% | 1.100 | 100% | 3.865 | DINSOS PP&PA |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **1.315** |  | **1.575** |  | **1.775** |  | **1.950** |  | **6.615** |  |
| **1** | **2** | **3** |  | **PANGAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 615 | 100% | 700 | 100% | 710 | 100% | 720 | 100% | 2.745 | DISKEPA |
| 1 | 2 | 3 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 90 | 88% | 125 | 90% | 125 | 92% | 160 | 92% | 500 | DISKEPA |
| 1 | 2 | 3 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 44 | DISKEPA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | Persentase desa yang memiliki percontohan pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan sehat | 45% | 45% | 176 | 45% | 303 | 45% | 345 | 45% | 385 | 45% | 1.209 | DISKEPA |
| 1 | 2 | 3 | 5 | Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan | Persentase Desa Mandiri Pangan | 10% | 10% | 225 | 10% | 230 | 10% | 305 | 10% | 495 | 10% | 1.255 | DISKEPA |
| 1 | 2 | 3 | 6 | Program Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan | Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan | ≥ 10% | ≥ 10% | 200 | ≥ 10% | 1.090 | ≥ 10% | 775 | ≥ 10% | 1.500 | ≥ 10% | 3.565 | DISKEPA |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **1.317** |  | **2.459** |  | **2.271** |  | **3.271** |  | **9.318** |  |
| **1** | **2** | **4** |  | **LINGKUNGAN HIDUP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 1.700 | 100% | 1.800 | 100% | 1.900 | 100% | 2.000 | 100% | 7.400 | DINAS LH |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 100 | 88% | 100 | 90% | 150 | 92% | 200 | 92% | 400 | DINAS LH |
| 1 | 2 | 4 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 44 | DINAS LH |
| 1 | 2 | 4 | 4 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Jumlah kasus lingkungan yang dapat ditangani | 58 | 70 | 1.370 | 74 | 1.510 | 80 | 1.650 | 82 | 1.790 | 84 | 6.320 | DINAS LH |
| 1 | 2 | 4 | 5 | Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup | Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh | 3 Jenis | 5 Jenis | 400 | 5 Jenis | 440 | 5 Jenis | 480 | 5 Jenis | 520 | 5 Jenis | 1.840 | DINAS LH |
| 1 | 2 | 4 | 6 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Jumlah spot/titik taman, hutan dalam kondisi terpelihara dan dikembangkan | 11 taman  5 hutan | 11 taman  5 hutan | 1.746 | 12 taman  5 hutan | 5.246 | 12 taman  5 hutan | 4.746 | 12 taman  5 hutan | 4.746 | 12 taman  5 hutan | 16.484 | DINAS LH |
| 1 | 2 | 4 | 7 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Rasio/persentase volume sampah yang mampu diangkut/diolah terhadap volume sampah yang ada | 44% | 50% | 14.235 | 70% | 17.702 | 80% | 15.809 | 90% | 17.933 | 90% | 65.739 | DINAS LH |
| 1 | 2 | 4 | 8 | Program Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat | Jumlah pengolahan persampahan berbasis masyarakat TPST 3R dan Bank sampah | TPST = 8 unit, Bank Sampah = 29 | 2 TPST, 5 Bank sampah | 850 | 2 TPST, 5 Bank sampah | 850 | 2 TPST, 5 Bank sampah | 850 | 2 TPST, 5 Bank sampah | 850 | 10 TPST, 25 Bank sampah | 3.400 | DINAS LH |
| 1 | 2 | 4 | 9 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan IPLT | Kapasitas tinja yang mampu ditanangani 0,76 ton/th | 987 m3/th | 1.283,1 m3/th | 900 | 1.381,8 m3/th | 800 | 1.480,5 m3/th | 900 | 1.480,5 m3/th | 800 | 1.480,5 m3/th | 3.400 | DINAS LH |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **21.321** |  | **28.459** |  | **26.496** |  | **28.910** |  | **105.177** |  |
| **1** | **2** | **5** |  | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 1.300 | 100% | 1.373 | 100% | 1.504 | 100% | 1.641 | 100% | 5.818 | DISDUKCAPIL |
| 1 | 2 | 5 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 5.555 | 88% | 550 | 90% | 350 | 92% | 250 | 92% | 6.705 | DISDUKCAPIL |
| 1 | 2 | 5 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 12 | 100% | 13 | 100% | 47 | DISDUKCAPIL |
| 1 | 2 | 5 | 4 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Persentase kepemilikan dokumen kependudukan | 70% | 80% | 2.491 | 85% | 2.744 | 90% | 3.007 | 95% | 3.281 | 95% | 11.524 | DISDUKCAPIL |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **9.357** |  | **4.678** |  | **4.873** |  | **5.185** |  | **24.094** |  |
| **1** | **2** | **6** |  | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 6 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 900 | 100% | 1.006 | 100% | 1.145 | 100% | 1.145 | 100% | 4.196 | DPMD |
| 1 | 2 | 6 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 230 | 88% | 2.200 | 90% | 365 | 92% | 375 | 92% | 3.170 | DPMD |
| 1 | 2 | 6 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 301 | 100% | 125 | 100% | 135 | 100% | 145 | 100% | 706 | DPMD |
| 1 | 2 | 6 | 4 | Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa | Jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat yang difasilitasi oleh BUMDes | 0 | 160 | 1.240 | 150 | 1.340 | 132 | 1.250 | 814 | 600 | 814 | 4.430 | DPMD |
| 1 | 2 | 6 | 5 | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | Jumlah desa yang memiliki kapasitas aparatur pemerintah desa memadai | 133 desa | 133 | 435 | 133 | 5.940 | 133 | 545 | 133 | 550 | 133 desa | 7.470 | DPMD |
| 1 | 2 | 6 | 6 | Program peningkatan pengelolaan pemerintahan Desa | Persentase Desa yang mendapatkan penilaian baik atas kinerja keuangan | NA | 60% | 722 | 70% | 1.250 | 80% | 1.275 | 100% | 1.275 | 100% | 4.522 | DPMD |
| 1 | 2 | 6 | 7 | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Jumlah desa berprestasi minimal tingkat propinsi | 0 | 1 | 3.190 | 1 | 3.672 | 1 | 3.701 | 1 | 3.705 | 1 | 14.268 | DPMD |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **7.018** |  | **15.553** |  | **8.416** |  | **7.795** |  | **38.762** |  |
| **1** | **2** | **7** |  | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 7 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 865 | 100% | 939 | 100% | 1.017 | 100% | 1.060 | 100% | 3.882 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB |
| 1 | 2 | 7 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 1.540 | 88% | 1.036 | 90% | 3.546 | 92% | 2.441 | 92% | 8.563 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB |
| 1 | 2 | 7 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 11 | 100% | 13 | 100% | 15 | 100% | 17 | 100% | 56 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB |
| 1 | 2 | 7 | 4 | Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif | 70,05% | 72,50% | 1.740 | 73,00% | 2.118 | 75,00% | 1.619 | 78,00% | 1.917 | 78,00% | 7.394 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB |
| 1 | 2 | 7 | 5 | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | Persentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun | 74,50% | 75,00% | 125 | 76,00% | 145 | 77,00% | 165 | 78,00% | 185 | 78,00% | 620 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB |
| 1 | 2 | 7 | 6 | Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB (%) | 87,10% | 88,90% | 245 | 89,00% | 260 | 89,10% | 275 | 89,50% | 310 | 89,50% | 1.090 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **4.526** |  | **4.511** |  | **6.637** |  | **5.930** |  | **21.605** |  |
| **1** | **2** | **8** |  | **PERHUBUNGAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 8 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 2.296 | 100% | 2.611 | 100% | 2.927 | 100% | 3.243 | 100% | 11.076 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 1 | 2 | 8 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 1.299 | 88% | 813 | 90% | 127 | 92% | 140 | 92% | 2.379 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 1 | 2 | 8 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 35 | 100% | 40 | 100% | 45 | 100% | 50 | 100% | 170 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 1 | 2 | 8 | 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | Persentase ASN Dinas Perhubungan yang memperoleh diklat teknis | 16% (20/119) | 33% | 50 | 50% | 50 | 67% | 50 | 84% | 50 | 84% | 200 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 1 | 2 | 8 | 5 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Pesentase jumlah kajian bidang perhubungan terhadap kebutuhan | 11% | 76% | 4.939 | 88% | 3.189 | 94% | 2.639 | 100% | 2.639 | 100% | 13.406 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 1 | 2 | 8 | 6 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Persentase Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik | 100% | 100% | 220 | 100% | 625 | 100% | 230 | 100% | 235 | 100% | 1.310 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 1 | 2 | 8 | 7 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Jumlah Sarana dan Prasarana perhubungan yang memadai | 9 Unit | 12 Unit | 450 | 14 unit | 150 | 16 unit | 150 | 18 unit | 150 | 18 unit | 900 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 1 | 2 | 8 | 8 | Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas | Persentase ruas jalan kabupaten yang berkeselamatan | 19,54% | 25,83% (78/302) | 8.944 | 28,10% (85302) | 8.984 | 30,13% (91/302) | 9.424 | 40,07% (121/302) | 9.464 | 40,07% (121/302) | 36.816 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 1 | 2 | 8 | 9 | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Rasio jumlah seat angkutan umum terhadap jumlah penduduk | 0,8 | 1,4 | 18.320 | 1,6 | 19.325 | 1,8 | 20.330 | 2,0 | 21.335 | 2,0 | 79.310 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 1 | 2 | 8 | 10 | Program peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | Jumlah Kendaraan yang laik uji | 22.376 | 22.700 | 2.880 | 22.900 | 2.900 | 23.100 | 3.430 | 23.300 | 460 | 23.300 | 9.670 | DINAS PERHUBUNGAN |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **39.433** |  | **38.687** |  | **39.352** |  | **37.766** |  | **155.237** |  |
| **1** | **2** | **9** |  | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 9 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 791 | 100% | 900 | 100% | 1.009 | 100% | 1.118 | 100% | 3.818 | DISKOMINFO |
| 1 | 2 | 9 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 400 | 88% | 400 | 90% | 400 | 92% | 400 | 92% | 1.600 | DISKOMINFO |
| 1 | 2 | 9 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 45 | 100% | 50 | 100% | 55 | 100% | 60 | 100% | 210 | DISKOMINFO |
| 1 | 2 | 9 | 4 | Program Pengembangan e- government | Persentase terbangunnya platform Smart Government Kabupaten Tabanan | 0 | 40% | 2.400 | 69% | 2.400 | 83% | 2.400 | 100% | 2.400 | 100% | 9.600 | DISKOMINFO |
| 1 | 2 | 9 | 5 | Program Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi | Persentase wilayah yang terlayani jaringan Telekomunikasi | 52% | 75% | 1.887 | 85% | 2.161 | 90% | 2.443 | 100% | 2.843 | 100% | 9.334 | DISKOMINFO |
| 1 | 2 | 9 | 6 | Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Persentase Informasi Daerah yang dipublikasikan | 25% | 40% | 630 | 69% | 655 | 83% | 680 | 100% | 680 | 100% | 2.645 | DISKOMINFO |
| 1 | 2 | 9 | 7 | Program pemanfaatan Teknologi Informasi bagi Masyarakat | Persentase desa di wilayah kabupaten Tabanan berbasis IT | NA | 70% | 225 | 80% | 275 | 90% | 350 | 100% | 400 | 100% | 1.250 | DISKOMINFO |
| 1 | 2 | 9 | 8 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase ASN yang memperoleh Diklat Teknis | NA | 40% | 993 | 60% | 1.131 | 80% | 1.272 | 100% | 1.472 | 100% | 4.868 | DISKOMINFO |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **7.371** |  | **7.972** |  | **8.609** |  | **9.373** |  | **33.325** |  |
| **1** | **2** | **10** |  | **KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 10 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 90% | 100% | 615 | 100% | 630 | 100% | 650 | 100% | 650 | 100% | 2.545 | DISKOP UMKM |
| 1 | 2 | 10 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 351 | 88% | 410 | 90% | 265 | 92% | 982 | 92% | 2.008 | DISKOP UMKM |
| 1 | 2 | 10 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 12 | 100% | 13 | 100% | 14 | 100% | 14 | 100% | 53 | DISKOP UMKM |
| 1 | 2 | 8 | 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | Persentase ASN yang memperoleh diklat teknis | 0% | ‘- | ‘- | 35% | 75 | 35% | 75 | 100 | 75 | 100 | 225 | DISKOP UMKM |
| 1 | 2 | 10 | 5 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Persentase Koperasi Sektor Rill yang berkualitas | 0,55% | 1,09% | 1.073 | 1,28% | 1.805 | 1,46% | 1.919 | 1,46% | 5.809 | 1,46% | 11.236 | DISKOP UMKM |
| 1 | 2 | 10 | 6 | Program Fasilitasi Pemasaran Produksi Petani dan UMKM | Jumlah kelompok usaha yang difasiltasi pemasaran produknya | 0 | 100 | 175 | 100 | 175 | 100 | 175 | 100 | 750 | 100 | 1.275 | DISKOP UMKM |
| 1 | 2 | 10 | 7 | Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif | Persentase UMKM yang mengalami Pertumbuhan | 60% | 69% | 275 | 72% | 275 | 75% | 275 | 75% | 925 | 75% | 1.750 | DISKOP UMKM |
| 1 | 2 | 10 | 8 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM | Jumlah UMKM yang mampu mempromosikan produknya | 32 IKM | 35 IKM | 60 | 36 IKM | 60 | 37 IKM | 75 | 40 IKM | 270 | 40 IKM | 465 | DISKOP UMKM |
| 1 | 2 | 10 | 9 | Program Peningkatan SDM UMKM | Jumlah kelompok UMKM yang mampu meningkatkan omset penjualan | 0 | 30 Klp | 500 | 30 Klp | 500 | 30 Klp | 500 | 151 | 2.145 | 151 | 3.645 | DISKOP UMKM |
| 1 | 2 | 10 | 10 | Program Pembangunan Sarana Ekonomi Desa Adat | Persentase Gedung LPD dengan kondisi baik | 40% (123 Unit) | 41,4% (127 Unit) | 1.500 | 42,4% (129 Unit) | 1.500 | 42,7 % (131 Unit) | 1.000 | 43,3% (133 Unit) | 5000 | 43,3% (133 Unit) | 9.000 | DISKOP UMKM |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **5.191** |  | **5.443** |  | **4.948** |  | **16.620** |  | **32.202** |  |
| **1** | **2** | **11** |  | **PENANAMAN MODAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 1.136 | 100% | 1.293 | 100% | 1.450 | 100% | 1.607 | 100% | 5.486 | DINAS PENANAMAN MODAL & PPTSP |
| 1 | 2 | 11 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 99 | 100% | 113 | 90% | 127 | 92% | 140 | 92% | 479 | DINAS PENANAMAN MODAL & PPTSP |
| 1 | 2 | 11 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 35 | 100% | 40 | 100% | 45 | 100% | 50 | 100% | 170 | DINAS PENANAMAN MODAL & PPTSP |
| 1 | 2 | 11 | 4 | Program peningkatan iklim dan realsasi investasi | Jumlah nilai investasi beskala nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah) | 609,48 | 4.871,96 | 600 | 5.795,57 | 600 | 6.886,44 | 500 | 8.172,57 | 500 | 8.172,57 | 2.200 | DINAS PENANAMAN MODAL & PPTSP |
| 1 | 2 | 11 | 5 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi | Persentase Ijin dan Non Perijinan terbit terhadap Total Permohonan Ijin dan Non Perijinan | 98% | 98,7% | 525 | 99% | 575 | 99,3% | 650 | 99,6% | 1.075 | 99,8% | 2.825 | DINAS PENANAMAN MODAL & PPTSP |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **2.395** |  | **2.621** |  | **2.772** |  | **3.372** |  | **11.160** |  |
| **1** | **2** | **12** |  | **KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 12 | 1 | Program Pembinaan Pemuda dan Pemasyarakatan Olahraga | Peraihan Medali Terhadap Cabang Olah Raga/Seni Yang Diikuti dalam Lomba Tingkat Provinsi | 95 | 100 | 1.995 | 110 | 2.100 | 110 | 2.100 | 120 | 2.200 | 120 | 8.395 | DISDIK |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **1.995** |  | **2.100** |  | **2.100** |  | **2.200** |  | **8.395** |  |
| **1** | **2** | **13** |  | **STATISTIK** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 13 | 1 | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | Persentase penyediaan data informasi statistik daerah Kab. Tabanan | NA | 37% | 300 | 56% | 300 | 75% | 300 | 100% | 300 | 100% | 1.200 | DISKOMINFO |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **300** |  | **300** |  | **300** |  | **300** |  | **1.200** |  |
| **1** | **2** | **14** |  | **KEBUDAYAAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 14 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 438 | 100% | 466 | 100% | 490 | 100% | 515 | 100% | 1.908 | DISBUD |
| 1 | 2 | 14 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 300 | 88% | 500 | 90% | 700 | 92% | 850 | 92% | 2.350 | DISBUD |
| 1 | 2 | 14 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 111 | 100% | 161 | 100% | 161 | 100% | 161 | 100% | 594 | DISBUD |
| 1 | 2 | 14 | 4 | Program Lembaga Adat/ Tradisional Yang terjaga Kelestariannya | Jumlah Lembaga Adat/ Tradisional yang Terjaga Kelestarianya | 348 | 231 | 1.630 | 245 | 2.235 | 294 | 2.830 | 314 | 3.390 | 1012 | 10.085 | DISBUD |
| 1 | 2 | 14 | 5 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi | 320 | 330 | 123 | 250 | 97 | 650 | 106 | 660 | 116 | 770 | 2.330 | DISBUD |
| 1 | 2 | 14 | 6 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan | 105 | 178 | 3.950 | 178 | 4.750 | 178 | 5.000 | 178 | 5.250 | 182 | 18.950 | DISBUD |
| 1 | 2 | 14 | 7 | Program revitalisasi sarana prasarana Kesenian/Budaya | Jumlah sapras Kesenian/budaya yang representatif | NA | 2 | 3.265 | 2 | 3.471 | 2 | 3.629 | 2 | 5.198 | 2 | 15.563 | DISBUD |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **9.944** |  | **12.233** |  | **13.470** |  | **16.134** |  | **51.780** |  |
| **1** | **2** | **15** |  | **PERPUSTAKAAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 15 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 767 | 100% | 770 | 100% | 770 | 100% | 770 | 100% | 3.078 | DINAS PERSIP |
| 1 | 2 | 15 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 156 | 88% | 172 | 90% | 188 | 92% | 206 | 92% | 722 | DINAS PERSIP |
| 1 | 2 | 15 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 9 | 100% | 10 | 100% | 11 | 100% | 12 | 100% | 42 | DINAS PERSIP |
| 1 | 2 | 15 | 4 | Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan | Persentase sekolah dan Desa yang telah memiliki perpustakaan | 43% | 64% | 691 | 64% | 762 | 64% | 834 | 64% | 910 | 64% | 3.197 | DINAS PERSIP |
| 1 | 2 | 15 | 5 | Program Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan | Bertambahnya sarana dan prasarana perpustakaan | 0% | 50% | 587 | 83% | 657 | 100% | 730 | 100% | 806 | 100% | 2.780 | DINAS PERSIP |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **2.210** |  | **2.371** |  | **2.533** |  | **2.704** |  | **9.819** |  |
| **1** | **2** | **16** |  | **KEARSIPAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 16 | 1 | Program pengembangan sarana dan prasarana kearsipan | Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik | 0% | 65% | 691 | 65% | 761 | 65% | 834 | 65% | 910 | 65% | 3.196 | DINAS PERSIP |
| 1 | 2 | 16 | 2 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | Persentase dokumen/arsip daerah yang terdata | 0% | 22% | 587 | 22% | 657 | 22% | 730 | 22% | 806 | 22% | 2.780 | DINAS PERSIP |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **1.278** |  | **1.418** |  | **1.564** |  | **1.716** |  | **5.976** |  |
| 2 | 1 |  |  | **URUSAN PILIHAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 |  | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 1.090 | 100% | 1.100 | 100% | 1.120 | 100% | 1.130 | 100% | 4.440 | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 99 | 88% | 113 | 90% | 127 | 92% | 140 | 92% | 479 | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 35 | 100% | 40 | 100% | 45 | 100% | 50 | 100% | 170 | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | Persentase ASN yang memperoleh diklat teknis | 32,3% | 41,1% | 60 | 50,0% | 95 | 58,8% | 110 | 67,6% | 135 | 67,6% | 400 | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 5 | Program pengembangan perikanan budidaya | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya | 1% | 2% | 2.071 | 3% | 2.389 | 4% | 2.716 | 5% | 3.179 | 6% | 10.355 | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 6 | Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar | Tambahan produk unggulan daerah yang dikembangkan kawasan minapolitan | 1 | 1 | 1.780 | 1 | 1.955 | 1 | 2.141 | 1 | 2.350 | 1 | 8.226 | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 7 | program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan | Cakupan bina kelompok pelaku utama perikanan | 146 | 163 | 518 | 173 | 597 | 186 | 679 | 191 | 795 | 196 | 2.589 | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 8 | Program pengembangan perikanan tangkap | Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap | 1% | 2% | 1.670 | 3% | 1.990 | 4% | 2.370 | 5% | 2.822 | 6% | 8.852 | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 9 | Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir | Persentase peningkatan pelaku utama perikanan masyarakat pesisir | 5 | 45 | 3.950 | 50 | 4.275 | 55 | 5.050 | 60 | 5.807 | 60 | 19.082 | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 10 | Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan | Produksi aneka olahan ikan bernilai tambah | 2.264,4 | 2.351,3 | 2.540 | 2.403,0 | 2.730 | 2.460,7 | 2.930 | 2.524,6 | 3.100 | 2.595,3 | 3.290 | DISKAN |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **11.273** |  | **12.554** |  | **14.358** |  | **14.408** |  | **54.593** |  |
| **2** | **1** | **2** |  | **PARIWISATA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 1.396 | 100% | 1.588 | 100% | 1.781 | 100% | 1.973 | 100% | 6.738 | DISPAR |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 210 | 88% | 220 | 90% | 130 | 92% | 140 | 92% | 700 | DISPAR |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 44 | DISPAR |
| 2 | 1 | 2 | 4 | Program Pengembangan Destinasi Wisata | Jumlah DTW yang dikunjungi wisatawan | 3 obyek wisata (tanah lot, danau beratan, Kebun raya Eka Karya) | 6 | 6.047 | 7 | 13.435 | 8 | 14.195 | 9 | 14.530 | 9 | 48.207 | DISPAR |
| 2 | 1 | 2 | 5 | Program Pengembangan Desa Wisata/ agrowisata | Jumlah desa wisata/Agro Wisata yang berkembang | 6 | 11 | 407 | 12 | 437 | 15 | 562 | 15 | 337 | 15 | 1.743 | DISPAR |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **8.071** |  | **15.691** |  | **16.679** |  | **15.991** |  | **57.432** |  |
| **2** | **1** | **3** |  | **PERTANIAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 3.000 | 100% | 3.500 | 100% | 4.000 | 100% | 4.000 | 100% | 14.500 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 1.000 | 88% | 1.000 | 90% | 1.000 | 92% | 1.000 | 92% | 4.000 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 33 | 100% | 40 | 100% | 47 | 100% | 47 | 100% | 167 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 4 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Persentase luas lahan pertanian yang menerima subsidi pupuk, benih dan saprodi | 60% | 60% | 2.300 | 70% | 2.500 | 75% | 2.800 | 100% | 2.850 | 100% | 10.450 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 5 | Program Peningkatan Produksi Padi | Angka produksi padi (ton) | 194.122 | 207.623 | 12.075 | 207.977 | 14.070 | 208.496 | 16.314 | 208.496 | 16.364 | 208.496 | 58.823 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 6 | Program Peningkatan Produksi Hortikultura | Angka produksi sayuran per tahun (kwintal) | 505.527 | 556.080 | 500 | 581.356 | 550 | 606.632 | 600 | 631.909 | 600 | 631.909 | 2.250 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 7 | Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian | Persentase peningkatan kelompok/subak binaan yang berhasil menjalin kemitraan bisnis dengan pengusaha | 5% | 10% | 600 | 10% | 650 | 10% | 700 | 40% | 700 | 40% | 2.650 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 8 | Program Peningkatan Produksi Perkebunan | Persentase Produksi Komoditas unggulan | 5% | 10% | 1.700 | 10% | 2.210 | 15% | 2.610 | 15% | 2.610 | 15% | 9.130 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 9 | Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan | Persentase Produk olahan primer komoditi unggulan perkebunan (ton) | 10% | 40% | 1.000 | 50% | 1.000 | 60% | 1.000 | 60% | 1.000 | 60% | 4.000 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 10 | Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Petani | Jumlah kelompok/subak binaan yang berhasil membentuk usaha bersama (agribisnis) yang menguntungkan | 5 | 10 | 1.125 | 10 | 945 | 10 | 2.170 | 50 | 1.070 | 50 | 5.310 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 11 | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) | Persentase peningkatan kompetensi PPL | 20% | 10% | 875 | 10% | 940 | 10% | 1.010 | 50% | 1.015 | 50% | 3.840 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 12 | Program Pengembangan Pertanian Organik | Luas lahan pertanian yang dikelola secara organik (tanpa memanfaatkan bahan kimia sistetis) | 850 Ha | 435 ha | 2.300 | 385 ha | 2.400 | 450 ha | 2.450 | 2075 ha | 2.500 | 2075 ha | 9.650 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 13 | Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan | Persentase kelompok yang mengolah dan memasarkan hasil ternak secara kontinyu | 16% | 3% | 1.160 | 3% | 1.325 | 3% | 1.490 | 31% | 1.490 | 31% | 5.465 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 14 | Program Peningkatan Produksi Palawija | Angka produksi jagung (ton) | 5.036 | 10.072 | 3.500 | 10.308 | 3.500 | 10.620 | 3.500 | 10.933 | 3.500 | 10.933 | 14.000 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 15 | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Persentase peningkatan produksi dan populasi ternak | 1,96% | 2% | 1.585 | 2% | 1.740 | 2% | 1.900 | 10% | 1.975 | 10% | 7.200 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 16 | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | Persentase pelayanan kesehatan ternak | 70% | 5% | 300 | 5% | 350 | 5% | 400 | 95% | 400 | 95% | 1.450 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 17 | Program Pengembangan Taman Teknologi Pertanian (TTP) | Keberadaan TTP yang berfungsi sebagai kawasan pusat gelar produk, alih teknologi pertanian, dan agrowisata | 0 | 20% | 600 | 30% | 600 | 50% | 700 | 100% | 700 | 100% | 2.600 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 18 | Program Peningkatan Kemandirian Benih/Bibit | Persentase kebutuhan benih/bibit (padi, Kedele, Hortikultura) yang dapat dipenuhi dari petani Tabanan | 10% | 20% | 90 | 30% | 90 | 40% | 90 | 50% | 90 | 50% | 360 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 19 | Program pelestarian dan perlindungan Plasma Nuftah | Jumlah satwa/tanaman langka yang di konservasi | 1 | 3 | 400 | 4 | 450 | 5 | 900 | 6 | 900 | 6 | 2.650 | DISTAN |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **34.143** |  | **37.860** |  | **43.681** |  | **42.811** |  | **158.495** |  |
| **2** | **1** | **4** |  | **PERDAGANGAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 4 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 1.022 | 100% | 1.124 | 100% | 1.236 | 100% | 1.360 | 100% | 4.742 | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | 4 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 75 | 88% | 100 | 90% | 125 | 92% | 340 | 92% | 640 | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | 4 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 12 | 100% | 13 | 100% | 14 | 100% | 15 | 100% | 54 | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | 4 | 4 | Program Pengamanan Perdagangan | Jumlah Komoditas Kebutuhan Pokok, Barang Penting dan Barang Strategis yang diawasi | 0 | 45% | 215 | 50% | 265 | 55% | 295 | 60% | 355 | 60% | 1.130 | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | 4 | 5 | Program Pelayanan Perlindungan Konsumen | Jumlah Pelayanan Tera/Tera Ulang per tahun | 5000 UTTP | 9000 UTTP | 640 | 12.000 UTTP | 788 | 15.000 UTTP | 1.050 | 18.000 UTTP | 1.205 | 18.000 UTTP | 3.683 | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | 4 | 6 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan | Presentase Sarana dan prasarana perdagangan yang legal dan representatif | 10% | 30% | 7.490 | 40% | 5.843 | 50% | 6.405 | 60% | 7.218 | 60% | 26.956 | DISPERINDAG |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **9.454** |  | **8.133** |  | **9.125** |  | **10.493** |  | **37.205** |  |
| **1** | **2** | **5** |  | **ENERGI DAN SUMBER DAYA MENERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 1 | Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan | Persentase Usaha Pertambangan Yang Dibina | NA | 30 | 350 | 40 | 400 | 50 | 450 | 60 | 500 | 60 | 1.700 | DINAS PENANAMAN MODAL & PPTSP |
| 1 | 2 | 5 | 2 | Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan | Persentase Rumah Tangga Berlistrik | 28 | 30 | 350 | 35 | 400 | 45 | 450 | 50 | 500 | 50 | 1.700 | DINAS PENANAMAN MODAL & PPTSP |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **700** |  | **800** |  | **800** |  | **1.000** |  | **3.400** |  |
| **2** | **1** | **5** |  | **PERINDUSTRIAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 5 | 1 | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi | Nilai produksi IKM | NA | 100 | 400 | 125 | 125 | 150 | 125 | 175 | 250 | 175 | 900 | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | 5 | 2 | Program Pengendalian Mutu Produksi Industri Kecil dan Menengah | Persentase IKM yang sudah menjalankan Gugus Kendali Mutu (GKM) | 50% | 65% | 255 | 70% | 280 | 75% | 335 | 80% | 605 | 80% | 1.445 | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | 5 | 3 | Program Perlindungan Hasil Pertanian | Jumlah Hasil Pertanian yang mampu difasilitasi dalam distribusi dan pemasaran | 25% | 35% | 420 | 45% | 500 | 55% | 555 | '65% | 600 | 65% | 2.075 | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | 5 | 4 | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Jumlah Peningkatan Produksi IKM yang dapat disalurkan | 0 | 1 | 75 | 1 | 2.500 | 1 | 750 | - | - | 3 | 6.825 | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | 5 | 5 | Program Fasilitasi Pemasaran Poduk Petani dan UMKM | Jumlah Kelompok Usaha yang difasilitasi Pemasaran Produknya | 32 | 40 | 3.050 | 45 | 2.100 | 50 | 750 | 55 | 1.000 | 55 | 6.900 | DISPERINDAG |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **4.170** |  | **5.505** |  | **2.515** |  | **2.455** |  | **14.645** |  |
| **2** | **1** | **6** |  | **TRANSMIGRASI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 6 | 1 | Program Transmigrasi Regional | Persentase calon transmigran yang ditempatkan pada daerah tujuan transmigrasi | 100% | 100% | 222 | 100% | 250 | 100% | 250 | 100% | 250 | 100% | 972 | DISNAKER |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **222** |  | **250** |  | **250** |  | **250** |  | **972** |  |
| **3** | **1** |  |  | **FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | **1** |  | **PERENCANAAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 990 | 100% | 1.089 | 100% | 1.198 | 100% | 1.318 | 100% | 4.596 | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 200 | 88% | 200 | 90% | - | 92% | 300 | 92% | 700 | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 13 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100% | 73 | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 4 | Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan daerah | Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan | NA | 20% | 1.880 | 15% | 2.300 | 10% | 2.010 | 5% | 2.450 | 5% | 8.640 | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 5 | Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam | Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang ekonomi dan Sumber Daya Alam | NA | 20% | 300 | 15% | 300 | 10% | 300 | 5% | 300 | 5% | 1.200 | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 6 | Program perencanaan dan pengendalian bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan | Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan | NA | 20% | 350 | 15% | 350 | 10% | 350 | 5% | 350 | 5% | 1.400 | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 7 | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Prasarana Wilayah dan tataruang | Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Prasarana Wilayah dan Tataruang | NA | 20% | 485 | 15% | 485 | 10% | 485 | 5% | 485 | 5% | 1.940 | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 8 | Program perencanaan dan pengendalian bidang pembangunan manusia dan Masyarakat | Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang Pembangunan manusia dan masyarakat | NA | 20% | 250 | 15% | 250 | 10% | 250 | 5% | 250 | 5% | 1.000 | BAPELITBANG |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **4.468** |  | **4.994** |  | **4.613** |  | **5.473** |  | **19.549** |  |
| **3** | **1** | **2** |  | **KEUANGAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 2 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 2.600 | 100% | 2.750 | 100% | 2.850 | 100% | 2.900 | 100% | 11.100 | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 13.313 | 88% | 11.016 | 90% | 13.708 | 92% | 14.158 | 92% | 52.195 | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 44 | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 4 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah | Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori “BAIK” | 80,00% | 85% | 3.661 | 90% | 3.426 | 90% | 3.451 | 90% | 3.476 | 100% | 14.014 | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 5 | Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | Persentase peningkatan target penerimaan PAD | 15% | 13% | 3.373 | 13% | 3.413 | 13% | 3.453 | 13% | 3.513 | 13% | 13.752 | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 6 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase penurunan nilai temuan BMD | 75% | 20% | 1.155 | 20% | 1.225 | 20% | 1.305 | 20% | 1.270 | 20% | 4.955 | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 7 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Day  a Aparatur | Persentase ASN yang memperoleh Diklat Teknis | 60% | 80% | 564 | 80% | 825 | 80% | 600 | 80% | 625 | 80% | 2.614 | BAKEUDA |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **24.677** |  | **22.666** |  | **25.378** |  | **25.953** |  | **98.674** |  |
| **3** | **1** | **3** |  | **KEPEGAWAIAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 3 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 520 | 100% | 573 | 100% | 628 | 100% | 685 | 100% | 2.406 | BKPSDM |
| 3 | 1 | 3 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 497 | 88% | 97 | 90% | 97 | 92% | 97 | 92% | 788 | BKPSDM |
| 3 | 1 | 3 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 44 | BKPSDM |
| 3 | 1 | 3 | 4 | Program pembinaan ASN | Persentase ASN tertib administrasi kepegawaian | 50% | 85% | 765 | 90% | 845 | 95% | 707 | 100% | 670 | 100% | 2.987 | BKPSDM |
| 3 | 1 | 3 | 5 | Program pengembangan ASN | Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi | 46% | 66% | 10.083 | 75% | 9.140 | 85% | 9.029 | 90% | 9.495 | 100% | 37.746 | BKPSDM |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **11.876** |  | **10.666** |  | **10.472** |  | **10.958** |  | **43.971** |  |
| **3** | **1** | **4** |  | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 4 | 1 | Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah | Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbangan | 0 | 3 | 444 | 3 | 487 | 3 | 534 | 3 | 500 | 15 | 1.965 | BAPELITBANG |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **442** |  | **487** |  | **534** |  | **500** |  | **1.965** |  |
| **3** | **1** | **5** |  | **SEKRETARIAT DPRD** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 5 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 38.622 | 100% | 38.631 | 100% | 38.740 | 100% | 38.793 | 100% | 154.768 | SETWAN |
| 3 | 1 | 5 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 723 | 88% | 653 | 90% | 653 | 92% | 653 | 92% | 2.682 | SETWAN |
| 3 | 1 | 5 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 60 | SETWAN |
| 3 | 1 | 5 | 4 | Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | Persentase perda, Ranperda, reses, risalah dapat terlaksana | 80% | 90% | 7.049 | 90% | 7.651 | 90% | 8.253 | 90% | 8.855 | 90% | 31.808 | SETWAN |
| 3 | 1 | 5 | 5 | Program kerjasama informasi dan media massa | Jumlah pemberitaan melalui media cetak dan elektronik | 900 exp | 900 exp | 705 | 900 exp | 725 | 900 exp | 745 | 900 exp | 765 | 900 exp | 2.940 | SETWAN |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **47.114** |  | **47.675** |  | **48.406** |  | **49.081** |  | **192.276** |  |
| **3** | **1** | **6** |  | **SEKRETARIAT DAERAH** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 6 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 9.142 | 100% | 10.071 | 100% | 11.035 | 100% | 12.040 | 100% | 42.288 | BAGIAN UMUM |
| 3 | 1 | 6 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 661 | 88% | 695 | 90% | 845 | 92% | 1.045 | 92% | 3.246 | BAGIAN UMUM |
| 3 | 1 | 6 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 170 | 100% | 375 | 100% | 550 | 100% | 700 | 100% | 1.795 | BAGIAN KEUANGAN |
| 3 | 1 | 7 | 4 | Program Penguatan Akuntabilitas | Nilai LKPPD dan Nilai LKJIP Perangkat daerah di Kabupaten Tabanan. | -/CC | Baik/B | 528 | Sangat Baik/BB | 560 | Sangat Baik/BB | 605 | Sangat Baik/BB | 650 | Sangat Baik/BB | 2.343 | BAGIAN ORGANISASI |
| 3 | 1 | 7 | 5 | Program Penataan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah | Jumlah aset tanah pemerintah daerah yang bersertifikat an Pemkab Tabanan | 40 | 43 | 1.414 | 45 | 1.557 | 47 | 1.707 | 50 | 1.862 | 35 | 915 | BAGIAN TAPEM |
| 3 | 1 | 7 | 6 | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah/Lembaga Lainnya. | Jumlah Perjanjian Kerjasama Yang Diimplementasikan Dalam Setahun. | 15 Mou | 20 Mou | 310 | 20 Mou | 350 | 20 Mou | 375 | 100 Mou | 400 | 100 Mou | 1.435 | BAGIAN TAPEM |
| 3 | 1 | 7 | 7 | Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Persentase Kegiatan Pembangunan Infrastruktur yang dapat dilaksanakan sesuai target waktu dan tujuan program | 10% | 20% | 180 | 20% | 200 | 20% | 200 | 80% | 200 | 80% | 780 | BAGIAN PEMBANGUNAN |
| 3 | 1 | 7 | 8 | Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan | Persentase Konflik-Konflik Pertanahan yang dapat diselesaikan. | 0 | 20% | 50 | 20% | 50 | 20% | 50 | 20% | 50 | 20% | 200 | BAGIAN TAPEM |
| 3 | 1 | 7 | 9 | Program Pengendalian Pembangunan Ekonomi Daerah. | Jumlah Kebijakan KDH Dalam Rangka Pengendalian Inflasi dan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah. | 5 | 5 | 500 | 5 | 2.243 | 650 | 2.458 | 800 | 2.681 | 950 | 2.900 | BAGIAN EKONOMI |
| 3 | 1 | 7 | 10 | Penyelenggaraan Hari-Hari Besar/ Nasional/ Keagamaan. | Jumlah Aktifitas penyelenggaraan hari-hari besar/ nasional/ Keagamaan | 61 Keg | 61 Keg | 7.761 | 61 Keg | 850 | 61 Keg | 950 | 305 Keg | 1.000 | 305 Keg | 10.561 | BAGIAN KESRA, BAGIAN TAPEM |
| 3 | 1 | 7 | 11 | Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan | Persentase Penyebarluasan Informasi Kebijakan Kepala Daerah | 80% | 90% | 6.053 | 93% | 6.123 | 97% | 6.203 | 100% | 6.273 | 100% | 24.651 | BAGIAN HUMAS & PROTOKOL |
| 3 | 1 | 7 | 12 | Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan | Terselengaraanya Upacara/Acara-acara sesuai dengan standar keprotokolan yang berlaku | N.A | 90% | 365 | 93% | 385 | 97% | 405 | 100% | 425 | 100% | 1.580 | BAGIAN HUMAS & PROTOKOL |
| 3 | 1 | 7 | 13 | Program Pembinaan dan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah. | Jumlah permasalahan kelembagaan serta tugas dan fungsi yang diselesaikan | 0 | 20% | 725 | 20% | 825 | 20% | 825 | 100% | 925 | 100% | 3.300 | BAGIAN ORGANISASI |
| 3 | 1 | 7 | 14 | Program Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah daerah | Jumlah pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan | N.A | 250 Keg | 3.958 | 250 Keg | 4.725 | 250 Keg | 5.000 | 250 Keg | 5.250 | 250 Keg | 18.933 | BAGIAN PENGADAAN |
| 3 | 1 | 7 | 15 | Program Penataan dan Penyusunan Regulasi Daerah | Persentase penetapan Regulasi Daerah yang tepat waktu | 50% | 75% | 880 | 75% | 968 | 75% | 1.064 | 75% | 1.171 | 75% | 4.083 | BAGIAN HUKUM & HAM |
| 3 | 1 | 7 | 16 | Program Fasilitasi Masalah Hukum Daerah | Persentase Kasus yang difasilitasi Hingga Mempunyai Ketetapan Hukum. | 50% | 20% | 490 | 20% | 539 | 20% | 593 | 100% | 652 | 100% | 2.273 | BAGIAN HUKUM & HAM |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **31.983** |  | **27.600** |  | **29.735** |  | **31.965** |  | **121.283** |  |
| **3** | **1** | **8** |  | **INSPEKTORAT** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 8 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 1.605 | 100% | 2.445 | 100% | 3.321 | 100% | 4.122 | 100% | 11.493 | INSPEKTORAT |
| 3 | 1 | 8 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 300 | 88% | 450 | 90% | 600 | 92% | 750 | 92% | 2.100 | INSPEKTORAT |
| 3 | 1 | 8 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 18 | 100% | 27 | 100% | 36 | 100% | 45 | 100% | 126 | INSPEKTORAT |
| 3 | 1 | 8 | 4 | Program Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase penurunan jumlah OPD dengan temuan kerugian negara/daerah | 90% | 90% | 2.690 | 90% | 4.035 | 90% | 5.380 | 90% | 6.725 | 90% | 18.830 | INSPEKTORAT |
| 3 | 1 | 8 | 5 | Program Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Kinerja Daerah | Persentase peningkatan kinerja perangkat daerah dengan nilai LKJIP "A" | 90% | 90% | 3.407 | 90% | 5.261 | 90% | 7.214 | 90% | 9.267 | 90% | 25.149 | INSPEKTORAT |
| 3 | 1 | 8 |  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase ASN terkait dengan diklat teknis | 90% | 90% | 550 | 90% | 900 | 90% | 1.300 | 90% | 1.750 | 90% | 4.500 | INSPEKTORAT |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **8.020** |  | **12.218** |  | **16.551** |  | **20.909** |  | **57.698** |  |
| 3 | 1 | 9 |  | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 9 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 664 | 100% | 750 | 100% | 750 | 100% | 750 | 100% | 2.914 | BADAN KESBANGPOL |
| 3 | 1 | 9 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 54 | 88% | 150 | 90% | 150 | 92% | 150 | 92% | 504 | BADAN KESBANGPOL |
| 3 | 1 | 9 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 21 | 100% | 21 | 100% | 21 | 100% | 21 | 100% | 84 | BADAN KESBANGPOL |
| 3 | 1 | 9 | 4 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Persentase terkendalinya potensi konflik diwilayah Kabupaten Tabanan | 100% | 100% | 1.395 | 100% | 1.400 | 100% | 1.398 | 100% | 1.398 | 100% | 5.591 | BADAN KESBANGPOL |
| 3 | 1 | 9 | 5 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Jumlah generasi muda yang mendapatkan pembinaan wasbang | NA | 110 orang | 170 | 110 orang | 200 | 110 orang | 200 | 110 orang | 200 | 110 orang | 770 | BADAN KESBANGPOL |
| 3 | 1 | 9 | 6 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | Persentase pastisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu | 74% | 78% | 428 | 78% | 660 | 85% | 670 | 85% | 560 | 85% | 2.318 | BADAN KESBANGPOL |
| 3 | 1 | 9 | 7 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase ASN yang memperoleh Diklat terlatih | 0 | 100% | 85 | 100% | 120 | 100% | 120 | 100% | 120 | 100% | 445 | BADAN KESBANGPOL |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **2.817** |  | **3.301** |  | **3.309** |  | **3.199** |  | **12.626** |  |
| 3 | 1 | 10 |  | **PENANGGULANGAN BENCANA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 10 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 1.117 | 100% | 1.147 | 100% | 1.172 | 100% | 1.186 | 100% | 4.622 | BPBD |
| 3 | 1 | 10 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 150 | 88% | 3.150 | 90% | 150 | 92% | 150 | 92% | 3.600 | BPBD |
| 3 | 1 | 10 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 28 | BPBD |
| 3 | 1 | 10 | 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Aparatur dan relawan yanng memperoleh bitek/pelatihan | 60 orang | 31 Orang | 72 | - | - | 50 Orang | 100 | - | - | 141 | 172 | BPBD |
| 3 | 1 | 10 | 5 | Program Pencegahan dan Kesiap siagaan | Menurunnya Indeks Resiko Bencana | 174,40 | 164,40 | 421 | 159,40 | 1.750 | 154,40 | 1.885 | 149,40 | 1.560 | 149,40 | 5.586 | BPBD |
| 3 | 1 | 10 | 6 | Program Kedaruratan dan Logistik | Persentase Korban yang Mampu Tertangani Sesuai SOP | 100% | 100% | 503 | 100% | 650 | 100% | 572 | 100% | 594 | 100% | 2.318 | BPBD |
| 3 | 1 | 10 | 7 | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Persentase Korban yang di Rehabilitasi dan di Rekonstruksi Sesuai SOP | 100% | 100% | 60 | 100% | 120 | 100% | 70 | 100% | 70 | 100% | 320 | BPBD |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **2.329** |  | **6.824** |  | **3.926** |  | **3.567** |  | **16.645** |  |
| **3** | **1** | **11** |  | **KECAMATAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 11 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100% | 100% | 3.567 | 100% | 3.710 | 100% | 3.782 | 100% | 3.952 | 100% | 15.010 | KECAMATAN |
| 3 | 1 | 11 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung tugas dan fungsi PD | 80% | 86% | 1.120 | 88% | 350 | 90% | 150 | 92% | 350 | 92% | 1.376 | KECAMATAN |
| 3 | 1 | 11 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 120 | 100% | 150 | 100% | 140 | 100% | 140 | 100% | 550 | KECAMATAN |
| 3 | 1 | 11 | 4 | Program Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kecamatan | Persentase Kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik | 100% | 100% | 2.300 | 100% | 2.450 | 100% | 2.600 | 100% | 2.700 | 100% | 10.050 | KECAMATAN |
| 3 | 1 | 11 | 5 | Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan | Jenis Inovasi Pelayanan Publik | 100% | 6 | 4.500 | 9 | 4.725 | 12 | 4.961 | 15 | 5.209 | 15 | 19.396 | KECAMATAN |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **11.607** |  | **11.385** |  | **11.633** |  | **12.351** |  | **46.976** |  |
|  |  |  |  | **JUMLAH RENCANA BELANJA SESUAI KAPASITAS RIIL** | | | | **881.404** |  | **970.939** |  | **1.063.947** |  | **1.160.776** |  |  |  |

**Tabel 8.2**

**Indikasi Rencana Program Prioritas Tahun 2017 yang disertai Pendanaan dari APBD Kabupaten Tabanan**

| **KODE** | | | | **BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN** | **INDIKATOR KINERJA PROGRAM** | **KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)** | **CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN** | | **SKPD PENANGGUNGJAWAB** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TAHUN 2017** | |
| **(OUTCOME)** | **TARGET** | **JUTA Rp** |
| (1) | | | | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(7)** | **(8)** | **(17)** |
| **1** | ***1*** |  |  | ***URUSAN WAJIB*** |  |  |  |  |  |
| **1** | **1** | **1** |  | **PENDIDIKAN** |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 25.066 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 244 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 144 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 4 | Program peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar | Persentase jumlah sekolah dasar dengan penyelenggaraan pendidikan dalam kategori 'baik' | 0% | 18,35% | 38.347 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 5 | Program peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama | Persentase jumlah sekolah menengah pertama dengan penyelenggaraan pendidikan dalam kategori 'baik' | 0% | 13,95% | 28.543 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 6 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | persentase kelulusan UKG dengan kategori “baik” | 36,81% | 54,62% | 2.530 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 7 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase jumlah SD/MI yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 85,02% | 87,46% | 23.720 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 8 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase jumlah SMP/MTs yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 88,37% | 93,02% | 4.902 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 9 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | APK PAUD bagi pendidikan anak usia 4- 6 tahun | 77,22% | 77,31% | 7.907 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 10 | Program Pendidikan kesetaraan dan pendidikan keberlanjutan lainnya | peningkatan jumlah peserta pendidikan nonformal (pendidikan kesetaraan dan pendidikan keberlanjutan lainnya) | 717 Orang | 917 Orang | 1.581 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 11 | Program pendidikan karakter berbasis budaya | Persentase jumlah sekolah percontohan yang menerapkan pendidikan karakter dan penggalian potensi unggul anak | 4,59% | 48,92% | 3.163 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 12 | Program Pelayanan Manajemen Pendidikan | persentase sekolah yang mampu mengelola dana pendidikan dengan kategori 'baik' | 8,15% | 34,45% | 1.581 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 13 | Program Pendidikan Menengah | persentase capaian SPM pendidikan menengah | 0,00% | 14,71% | 45.858 | DISDIK |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **183.585** |  |
| 1 | 1 | 2 |  | **KESEHATAN** |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 1.394 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 3.318 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 291 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 4 | Program Peningkatan kesehatan ibu | Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup | 58,9 | 55 | 203 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 5 | Program peningkatan kesehatan anak | Angka kematian bayi dan balita per 1000 kelahiran hidup | 10,2 | 9 | 203 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 6 | Program peningakatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja | Cakupan Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) | 20% | 50% | 203 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 7 | Program peningkatan kesehatan lanjut usia | Persentase Lansia yang dilayani | 59% | 62% | 203 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | Program Pelayanan Kesehatan | Persentase jenis layanan kesehatan dasar yang mampu dilayani secara prima | 80% | 86% | 203 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 9 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Persentase balita gizi kurang | 4% | 4% | 1.015 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 10 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | Persentase penyakit menular yang ditangani | 100% | 100% | 1.015 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 11 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular | Persentase penyakit tidak menular yang ditangani | 100% | 100% | 1.015 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 12 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada B L U D Puskesmas | Persentase Puskesmas yang BLUD | 0 | 0 | 203 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 13 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase ketersediaan obat dan vaksin | 77% | 83% | 22.336 | DIKES DAN BRSUD |
| 1 | 1 | 2 | 14 | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Jumlah Puskesmas rawat inap yang berkualitas sesuai standar akreditasi | 0 | 5 | 8.122 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 15 | Program Pelayanan Kesehatan Rujukan | Persentase jenis layanan kesehatan rujukan yang mampu dilayani secara prima | 100% | 100% | 97.466 | DIKES DAN BRSUD |
| 1 | 1 | 2 | 16 | Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) | Jumlah SDM yang memenuhi standar jumlah dan kompetensi | 968 | 1.299 | 8.122 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 17 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM) | 1,50% | 4,50% | 4.061 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 18 | Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat | Persentase desa siaga yang aktif pratama | 60,15% | 65% | 8.122 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 19 | Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan Jaringannya | persentase puskesmas yang memiliki sapras sesuai standar | 0 | 40% | 10.153 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 20 | Program Pelayanan Kesehatan Keliling | Jumlah mobil keliling pelayanan kesehatan (mobil sehat) | 2 | 2 | 6.092 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 21 | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | Jumlah terbangunnya gedung rumah sakit (unit) | 2 | 5 | 24.367 | BRSUD |
| 1 | 1 | 2 | 22 | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Puskesmas | jumlah puskesmas yang memiliki sapras rawat inap | 5 unit | 0 | 9.747 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 23 | Program Peningkatan Manajemen Puskesmas | persentase jumlah puskesmas dengan indeks kepuasan pelanggan memuaskan | 10% | 40% | 203 | DIKES |
| 1 | 1 | 2 | 24 | Program Rumah Sakit Pendidikan | Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan | Tipe B Non Pendidikan | Tipe B Non Pendidikan | 1.523 | BRSUD |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **209.581** |  |
| **1** | **1** | **3** |  | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 19.587 | DPUPR |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 23.299 | DPUPR |
| 1 | 1 | 2 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 56 | DPUPR |
| 1 | 1 | 3 | 4 | Program Pembangunan Jalan baru kabupaten | Panjang Jalan baru yang dibangun Dalam Rangka Membuka Akses Wilayah | 0 Km | 17 km | 25.628 | DPUPR |
| 1 | 1 | 3 | 5 | Program Pembangunan Jembatan Baru | Jembatan dalam kondisi baik | 12 | 17 | 5.874 | DPUPR |
| 1 | 1 | 3 | 6 | Program Peningkatan Jalan di Kabupaten Tabanan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | 35% (302,229 km) | 62.32 % (139,894 km) | 22.518 | DPUPR |
| 1 | 1 | 3 | 7 | Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan | Panjang jalan kabupaten yang dapat dipelihara | 392.664 | 482.664 | 205.308 | DPUPR |
| 1 | 1 | 3 | 8 | Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan | Jumlah alat berat yang laik pakai | 13 | 13 | 2.534 | DPUPR |
| 1 | 1 | 3 | 9 | Program peningkatan sarana dan prasarana LPJU | Persentase desa dalam cakupan layanan lampu penerangan jalan | 42,90% | 77,68% | 6.911 | DPUPR |
| 1 | 1 | 3 | 10 | Program pembangunan infrastruktur perdesaan; | Persentase jalan desa dan jalan lingkungan dalam kondisi baik | 25% | 35% | 20.156 | DPUPR |
| 1 | 1 | 3 | 11 | Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum | Persentase peningkatan cakupan layanan air bersih perdesaan dan perkotaan | 68,41 % | 84,40% | 29.601 | DPUPR |
| 1 | 1 | 3 | 12 | Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah | Jumlah pusat pengolahan limbah komunal dan skala kawasan yang dapat dibangun pada area berrisiko sanitasi | 35 unit | 49 unit | 3.571 | DPUPR |
| 1 | 1 | 3 | 13 | Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong x | Tersedianya data Pelaksanaan Pengelolaan IPAL Komunal secara berkelanjutan, berkalan setiap tahun | 84.64 % | 88,78% | 3.801 | DPUPR |
| 1 | 1 | 3 | 14 | Program peningkatan Prasarana aparatur dan prasarana publik | Jumlah gedung pemerintah dan prasarana publik dalam kondisi baik | 63 Unit | 75 Unit | 28.795 | DPUPR |
| 1 | 1 | 3 | 15 | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | Tersedianya air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada | 1,2 ltr/det/Ha | 1,2 ltr/det/Ha | 34.554 | DPUPR |
| 1 | 1 | 3 | 16 | Program penyediaan dan pengolahan air | Jumlah debit air baku yang dikelola | Baru 10 lt/dt | 30 lt/dt | 115 | DPUPR |
| 1 | 1 | 3 | 17 | Program pembangunan embung/waduk/bendungan | Jumlah Bendungan yang terbangun | 1 Bendungan | 0 | 161 | DPUPR |
| 1 | 1 | 3 | 18 | Program Perencanaan Tata Ruang | Jumlah Dokumen yang memiliki legalitas Rencana Tata ruang | 1 Dok (RTRW Kab.Tabanan) | 4 Dok | 1.010 | DPUPR |
| 1 | 1 | 3 | 19 | Program Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang | Persentase luas kawasan yang dapat dipertahankan sesuai dengan arahan rencana pola ruang | 100% | 100% | 410 | DPUPR |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **433.889** |  |
| **1** | **1** | **4** |  | **PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 4 | 1 | Program peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh | berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | 30,87% | 77,80% | 1.078 | DPUPR |
| 1 | 1 | 4 | 2 | Program Stimulan Perumahan Swadaya | Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan stimulan rumah layak huni | 700 | 425 | 1.024 | DPUPR |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **2.102** |  |
| **1** | **1** | **5** |  | **KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 5 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 3.402 | BAKESBANG POLINMAS / SATPOL-PP / BPBD |
| 1 | 1 | 5 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 427 | BAKESBANG POLINMAS / SATPOL-PP / BPBD |
| 1 | 1 | 5 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 91 | BAKESBANG POLINMAS / SATPOL-PP / BPBD |
| 1 | 1 | 5 | 4 | Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan | Persentase terkendalinya potensi konflik diwilayah Kabupaten Tabanan | 100% | 100% | 1.790 | BAKESBANG POLINMAS |
| 1 | 1 | 5 | 5 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Persentase generasi muda yang mendapatkan pembinaan wasbang | 100% | 100% | 994 | BAKESBANG POLINMAS |
| 1 | 1 | 5 | 6 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | Persentase pastisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu | 74% | - | 994 | BAKESBANG POLINMAS |
| 1 | 1 | 5 | 7 | Program Pemeliharaan, Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Menurunnya Jumlah gangguan kantrantibmas | 1.015 | 1.003 | 696 | SATPOL-PP |
| 1 | 1 | 5 | 8 | Program Sumber Daya Aparatur | Peningkatkan kapasitas sumber daya aparatur | 237 | 162 | 298 | SATPOL-PP |
| 1 | 1 | 5 | 8 | Program Kesiapsiagaan Masyarakat | Jumlah Linmas Per Satuan Penduduk yang dilatih | 300 | 756 | 1.193 | SATPOL-PP |
| 1 | 1 | 5 | 9 | Program Pencegahan Dan Kesiap Siagaan | Jumlah SDM yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan bencana (Orang) | 5.000 | 7.000 | 2.983 | BPBD |
| 1 | 1 | 5 | 9 | Program Kedaruratan dan Logistik | Persentase Korban Yang Mampu Tertangani Sesuai SOP | 100% | 100% | 497 | BPBD |
| 1 | 1 | 5 | 10 | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Persentase Korban Yang di Rehabilitasi dan di Rekonstruksi Sesuai SOP | 100% | 100% | 497 | BPBD |
| 1 | 1 | 5 | 11 | Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | Presentase laporan kebakaran yang dapat ditangani sesuai SOP | 100% | 100% | 6.142 | BPBD |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **20.004** |  |
| **1** | **1** | **6** |  | **SOSIAL** |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 797 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 1 | 6 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 85 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 1 | 6 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 30 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 1 | 6 | 4 | Program Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin | Persentase Jumlah masyarakat miskin yang mendapat perlindungan dan pemberdayaan ekonomi | 30% | 40% | 276 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 1 | 6 | 5 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 49,62% | 52% | 1.921 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 1 | 6 | 6 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial | 76,98% | 80% | 552 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 1 | 6 | 7 | Program pembinaan anak terlantar | Persentase anak terlantar yang mendapat Pembinaan | 58,35% | 70% | 479 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 1 | 6 | 8 | Program pembinaan para penyandang Disabilitas dan trauma | Persentase penyandang Disabilitas fisik, mental, lanjut usia yang menerima jaminan sosial | 65,85% | 75% | 479 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 1 | 6 | 9 | Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo | Jumlah panti asuhan yang mendapat penanganan sosial | 6 PA | 6 PA | 479 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 1 | 6 | 10 | Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) | Persentase eks penyandang penyakit sosial yang terbina | 91,71 % dari 183 org | 100% dari 265 org | 240 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 1 | 6 | 11 | Pemberian santunan dan tunjangan kepada penderita Disabilitas permanen dan lanjut usia | Jumlah Penderita Disabilitas permanen yang tersantuni | 207 org | 335 org | 479 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 1 | 6 | 12 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Jumlah lembaga Kesejahteraan sosial yang diberdayakan | 10 TKSK | 10 TKSK | 615 | DINSOS PP&PA |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **6.434** |  |
| **1** | **2** |  |  | **URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **1** |  | **TENAGA KERJA** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 1 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 872 | DISNAKER |
| 1 | 2 | 1 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 85 | DISNAKER |
| 1 | 2 | 1 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 30 | DISNAKER |
| 1 | 2 | 1 | 4 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Terlaksananya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis masyarakat dan kompetensi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja sehingga tenaga kerja dapat terserap di pasar kerja maupun usaha mandiri | 100% | 100% | 4.088 | DISNAKER |
| 1 | 2 | 1 | 5 | Program peningkatan kesempatan kerja | Tersedianya kesempatan kerja bagi masyarakat pengangguran yang diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran | 100% | 100% | 409 | DISNAKER |
| 1 | 2 | 1 | 6 | Program Pengembangan hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Jumlah tenaga kerja kepesertaan BPJS | 100% | 100% | 736 | DISNAKER |
| 1 | 2 | 1 | 7 | Program Revitalisasi LLK | Persentase lulusan LLK yang terserap lapangan kerja dan kerja mandiri yang mengakibatkan angka pengangguran menurun | 25% | 100% | 2.943 | DISNAKER |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **9.164** |  |
| **1** | **2** | **2** |  | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 1 | Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | Jumlah organisasi perempuan dan anak aktif | 1 Organisasi | 5 | 974 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 2 | 2 | 2 | Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan | Prosentase Jumlah Perempuan yang menduduki jabatan di lembaga ekskutif dan legislatif | 30% | 34% | 81 | DINSOS PP&PA |
| 1 | 2 | 2 | 3 | Program peningkatan Mutu kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan | 11 Kasus | 31 | 568 | DINSOS PP&PA |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **1.624** |  |
| **1** | **2** | **3** |  | **PANGAN** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 1.123 | DINAS KP |
| 1 | 2 | 3 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 171 | DINAS KP |
| 1 | 2 | 3 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 61 | DINAS KP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan | Persentase desa yang memiliki ketersediaan pangan yang cukup (tidak dalam status rawan pangan) | 100% | 100% | 604 | DINAS KP |
| 1 | 2 | 3 | 5 | Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | Jumlah desa yang memiliki percontohan pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan sehat | 15 | 45 | 201 | DINAS KP |
| 1 | 2 | 3 | 6 | Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan | Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan | 50% | 70% | 81 | DINAS KP |
| 1 | 2 | 3 | 7 | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) | Persentase peningkatan kompetensi PPL | 20% | 10% | 60 | DINAS KP |
| 1 | 2 | 3 | 8 | Program Pengembangan Pertanian Organik | Luas lahan pertanian yang dikelola secara organik (tanpa memanfaatkan bahan kimia sistetis) | 850 Ha | 220 ha | 765 | DINAS KP |
| 1 | 2 | 3 | 9 | Program Peningkatan Kemandirian Benih/Bibit | Persentase kebutuhan benih/bibit (padi, kopi, sayuran, dan ikan) yang dapat dipenuhi dari petani Tabanan | 10% | 10% | 302 | DINAS KP |
| 2 | 1 | 3 | 9 | Program Pengembangan Industri Pedesaan | Persentase terbangun dan beroperasinya penyosohan beras skala besar dan pabrik pakan ternak | 0 | 25% | 328 | DINAS KP |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **3.696** |  |
| **1** | **2** | **4** |  | **PERTANAHAN** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan | Persentase Konflik-Konflik Pertanahan yang dapat diselesaikan. | 0 | 20% | 288 | BAGIAN TAPEM |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **288** |  |
| **1** | **2** | **5** |  | **LINGKUNGAN HIDUP** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 2.079 | DINAS LH |
| 1 | 2 | 5 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 171 | DINAS LH |
| 1 | 2 | 5 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 61 | DINAS LH |
| 1 | 2 | 5 | 4 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Rasio/persentase volume sampah yang mampu diangkut/diolah terhadap volume sampah yang ada | 90% | 90% | 10.772 | DINAS LH |
| 1 | 2 | 5 | 5 | Program Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat | Jumlah pengolahan persampahan berbasis masyarakat TPST 3R dan Bank sampah | TPST = 4 unit, Bank Sampah = 17 | 6 TPST, 22 Bank sampah | 1.915 | DINAS LH |
| 1 | 2 | 5 | 6 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Jumlah spot/titik taman, hutan dalam kondisi terpelihara | 11 taman dan 5 hutan | 11 taman dan 5 hutan | 3.591 | DINAS LH |
| 1 | 2 | 5 | 7 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan IPLT | Kapasitas tinja yang mampu ditanangani 0,76 ton/th | 987 m3/th | 1.184,4 m3/th | 3.591 | DINAS LH |
| 1 | 2 | 5 | 8 | Program Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Air | Persentase cakupan penghijauan rawan longsor dan sumber mata air | 0% | 20% | 718 | DINAS LH |
| 1 | 2 | 5 | 9 | Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup | Meningkatknya Peran Masyarakat Peduli Lingkungan | 100% | 100% | 718 | DINAS LH |
| 1 | 2 | 5 | 10 | Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Yang Berpotensi Merusak Lingkungan | Jumlah kasus hukum lingkungan yang tertangani | 5 Kasus yang tertangani | 10 Kasus | 479 | DINAS LH |
| 1 | 2 | 5 | 11 | Program Pengendalian Perusakan Lingkungan Hidup | Persentase cakupan pengawasan / Pengendalian terhadap kegiatan wajib dokumen lingkungan | 58% | 100% | 1.676 | DINAS LH |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **25.769** |  |
| **1** | **2** | **6** |  | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 6 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 1.510 | DISDUKCAPIL |
| 1 | 2 | 6 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 85 | DISDUKCAPIL |
| 1 | 2 | 6 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 30 | DISDUKCAPIL |
| 1 | 2 | 6 | 4 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan | 60% | 70% | 1.739 | DISDUKCAPIL |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **3.365** |  |
| **1** | **2** | **7** |  | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 7 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 868 | DINAS PMD |
| 1 | 2 | 7 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 85 | DINAS PMD |
| 1 | 2 | 7 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 30 | DINAS PMD |
| 1 | 2 | 7 | 4 | Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa | Jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat yang difasilitasi oleh BUMDes | 0 | 190 | 1.235 | DINAS PMD |
| 1 | 2 | 7 | 5 | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | Jumlah desa yang memiliki kapasitas aparatur pemerintah desa memadai | 133 desa | 133 desa | 2.691 | DINAS PMD |
| 1 | 2 | 7 | 6 | Program peningkatan pengelolaan pemerintahan Desa | Persentase Desa yang mendapatkan penilaian baik atas kinerja keuangan | N/A | 50% | 1.297 | DINAS PMD |
| 1 | 2 | 7 | 7 | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan | jumlah desa "berprestasi" minimal tingkat provinsi | 0 | 1 | 3.600 | DINAS PMD |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **9.808** |  |
| **1** | **2** | **8** |  | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 8 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 972 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB |
| 1 | 2 | 8 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 85 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB |
| 1 | 2 | 8 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 30 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB |
| 1 | 2 | 8 | 4 | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif (%) | 70,05% | 72,30% | 259 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB |
| 1 | 2 | 8 | 5 | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | Cakupan Pasangan Usia Subur menikah 21 tahun keatas (%) | 74,50% | 75,00% | 104 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB |
| 1 | 2 | 8 | 6 | Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB (%) | 87,10% | 88,90% | 156 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **1.606** |  |
| **1** | **2** | **9** |  | **PERHUBUNGAN** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 9 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 1.971 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 1 | 2 | 9 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 85 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 1 | 2 | 9 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 30 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 1 | 2 | 9 | 4 | Program Rehabilitasi terminal | Jumlah terminal dalam kondisi baik | 1 terminal | 2 terminal | 409 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 1 | 2 | 9 | 5 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perparkiran | Jumlah lokasi Terminal Parkir elektronik | 0 | 2 lokasi | 1.130 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 1 | 2 | 9 | 6 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Persentase Ruas Jalan Kabupaten yang Dilengkapi dengan Fasilitas Keselamatan | 19,54% (59/302) | 23,84% (72/302) | 7.597 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 1 | 2 | 9 | 7 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Persentase Fasilitas LLAJ Terpilihara | 60% | 70% | 144 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 1 | 2 | 9 | 8 | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Persentase kecamatan yang terlayani angkutan Trans Serasi | 5 Kecamatan | 7 Kecamatan | 10.338 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 1 | 2 | 9 | 9 | Program peningkatan sarana prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor | Jumlah Alat Uji sesuai Standar | 2 Unit | 7 Unit | 1.923 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 1 | 2 | 9 | 10 | Program peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | Persentase kendaraan yang melakukan laik uji terhadap kendaraan yang wajib uji | 94,22% (21,311/22.618) | 94,22% (21,311/22.618) | 361 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 1 | 2 | 9 | 11 | Pembangunan Sistem Manajemen LLAJ | Jumlah Sistem Manajemen yang Terbangun | 0 | 4 Paket | 962 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 1 | 2 | 9 | 12 | Program Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas | Frekuensi Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor | 24 kali | 28 kali | 1.178 | DINAS PERHUBUNGAN |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **26.129** |  |
| **1** | **2** | **10** |  | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 10 | 1 | Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi | Jumlah SKPD Terintegrasi Jaringan LAN dan WAN | Server Induk, FO, Perangkat Aktif, Bandwidth, 4 Bagian dan 5 SKPD Terintegrasi Jaingan | FO, Perangkat Aktif, Bandwidth, 5 Bagian dan 11 SKPD Terintegrasi | 2.530 | DINAS KOMINFO |
| 1 | 2 | 10 | 2 | Program Pengembangan e- government | Terbangunnya platform Smart Government Kabupaten Tabanan | 0 | 1 paket | 633 | DINAS KOMINFO |
| 1 | 2 | 10 | 3 | Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi | Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan | 0 | 16 orang | 791 | DINAS KOMINFO |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **3.953** |  |
| **1** | **2** | **11** |  | **KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 682 | DISKOP & UKM |
| 1 | 2 | 11 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 85 | DISKOP & UKM |
| 1 | 2 | 11 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 30 | DISKOP & UKM |
| 1 | 2 | 11 | 4 | Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif | Persentase UMKM yang mengalami Pertumbuhan | 60% | 67% | 247 | DISKOP & UKM |
| 1 | 2 | 11 | 5 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM | Jumlah IKM yang mampu mempromosikan produknya | 32 IKM | 34 IKM | 371 | DISKOP & UKM |
| 1 | 2 | 11 | 6 | Program Peningkatan SDM UMKM | Jumlah kelompok UMKM yang mampu meningkatkan omset penjualan | 0 | 60 Klp | 124 | DISKOP & UKM |
| 1 | 2 | 11 | 7 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Persentase Koperasi Sektor Rill Yang Berkualitas | 0,55% | 0,91% | 494 | DISKOP & UKM |
| 1 | 2 | 11 | 8 | Program Pembangunan Sarana Ekonomi Desa Adat | Persentase Gedung LPD dengan kondisi baik | 40% (123 LPD) | 40,7% (125 LPD) | 1.577 | DISKOP & UKM |
| 1 | 2 | 11 | 9 | Program Fasilitasi Pemasaran Produksi Petani dan UMKM | Jumlah kelompok usaha yang difasiltasi pemasaran produknya | 0 | 10 | 1.235 | DISPERINDAG |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **4.845** |  |
| **1** | **2** | **12** |  | **PENANAMAN MODAL** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 12 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 980 | DINAS PENANAMAN MODAL & PPTSP |
| 1 | 2 | 12 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 85 | DINAS PENANAMAN MODAL & PPTSP |
| 1 | 2 | 12 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 30 | DINAS PENANAMAN MODAL & PPTSP |
| 1 | 2 | 12 | 4 | Program peningkatan iklim investasi | Rasio Ijin Investasi Sektor Pertanian terhadap Jumlah Ijin Investasi | 2% | 2% | 1.419 | DINAS PENANAMAN MODAL & PPTSP |
| 1 | 2 | 12 | 5 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah) | 609,48 | 4.151,39 | 946 | DINAS PENANAMAN MODAL & PPTSP |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **3.461** |  |
| **1** | **2** | **13** |  | **KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 13 | 1 | Program Pembinaan Pemuda dan Pemasyarakatan Olahraga | rangking Kabupaten Tabanan dalam Porseni | 9 | 8 | 2.780 | DISDIK |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **2.780** |  |
| **1** | **2** | **14** |  | **STATISTIK** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 14 | 1 | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | persentase ketersediaan data dan informasi statistik daerah | 60% | 80% | 359 | DINAS KOMINFO |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **359** |  |
| **1** | **2** | **15** |  | **KEBUDAYAAN** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 15 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 1.203 | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 85 | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 30 | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 4 | Program Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah | Memperkuat Peran Desa Pakraman dalam Pelestarian Adat dan Tradisi | 379 lembaga adat | 953 | 1.577 | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 5 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Jumlah cagar budaya yang dilindungi | 20 | 30 | 788 | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 6 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Jumlah Kesenian Sakral yang dapat Dilestarikan | 85 jenis kesenian sakral | 87 jenis kesenian sakral | 788 | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 7 | Program Pengembangan Nilai Budaya | Jumlah kesenian tradisional khas tabanan yang dikembangkan | 5 | 0 | 4.730 | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 8 | Program revitalisasi sarana prasarana kesenian/budaya | Jumlah gedung kesenian dan taman kota yang terevitalisasi | 1 Gedung I Ketut Maria dan 1 Taman Kota | 0 | 3.153 | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 9 | Program pelestarian subak | Persentase alih fungsi luas lahan subak | N.A | Kurang dari 1 % | 1.021 | DISBUD |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **13.376** |  |
| **1** | **2** | **16** |  | **PERPUSTAKAAN** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 16 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 633 | DINAS PERSIP |
| 1 | 2 | 16 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 85 | DINAS PERSIP |
| 1 | 2 | 16 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 30 | DINAS PERSIP |
| 1 | 2 | 16 | 4 | Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan | persentase OPD dan Desa yang telah memiliki perpustakaan | 43% | 64% | 309 | DINAS PERSIP |
| 1 | 2 | 16 | 5 | Program Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan | Terciptanya administrasi perpustakaan dan meningkatnya budaya baca | 0% | 50% | 1.235 | DINAS PERSIP |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **2.293** |  |
| **1** | **2** | **17** |  | **KEARSIPAN** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 17 | 1 | Program Perbaikan sistem administrasi Kearsipan dan Dokumentasi | Persentase OPD dan Desa yang telah melaksanakan administrasi kearsipan berbasis IT | 0% | 100% | 72 | DINAS PERSIP |
| 1 | 2 | 17 | 2 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | Terkelolanya Administrasi Kearsipan di masing-masing OPD dan Desa | 0% | 22% | 72 | DINAS PERSIP |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **144** |  |
| 2 | 1 |  |  | **URUSAN PILIHAN** |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 |  | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 1.215 | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 85 | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 30 | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 4 | Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir | Tambahan penduduk desa pesisir yang mendapat peningkatan keterampilan usaha perikanan (orang) | 30 | 40 | 1.816 | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 5 | Program pengembangan budidaya perikanan | Tingkat produksi perikanan budidaya per tahun (Ton) | 2.931,8 | 4.132,0 | 1.816 | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 6 | Program pengembangan perikanan tangkap | Tingkat produksi perikanan tangkap per tahun (ton) | 717,0 | 738,7 | 1.816 | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 7 | Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | Tingkat Konsumsi ikan masyarakat / kapita / tahun | 29,3 | 30,3 | 908 | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 8 | program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan | Tambahan kelompok masyarakat pelestari sumberdaya hayati | 10 | 1 | 454 | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 9 | Program peningkatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat | Tambahan penduduk yang menjadi nelayan di kecamatan pesisir (orang) | 932 | 952 | 454 | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 10 | Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar | Tambahan produk unggulan daerah yang dikembangkan kawasan minapolitan | 1 | 1 | 1.816 | DISKAN |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **10.411** |  |
| **2** | **1** | **2** |  | **PARIWISATA** |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 1 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | jumlah obyek wisata dengan tingkat kunjungan minimal sebesar 300.000 per tahun | 3 obyek wisata (tanah lot, danau beratan, Kebun raya Eka Karya) | 5 | 163 | DISPAR |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Program Pengembangan Desa Wisata/ agrowisata | Jumlah POKDARWIS yang berperan dalam memajukan wisata | 6 | 8 | 163 | DISPAR |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **327** |  |
| **2** | **1** | **3** |  | **PERTANIAN** |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 2.071 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 171 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 61 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 4 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Persentase luas lahan pertanian yang menerima subsidi pupuk, benih dan saprodi | 60% | 50% | 5.189 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 5 | Program Peningkatan Produksi Padi | Angka produksi padi (ton) | 194.122 | 205.575 | 10.378 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 6 | Program Peningkatan Produksi Hortikultura | Angka produksi sayuran per tahun (kwintal) | 505.527 | 530.803 | 7.783 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 7 | Program Peningkatan Produksi Palawija | Angka produksi jagung (ton | 5.036 | 9.391 | 7.783 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 8 | Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian | Persentase peningkatan kelompok/subak binaan yang berhasil menjalin kemitraan bisnis dengan pengusaha | 5% | 10% | 3.113 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 9 | Program Peningkatan Produksi Perkebunan | Persentase produksi kopi, kakao, dan kelapa | 5% | 5% | 5.189 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 10 | Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan | Persentase kelompok/subak binaan yang mampu menghasilkan produk olahan dan menjalin kemitraan bisnis dengan pengusaha | 10% | 30% | 3.113 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 11 | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Persentase peningkatan produksi dan populasi ternak | 1,96% | 2% | 519 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 12 | Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan | Persentase kelompok yang mengolah dan memasarkan hasil ternak secara kontinyu | 16% | 3% | 778 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 13 | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Hewan | Persentase pelayanan kesehatan hewan | 70% | 5% | 363 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 14 | Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Petani | Jumlah kelompok/subak binaan yang berhasil membentuk usaha bersama (agribisnis) yang menguntungkan | 5 | 10 | 1.038 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 15 | Program Pengembangan Taman Teknologi Pertanian ( TTP) | Keberadaan TTP yang berfungsi sebagai kawasan pusat gelar produk, alih teknologi pertanian, dan agrowisata | 0 | 0 | 5.189 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 16 | Program pelestarian dan perlindungan Plasma Nuftah | Jumlah satwa/tanaman langka yang di konservasi | 1 | 2 | 1.038 | DISTAN |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **53.777** |  |
| **2** | **1** | **4** |  | **PERDAGANGAN** |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | **4** | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 824 | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | **4** | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 85 | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | **4** | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 30 | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | **4** | 4 | Program Pengamanan Perdagangan | Jumlah Komoditas Kebutuhan Pokok, Barang Penting dan Barang Strategis yang diawasi | 0 | 25% | 724 | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | **4** | 5 | Program Pelayanan Perlindungan Konsumen | Jumlah Pelayanan Tera/Tera Ulang per tahun | 5000 UTTP | 5000 UTTP | 362 | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | **4** | 6 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan | Presentase Sarana dan prasarana perdagangan yang legal dan representatif | 10% | 20% | 869 | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | **4** | 7 | Program Perlindungan Hasil Pertanian | Jumlah hasil pertanian yang mampu difasilitasi dalam distribusi dan pemasaran | 0 | 0 | 2.895 | DISPERINDAG |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **5.790** |  |
| **2** | **1** | **5** |  | **PERINDUSTRIAN** |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | **5** | 1 | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi | Nilai produksi IKM | 0 | 0 | 328 | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | **5** | 2 | Program Pengendalian Mutu Produksi Industri Kecil dan Menengah | Persentase IKM yang sudah menjalankan Gugus Kendali Mutu (GKM) | 50% | 55% | 438 | DISPERINDAG |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **766** |  |
| **2** | **1** | **6** |  | **TRANSMIGRASI** |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 6 | 1 | Program Transmigrasi Regional | Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan pada daerah tujuan transmigrasi | 100% | 100% | 467 | DISNAKER |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **467** |  |
| **3** | **1** |  |  | **FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | **1** |  | **PERENCANAAN** |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 1.067 | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 85 | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 30 | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 4 | Program Pengembangan data/informasi | Persentase kelengkapan data perencanaan dan data kinerja yang tersedia | 100% | 100% | 137 | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 5 | Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan daerah | Penurunan Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan | NA | 25% | 2.284 | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 6 | Program perencanaan dan pengendalian bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan | Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan | NA | 25% | 503 | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 7 | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Prasarana Wilayah dan tataruang | Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Prasarana Wilayah dan Tataruang | NA | 25% | 548 | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 8 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | prosentase SKPD yang telah melaksanakan Sakip sesuai peraturan perundangan | 60% | 70% | 548 | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 9 | Program Perencanaan Pembangunan Dan Pengendalian Bidang Ekonomi | Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang ekonomi | NA | 25% | 548 | BAPELITBANG |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **5.751** |  |
| **3** | **1** | **2** |  | **KEUANGAN** |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 2 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 1.818 | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 85 | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 30 | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 4 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah | Tingkat Realisasi Keuangan SKPD Per Triwulan. | 85,86% | 100% | 3.062 | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 5 | Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | Prosentase peningkatan target penerimaan PAD | 264.003,33 15% 39.844,13 | 13% 38.782,08 | 4.083 | BAKEUDA |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **4.996** |  |
| **3** | **1** | **3** |  | **KEPEGAWAIAN** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 772 | DINAS KEPEGAWAIAN DAERAH & PENGEMBANGAN SDM |
|  | 1 | 3 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 85 | DINAS KEPEGAWAIAN DAERAH & PENGEMBANGAN SDM |
|  | 1 | 3 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 30 | DINAS KEPEGAWAIAN DAERAH & PENGEMBANGAN SDM |
|  | 1 | 3 | 4 | Program pembinaan dan pengembangan aparatur | Jumlah pelanggar disiplin PNS | 5 | 3 | 719 | DINAS KEPEGAWAIAN DAERAH & PENGEMBANGAN SDM |
|  | 1 | 3 | 5 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah ASN yang Memperoleh Diklat" | 241 Orang | 489 | 2.874 | DINAS KEPEGAWAIAN DAERAH & PENGEMBANGAN SDM |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **4.482** |  |
| **3** | **1** | **4** |  | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 4 | 1 | Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah | Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbangan | 0 | 3 | 300 | BAPLITBANG |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | **5** |  | **SEKRETARIAT DPRD** |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 5 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 44.451 | SETWAN |
| 3 | 1 | 5 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 427 | SETWAN |
| 3 | 1 | 5 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 30 | SETWAN |
| 3 | 1 | 5 | 4 | Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | Persentase prolegda bidang prioritas daerah menjadi perda | 100% | 100% | 6.941 | SETWAN |
| 3 | 1 | 5 | 5 | Program kerjasama informasi dan media massa | Jumlah pemberitaan melalui media cetak dan elektronik | 900 exp | 903 exp | 765 | SETWAN |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **52.614** |  |
| **3** | **1** | **6** |  | **SEKRETARIAT DAERAH** |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 6 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 12.418 | BAG. UMUM |
| 3 | 1 | 6 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 8.283 | BAG. UMUM |
| 3 | 1 | 6 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 127 | BAG. UMUM |
| 3 | 1 | 6 | 4 | Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan | Persentase penyebarluasan informasi Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui media massa | 80% | 86% | 5.869 | BAG. HUMAS |
| 3 | 1 | 6 | 5 | Program Pembinaan dan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah. | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Sapras dan SDM yang proporsional | 0 | 20% | 462 | BAG. ORTAL |
| 3 | 1 | 6 | 6 | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah/Lembaga Lainnya. | Jumlah Perjanjian Kerjasama Yang Diimplementasikan Dalam Setahun. | 15 Mou | 20 Mou | 1.531 | BAG TAPEM |
| 3 | 1 | 6 | 7 | Program Fasilitasi Masalah Hukum Daerah | Persentase Kasus yang difasilitasi Hingga Mempunyai Ketetapan Hukum. | 50% | 20% | 638 | BAG. HK & HAM |
| 3 | 1 | 6 | 8 | Program Penataan dan Penyusunan Regulasi Daerah | Persentase penetapan Regulasi Daerah yang tepat waktu | 50% | 75% | 848 | BAG.HK & HAM |
| 3 | 1 | 6 | 9 | Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Persentase Kegiatan Pembangunan Infrastruktur yang dapat dilaksanakan sesuai target waktu dan tujuan program | 10% | 10% | 255 | BAG. EKBANG |
| 3 | 1 | 6 | 10 | Penyelenggaraan Hari-Hari Besar/ Nasional/ Keagamaan. | Jumlah Aktifitas penyelenggaraan hari-hari besar/ nasional/ Keagamaan | 61 Keg | 61 Keg | 6.889 | BAG. TAPEM & KESRA |
| 3 | 1 | 6 | 11 | Program Penguatan Akuntabilitas | Nilai EKPPD/Nilai LKjIP Setda. Kabupaten Tabanan. | -/CC | Baik/B | 893 | BAG. TAPEM & ORTAL |
| 3 | 1 | 6 | 12 | Program Pengendalian Pembangunan Ekonomi Daerah. | Jumlah Kebijakan KDH Dalam Rangka Pengendalian Inflasi dan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah. | 5 | 5 | 1.110 | BAG. EKBANG & SDA |
| 3 | 1 | 6 | 13 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). | Terbangunnya Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). | - | Ada | 1.021 | BAG. PERLENGKAPAN |
| 3 | 1 | 6 | 14 | Program Pengelolaan Barang Persediaan | Terbangunnya Sistem Pengelolaan Barang Persediaan. | - | Ada | 1.021 | BAG. PERLENGKAPAN |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **30.430** |  |
| **3** | **1** | **7** |  | **INSPEKTORAT** |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 7 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 979 | INSPEKTORAT |
| 3 | 1 | 7 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 85 | INSPEKTORAT |
| 3 | 1 | 7 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 30 | INSPEKTORAT |
|  | 1 | 7 | 4 | Program Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah | Prosentase Penurunan Jumlah OPD dengan Temuan Kerugian Negara / Daerah | 90% | 90% | 2.424 | INSPEKTORAT |
| 3 | 1 | 7 | 5 | Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas | Jumlah tenaga fungsional yang memiliki sertifikat auditor | 95% | 95% | 281 | INSPEKTORAT |
| 3 | 1 | 7 | 6 | Program penataan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | Tingkat Tercapainya Penyelenggaraan Kegiatan Pengawasan | 100% | 100% | 51 | INSPEKTORAT |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **3.850** |  |
| **3** | **1** | **8** |  | **KECAMATAN** |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 8 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 100% | 3.851 | KECAMATAN |
| 3 | 1 | 8 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 80% | 84% | 855 | KECAMATAN |
| 3 | 1 | 8 | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase serapan anggaran sesuai target | 100% | 100% | 304 | KECAMATAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | Program Koordinasi Dan Fasilitasi Pelayanan Kecamatan | Persentase Kegiatan Skpd yang Difasilitasi Katagori Baik | 100% | 100% | 1.786 | KECAMATAN |
| 3 | 1 | 8 | 5 | Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan | Jenis Inovasi Pelayanan Publik | 0 | 3 | 2.041 | KECAMATAN |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **8.838** |  |

**Tabel 8.3**

**Indikasi Rencana Program Prioritas Tahun 2016 yang disertai Pendanaan dari APBD Kabupaten Tabanan**

| **KODE** | | | **BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN** | **INDIKATOR KINERJA PROGRAM** | **KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)** | **CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN** | | **SKPD PENANGGUNGJAWAB** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TAHUN 2016** | |
| **(OUTCOME)** | **TARGET** | **JUTA Rp** |
| **(1)** | | | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(17)** |
| ***1*** |  |  | ***URUSAN WAJIB*** |  |  |  |  |  |
| *1* |  |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 114.741 | Seluruh SKPD |
| *1* |  |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Lancarnya Prasarana Administrasi Kantor | 90% | 90% | 47.448 | Seluruh SKPD |
| *1* |  |  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | persentase SKPD dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori “BAIK” | 75% | 75% | 2.832 | Seluruh SKPD |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **165.021** |  |
| **1** | **1** |  | **PENDIDIKAN** |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | persentase kelulusan UKG dengan kategori “baik” | 36,81% | 46,62% | 550 | DISDIK |
| 1 | 1 | 2 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | APK PAUD bagi pendidikan anak usia 4- 6 tahun | 77,22 | 80% | 7.194 | DISDIK |
| 1 | 1 | 3 | Program Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Angka Putus Sekolah (SD, SMP) | 0,01% | 0,01% | 71.370 | DISDIK |
| 1 | 1 | 4 | Program Pendidikan Menengah | Angka Putus Sekolah (SMA) | 0,03% | 0,03% | 37.387 | DISDIK |
| 1 | 1 | 5 | Program Pendidikan Non Formal | Persentase lulusan SMK, BLK dan Pendidikan Non Formal (Life Skill) yang terserap lapangan kerja/berwirausaha | 80% | 80% | 435 | DISDIK |
| 1 | 1 | 6 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Presentase sekolah (SMP dan SMA) terjangkau Jardiknas | 70% | 70% | 1.040 | DISDIK |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **117.976** |  |
| **1** | **2** |  | **KESEHATAN** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 1 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat \*) | Persentase Balita Gizi kurang | 4% | < 5% | 461 | DIKES |
| 1 | 2 | 2 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Jumlah Ketersediaan obat per kapita | 77% | Rp. 10.000,- | 98.268 | DIKES DAN BRSUD |
| 1 | 2 | 3 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase masyarakat yang mendapatkan akses air bersih yang memenuhi standar kesehatan | 68 | 100% | 175 | DIKES |
| 1 | 2 | 4 | Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat | Cakupan desa siaga aktif | 60,15% | 95% | 8.850 | DIKES |
| 1 | 2 | 5 | Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan Jaringannya | Jmlh Puskesmas /Pustu dan Poskesdes yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar | 0 | 12 | 13.254 | DIKES |
| 1 | 2 | 6 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase tempat-tempat umum (TTU) memenuhi standar kualitas sanitasi | 100% | 100% | 6.144 | DIKES |
| 1 | 2 | 7 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Rangka penemuan kasus TBC per 100.000 penduduk | >45 | >45 | 1.221 | DIKES |
| 1 | 2 | 8 | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Jumlah MOU dengan lembaga kompeten dalam rangka meningkatkan SDM dan mutu | 5 | 5 | 6.799 | DIKES |
| 1 | 2 | 9 | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran | <10 / 1000 | <10 / 1000 | 2.882 | DIKES |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **138.054** |  |
| **1** | **3** |  | **PEKERJAAN UMUM** |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 1 | Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan | Ketersediaan Data jalan sesuai Standar (SK 77) | 860.948 km | 860.948 km | 455 | DPU |
| 1 | 3 | 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan | Jumlah alat berat yang laik pakai | 6 | 6 | 5.200 | DPU |
| 1 | 3 | 3 | Program pembangunan infrastruktur perdesaan; | Persentase panjang jalan desa/jalan lingkungan berkondisi baik | 46,17 % (815,099 km) | 50% | 10.476 | DPU |
| 1 | 3 | 4 | Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | Drainase Dalam Kondisi Baik di Ibu Kota Kecamatan | 80% | 80 % | 1.400 | DPU |
| 1 | 3 | 5 | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | Persentase jaringan irigasi yang terehabilitasi dan terpelihara | 1,2 ltr/det/Ha | 42% | 12.352 | DPU |
| 1 | 3 | 6 | Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Persentase Jalan Kabupaten dan Jembatan Dalam Kondisi Baik | 54% jalan baik dan 90% jembatan baik | 54% jalan baik dan 90% jembatan baik | 114.606 | DPU |
| 1 | 3 | 7 | Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah | Persentase penduduk yang menikmati layanan air bersih | perkotaan 75% dan pedesaan 65% | perkotaan 75% dan pedesaan 65% | 6.484 | DPU |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **150.972** |  |
| **1** | **4** |  | **PERUMAHAN** |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 | 1 | Program Lingkungan Sehat Perumahan | Jumlah kawasan perumahan perkotaan yang tergenang pada musim hujan | 0 kawasan | 0 kawasan | 2.938 | DPU |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **2.938** |  |
| **1** | **5** |  | **PENATAAN RUANG** |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 | 1 | Program Perencanaan Tata Ruang | Jumlah kawasan strategis yang memiliki dokumen tata ruang | 1 Dokumen RTRW | 2 | 800 | DPU, BAPPEDA |
| 1 | 5 | 2 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Persentase luas kawasan yang dapat dipertahankan sesuai dengan arahan rencana pola ruang | 25% | 100% | 470 | DPU |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **1.270** |  |
| **1** | **6** |  | **PERENCANAAN PEMBANGUNAN** |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 | 1 | Program Pengembangan data/informasi | Ketersediaan data/informasi perencanaan berbasis web | Tersedia | Tersedia | 60 | Bappeda |
| 1 | 6 | 2 | Program perencanaan pembangunan daerah | Ketersediaan dokumen perencanaan wajib di tingkat pemerintah kabupaten dan di SKPD | NA | Tersedia sesuai standar | 3.478 | Bappeda |
| 1 | 6 | 3 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Jumlah survei/kajian ekonomi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan pembangunan | 5 | 5 | 525 | Bappeda |
| 1 | 6 | 4 | Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya | Jumlah kebijakan (public policy) yang didasarkan atas hasil survei/kajian akademis sosial budaya | 1 | 1 | 279 | Bappeda |
| 1 | 6 | 5 | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | Jumlah survei/kajian kebijakan prasarana wilayah dan sumberdaya alam yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan pembangunan | 5 | 5 | 200 | Bappeda |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **4.542** |  |
| **1** | **7** |  | **PERHUBUNGAN** |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 | 1 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik | 70 | 85% | 135 | DISHUBKOMINFO |
| 1 | 7 | 2 | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Persentase Sarana Penunjang Pelayanan Angkutan Terpenuhi | 5 kecamatan | 75% | 6.386 | DISHUBKOMINFO |
| 1 | 7 | 3 | Program peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | Persentase kendaraan yang melakukan laik uji terhadap kendaraan yang wajib uji | 100% | 100% | 323 | DISHUBKOMINFO |
| 1 | 7 | 4 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Persentase tingkat kecukupan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan terhadap kebutuhan | 80% | 80% | 1.654 | DISHUBKOMINFO |
| 1 | 7 | 5 | Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas | Persentase penurunan kasus kecelakaan lalu lintas dalam setahun | 80% | 80% | 1.631 | DISHUBKOMINFO |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **10.129** |  |
| **1** | **8** |  | **LINGKUNGAN HIDUP** |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 | 1 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Jumlah unit pengelolaan sampah mandiri | 8 desa (2 kec) | 10 | 10.266 | DKP |
| 1 | 8 | 2 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Persentase kasus pencemaran lingkungan yang ditangani secara tuntas | 5% | 5% | 1.334 | BLH |
| 1 | 8 | 3 | Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) | Luas taman kota di Kabupaten Tabanan | 2,025 ha (11 taman dan 5 hutan)) | 3,825 Ha | 1.914 | DKP, DISHUTBUN |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **13.515** |  |
| **1** | **9** |  | **PERTANAHAN** |  |  |  |  |  |
| 1 | 9 | 1 | Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | Jumlah aset tanah pemerintah daerah yang bersertifikat an. Pemkab Tabanan | 30 bidang tanah | 35 bidang | 1.278 | BAGIAN TAPEM, BAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASET |
| 1 | 9 | 2 | Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan | Jumlah permohonan penyelesaian pertanahan yang difasilitasi | 9 kasus | 10 | 65 | BAGIAN TAPEM |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **1.343** |  |
| **1** | **10** |  | **KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL** |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | 1 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Cakupan pelayanan E-KTP yang telah beroperasi secara optimal (kecamatan) | 10 kecamatan | 10 kecamatan | 871 | Disdukcapil |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **871** |  |
| **1** | **11** |  | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** |  |  |  |  |  |
| 1 | 11 | 1 | Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan | Persentase kelompok wanita yang dibina yang berhasil membangun usaha ekonomi secara berkelanjutan | 0 | 10% | 24 | BP3AKB |
| 1 | 11 | 2 | Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan | Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan | 0 | 0 | 739 | BP3AKB |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **763** |  |
| **1** | **12** |  | **KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA** |  |  |  |  |  |
| 1 | 12 | 1 | Program Keluarga Berencana | Persentase PUS menjadi peserta KB aktif | 70,05% | 80% | 989 | BP3AKB |
| 1 | 12 | 2 | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | Persentase wanita usia subur menikah 21 tahun ke atas | 74,50% | 75,00% | 25 | BP3AKB |
| 1 | 12 | 3 | Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga | Jumlah kelompok bina keluarga wanita yang mendapat peringkat juara di tingkat Provinsi dan Nasional | 87,10% | 2,00% | 118 | BP3AKB |
| 1 | 12 | 4 | Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat | Persentase anak balita yang mengalami gangguan tumbuh kembang | kurang dari 5% | kurang dari 5% | 1.125 | BP3AKB |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **2.256** |  |
| **1** | **13** |  | **SOSIAL** |  |  |  |  |  |
| 1 | 13 | 1 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. | Persentase PMKS (fakir miskin) yang mampu diberdayakan secara ekonomi | 49,62% | 55% | 2.160 | DINSOS |
| 1 | 13 | 2 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase PMKS yang mendapat penanganan | 76,98% | 70% | 912 | DINSOS |
| 1 | 13 | 3 | Program pembinaan anak terlantar | Persentase anak terlantar yang mendapat Pembinaan | 58,35% | 65% | 20 | DINSOS |
| 1 | 13 | 4 | Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) | Persentase eks penyandang penyakit sosial yang terbina | 91,71 % dari 183 org | 100% dari 265 org | 50 | DINSOS |
| 1 | 13 | 5 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Jumlah TKSK yang memenuhi tupoksi sesuai standar | 10 TKSK memenuhi tupoksi sesuai standar | 10 TKSK | 1.067 | DINSOS |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **4.209** |  |
| **1** | **14** |  | **KETENAGAKERJAAN** |  |  |  |  |  |
| 1 | 14 | 1 | Program peningkatan kesempatan kerja | Persentase pencari kerja yang terserap pasar kerja dalam setahun | 45,40% | 50,00% | 75 | DISNAKERTRANS |
| 1 | 14 | 2 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase pencari kerja yang terserap pasar kerja dalam setahun | 384 orang | 384 orang | 2.016 | DISNAKERTRANS |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **2.091** |  |
| **1** | **15** |  | **KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** |  |  |  |  |  |
| 1 | 15 | 1 | Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif | Persentase Pertumbuhan UMKM | 60% | 65% | 50 | DISKOP & UKM |
| 1 | 15 | 2 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Jumlah promosi produk usaha bagi KUMKM | 32 IKM | 12 event | 332 | DISKOP & UKM |
| 1 | 15 | 3 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Persentase koperasi sehat dan cukup sehat | 55% | 75% | 219 | DISKOP & UKM |
| 1 | 15 | 4 | Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah | Persentase peningkatan serapan tenaga kerja oleh KUMKM | 18% | 18% | 295 | DISKOP & UKM |
| 1 | 15 | 5 | Program Peningkatan Kopetensi SDM Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) | Jumlah Pengurus dan pengawas yang memahami tentang perkoperasian | 50 | 50 | 170 | DISKOP & UKM |
| 1 | 15 | 6 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Peningkatan pengetahuan tentang kredit perbankkan | 35 | 35 | 50 | DISKOP & UKM |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **1.117** |  |
| **1** | **16** |  | **PENANAMAN MODAL DAERAH** |  |  |  |  |  |
| 1 | 16 | 1 | Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi | nilai investasi PMA/PMDN | 4 kali | Rp. 111 Milyar | 200 | BPMPD |
| 1 | 16 | 2 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Lama penyelesaian perijinan investasi mulai dari pengambilan formulir sampai penyerahan ijin | Kura ng dari 1 bulan | Kurang dari 1 bulan | 683 | BPMPD |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **883** |  |
| **1** | **17** |  | **KEBUDAYAAN** |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 1 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Jumlah cagar budaya yang dilestarikan | 20 | 29 cagar budaya | 395 | DISBUDPAR |
| 1 | 17 | 2 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Jumlah Kesenian Sakral yang dapat Dilestarikan | 85 jenis kesenian sakral | 85 jenis kesenian sakral | 0 | DISBUDPAR |
| 1 | 17 | 3 | Program Pengembangan Nilai Budaya | Jumlah Pagelaran Seni Budaya | 30 | 13 Pagelaran | 7.725 | DISBUDPAR |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **8.120** |  |
| **1** | **18** |  | **PEMUDA DAN OLAH RAGA** |  |  |  |  |  |
| 1 | 18 | 1 | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | Rangking olahraga prestasi tingkat provinsi | 9 | Rangking 7 | 1.500 | DISDIK |
| 1 | 18 | 2 | Program peningkatan peran serta kepemudaan | Jumlah pemuda pelopor/berprestasi tingkat regional yang dihasilkan dari hasil pembinaan pemerintah daerah | 2 orang pemuda pelopor, dan 8 paskibra prov | 2 orang pemuda pelopor, dan 8 paskibra prov | 1.113 | DISDIK |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **2.613** |  |
| **1** | **19** |  | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI** |  |  |  |  |  |
| 1 | 19 | 1 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Persentase pengaduan terkait keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dapat tertangani | 100% | 100% | 405 | BAKESBANGPOLINMAS |
| 1 | 19 | 2 | Program pengembangan wawasan kebangsaan | Jumlah kasus konflik SARA dan adat yang terekspose di media masa | 350 Pemuda | 1 kasus | 3.884 | BAKESBANGPOLINMAS |
| 1 | 19 | 3 | Program pendidikan politik masyarakat | Persentase partisipasi penggunaan hak pilih dalam Pemilu | 100% | 85% | 125 | BAKESBANGPOLINMAS |
| 1 | 19 | 4 | Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan pencegahan Tindak Kriminal | Jumlah kasus terkait: Kantibmas dan Tindak Kriminal | 50 kasus dan 250 kali pengawasan | 50 kasus dan 250 kali pengawasan | 670 | BAKESBANGPOLINMAS |
| 1 | 19 | 5 | Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana | Persentase jumlah korban yang dapat ditangani | 100% | 100% | 1.611 | BAKESBANGPOLINMAS |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **6.694** |  |
| **1** | **20** |  | **OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAAH , KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN** |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 | 1 | Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | Jumlah perda yang berasal dari inisiatif DPRD | 81% | 1 | 5.957 | SETWAN |
| 1 | 20 | 2 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Jumlah dialog yang dilakukan kepala daerah dengan organisasi masyarakat / lembaga Pemerintah dalam rangka menemukan solusi terhadap permasalahan daerah yang menjadi polemic di masyarakat | 5 KALI | 12 kali per tahun | 876 | SETDA |
| 1 | 20 | 3 | Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Opini BPK | WTP | WTP | 3.543 | SETDA |
| 1 | 20 | 4 | Program penataan Peraturan perundang-undangan | Jumlah perda yang dihasilkan dari tahun 2010 s.d 2015 | Subak = 145 Subak abian = 113 | 4 | 2.377 | SETDA |
|  |  | 5 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah desa yang difasilitasi | 1,33 | 1,33 | 100 | KECAMATAN |
| 1 | 20 | 6 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Persentase PNS yang memenuhi kualifikasi pendidikan/pelatihan struktural yang dipersyaratkan | 100% | 100% | 5.062 | BKD |
| 1 | 20 | 7 | Program pembinaan dan pengembangan aparatur | Jumlah pelanggar disiplin PNS | 5 | 0 | 2.074 | BKD |
| 1 | 20 | 8 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | persentase SKPD dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori “BAIK” | 20% | 20% | 7.899 | BKD |
| 1 | 20 | 9 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Jumlah pelanggar disiplin PNS | 5 | 0 | 244 | BKD |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **28.131** |  |
| **1** | **21** |  | **KETAHANAN PANGAN** |  |  |  |  |  |
| 1 | 21 | 1 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan | Persentase desa yang memiliki status ketersediaan pangan (beras) dalam kategori cukup | 100% | 100% | 884 | KKP |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **884** |  |
| **1** | **22** |  | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** |  |  |  |  |  |
| 1 | 22 | 1 | Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin | Jumlah KK miskin yang mendapatkan pembinaan dan bantuan peningkatan ekonomi keluarga | 11624 KK | 11624 KK | 692 | BPMD |
| 1 | 22 | 2 | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | Jumlah desa dengan penilaian admnistrasi desa dalam katagori baik | 133 desa | 133 desa | 1.022 | BPMD |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **1.714** |  |
| **1** | **23** |  | **STATISTIK** |  |  |  |  |  |
| 1 | 23 | 1 | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | ketersediaan data dan informasi statistik daerah dengan unit analisis kecamatan | 60% | 80% | 575 | SKPD |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **575** |  |
| **1** | **25** |  | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** |  |  |  |  |  |
| 1 | 25 | 1 | Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa | Jumlah SKPD yang memiliki Web dengan update harian | 28 | 39 | 6.206 | DISHUBKOMINFO |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **6.206** |  |
| **1** | **26** |  | **PERPUSTAKAAN** |  |  |  |  |  |
| 1 | 26 | 1 | Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan | Tingkat kunjungan ke perpustakaan per tahun | 15 SD, SMP, SMA, Desa | 79.920 orang per tahun | 215 | PERSIP |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **215** |  |
| **2** |  |  | **URUSAN PILIHAN** |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 4.545 | Seluruh SKPD |
| 2 |  |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Lancarnya Prasarana Administrasi Kantor | 90% | 90% | 1.639 | Seluruh SKPD |
| 2 |  |  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | persentase SKPD dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori “BAIK” | 75% | 75% | 68 | Seluruh SKPD |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **6.252** |  |
| **2** | **1** |  | **PERTANIAN** |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Petani pelaku agribisnis | 60% | 30 org | 85 | DISTAN-TP |
| 2 | 1 | 2 | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Tingkat produksi: daging, telur, Pupuk organik | 4.780.100 | 35.960 ton 19.980 ton 6.590 ton | 736 | DISNAK |
| 2 | 1 | 3 | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | Persentase kejadian penyakit per populasi ternak | 3% | 3% | 265 | DISNAK |
| 2 | 1 | 4 | Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan | Jumlah lembaga pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan | 35 UUP | 35 UUP | 605 | DISTAN-TP |
| 2 | 1 | 5 | Program Peberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan | Persentase penyuluh dengan kualifikasi ahli | 100% | 100% | 2.744 | DISTAN-TP |
| 2 | 1 | 6 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | Jumlah kelompok tani yang memanfaatkan teknologi tepat guna on farm | 145 klmpk, 7 UUP kakao, 7 UUP kopi | 145 klmpk, 7 UUP kakao, 7 UUP kopi | 325 | DISTAN-TP |
| 2 | 1 | 7 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Jumlah produksi dan produktivitas pertanian/ perkebunan | 6400 ton kopi 2900 ton Kakao dan 236.800 ton gabah | 6400 ton kopi 2900 ton Kakao dan 236.800 ton gabah | 6.538 | DISTAN-TP |
| 2 | 1 | 8 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan | Persentase kelompok ternak yang mengadopsi teknologi tepat guna | 17.34% | 17.34% | 50 | DISNAK |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **11.348** |  |
| **2** | **2** |  | **KEHUTANAN** |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 1 | Program rehabilitasi hutan dan lahan | luas lahan potensial kritis diluar kawasan hutan | Berkurang 3500 ha | Berkurang 3500 ha | 691 | DISHUTBUN |
| 2 | 2 | 2 | program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan | Jumlah kasus gangguan fungsi hutan | 12 kasus | 12 kasus | 215 | DISHUTBUN |
| 2 | 2 | 3 | program pemanfaatan potensi sumber daya hutan | meningkatnya nilai komoditi kehutanan | 2 kecamatan | 2 kecamatan | 0 | DISHUTBUN |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **906** |  |
| **2** | **3** |  | **PARIWISATA** |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 1 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Tingkat Kunjungan ke daya tarik wisata | 4.000.000 | 4.580.716 orang | 418 | DISHUTBUN |
| 2 | 3 | 2 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Jumlah desa wisata yang telah berkembang (pariwisata) | 2 desa wisata (Pinge dan Jatiluwih) | 7 desa wisata (pinge, Jatiluwih, beraban, Belimbing, Tista, Kukuh, Candi kuning) | 260 | DISBUDPAR |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **678** |  |
| **2** | **4** |  | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 1 | Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir | Persentase penduduk desa pesisir sebagai pelaku usaha perikanan | 30 | 5% | 24 | DISKANLA |
| 2 | 4 | 2 | Program pengembangan perikanan tangkap | Tingkat produksi perikanan tangkap per tahun | 717,0 | 961.8 | 255 | DISKANLA |
| 2 | 4 | 3 | Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | Tingkat produksi aneka olahan hasil perikanan | 29,3 | 1.719 | 1.033 | DISKANLA |
| 2 | 4 | 4 | program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan | Jumlah kelompok masyarakat pengawas pelestari sumber daya kelautan di desa pesisir | 10,0 | 8 | 330 | DISKANLA |
| 2 | 4 | 5 | Program peningkatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat | jumlah penduduk yang menjadi nelayan di kecamatan pesisir | 6 desa | 6 desa | 50 | DISKANLA |
| 2 | 4 | 6 | program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar | jumlah produk unggulan daerah yang dikembangkan kawasan minapolitan | 1 produk unggulan | 1 produk unggulan | 539 | DISKANLA |
| 2 | 4 | 7 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Tingkat produksi perikanan budidaya per tahun | 4730 ton | 4730 ton | 277 | DISKANLA |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **2.508** |  |
| **2** | **5** |  | **PERDAGANGAN** |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Jumlah kasus/ keluhan terhadap alat ukur takar timbang perlengkapannya (UTTP) dan peredaran barang yang tidak sesuai dengan peraturan perlindungan konsumen | 5000 UTTP | 5 kasus | 1.453 | DISPERINDAG |
| 2 | 5 | 2 | Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan | Jumlah pedagang kaki lima yang di bina | 2 | 2 | 510 | BPMD |
| 2 | 5 | 3 | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | Nilai ekspor (USD); Jumlah eksportir | 25 EKSPORTIR  62 M | 8.800 USD; 25 exportir | 110 | DISPERINDAG |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **2.073** |  |
| **2** | **6** |  | **PERINDUSTRIAN** |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 | 1 | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Persentase IKM yang sudah menjalankan Gugus Kendali Mutu (GKM) | 2 GKM | 2 GKM | 734 | DISPERINDAG |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **734** |  |
| **2** | **7** |  | **TRANSMIGRASI** |  |  |  |  |  |
| 2 | 7 | 1 | Program transmigrasi regional | Jumlah calon transmigrasi (KK) yang ditempatkan pada daerah tujuan transmigrasi | 100 KK | 100 KK | 237 | DISNAKERTRANS |
| 2 | 7 | 2 | ProgramPengembangan Wilayah Transmigrasi | Jumlah calon transmigrasi (KK) yang berhasil ditempatkan pada daerah tujuan transmigrasi | 100 KK | 100 KK | 20 | DISNAKERTRANS |
|  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **257** |  |

bab VIII

**INDIKASI RECANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAANNYA**

Untuk mencapai sasaran maupun indikator sasaran yang telah ditetapkan dan akan menjadi IKU lakip kabupaten, maka target tersebut akan dicapai oleh OPD penanggung jawab dalam bentuk program-program yang akan dilaksanakan setiap tahun. Masing-masing program juga akan disertai dengan indikator program sehingga hasil yang dicapai lebih mudah terukur dan menuju pada hasil akhir tahun RPJMD ini.

Untuk kebijakan pendanaan, digunakan dasar analisis kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada Bab III, yaitu pendanaan untuk program prioritas belanja langsung kegiatan lainnya berasal dari sisa pagu total belanja langsung dikurangi kebutuhan belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Selengkapnya indikasi rencana program priorias lainnya untuk RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2021 dan kebutuhan pendanaannya disajikan pada Tabel 8.1 , Tabel 8.2, Tabel 8.3 di bawah ini.

**BAB IX**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2016-2021 yang telah direncanakan.Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang pada prinsipnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan mayarakat dengan peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Sebagai alat ukur, indikator tentunya mampu menggambarkan kemajuan daerah dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, selain itu indikator merupakan data dan informasi untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatandini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendaliandan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

lndikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Sesuai dengan tujuan otonomi daerah terdapat tiga aspek yang dapat diukur dengan indikator-indikator kinerja yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum.

1. **Kesejahteraan Masyarakat**

Desentralisasi merupakan usaha yang dianggap mampu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan desentralisasi didesain untuk menciptakan empowering welfare artinya kesejahteraan harus dikaitkan dengan proses pemberdayaan melalui pengembangan kapasitas dan potensi seluruh anggota masyarakat. Menurut UNDP (2001), pengembangan manusia sebagai aktor pembangunan harus didasarkan pada empat elemen kunci yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan dan pemberdayaan. Dengan model pemberdayaan (*empoweringwelfare*), maka peningkatan kesejahteraan dapat diukur melalui pendekatan materi dan non materi yang diterjemahkan dalam 3 (tiga) kelompok indikator antara lain : 1). Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; 2) Kesejahteraan Sosial; 3) seni budaya dan olahraga.

1. **Penetapan Indikator Kinerja Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat diukur beberapa bidang yang memiliki esensi bagi pengembangan harkat dan martabat manusia sebagai aktor dalam sistem ekonomi, sistem politik, sistem budaya dan keagamaan, sistem sosial dan sistem lingkungan hidup. Dalam pengukuran aspek kesejahteraan masyarakat dapat digunakan indikator seperti pada tabel berikut :

1. **Penetapan Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum/Publik**

Otonomi daerah memberikan peluang untuk terpenuhinya pelayanan minimal di daerah. Kewenangan yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi daerah akan mendekatkan pelayanan tersebut kepada masyarakat. dengan demikian diharapkan aspirasi masyarakat lebih terakomodir sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan umum.

1. **Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah berkaitan dengan urusan pilihan pemerintah daerah. Secara umum, Daya Saing Daerah dapat diukur antara lain dari: tingkat daya saing industri, sumber daya alam, sumber daya manusia, produk unggulan, efisensi pelayanan birokrasi, efisiensi perdagangan, ketersediaan infrasruktur, keamanan, potensi pasar, kepastian hukum dan sebagainya. Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah.Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan Indikator Kinerja ke tiga aspek tersebut disajikan pada Tabel 9.1 berikut ;

**Tabel 9.1**

**Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah**

**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tabanan**

| **No.** | **ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH** | **Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD** | | **Target Capaian Setiap Tahun** | | | | | | | | | | | | | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | | **2016** | **2017** | | **2018** | | | | **2019** | | | **2020** | | | |
| **A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan PDRB | 6,15 | | 6,25 | 6,45 | | 6,55 | | | | 6,7 | | | 6,8 | | | | 7.00 | |
| 2 | Laju Inflasi | 2,75 | | 2,75 | 2,75 | | 2,75 | | | | 2,75 | | | 3,75 | | | | 2,75 | |
| 3 | PDRB Perkapita Harga Berlaku (Jt/th) | 38,76 | | 40,12 | 45,00 | | 50,00 | | | | 55,00 | | | 60,00 | | | | 60,00 | |
| 4 | Indeks Gini | 0,34 | | 0,33 | 0,30 | | 0,28 | | | | 0,25 | | | 0,19 | | | | 0,1 | |
| 5 | Persentase Penduduk Miskin | 5,61 | | 5,61 | 5,50 | | 5,25 | | | | 5,00 | | | 4,75 | | | | 4,50 | |
| 6 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 73,54 | | 73,77 | 74,84 | | 76,01 | | | | 77,01 | | | 78,01 | | | | 79,01 | |
| 7 | Angka Kriminalitas ( Jumlah Kasu / 10.000 Penduduk) | 3.00 | | 3.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | 2.00 | | | 2.00 | | | | 2.00 | |
| **B. Urusan Wajib Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B1.** | **Urusan Pendidikan** |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 1 | Angka Melek Huruf | 96,00 | | 96,10 | | 96,15 | | | 96,15 | | | 96,10 | | | 96,10 | | 96,10 | | |
| 2 | Angka Rata – rata Lama Sekolah | 8,40 | | 8,40 | | 8,45 | | | 8,50 | | | 8,55 | | | 8,60 | | 9 | | |
| 3 | Angka Partisipasi Kasar |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| a. | SD/MI/Paket A | 105,08 | | 105,30 | | 105,70 | | | 106,00 | | | 106,10 | | | 106,10 | | 106,10 | | |
| b. | SMP/MTs/Paket B | 104,76 | | 105,00 | | 105,10 | | | 105,40 | | | 105,60 | | | 105,80 | | 105,80 | | |
| C | SMA/SMK/MA/Paket c | 89,76 | | 89,95 | | 90.00 | | | 90,10 | | | 90,10 | | | 90,30 | | 90,30 | | |
| 4 | Angka Kelulusan |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| a. | SD/MI/Paket A | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | |
| b. | SMP/MTs/Paket B | 99,98 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | |
| C | SMA/SMK/MA/Paket c | 99,97 | | 100.00 | | 100.00 | | | 100.00 | | | 100.00 | | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 5 | Angka Partisipasi Murni |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| a. | SD/MI/Paket A | 91,09 | | 91,10 | | 91,10 | | | 91,30 | | | 91,40 | | | 91,50 | | 91,50 | | |
| b | SMP/MTs/Paket B | 77,05 | | 77,10 | | 77,10 | | | 77,30 | | | 77,40 | | | 77,50 | | 77,50 | | |
| C | SMA/SMK/MA/Paket c | 60,17 | | 60,10 | | 60,30 | | | 60,40 | | | 60,50 | | | 60,60 | | 60,60 | | |
| **Pendidikan Dasar** | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 1 | Angka Partisipasi Sekolah | 94,41 | | 94,41 | | 97,50 | | | 98,50 | | | 99,40 | | | 100,0 | | **100,0** | | |
| 2 | Ratio Ketersediaan (Sek/10.000 pddk) | 2,5 | | 2,5 | | 3 | | | 3.00 | | | 3,5 | | | 3,5 | | 3,5 | | |
| 3 | Rasio Guru terhadap murid | 1:14 | | 1:14 | | 1:14 | | | 1:13 | | | 1:13 | | | 1:12 | | 1:12 | | |
| 4 | Rasio Guru terhadap murid per kelas rata-rata (Guru/Kls/10.000 pddk) | 1:35 | | 1:35 | | 1:35 | | | 1:35 | | | 1:35 | | | 1:35 | | 1:35 | | |
| **Pendidikan Menengah** | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 1 | Angka Partisipasi Sekolah | 65,50 | | 65,50 | | 69,00 | | | 74,50 | | | 78,50 | | | 85,00 | | 85,00 | | |
| 2 | Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah( Sek/10.000 pddk) | 0,50 | | 0,50 | | 0,50 | | | 1.00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | |
| 3 | Rasio guru terhadap murid (Guru/Murid) | 1:10 | | 1:10 | | 1:10 | | | 1:10 | | | 1,90 | | | 1,90 | | 1,90 | | |
| 4 | Rasio guru terhadap murid per kelas rata – rata (Guru/kls/10.000 pddk) | 1:35 | | 1:35 | | 1:35 | | | 1:35 | | | 1:35 | | | 1:35 | | 1:35 | | |
| 5 | Penduduk yang berusia lebih dari 15 Tahun Melek huruf (%) | 98,00 | | 98,00 | | 98,15 | | | 98,70 | | | 99,10 | | | 99,50 | | 99,50 | | |
| **Fasilitas Pendidikan** | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 1. | Persentase Lembaga Pendidikan non formal yang telah memenuhi SPM | 55,00 | | 60,00 | | 70,00 | | | 75,00 | | | 80,00 | | | 85,00 | | 90,00 | | |
| 2. | Sekolah Pendidikan SD/Mi kondisi bangunan baik (%) | 76,00 | | 76,00 | | 85,00 | | | 93,00 | | | 98,00 | | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 3. | Sekolah Pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA kondisi baik | 85,00 | | 85,00 | | 90,00 | | | 95,00 | | | 98,00 | | | 100,00 | | 100,00 | | |
| **Pendidikan Usia Dini** | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 1 | Pendidikan Usia Dini | 50,55 | | 50,55 | | 53,42 | | | 56,44 | | | 59,45 | | | 62,40 | | 62,40 | | |
| **Angka Putus Sekolah** | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 1 | Angka Putus Sekolah (APS)SD/MI(%) | 0,02 | | 0,02 | | 0,01 | | | 0,01 | | | 0,01 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | 0,04 | | 0,04 | | 0,03 | | | 0,02 | | | 0,01 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | Angka Putus Sekolah (APS)SMA/SMA/SM/MA | 0,10 | | 0,10 | | 0,06 | | | 0,05 | | | 0,04 | | | 0,01 | | 0,01 | | |
| **Angka Kelulusan** | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 1 | Angka Kelulusan SD/MI (%) | 99,00% | | 99,00% | | 99,40 | | | 99,60% | | | 99,70 | | | 100.00% | | 100.00% | | |
| 2 | Angka Kelulusan SMP/MTs (%) | 99,00% | | 99,00% | | 99,40 | | | 99,60% | | | 99,70 | | | 100,00% | | 100,00% | | |
| 3 | Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%) | 99,98% | | 99,98% | | 99,98 | | | 99,99% | | | 99,99 | | | 100,00% | | 100,00% | | |
| 4 | Angka Melanjutkan SD/MI (%) | 99,06% | | 99,06% | | 99,25 | | | 99,40% | | | 99,65 | | | 100,00% | | 100,00% | | |
| 5 | Angka Melanjutkan SMP/MTs (%) | 78,60% | | 78,60% | | 79,60 | | | 79,80% | | | 79,90 | | | 80,00% | | 80,00% | | |
| 6 | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV (%) | 75,00% | | 75,00% | | 76,00 | | | 77,00% | | | 78,00 | | | 80,00% | | 80,00% | | |
| **B.2Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pencapaian BOR BRSUD Tabanan sesuai Standar | 89,08% | 100,00% | | | 80,00 % | | | 80,00 % | | | | 80,00 % | | | 80,00 % | | | 80,00 % |
| 2 | Tingkat Akreditasi Pelayanan BRSUD Tabanan | paripurna | Pari purna | | | Pari purna | | | Pari purna | | | | Pari purna | | | Pari purna | | | paripurna |
| 3 | Persentasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terakreditasi | 0,00% | 0,00% | | | 10,00% | | | 25,00% | | | | 50,00% | | | 75,00% | | | 100,00% |
| 4 | Rasio Posyandu per Satuan Balita ( Bh/10.000) | 12.00 | 12.00 | | | 13.00 | | | 13.00 | | | | 13.00 | | | 13.00 | | | 13.00 |
| 5 | Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk | 2.00 | 2.00 | | | 3.00 | | | 3.00 | | | | 3.00 | | | 3.00 | | | 3.00 |
| 6 | Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk | 0,01 | 0,01 | | | 0,01 | | | 0,01 | | | | 0,01 | | | 0,01 | | | 0,01 |
| 7 | Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (Bh/10.000) | 2,00 | 2,00 | | | 3,00 | | | 3,00 | | | | 3,00 | | | 3,00 | | | 3,00 |
| 8 | Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | | | 5.00 | | | | 5.00 | | | 5.00 | | | 5.00 |
| 9 | Meningkatnya Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%) | 90.00 | 90.00 | | | 92.00 | | | 92.00 | | | | 94.00 | | | 95.00 | | | 95.00 |
| 10 | Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebinaan (%) | 40 | 40 | | | 50 | | | 60 | | | | 70 | | | 80 | | | 80 |
| 11 | Cakupan Desa Kelurahan UCI (%) | 92 | 92 | | | 94 | | | 96 | | | | 98 | | | 100 | | | 100 |
| 12 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan (%) | 100 | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | 100 |
| 13 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%) | 100 | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | 100 |
| 14 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit BDB (%) | 100 | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | 100 |
| 15 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%) | 100 | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | 100 |
| 16 | Cakupan Kunjungan Bayi (%) | 90,80% | 90,80% | | | 91,00% | | | 91,50% | | | | 92,00% | | | 92,00% | | | 92,00% |
| 17 | Meningkatnya Cakupan Rawat Jalan Puskesmas (%) | 90% | 90% | | | 92% | | | 92% | | | | 94% | | | 95% | | | 95% |
| 18 | Meningkatnya Cakupan Rawat Inap Puskesmas (%) | 20% | 20% | | | 20% | | | 30% | | | | 40% | | | 50% | | | 50% |
| **B.3Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rasio Tempat Ibadah (Bh/1.000 Penduduk) | 4 | 4 | | | 4 | | | 4 | | | | 5 | | | 5 | | | 5 |
| 2 | Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) (Ton/1.000 Orang | 0,2 | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,2 |
| 3 | Penyusunan Norma, Standar Pedoman dan Manual (NSPM) Buah | 2 | 2 | | | 4 | | | 6 | | | | 8 | | | 10 | | | 10 |
| 4 | Rasio Pemukiman Layak Huni ( M2 / KM2) | 10 | 10 | | | 10 | | | 10 | | | | 10 | | | 10 | | | 10 |
| 5 | Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (%) | 30 | 30 | | | 35 | | | 40 | | | | 45 | | | 45 | | | 45 |
| 6 | Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan (%) | 5 | 5 | | | 10 | | | 12 | | | | 15 | | | 20 | | | 20 |
| 7 | Jumlah Kawasan Strategis yang mampu berkembang | 9 kwsn | 9 kwsn | | | 21 Kwsn | | | 25 kwsn | | | | 30 kwsn | | | 30 kwsn | | | 30 kwsn |
| 8 | Ketahatan terhadap RTRW (%) | 70 | 72 | | | 74 | | | 76 | | | | 78 | | | 80 | | | 80 |
| 9 | Luas Wilayah Produktif (%) | 80 | 80 | | | 80 | | | 80 | | | | 80 | | | 80 | | | 80 |
| 10 | Luas Wilayah Industri (%) | 30 | 30 | | | 30 | | | 30 | | | | 30 | | | 30 | | | 30 |
| 11 | Luas Wilayah Kebanjiran (%) | 5 | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | | 5 | | | 5 |
| 12 | Luas Wilayah Kekeringan (%) | 5 | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | | 5 | | | 5 |
| 13 | Luas Wilayah Perkotaan (%) | 10 | 10 | | | 10 | | | 10 | | | | 10 | | | 10 | | |  |
| 14 | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap kondisi sarana prasarana Infrastruktur jalan yang menghubungkan Pusat Pusat Pertumbuhan | N/A | N/A | | | Sedang | | | Sedang | | | | Sedang | | | Sedang | | | Tinggi |
| 15 | Proporsi Panjang Jaringan jalan dalam kondisi baik (%) | 24 | 24 | | | 39 | | | 53 | | | | 73 | | | 92 | | | 92 |
| 16 | Panjang Jalan dilalui Roda Empat (KM per orang) | 200 | 200 | | | 210 | | | 220 | | | | 230 | | | 240 | | | 240 |
| 17 | Jalan Penghubung Kabupaten dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman (KM) Penduduk (Minimal dilalui roda Empat | 100,36 | 100,36 | | | 100,3 | | | 100,36 | | | | 100,36 | | | 100,36 | | | 100,36 |
| 18 | Jumlah Aset Irigasi (DI) | 15 | 15 | | | 37 | | | 37 | | | | 37 | | | 37 | | | 37 |
| 19 | Jumlah Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%) | 80 | 80 | | | 85 | | | 85 | | | | 86 | | | 87 | | | 87 |
| **B.4Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat Pencapaian Komponen komponen SPM Bidang Keciptakaryaan | 9 SPM belum tercapai sesuai target | | 9 SPM belum tercapai sesuai target | | 9 SPM belum tercapai sesuai target | | 9 SPM sudah mencapai target | | 9 SPM sudah mencapai target | | | | 9 SPM sudah mencapai target | | | 9 SPM sudah mencapai target | | |
| 2 | Rumah Tangga pengguna air bersih (%) | 40 | | 40 | | 50 | | 60 | | 60 | | | | 70 | | | 70 | | |
| 3 | Rumah Tangga pengguna Listrik (%) | 40 | | 40 | | 45 | | 56 | | 57 | | | | 60 | | | 60 | | |
| 4 | Rumah Tangga bersanitasi (Bh/1000 Pddk) | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | | 6 | | | 6 | | |
| 5 | Lingkungan Permukiman Kumuh | 20 | | 20 | | 20 | | 18 | | 17 | | | | 16 | | | 16 | | |
| 6 | Rumah Layak Huni (Orang/ 1000 Penduduk | 600 | | 600 | | 650 | | 675 | | 700 | | | | 700 | | | 700 | | |
| **B.5Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten (%) | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | | | 100 | | | 100 | | |
| 2 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (%) | 50 | | 60 | | 70 | | 75 | | 75 | | | | 80 | | | 80 | | |
| 3 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) (%) | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | 50 | | | | 60 | | | 75 | | |
| **B.6 Urusan Sosial** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase PMKS yang mendapat perlindungan social dan pemberdayaan | 70 | | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | | | 95 | | | 95 | | |
| 2 | Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi ( Buah) | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | | 3 | | | 3 | | |
| 3 | PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial (%) | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | | | 70 | | | 70 | | |
| 4 | Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (%) | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | | | 70 | | | 70 | | |
| **C. Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C.1Urusan Ketenagakerjaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Menurunya Angka Pengangguran | 2,25% | | 2,15% | | 2,05% | | 2,00% | | 1,90% | | | | 1,80% | | | 1,75% | | |
| 2 | Rasio Penduduk yang bekerja | 98,02% | | 98,05% | | 98,1% | | 98,4% | | 98,7% | | | | 99,2% | | | 99,2% | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C.2Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%) | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | | 10 | | | 10 | | |
| 2 | Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%) | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | | | 90 | | | 90 | | |
| 3 | Rasio KDRT (%) | 10 | | 10 | | 9 | | 8 | | 7 | | | | 6 | | | 6 | | |
| 4 | Jumlah Tenaga Kerja dibawah umur (%) | 30 | | 30 | | 29 | | 18 | | 17 | | | | 16 | | | 16 | | |
| 5 | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | | | 60 | | | 60 | | |
| 6 | Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari Tindakan Kekerasan (%) | 10 | | 10 | | 9 | | 8 | | 7 | | | | 6 | | | 6 | | |
| **C.3Urusan Pangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Regulasi Ketahanan Pangan (Buah) | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | |
| 2 | Ketersediaan Pangan Utama (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | |
| 3 | Indeks Pertanaman Padi (IP Padi) | 152,16% | | 152,16% | | 152,16% | | 152,16% | | 200% | | | | 200% | | | 200% | | |
| **C.4Urusan Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase penanganan sampah (%) | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | | | 90 | | | 90 | | |
| 2 | Persentase penduduk berakses air minum (%) | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | | | 90 | | | 90 | | |
| 3 | Persentase Rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%) | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | | | 80 | | | 80 | | |
| 4 | Persentase luas pemukiman yang tertata (%) | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | | | 70 | | | 70 | | |
| 5 | Pencemaran status mutu air (%) | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | | | 70 | | | 70 | | |
| 6 | Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air (%) | 60 | | 60 | | 80 | | 70 | | 70 | | | | 70 | | | 70 | | |
| 7 | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%) | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | | | 70 | | | 70 | | |
| 8 | Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (buah/1000 pddk) | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | | | 0,1 | | | 0,1 | | |
| 9 | Penegakan hukum lingkungan (%) | 60 | | 60 | | 60 | | 70 | | 80 | | | | 90 | | | 90 | | |
| 10 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan (ha) | 1.39 | | 1.39 | | 1.5 | | 1.62 | | 1.73 | | | | 1.85 | | | 1.85 | | |
| 11 | Kerusakan kawasan hutan ( kawasan) | 0.42 | | 0.42 | | 0.4 | | 0.38 | | 0.36 | | | | 0.34 | | | 0.34 | | |
| **C.5Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan(%) | 31,8 | | 31,8 | | 33,5 | | 34,5 | | 37,6 | | | | 39,45 | | | 39,45 | | |
| 2 | Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Perceraian(%) | 1.1 | | 1.1 | | 1 | | 0.5 | | 0.4 | | | | 0.3 | | | 0.3 | | |
| 3 | Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Pengakuan,Pengangkatn dan Pengesahan Anak (%) | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.5 | | 0.6 | | | | 0.7 | | | 0.7 | | |
| **C.6Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Bumdes yang produknya mampu diserap BUMD | N/A | | N/A | | 18% | | 30% | | 37% | | | | 15% | | | 100% | | |
| 2 | Persentase desa dengan pelayanan baik | N/A | | N/A | | 30% | | 50% | | 70% | | | | 100% | | | 100% | | |
| 3 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (kelompok) | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | | | 14 | | | 14 | | |
| **C.7Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rata–rata jumlah anak per keluarga (org) | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | | 4 | | | 4 | | |
| 2 | Rasio akseptor KB(%) | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | | | 60 | | | 60 | | |
| 3 | Cakupan peserta KB aktif(%) | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | | | 70 | | | 70 | | |
| 4 | Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I(%) | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | | | 60 | | | 60 | | |
| **C.8Urusan Perhubungan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Perolehan penghargaan WTN | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| 2 | Jumlah arus penumpang angkutan umum (buah) | 66.420 | | 66.420 | | 66.420 | | 66.420 | | 66.420 | | | | 66.420 | | | 66.420 | | |
| 3 | rasio Ijin trayek (buah/org) | 427 | | 427 | | 427 | | 427 | | 427 | | | | 427 | | | 427 | | |
| 4 | Jumlah uji kir angkutan umum (buah) | 11.118 | | 11.118 | | 11.118 | | 11.118 | | 11.118 | | | | 11.118 | | | 11.118 | | |
| 5 | Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis (buah) | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | | 3 | | | 3 | | |
| 6 | Angkutan Darat (buah) | 351.178 | | 351.178 | | 351.178 | | 351.178 | | 351.178 | | | | 351.178 | | | 351.178 | | |
| 7 | Kepemilikan Kir Angkutan umum | 1036 | | 1036 | | 1036 | | 1036 | | 1036 | | | | 1036 | | | 1036 | | |
| 8 | Biaya Pengujian kelayakan angkutan umum (ribu Rp.) | 77.000 | | 77.000 | | 77.000 | | 77.000 | | 77.000 | | | | 77.000 | | | 77.000 | | |
| **C.9Urusan Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah wartel/warnet (buah/10.000 penduduk) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| 2 | Jumlah surat kabar Nasional /lokal (buah) | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | 5 | | | 5 | | |
| 3 | Jumlah penyiaran radio/TV lokal (kali) | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | 5 | | | 5 | | |
| 4 | Pameran/Expo (kali) | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | |
| **C.10Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menangah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah koperasi Sehat yang jenis usaha utamanya bukan simpan pinjam | 3 (koperasi, | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
| **C.11Urusan Penanaman Modal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Investor PMDN | 563 | | 687 | | 700 | | 712 | | 725 | | | | 738 | | | 751 | | |
| 2 | Jumlah Investor PMA | 17 | | 11 | | 12 | | 13 | | 13 | | | | 14 | | | 15 | | |
| **C.12Urusan Kepemudaan dan Olah Raga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah organisasi pemuda (buah) | 114 | | 114 | | 114 | | 114 | | 114 | | | | 114 | | | 114 | | |
| 2 | Jumlah organisasi olah raga (buah) | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | | | 30 | | | 30 | | |
| 3 | Jumlah kegiatan kepemudaan (kali) | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | | | 28 | | | 28 | | |
| 4 | Jumlah kegiatan olah raga (kali) | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | | | 50 | | | 50 | | |
| 5 | Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) (buah/penduduk) | 0,001 | | 0,001 | | 0,001 | | 0,001 | | 0,001 | | | | 0,001 | | | 0,001 | | |
| 6 | Lapangan olahraga (buah/penduduk) | 0,004 | | 0,004 | | 0,004 | | 0,004 | | 0,004 | | | | 0,004 | | | 0,004 | | |
| **C.13Urusan Statistik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Buku “Kabupaten dalam angka” (buah) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| 2 | Buku “PDRB Kabupaten” (buah) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| **C.14Urusan Kebudayaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Grup Kesenian yang representatif | 1.175 | | 1.175 | | 1.175 | | 1.175 | | 1.175 | | | | 1.175 | | | 1.175 | | |
| 2 | Jumlah Gedung Kesenian | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 3 | | |
| 3 | Jumlah Klub Olahraga | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | | 10 | | | 10 | | |
| 4 | Jumlah Gedung Olahraga yang representatif | 1 | | 1 | | 3 | | 5 | | 7 | | | | 8 | | | 10 | | |
| **C.15Urusan Perpustakaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya jumlah tenaga perpustakaan (orang) | 6 | | 6 | | 8 | | 10 | | 11 | | | | 12 | | | 12 | | |
| 2 | Meningkatnya jumlah pengelola Kearsipan (orang) | 5 | | 5 | | 7 | | 9 | | 11 | | | | 12 | | | 12 | | |
| 3 | Meningkatnya Desa dan kelurahan yang cerdas (orang) | 1.335 | | 1.335 | | 1.816 | | 2.332 | | 2.887 | | | | 3.479 | | | 3.479 | | |
| **C.16Urusan Kearsipan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan arsip secara buku (buah) | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | | 10 | | | 10 | | |
| 2 | Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (Buah) | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | | | 28 | | | 28 | | |
| **DUrusan Pilihan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D.1Urusan Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Produksi perikanan (%) ton | 1.648,8 | | 4.766,6 | | 4.870,6 | | 4.984,6 | | 5.108,9 | | | | 5.178,1 | | | 5.178,1 | | |
| 2 | Konsumsi Ikan (%) kg/kapita/tahun | 19,3 | | 30,0 | | 31,0 | | 31,0 | | 33,0 | | | | 34,0 | | | 35,0 | | |
| 3 | Cakupan Bina Kelompok Budidaya Ikan (%) Kelompok | 131 | | 146 | | 163 | | 183 | | 106 | | | | 131 | | | 131 | | |
| **D.2Urusan Pariwisata** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah destinasi wisata dengan tingkat kunjungan minimal sebesar 300.000 per tahun | 3 Obyek Wisata (Tanah Lot, Ulun Danau, Kebun Raya Eka Karya | | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | 5 | | | 5 obyek wisata | | |
| 2 | Kunjungan wisata (%) | 5 | | 5 | | 10 | | 10 | | 10 | | | | 10 | | | 10 | | |
| 3 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%) | 16 | | 16 | | 18 | | 18 | | 18 | | | | 10 | | | 10 | | |
| 4 | Jenis, kelas, dan jumlah restoran (buah) | 31 | | 31 | | 31 | | 31 | | 31 | | | | 34 | | | 34 | | |
| 5 | Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel (buah) | 63 | | 63 | | 63 | | 63 | | 63 | | | | 64 | | | 64 | | |
| **D.3Urusan Pertanaian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai Tukar Petani | <100 | | <100 | | 100 | | >100 | | >100 | | | | >100 | | | >100 | | |
| 2 | Luas lahan pertanian yang menerap-kan sistem organik | 1.450 ha | | 1.757 | | 2.257 | | 2.757 | | 3.257 | | | | 3.757 | | | 4.000 ha | | |
| 3 | Produktifitas Padi (Ton)/hektar) | 55 | | 55 | | 55 | | 56 | | 56 | | | | 57 | | | 57 | | |
| 4 | Kontribusi Asektor Pertanian terhadap PDRB (%) | 33 | | 33 | | 33 | | 33 | | 33 | | | | 33 | | | 33 | | |
| 5 | Cakupan bina kelompok petani (%) | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | | 10 | | | 10 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D.4** | **Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral** |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| 1 | Persentase jumlah Desa Berlistrik (%) | 87 | | 87 | | 92 | | 97 | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | |
| 2 | Rasio ketersediaan daya listrik (%) | 50 | | 50 | | 55 | | 60 | | 65 | | | | 70 | | | 70 | | |
| 3 | Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%) | 50 | | 50 | | 55 | | 60 | | 65 | | | | 70 | | | 70 | | |
| **D.5Urusan perdagangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah IKM | 752 | | 825 | | 864 | | 903 | | 941 | | | | 980 | | | 1.019 | | |
| 2 | Tenaga Kerja | 6.382 | | 4.846 | | 4.412 | | 3.978 | | 3.544 | | | | 3.111 | | | 2.677 | | |
| 3 | Nilai Investasi (Rp 000.000) | 345 | | 460 | | 520 | | 580 | | 640 | | | | 700 | | | 760 | | |
| 4 | Nilai Produksi (Rp.000.000) | 511 | | 540 | | 570 | | 600 | | 630 | | | | 660 | | | 690 | | |
| **D.6Urusan Perindustrian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | 14.63 | | 23,14 - 23,94 | | 6.38 | | 23,68 - 24,63 | | 6.51 | | | | 23,87 - 25,08 | | | 24,87 -26,02 | | |
| 2 | Pertumbuhan Industri (UKM). | 77,808 | | 77,900 | | 77,900 | | 78,000 | | 78,000 | | | | 78,100 | | | 78,300 | | |
| 3 | Pertumbuhan Industri IKM | 11,905 | | 12,084 | | 12,084 | | 12,259 | | 12,326 | | | | 12,434 | | | 12,609 | | |
| 4 | Cakupan bina kelompok pengrajin | 37.70 | | 25 | | 6.14 | | 50 | | 4.65 | | | | 75 | | | 85 | | |
| E | Urusan Penunjang Pemerintahan |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| **E.1Perencanaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%) | 91,70 | | 91,70 | | 91,85 | | 91,90 | | 92,00 | | | | 92,00 | | | 92,00 | | |
| 2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA (Buah) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| 3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA ( Buah) | 1 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 5 | | |
| 4 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (KK) | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | | | 20 | | | 20 | | |
| **E.2Urusan Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th) | 13.13 | | 13.97 | | 13.97 | | 14.85 | | 14.85 | | | | 15.86 | | | 16.95 | | |
| 2 | Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita | 8.01 | | 8.01 | | 8.01 | | 8.70 | | 8.70 | | | | 9.51 | | | 10.41 | | |
| 3 | Produktivitas total daerah | 40.86 | | 44.72 | | 44.72 | | 48.87 | | 48.87 | | | | 53.67 | | | 59.08 | | |
| 4 | Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha | 4 perda | | 5 perda | | 5 perda | | 5 perda | | 5 perda | | | | 6 perda | | | 6 perda | | |
| 5 | Jumlah Nasabah Jamkrida | 5759 | | 6000 | | 6000 | | 7000 | | 7000 | | | | 8000 | | | 10000 | | |
| 6 | Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda | 43 | | 43 | | 43 | | 43 | | 43 | | | | 43 | | | 43 | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |

bab x

**PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

**10.1 Pedoman Transisi**

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016–2021 memuat rencana strategis daerah yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005–2025, serta mengacu RPJMD Provinsi Bali dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015–2019, serta dengan memperhatikan kondisi dan isu-isu strategis daerah. RPJMD Semesta Berencana ini merupakan acuan bagi satuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan sebagai rencana tahunan pemerintah daerah.

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan, penyusunan RKPD Tahun 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2021 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tabanan serta mengacu pada RPJMD provinsi Bali untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi.

**10.2 Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan diperlukan dalam rangka menjaga konsistensi rencana pembangunan yang telah disepakati dengan aktualisasinya. Berkaitan dengan hal tersebut, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016–2021 menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh jajaran pemerintahan daerah, termasuk DPRD, masyarakat, dan dunia usaha wajib melaksanakan program RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan ini dengan sebaik-baiknya.
2. OPD berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan menjamin konsistensi antara RPJMD dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
3. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021, Bapelitbang berkewajiban untuk memfasilitasi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD dan Renja PD agar terjalin keterpaduan dan sinkronisasi rencana pembangunan.
4. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan wajib menyebar luaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Semesta Berencana 2016-2021; hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
5. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun mulai tahun ‘2016-2021’, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
6. Perangkat Daerah (PD) wajib mengevaluasi pencapaian target kinerja program yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan hasil evaluasinya secara periodik kepada Bupati Tabanan.
7. Bapelitbang melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD, hal tersebut sesuai dengan pasal 211 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
8. Apabila berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, terjadi perkembangan kondisi dan isu-isu strategis daerah yang tidak sesuai atau belum terakomodasi dalam program dan target kinerja RPJMD Semesta Berencana maka RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2016–2021 perlu direvisi dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI